



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU
PENGETAHUAN BUDAYA

Gedung Dekanat Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Kampus UI Depok Jawa Barat 16424
T. 62.21. 7863528, 7863529
F. 62.21. 7270038 E. humas1@ui.ac.id
www.fib.ui.ac.id

Nomor : S-2982/UN2.F7.D/PDP.04.01/2025
Sifat : Biasa
Perihal : Ujian Hasil Riset
Saudara Sulaeman NPM 2006565725

1 Juli 2025

Yth. Dr. Desvian Bandarsyah, M.Pd.
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka

Dengan ini kami mohon kesediaan Bapak untuk dapat menguji hasil riset Saudara Sulaeman NPM 2006565725 mahasiswa Program Doktor Program Studi Ilmu Sejarah, Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.

Ujian diselenggarakan pada:
hari, tanggal : Kamis, 3 Juli 2025
pukul : 13.00-16.00 WIB
tempat : Ruang 4112 Gedung IV Lantai 1
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI, Kampus UI, Depok

Atas perhatian Bapak, kami mengucapkan terima kasih.



Dekan,
Dr. Bondan Kanumoyoso, S.S., M.Hum.
NIP 0706050098

Tembusan;

1. Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Riset dan Kemahasiswaan;
2. Manajer Pendidikan;
3. Manajer Sumber Daya Manusia; dan
4. Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Sejarah.



NOTA DINAS

Nomor: ND-88/UN2.F7.DP6.1/PDP.04.04/2025

Yth. : Dr. Desvian Bandarsyah, M.Pd.
Dari : Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Sejarah
Perihal : Ujian Hasil Riset Saudara Sulaeman

Dengan ini kami mohon kesediaan Bapak untuk menguji Hasil Riset Saudara Sulaeman NPM 2006511741 peserta Program Doktor Program Studi Ilmu Sejarah, Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI, dengan judul “Transisi dan Konsensus Perguruan Tinggi Muhammadiyah Di Padang Panjang 1955-1985”.

Ujian diselenggarakan pada
hari, tanggal : Kamis, 3 Juli 2025
pukul : 13.00-16.00 WIB
tempat : Ruang 4112 Gedung IV Lantai 1
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI, Kampus UI, Depok

Surat undangan menguji dari pimpinan fakultas akan kami susulkan, saat ini masih dalam proses.

Atas kesediaan Bapak, kami mengucapkan terima kasih.

30 Juni 2025
Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Sejarah,

Dr. Linda Sunarti, S.S., M.Hum.
NUP 0706050106

Tembusan:
Saudara Sulaeman.



NOTA DINAS

Nomor: ND-88/UN2.F7.DP6.1/PDP.04.04/2025

Yth. : 1. Dr. Didik Pradjoko, S.S., M.Hum.
2. Dr. Dwi Mulyatari, S.S., M.A.
3. Agus Setiawan, S.S., M.Si., Ph.D.
4. Prof. Dr. Yon Machmudi, Ph.D.
5. Prof. Dr. M.I. Djoko Marihandono, S.S., M.Hum.
6. Dr. Abdurakhman, S.S., M.Hum.
Dari : Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Sejarah
Perihal : Ujian Hasil Riset Saudara Sulaeman

Dengan ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menguji Hasil Riset Saudara Sulaeman NPM 2006511741 peserta Program Doktor Program Studi Ilmu Sejarah, Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI, dengan judul “Transisi dan Konsensus Perguruan Tinggi Muhammadiyah Di Padang Panjang 1955-1985”.

Ujian diselenggarakan pada
hari, tanggal : Kamis, 3 Juli 2025
pukul : 13.00-16.00 WIB
tempat : Ruang 4112 Gedung IV Lantai 1
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI, Kampus UI, Depok

Atas kesediaan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

30 Juni 2025
Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Sejarah,

Dr. Linda Sunarti, S.S., M.Hum.
NUP 0706050106

Tembusan:
Saudara Sulaeman.



UNIVERSITAS INDONESIA

**TRANSISI DAN KONSENSUS
PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH
DI PADANG PANJANG 1955-1985**

DISERTASI

**SULAEMAN
NPM. 2006511741**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN DAN BUDAYA
PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH
DEPOK
JUNI 2025**



UNIVERSITAS INDONESIA

**TRANSISI DAN KONSENSUS
PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH
DI PADANG PANJANG 1955-1985**

DISERTASI

disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Sejarah

SULAEMAN
NPM. 2006511741

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN DAN BUDAYA
PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH
DEPOK
JUNI 2025**

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa Disertasi,

Nama : Sulaeman

NPM : 2006511741

Program Studi : Ilmu Sejarah

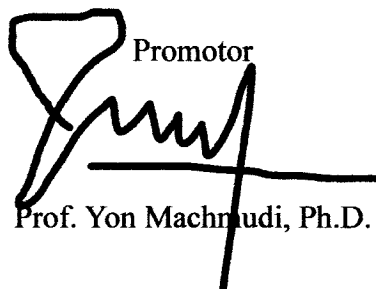
Fakultas : Ilmu Pengetahuan dan Budaya

Universitas : Universitas Indonesia

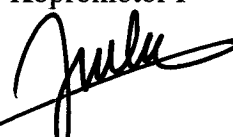
Judul Disertasi : Transisi dan Konsensus Perguruan Tinggi Muhammadiyah
di Padang Panjang 1955-1985

Layak untuk diuji dalam Ujian Hasil Riset

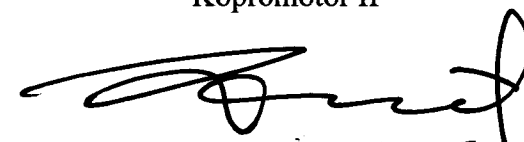
Depok, 26 Juni 2025

Promotor

Prof. Yon Machmudi, Ph.D.

Kopromotor I


Prof. Djoko Marihandono, M.Hum.

Kopromotor II

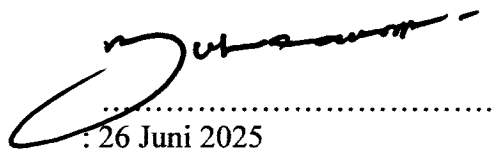

Dr. Abdurakhman, M.Hum.

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Disertasi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Sulaeman
NPM : 2006511741
Program Studi : Ilmu Sejarah
Fakultas : Ilmu Pengetahuan dan Budaya
Universitas : Universitas Indonesia
Tanda Tangan :

Tanggal


: 26 Juni 2025

LEMBAR PERSEMBAHAN

*untuk Baba Masdi bin Muhammad Talip
yang wafat pada Kamis, 12 Juni 2025
telah membekali saya dengan lentera ilmu
dan menitipkan saya kepada Muhammadiyah.*

ABSTRAKSI

Nama : Sulaeman
NPM : 2006511741
Program Studi : Ilmu Sejarah
Judul : Transisi dan Konsensus Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Padang Panjang 1955-1985
Promotor : Prof. Yon Machmudi, Ph.D.
Kopromotor 1 : Prof. Djoko Marihandono, M.Hum.
Kopromotor 2 : Dr. Abdurakhman, M.Hum.

Disertasi ini mengkaji secara mendalam dinamika pendirian Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Padang Panjang 1955-1985. Penelitian ini bertujuan mengungkap proses historis dan sosial yang kompleks di tengah kausalitas berdirinya Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Padang Panjang. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis yang terdiri dari heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi, serta teori strukturasi Giddens untuk menganalisis hubungan timbal balik antara agensi dan struktur sosial, serta teori konsensus dari Talcott Parsons dan Jurgen Habermas untuk menganalisis dinamika konsensus dalam proses pendirian perguruan tinggi. Temuan penelitian menunjukkan, bahwa proses pendirian Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Padang Panjang dipengaruhi oleh interaksi antara nilai-nilai Islam modernis, otoritas lokal, dan adaptasi terhadap kebijakan pendidikan kolonial hingga pasca-kolonial. Dinamika konsensus dalam organisasi Muhammadiyah mengalami fluktuasi disebabkan oleh fragmentasi kepemimpinan, perubahan orientasi kelembagaan, serta tantangan sosio-politik yang ditengahi melalui proses dialog dan interaksi sosial yang intens. Kesimpulannya, pendirian Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Padang Panjang merupakan hasil dari proses panjang yang mencerminkan kompleksitas interaksi sosial dan historis serta kemampuan organisasi Muhammadiyah beradaptasi dengan konteks perubahan zaman melalui pencapaian konsensus internal dan eksternal.

Kata kunci: Muhammadiyah, Strukturasi, Konsensus, Pendidikan Tinggi dan Padang Panjang

ABSTRACT

Name : Sulaeman
NPM : 2006511741
Study Program : History Science
Title : Transition and Consensus of Muhammadiyah Universities
in Padang Panjang 1955-1985
Promoter : Prof. Yon Machmudi, Ph.D.
1st Copromoter : Prof. Djoko Marihandono, M.Hum.
2nd Copromoter : Dr. Abdurakhman, M.Hum.

This dissertation examines in depth the dynamics of the establishment of Muhammadiyah Universities in Padang Panjang 1955-1985. This research aims to reveal the complex historical and social processes at the center of the causality of the establishment of Muhammadiyah Universities in Padang Panjang. This research uses a historical approach consisting of heuristics, source criticism, interpretation, and historiography, as well as Giddens' structuration theory to analyze the reciprocal relationship between agency and social structure, and consensus theory from Talcott Parsons and Jurgen Habermas to analyze the dynamics of consensus in the process of establishing universities. The research findings show that the process of establishing Muhammadiyah College in Padang Panjang was influenced by the interaction between modernist Islamic values, local authorities, and adaptation to colonial to post-colonial education policies. The dynamics of consensus in the Muhammadiyah organization fluctuated due to leadership fragmentation, changes in institutional orientation, and socio-political challenges that were mediated through a process of dialogue and intense social interaction. In conclusion, the establishment of Muhammadiyah College in Padang Panjang is the result of a long process that reflects the complexity of social and historical interactions and the ability of Muhammadiyah organizations to adapt to the context of changing times through achieving internal and external consensus.

Keywords: Muhammadiyah, Structuration Theory, Consensus, Higher Education and Padang Panjang

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	viii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.1.1 Pendidikan Padang Panjang era Kolonial	7
1.1.2 Munculnya Sekolah atas Inisiasi Bumiputera	9
1.1.3 Masuknya Muhammadiyah dan Ide Pembaruan	11
1.2 Rumusan Masalah	19
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	20
1.4 Ruang Lingkup Penelitian	21
1.5 Tinjauan Pustaka	22
1.5.1 Studi Sejarah Pemikiran Muhammadiyah dan Pendidikan Tinggi	22
1.5.2 Studi Transisi Institusional dan Agensi dalam Sejarah Sosial	25
1.6 Metode Penelitian	27
1.6.1 Pendekatan Historis	27
1.6.2 Sumber Sejarah	29
1.7 Landasan Teoritis	30
1.7.1. Teori Strukturasi Anthony Giddens	31
1.7.2. Teori Konsensus Talcott Parsons dan Jurgen Habermas	32
1.8 Sistematika Penulisan	34
 BAB II PADANG PANJANG SEBAGAI PUSAT PEMBARUAN	
PENDIDIKAN ISLAM DI MINANGKABAU (1905-1925)	36
2.1 Kondisi Sosial dan Budaya Padang Panjang Awal Abad 20	36
2.2 Dualisme Pendidikan Kolonial di Ranah Minangkabau	40
2.3 Reformasi Pendidikan Islam: dari Surau ke Sekolah	54
2.4 Gerakan Sekolah Islam Pembaruan	59
2.4.1 Adabiyah School	62
2.4.2 Sumatera Thawalib Padang Panjang	63
2.4.3 Sekolah Diniyah Padang Panjang	66
2.5 Tokoh Utama Pembaruan Minangkabau	69
2.5.1 Syekh M. Jamil Jambek	72
2.5.2 Dr. Abdullah Ahmad	73
2.5.3 Dr. H. Abdul Karim Amrullah	78
2.6 Respon Masyarakat Padang Panjang terhadap Sekolah Pembaruan	82
 BAB III AKAR ORGANISASI DAN EMBRIO PERGURUAN	
MUHAMMADIYAH DI PADANG PANJANG (1925-1935)	85
3.1 Relasi Muhammadiyah dan Budaya Minangkabau	85
3.2 Kedatangan dan Pertumbuhan Muhammadiyah di Padang Panjang	94
3.3 Penolakan dan Negoisasi Sosial terhadap Muhammadiyah	102

3.4	Figur Sentral Perguruan Kauman Padang Panjang	104
3.4.1	Buya Hamka	104
3.4.2	A. Malik Ahmad	105
3.4.3	Jaringan Pembaru Muhammadiyah	106
3.5	Embrio Perguruan Muhammadiyah: HIS Med de Quran, Tablig School dan Kuliyatul Muballighien	108
 BAB IV TRANSISI PERGURUAN MUHAMMADIYAH:		
	DARI GAGASAN KE REALISASI (1935-1955)	118
4.1	Dari Tablig School Menjadi Kuliyatul Muballighien	118
4.2	Transisi dari Kuliyatul menjadi Fakultas Falsafah dan Hukum 1955 ..	130
4.3	Fragmentasi Kepemimpinan dan Perbedaan Arah	139
4.4	Strukturasi Sosial: Agensi, Otoritas, dan Nilai-nilai Organisasi	143
4.5	Dinamika Transisi 1935-1955: Konflik, Adaptasi, dan Reformulasi Tujuan	146
 BAB V KONSENSUS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH DI		
	PADANG PANJANG (1955-1985)	149
5.1	Fase Konsensus: Penyatuan Visi dan Kepemimpinan	149
5.2	Dialog dan Negosiasi Sosial antar Struktur Muhammadiyah	153
5.3	Fakultas Falsafah dan Hukum pada Masa Peristiwa PRRI	157
5.4	Dinamika Fakultas Falsafah dan Hukum setelah Peristiwa PRRI	162
5.5	Pendirian Akademi dan Fakultas: Akademi Kuliyatul, Agama Islam, Adab, Syari'ah, Niaga	166
5.6	Konsensus sebagai Produk Strukturasi: Narasi, Kompromi, dan Kontrak Sosial	174
 BAB VI KESIMPULAN		
DAFTAR PUSTAKA		181
LAMPIRAN		187

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Padang Panjang, suatu wilayah di Sumatera Barat, dikenal luas sebagai episentrum pendidikan Islam yang bersejarah dan strategis dalam perkembangan institusi pendidikan dengan corak asli (*indigenous*). Di kota ini, pranata-pranata pendidikan tradisional seperti surau, madrasah, dan sekolah partikelir tidak hanya bertumbuh, tetapi juga mengalami transformasi menjadi lembaga pendidikan modern yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan pemikiran kemajuan. Transformasi ini menjadikan Padang Panjang sebagai ruang yang signifikan dalam studi tentang perubahan sosial dan pendidikan di Minangkabau. Oleh karena itu, mengkaji dinamika, transisi, dan transformasi pendidikan di Padang Panjang menjadi penting untuk memahami bagaimana institusi pendidikan Islam mampu bertahan dan beradaptasi dalam arus perubahan zaman.

Untuk menjelaskan mengapa pendidikan Islam modern dapat tumbuh dengan kuat di Sumatera Barat, dan khususnya di Padang Panjang, peta sosial masyarakat setempat menjadi elemen krusial. Wilayah Padang dan sekitarnya, termasuk Padang Panjang, sejak masa kolonial telah dikenal sebagai kawasan dengan komposisi masyarakat yang multikultural. Kota Padang, yang merupakan pusat pemerintahan dan perdagangan kolonial, menjadi tempat pertemuan dan interaksi beragam etnis seperti Eropa, Tionghoa, India, dan Arab, di samping dominasi kelompok bumiputera. Sebaliknya, Padang Panjang yang terletak di dataran tinggi Minangkabau merupakan pusat kebudayaan masyarakat matrilineal yang berbasis pada sistem kekerabatan ibu, dengan pola sosial yang berbeda dari kota pelabuhan seperti Padang.

Perkembangan demografi di wilayah ini memperkuat gambaran keberagaman sosial yang menjadi latar bagi tumbuhnya institusi pendidikan Islam modern. Meskipun data penduduk Padang sebelum abad 18 tidak tersedia, catatan abad 19 menunjukkan pertumbuhan populasi yang signifikan. Pada awal abad 19, penduduk Padang diperkirakan hanya sekitar 8.500 jiwa, namun jumlah ini meningkat drastis

seiring arus migrasi dan perkembangan ekonomi kolonial.¹ Data sensus menunjukkan bahwa pada tahun 1878, jumlah penduduk Padang mencapai 7.971 jiwa, yang kemudian melonjak menjadi 47.000 jiwa pada tahun 1905 dan 52.054 jiwa pada tahun 1930. Tabel berikut ini menggambarkan pertumbuhan penduduk Padang berdasarkan klasifikasi etnis.

Tabel 1.1. Penduduk Padang, Sumatera Tengah 1878-1905

No.	Klasifikasi Etnis	Tahun		
		1878	1905	1930
1.	Kulit Putih (Eropa)	1.063	1.800	2.592
2.	Bumiputra	3.594	3.900	40.744
3.	Cina	2.630	5.000	7.263
4.	India/Jepang	572	1.000	1.455
5.	Arab	112	200	-
Total		7.971	47.000	52.054

Sumber: (Netscher, 1881, hlm. 4; Stibbe, 1919, hlm. 235; Colombijn, 1994, hlm. 48; dan Volkstelling 1930, hlm. 156-157)

Data di atas menunjukkan perubahan signifikan dalam dinamika sosial dan struktur etnis Kota Padang. Peningkatan terbesar terjadi pada kelompok bumiputera yang mendominasi demografi pada tahun 1930. Sementara kelompok Eropa, Cina, dan India juga mengalami pertumbuhan, tetapi dalam skala yang lebih kecil. Perubahan ini tidak dapat dilepaskan dari kebijakan kolonial, migrasi, dan dinamika ekonomi kota pelabuhan yang menarik pendatang dari berbagai wilayah. Secara sosio-kultural, keragaman etnis ini membentuk lanskap sosial yang heterogen, yang pada gilirannya memberikan kontribusi pada perkembangan institusi pendidikan yang beragam dan terbuka terhadap pembaruan.²

Dua puluh lima tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1930, Padang tercatat sebagai kota terbesar ketiga di Sumatera, dengan jumlah penduduk sekitar 52.000 jiwa. Komposisi demografinya terdiri atas 66 persen suku Minangkabau dan

¹ Mestika Zed. 2009. *Kota Padang Tempo Doeloe Zaman Kolonial*. (Seri Manuskrip No. 4). Universitas Negeri Padang: Pusat Kajian Sosial Budaya dan Ekonomi Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial, hlm. 5.

² Pada awal 1905, luas wilayah Kota Padang hanya sekitar 11.5 km persegi dengan penduduk sekitar 47.000 jiwa. Lihat Mestika Zed, 2009, hlm. 2.

minoritas seperti Tionghoa, Eropa, Niasan, Tamil, Batak, dan Arab, yang menciptakan interaksi sosial multietnis yang dinamis.³

Berbeda dengan Kota Padang yang berkembang sebagai pusat perdagangan, Padang Panjang tumbuh sebagai pusat sosial, pendidikan, dan pemerintahan di *Afdeeling* (divisi) Tanah Datar. Meskipun wilayahnya relatif kecil, Padang Panjang memainkan peran penting dalam pergerakan intelektual dan sosial. Pertumbuhan populasi bumiputera di wilayah ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Selain penduduk asli Minangkabau, wilayah ini juga dihuni oleh pendatang dari berbagai latar belakang etnis seperti Jawa, Nias, Batak, Melayu, Jambi, Minahasa, Ambon, Sunda, serta komunitas Eropa, Cina, dan India (Keling).

Data penduduk Padang Panjang sebelum tahun 1905 sulit dilacak karena keterbatasan dokumentasi. Namun, berdasarkan sensus pertama di Sumatera Barat pada tahun 1852, jumlah penduduk di *Afdeeling* (divisi) Tanah Datar, tempat Padang Panjang berada, mencapai 153.604 jiwa. Sebagian besar adalah bumiputera (153.471 jiwa), dengan minoritas Eropa (21 jiwa), Cina (12 jiwa), dan Asia lainnya (100 jiwa). Kemungkinan besar kelompok minoritas ini menetap di Padang Panjang, mengingat fungsinya sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan. Perkembangan populasi Padang Panjang selama masa kolonial dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.2. Penduduk Padang Panjang, Sumatera Tengah 1905-1935

No.	Klasifikasi Etnis	Tahun			
		1905	1920	1930	1935
1.	Kulit Putih (Eropa)	264	279	293	308
2.	Bumiputra	4.625	6.057	8.917	10.203
3.	Cina	452	475	374	382
4.	India/Jepang	22	31	25	28
	Total	5.463	6.842	9.609	12.856

³ Lihat Freek Colombijn, "The Colonial Municipal Council in Padang (Sumatra) as Political Arena", *Journal of Southeast Asian Studies*, Vol. 26, No. 2, 1995, hlm. 265. Padang menjadi pelabuhan utama di pantai barat Sumatera, karena penjajah Belanda menjadikannya markas besar, dan selama abad 17-18 mencekik perdagangan di pelabuhan-pelabuhan pantai barat lainnya. Pada awal abad 19, Belanda menaklukkan daerah pedalaman, yang mereka sebut dengan Perang Padri, dan memaksa semua perdagangan dari dan ke Dataran Tinggi melewati Padang. Pada periode ini, Padang telah menjadi pusat transportasi, dimana jalan raya, kereta api, dan jalur pelayaran saling bertemu. Fungsi utamanya adalah ekspor tanaman komersial, batu bara, dan semen. Meskipun Nasib Padang cukup baik, lambat laun kota ini dikalahkan oleh pesaingnya yang lebih makmur di pantai timur Sumatera, yaitu Medan dan Palembang.

Sumber: (diolah dari Koloniaal Verslag 1907, Volkstelling 1920, Volkstelling 1930, dan Indisch Verslag 1935)

Dari data tersebut terlihat bahwa pertumbuhan populasi Padang Panjang antara 1905 hingga 1935 berlangsung secara signifikan, terutama pada kelompok bumiputera. Sementara itu, populasi kulit putih (Eropa) dan India/Jepang meningkat secara bertahap, sedangkan populasi Cina cenderung fluktuatif. Perubahan demografi ini tidak hanya mencerminkan dinamika sosial dan ekonomi kolonial, tetapi juga berkontribusi pada terbentuknya komunitas yang mendorong perkembangan pembaruan pendidikan di wilayah tersebut.

Perkembangan demografi ini berkontribusi pada kemunculan pranata pendidikan lokal yang berkembang pesat. Fenomena ini mengingatkan pada istilah dari Ong Hok Ham seorang sejarawan Indonesia yang bermetafora bahwa padi tumbuh tanpa suara (*de padi groeit onhoorbaar*)⁴, yang bermakna bahwa perubahan-perubahan besar dalam masyarakat sering berlangsung secara perlahan namun pasti. Begitu pula dengan tumbuhnya institusi pendidikan di Padang Panjang, yang perlahan-lahan menjadi simbol kemajuan dan pembaruan masyarakat. Sebagaimana pernyataan A.A. Navis, seorang sastrawan Indonesia yang terlahir di Padang Panjang mengatakan bahwa,

orang Minangkabau tergolong suku bangsa yang “lapar” pada sekolah, sehingga masa sehabis Perang Dunia I (1914-1918) lahirlah gerakan yang luar biasa untuk membuka sekolah bagi anak-anaknya. Mereka yang bersekolah dinamakan sebagai “orang terpelajar”, tamatan sekolah menengah dinamakan “orang intelek”. Menyekolahkan anak ke sekolah berbahasa Belanda, berarti memasukan mereka ke dunia baru yang bernama “kemajuan” sementara siapa yang tidak bersekolah dipandang “orang kolot”.⁵

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran pemerintah kolonial Belanda. Sekolah dianggap sebagai *melting pot* (wadah peleburan ide) yang mampu melahirkan kelompok terpelajar dengan potensi melawan kolonialisme Belanda dengan spirit nasionalismenya.⁶ Selain itu, agama Islam yang dianut oleh mayoritas

⁴ Onghokham. 2014. *Runtuhnya Hindia Belanda*. Jakarta: PT Gramedia, hlm. 108

⁵ A.A. Navis. 1996. *Filsafat dan Strategi Pendidikan M. Sjafei: Ruang Pendidik INS Kayutanam*. Jakarta: Grasindo, hlm. 51.

⁶ Lihat Robert van Niel. 1984. *Munculnya Elite Modern Indonesia*. Jakarta: Pustaka Jaya, hlm. 48. Niel menerangkan lebih jauh, bahwa kemungkinan Bumiputera memperoleh kebudayaan Eropa yang terbaik melalui perencanaan pendidikan yang luas dari pemerintah kolonial Belanda akan

penduduk Indonesia menjadi kekuatan ideologis yang menyatukan perjuangan melawan penjajahan. Hal ini, menjadi satu faktor penting yang mendukung pertumbuhan nasionalisme Indonesia yang lebih terpadu dengan tingginya derajat homogenitas keagamaan.⁷ Sekitar lebih dari 90 persen penduduk Indonesia beragama Islam. Agama Islam bukan sekadar tali pengikat. Agama Islam merupakan simbol kelompok dalam melawan penyusup sekaligus kolonialisme yang menganut agama berbeda. Lebih lanjut dalam pandangan Kahin bahwa,

Agama Islam tidak begitu saja menyerap secara pasif impuls-impuls dari watak asli nasionalisme. Justru menyediakan saluran paling awal dari perkembangan nasionalisme Indonesia yang modern dan matang. Hal ini terjadi ketika gagasan tentang ajaran-ajaran Islam modernis yang bersumber dari pemikiran Abduh melalui majalah *Al Manar* yang diserap dan diminati pertama kali terutama oleh masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat yang berorientasi pada kehidupan komunal, unsur-unsur nasionalis dalam ajaran tersebut mulai menyuarkan gagasan anti-imperialisme.⁸

Di dalam sejarah pendidikan kolonial di Hindia Belanda, orang dapat mengenal berbagai jenis dan tingkatan sekolah baik yang langsung didirikan oleh pemerintah, maupun oleh missionaris, atau pihak swasta (partikelir). Sekolah-sekolah itu cenderung mencerminkan kekuatan dan kepentingan pemerintah kolonial. Melalui pendidikan semacam itu, pemerintah colonial Belanda berupaya mengalihkan orientasi pemikiran generasi muda bumiputera dari pendidikan Islam tradisional ke sistem pendidikan kolonial yang lebih terkontrol. Pendidikan Islam sendiri dikekang dan diawasi secara ketat, baik dari sisi isi ajaran maupun penyebaran politiknya.⁹

Munculnya sistem pendidikan Barat yang diberikan kepada Bumiputera (kelompok elit dalam stratifikasi sosial), maka pelajar dapat dibuat menyimpang

membangkitkan rasa menguntungkan diri sendiri yang lebih terbuka dengan mengetahui apa yang dapat diperoleh dari kebudayaan Barat terhadap mereka. Mestinya melalui “penggabungan” kebudayaan asli dan kebudayaan Eropa ini akan muncul suatu tatanan masyarakat Indonesia yang menumbuhkan diri sendiri, bermanfaat, progresif dan setia kepada negeri Belanda. Tetapi, rencana itu tidak sejalan dan Bumiputera malah melawan dengan gagasan anti kolonialisme.

⁷ George McTurnan Kahin. 2013. *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*. Depok: Komunitas Bambu, hlm. 52.

⁸ George McTurnan Kahin. 2013, hlm. 61-62.

⁹ Mestika Zed. 1989. *Kolonialisme, Pendidikan dan Munculnya Elit Minangkabau Modern: Sumatera Barat Abad 19*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, hlm. 2

dari jalur Islam ke arah kesatuan budaya dengan orang Belanda, dan hal itu akan menenyapkan semua signifikansi sosial maupun politik dari perbedaan agama. Selain menyediakan pendidikan Barat kepada Bumiputera, pemerintah kolonial Belanda mengendalikan pendidikan Islam dengan pengawasan yang ketat dan menentang pengakuan atas semua unsur politis dari doktrin dan hukum Islam.¹⁰

Namun, masyarakat Minangkabau tidak tinggal diam. Mereka tetap mengembangkan pendidikan berbasis Islam melalui surau dan madrasah. Upaya pemerintah Belanda untuk mengurangi pengaruh pendidikan Islam, seperti pendirian *schakelscholen* (sekolah transisi), justru mendorong lahirnya gerakan pendidikan Islam yang lebih terorganisir. Salah satunya adalah berdirinya Surau Jembatan Besi, Sumatera Thawalib dan Diniyah School di Padang Panjang pada awal abad 20, yang menjadi tonggak penting pendidikan Islam modern di Padang Panjang.¹¹

Hal itu sejalan dengan catatan dari Pistorius, yang cukup menarik untuk dikaji dan dikaitkan bahwa ketakutan terhadap kekuatan Islam bukan saja berdasarkan pengalaman perang Padri yang berlangsung pada 1803-1838 dan pemberontakan-pemberontakan kecil lainnya yang terpencar-pencar di Sumatera Barat, melainkan anak-anak yang sekolah dalam sistem pendidikan Belanda juga ikut ke dalam pelajaran Surau yang di dalamnya mengkaji Al-Quran dan Sunah Nabi Muhammad.¹²

Untuk itu, pada sub bagian berikut ini akan diuraikan fakta-fakta sejarah dalam perspektif kausalitas mengenai pendidikan Padang Panjang era Kolonial, Munculnya Sekolah atas Inisiasi Bumiputera (1911-1926), dan ditutup dengan

¹⁰ George McTurnan Kahin. 2013, hlm. 63.

¹¹ Azyumardi Azra. 2007. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*. Jakarta: Kencana, hlm. 226-227.

¹² Lihat A. W. P. Verkerk Pistorius. 1871. *Studien Over de Inlandsche Huishouding in de Padangsche Bovenlanden*. Zalt-Bommel, Joh. Noman En Zoon, hlm. 188. Catatan Pistorius khususnya mengenai keberadaan Surau dan Imam atau guru mengaji memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap cara pandang masyarakat Minangkabau kaitannya dengan penjajahan kolonial Belanda. Hal ini sejala dengan pandangan Weber dalam Tibi, bahwa bentuk ekspresional spiritual dan intelektual dalam substansi kehidupan mempengaruhi struktur sosial yang merupakan objek paling esensial dalam pembentukan spiritual dan intelektual sepanjang zaman (Bassam Tibi. 1999. *Islam, Kebudayaan dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana, hlm. 73).

Masuknya Muhammadiyah serta Ide Pembaharuan Pendidikan di Padang Panjang 1925-1939.

1.1.1 Pendidikan Padang Panjang era Kolonial

Bagi Pemerintah Hindia Belanda, masalah pendidikan selalu menjadi rumit untuk diselesaikan. Sekitar 1850, kebutuhan untuk mengorganisir secara energik bidang pendidikan bagi penduduk bumiputera sangat dirasakan, dan sejak itu, persoalan ini selalu mendapat perhatian penuh dari pemerintah.¹³ Problemnya tidak hanya bagaimana memperoleh keuntungan terbaik dari peralatan terbatas untuk tujuan pendidikan seluas mungkin, namun pada saat yang sama, juga terkait bagaimana mengadaptasi sistem agar memberi keuntungan sebesar mungkin dalam memenuhi kebutuhan yang berbeda-beda secara luas dari kehidupan penduduk yang beragam dengan tetap mengedepankan standar hidup layak.

Dalam usaha mendapatkan solusi terbaik atas problem ini dengan tidak melebihi ketersediaan aspek finansial, reorganisasi radikal sekali-sekali diperkenalkan dalam rencana asli pada 1875 yang digambarkan dalam garis besarnya. Difrensiasi terkait kebutuhan kelompok-kelompok berbeda yang mendasari kehidupan sosial bumiputera, untuk pertama kali, diselenggarakan pada 1893, ketika reorganisasi instruksi pendidikan untuk bumiputera diawasi, dan suatu garis tegas ditarik untuk membedakan sekolah-sekolah kelas pertama dan kedua. Seiring berjalannya waktu, sekolah kelas pertama berkembang menjadi sekolah Bahasa Belanda, sementara sekolah kelas kedua memberi pendidikan dasar kepada penduduk bumiputera di pusat-pusat industri dan perdagangan (pendidikan standar). Sekolah-sekolah ini umumnya terdiri atas 5 tahun pelajaran, meskipun yang terbaru, dengan kurikulum berbeda (perdagangan atau pertanian), tahun ke-6 ditambahkan ke sekitar 20 sekolah.¹⁴

Keinginan untuk mengadakan pendidikan umum dan populer dalam waktu sependek mungkin, melecuit didirikannya sekolah-sekolah populer kota atau sekolah-sekolah desa pada 1906, yang diadakan dan dilanjutkan oleh komunitas

¹³ J. Stroomberg. 2018. *Hindia Belanda 1930*. (Judul asli *Handbook of the Netherlands East-Indies 1930* diterjemahkan oleh Heri Apriyono). Yogyakarta: IRCiSoD, hlm. 78.

¹⁴ J. Stroomberg. 2018, hlm. 79.

desa yang didukung pemerintah dalam bentuk subsidi begitu besar.¹⁵ Meskipun ini merupakan sekolah dasar, tetapi memuaskan secara sempurna kebutuhan intelektual sederhana penduduk desa yang bersahaja. Pada 1915, penghubung antara sekolah-sekolah desa dan pendidikan dasar bumiputera yang dicapai melalui organisasi yang disebut kelas lanjutan. Di samping membentuk kelas transisi ini, pendidikan yang dikelola dari cabang sekolah Belanda, juga ditangani secara baik.

Namun, kekhawatiran pemerintah kolonial Belanda mulai muncul melalui pengamatan Pistorius¹⁶ seorang *Controleur op Sumatra* atau asisten residen yang mengamati masyarakat Islam dan pengaruh surau yang sangat besar sebagai lembaga pendidikan mulai dari tempat mengaji sampai dengan tingkat pesantren di Minangkabau.¹⁷ Peran pondok pesantren sebagai suatu lembaga Pendidikan dan sosio-kultural telah banyak diperhatikan oleh para ahli dengan suatu pandangan untuk membuat pesantren sebagai agen perubahan yang dinamis di pedesaan.¹⁸

Maka pada Maret 1920, Creutzberg mengusulkan pendirian *schakelscholen* (sekolah transisi) yang akan menghubungkan antara sekolah asli kelas dua dan

¹⁵ Van Heutsz pun berminat juga dalam masalah pendidikan massa Indonesia dan mulai 1906 mengadakan percobaan membuka sebuah sekolah dasar desa. Pada 1907 didirikanlah sekolah ini di Jawa. Pembukaan sekolah baru ini mempengaruhi anggaran belanja pemerintah dan program pendidikan umum yang agak berbeda dengan pengembangan Sekolah Kelas Dua yang diusulkan oleh Menteri Fock. Tujuan dari Sekolah Desa adalah memberikan tahap-tahap membaca, menulis dan berhitung kepada orang desa dan dengan demikian merupakan suatu langkah penting ke depan dalam rencana pemberantasan buta huruf (lihat Robert van Niel. 1984, hlm. 97).

¹⁶ Catatan dari Pistorius khususnya pada Bab VII tentang “Imam dan Pengaruhnya terhadap Masyarakat” di Padang, cukup menarik untuk dikaji bahwa ketakutan terhadap kekuatan Islam bukan saja berdasarkan pengalamannya perang Padri yang berlangsung pada 1803-1838 dan pemberontakan-pemberontakan kecil lainnya yang terpecah-pecah, melainkan anak-anak yang sekolah dalam sistem pendidikan Belanda juga ikut ke dalam pelajaran Surau. Lihat A. W. P. Verkerk Pistorius. 1871. *Studien Over de Inlandsche Huishouding in de Padangsche Bovenlanden*. Zalt-Bommel, Joh. Noman En Zoon, hlm. 188.

¹⁷ Lihat Taufik Abdullah. 1987. *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*. Jakarta: LP3ES, hlm. 217. Abdullah mengulas dengan kuat pandangan-pandangan sarjana asing tentang Islam Minangkabau di zaman kolonial. Abdullah juga berasumsi bahwa pemerintah kolonial membangun *Sekolah Raja* tempat untuk mendidik calon guru dan pegawai yang didirikan di Bukittinggi atau Fort de Kock pada akhir 1850-an, kemungkinan untuk menyebarkan pendidikan Belanda dan melemahkan pengaruh Islam di Minangkabau. Bahkan Kahin menegaskan bahwa dengan sistem pendidikan elitis gaya Barat, seperti yang berlangsung di *kweek school* (Sekolah Guru atau lebih dikenal Sekolah Raja) dan MOSVIA (Sekolah Calon Pegawai) di Bukittinggi selalu mengajarkan bahasa, sikap, dan nilai-nilai penguasa kolonial (lihat Audrey Kahin. 2008. *Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatra Barat dan Politik Indonesia 1926-1998*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 107).

¹⁸ Taufik Abdullah dan Sharon Siddique. *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES, hlm. 423.

pendidikan dasar yang lebih ekstensif. Ketika pemerintah kolonial menyetujui gagasan ini, kepala departemen menyusunnya dengan jenjang setelah tiga tahun di sekolah kelas dua setempat (sekolah desa), kursus lima tahun akan diselesaikan di sekolah transisi yang akan mengajarkan murid-muridnya, juga dalam hal bahasa Belanda, setingkat dengan sekolah pedalaman Belanda. Pada 1921, sekolah transisi pertama yang dirancang dan dibuka di Bandung dan Padang Panjang.¹⁹

Sekolah transisi sebagai salah satu jenis pendidikan modern telah disambut dengan harapan yang besar dan konsepnya disebut sebagai *een geniale uitvinding* (penemuan yang brilian). Bagaimanapun juga, sekolah ini hadir untuk mewadahi anak-anak yang paling berbakat dari jutaan orang dan membimbing mereka menuju pengetahuan tentang Barat.²⁰ Kelompok yang lebih menonjol kemampuan ekonominya di kalangan bumiputera, kemudian segera menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah Belanda ataupun Tionghoa, bahkan jika mungkin ke sekolah dasar Eropa, dan masyarakat umumnya tampaknya tidak mampu membayar biaya sekolah transisi ini yang relatif tinggi. Hal ini mengakibatkan, pada tahun-tahun krisis setelah 1929, sejumlah besar sekolah transisi harus ditutup.²¹

1.1.2 Munculnya Sekolah atas Inisiasi Bumiputera 1911-1926

Para reformis Islam mendirikan sekolah modernis yang sangat terkenal, yaitu Sumatra Thawalib di Padang Panjang. Sekolah ini adalah penerus perguruan agama tradisional dari Surau Djembatan Besi yang telah didirikan pada peralihan abad ke-20 oleh Syekh Abdullah, yang kemudian dilanjutkan oleh Syekh Daud Rasyidi dan sesudahnya pada 1911 digantikan oleh Haji Rasul.²² Sekolah-sekolah agama di tempat-tempat lain di Sumatra Barat juga menggunakan nama Sumatra Thawalib dan sampai awal 1920-an telah ada lima perguruan Sumatra Thawalib.²³

¹⁹ I.J. Brugmans. 1938. *Geschiedenis van het Onderwijs in Nederland Sch-Indië*. Batavia: J. B. Wolters' Uitgevers Maatschappij N.V. Groningen, hlm. 336. Lihat juga D.G. Stibbe dan C. Spat (ed). 1927. *Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie*. Leiden: Martinus Nijhoff - E.J. Brill, hlm. 381

²⁰ D.G. Stibbe dan C. Spat (ed). 1927, hlm. 382.

²¹ Brugmans, 1938, hlm. 336

²² Audrey Kahin. 2008. *Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatra Barat dan Politik Indonesia 1926-1998*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 29.

²³ Audrey Kahin. 2008, hlm. 29. Sekolah-sekolah ini adalah perguruan Sumatra Thawalib di Padang Panjang, Parabek (dekat Bukittinggi), Padang Jepang, Maninjau, dan Batu Sangkar. Mengenai evolusi sistem sekolah Thawalib yang berawal dari sebuah organisasi sosial pelajar di Surau

Guru yang paling berpengaruh di Sumatra Thawalib Padang Panjang, yaitu Zainuddin Labai el-Junusiah, bukan tamatan Mekah atau Kairo, melainkan sepenuhnya hasil didikan Sumatra Barat. Zainuddin kembali ke Padang Panjang pada 1913 untuk mengajar di Surau Djembatan Besi. Dialah yang membantu mengubah sistem Surau tersebut menjadi Sumatra Thawalib sekolah yang dikelola secara modern dengan menggunakan meja, ruang kelas, dan kurikulum yang juga berisi mata pelajaran non-agama. Selanjutnya, pada 1915 Zainuddin mendirikan kembali sekolah Islam yang lebih modern bagi murid laki-laki dan perempuan, yang diberi nama Perguruan Dinniyah. Jika Sumatra Thawalib menekankan kurikulumnya pada Pendidikan agama dan bahasa Arab, sekolah Dinniyah justru menitikberatkan pada mata Pelajaran umum, seperti menulis, membaca, berhitung, ilmu falak, ilmu bumi, Kesehatan, ilmu tumbuh-tumbuhan dan pedagogi. Kedua sistem pendidikan ini bekerja sama erat, dan murid-murid sering bersekolah di Thawalib pada pagi hari dan ke Dinniyah pada malam harinya.²⁴

Zainuddin Labai jauh lebih radikal dibanding kolega-koleganya yang lebih tua. Dia sangat tertarik dengan pemikiran kaum modernis Kairo dan dia mungkin orang Minangkabau yang paling banyak membaca karya Rasyid Ridha.²⁵ Dia juga seorang pengagum pemimpin nasionalis Turki, yaitu Mustafa Kamal Attaturk dan menerjemahkan biografi Attaturk serta mengajarkan di sekolah Dinniyah tentang gerakan nasionalis di Turki.²⁶ Labai menolak subsidi yang ditawarkan Asisten Residen Belanda untuk sekolah Dinniyah yang dia pimpin dan dia tidak berusaha mencegah para muridnya menyerap ide-ide radikal dan komunisme yang sedang mereka minati.²⁷

Mulai 1920-an, perguruan-perguruan Islam khususnya di Padang Panjang menjadi tempat pertautan antara agama dan politik radikal yang saling memperkuat dalam menghadapi penentangan dari pendiri perguruan yang konservatif. Hal ini terjadi terutama di perguruan Sumatra Thawalib yang dipimpin oleh Haji Rasul

Djembatan Besi dan bagaimana nama itu terbentuk lihat Deliar Noer "Gerakan Modernisme Islam" dan Taufik Abdullah "School and Politics", hlm. 34-36.

²⁴ Audrey Kahin. 2008, hlm. 30

²⁵ Audrey Kahin. 2008, hlm. 30

²⁶ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam*, hlm. 41

²⁷ Hamka, *Saja Teringat*, hlm. 40

berupaya keras mengekang apa yang dianggap sebagai ide-ide atheisme dan komunisme yang sedang pelajari dan disebar oleh murid-muridnya.²⁸ Bahkan Zainuddin Labai yang sangat mengagumi keulamaan Haji Rasul, tidak mau berdekatan dengan beliau. Hal ini terjadi, karena Zainuddin sebagai seorang pemuda yang keras hati dan berpendirian tidak mau menaklukkan dirinya di bawah kuasa Haji Rasul.²⁹

Selanjutnya, sekolah yang cukup penting di luar jaringan perguruan Thawalib, yaitu Indonesische Nederlandsch School (INS) Kayutanam yang didirikan oleh Mohammad Sjafei pada 31 Oktober 1926.³⁰ Pembentukan sekolah yang mengutamakan pendidikan keterampilan ini, tidak lepas dari ide dari Perhimpunan Indonesia (PI), yaitu perkumpulan pelajar-pelajar Indonesia yang studi di Belanda. Mohammad Sjafei merupakan anggota dari PI yang berpendirian bahwa untuk mencapai kemerdekaan Indonesia perlu diselenggarakan Pendidikan yang baik. Tujuan Pendidikan INS Kayutanam yang pada awalnya pembentukannya, yaitu pertama mendidik rakyat kearah kemerdekaan; kedua memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat; ketiga mendidik para pemuda agar berguna bagi masyarakat; keempat menanamkan kepercayaan terhadap diri sendiri dan berani bertanggungjawab; dan kelima tidak mau menerima sokongan yang dapat mengurangi kebebasan untuk mencapai cita-cita.³¹

1.1.3 Masuknya Muhammadiyah dan Ide Pembaruan 1925-1936

Sebelum kedatangan Muhammadiyah di Minangkabau pada 1925, modernisme Islam sudah menempati posisi terhormat sebagai kekuatan sosio-politik yang cukup penting dalam masyarakat Minangkabau. Hal ini tidak dapat

²⁸ Audrey Kahin. 2008, hlm. 32

²⁹ Audrey Kahin. 2008 mengutip dari Hamka "Ajahku", hlm. 130. Meskipun Zainuddin tidak terlibat langsung dalam kegiatan politik, murid-muridnya diberikan kebebasan sehingga organisasi siswa yang didirikan di Perguruan Diniyyah ini menjadi kelompok pemuda yang paling radikal di Padang Panjang.

³⁰ Selain itu, menurut Edwar dalam tulisannya tentang *Model Pendidikan di Sumatera Barat: Kasus INS Kayu Tanam*, mengungkapkan bahwa selain diinisiasi oleh Moh. Sjafei, ada peran dari organisasi buruh kereta api (VBSTOL) di Kayutanam, Sumatera Barat. Lihat M. Dawam Rahardjo (ed). 1955. *Pesantren dan Pembaharuan*. Jakarta: LP3ES, hlm. 155 dan Audrey Kahin, 2008, hlm. 113.

³¹ Edwar dalam M. Dawam Rahardjo (ed). 1955, hlm. 155.

dipisahkan oleh peran dari tiga tokoh perintis pembaharuan, yaitu Hadji Abdullah Ahmad, Hadji Abdul Karim Amrullah, dan Syeikh Djambek, beserta maju pesatnya dua sistem sekolah Muslim modernis, yaitu Sumatra Thawalib dan Diniyah.³²

Menurut Alfian, alasan Haji Rasul membawa Muhammadiyah masuk ke Minangkabau dari Jawa pada 1925 adalah untuk memerangi orang-orang Komunis yang sudah melancarkan serangan-serangan keras kepada pribadinya, namun Belanda dan Kaum Adat tampaknya senantiasa mencurigai Muhammadiyah sebagai kekuatan politik yang tangguh bukan sekedar organisasi sosio-religius yang secara terbuka bercorak non-politik. Kecurigaan itu bahkan menyebar seperti api liar ke seluruh Minangkabau setelah pemberontakan Komunis yang gagal.³³ Setelah PKI ditekan keras, karena pemberontakannya yang gagal pada 1927, Muhammadiyah mendapatkan momentum dan berkembang dengan pesat ke seluruh Minangkabau.³⁴

Ketika Sumatera Thawalib yang ikut didirikan oleh Haji Rasul disusupi paham komunis, Ia turun tangan dan tegas menentang paham itu. Tetapi, Haji Rasul juga ditantang oleh murid dan guru Sumatera Thawalib, sehingga Ia tersingkir. Kemudian, Ia kembali ke Maninjau dan pergi ke Pulau Jawa berkenalan dengan Muhammadiyah melalui Ahmad Dahlan. Haji Rasul mempelajari gerakan pembaharuan Muhammadiyah untuk diterapkan ke Minangkabau. Setelah itu, Haji Rasul berperan dan menganjurkan pendirian Muhammadiyah di Minangkabau. Haji Rasul juga menjadi pendorong berdirinya Muhammadiyah di Maninjau yang didirikan oleh menantunya, yaitu A.R. Sutan Mansur.³⁵

Dengan bermunculannya sekolah-sekolah dari masa kemasa, mulailah timbul pertentangan paham dengan kaum adat. Sebab, sekolah menawarkan pembaharuan dan kemajuan sementara adat dikhawatirkan akan dilupakan. Apalagi sekolah

³² Alfian. 2010. *Politik Kaum Modernis: Perlawanan Muhammadiyah terhadap Kolonial Belanda*. Jakarta: Al-Wasath Publishing House, hlm. 270-271

³³ Alfian. 2010, hlm. 273

³⁴ Secara administrasi, organisasi cabang Muhammadiyah yang mendapat pengesahan dari hoofdbestuur Muhammadiyah Yogyakarta adalah Muhammadiyah cabang Padang Panjang dengan *besluit* H.B. No. 36 tanggal 20 Juli 1927 (ANRI, 2016: 3168). Kemudian, Muhammadiyah berhasil membentuk 57 cabang dan ranting di Minangkabau, angka tersebut lebih dari 60 persen di seluruh cabang dan ranting yang berjumlah 94 yang ada di seluruh pulau Sumatra pada 1932. Jika dibandingkan dengan Yogyakarta, tempat kelahiran gerakan Muhammadiyah, hanya 50 cabang dan ranting di tahun yang sama. Lihat *Berita Tahunan Muhammadiyah Hindia Timoer 1927*, hlm. 32.

³⁵ Mas'ood Abidin et.al. 2005. *Ensiklopedi Minangkabau (Edisi Awal)*. Padang: Pusat Kajian Islam dan Minangkabau (PPIM), hlm. 25

agama yang berlandaskan nafas Islam. Menurut Hamka bahwa kaum adat hendak kokoh memegaris nilai-nilai luhur, yaitu adat bersendi *syarak dan syarak bersendi adat pula, Agama berpenghulu kepada Nabi Muhammad dan adat berpenghulu kepada Ketemangungan dan Perpatih Nan Sebatang*. Meskipun dinyatakan bahwa sesuatu haram kata agama, kalau halal kata adat, hendaklah adat didahulukan. Sebaliknya, perkara yang dihalalkan agama, kalau berlawanan dengan adat, hendaklah adat yang harus didahulukan.³⁶

Situasi yang pelik antara ketidaksepahaman adat dan agama (sekolah Islam) itu, sejalan dengan faktor sosial budaya yang mendahului kelahiran Muhammadiyah. Haedar Nashir melukiskan bahwa Muhammadiyah berdiri selain melekat dengan spirit, gagasan dan tindakan Ahmad Dahlan selaku pendirinya, pada saat yang sama tidak lepas dari kenyataan sosial yang hidup dalam masyarakat khususnya umat Islam Indonesia dalam belenggu kolonialisme.³⁷ Kelahiran Muhammadiyah didorong oleh dan atas pergumulannya dalam menghadapi kenyataan hidup umat Islam dan masyarakat Indonesia yang terpenjara dalam kebodohan.

Suatu perubahan penting lainnya dalam arah perkembangan pendidikan di Padang Panjang, sejak awal abad 20 ketika Muhammadiyah hadir di Sumatera Barat. Muhammadiyah mendirikan banyak sekolah, terkadang atas kekuatannya sendiri tetapi sering juga dengan bantuan pemerintah Belanda. Kurikulumnya disesuaikan dengan sekolah pemerintah, akan tetapi pelajarannya dalam bidang agama Islam disediakan waktu lebih banyak. Melalui Muhammadiyah pendidikan agama diperbaharui dan diperhatikan khususnya bagi para pemimpin guru agama dan mubaligh, yang sebelum adanya sekolah Muhammadiyah, hanya mengikuti kursus saja.³⁸

Sebelum Muhammadiyah hadir di Padang Panjang, lembaga pendidikan yang dimiliki oleh umat Islam masih tradisional dan tidak memenuhi tuntutan zaman sebagaimana yang telah diulas sebelumnya. Sistem pembelajaran dilaksanakan

³⁶ Hamka. 2018. *Islam Revolusi dan Ideologi*. Jakarta: Gema Insani, hlm. 28.

³⁷ Haedar Nashir. 2016. *Muhammadiyah Gerakan Pembaruan*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, hlm. 33-34

³⁸ Djoko Marihandono (ed). 2015. *K.H. Ahamd Dahlan (1868-1923)*. Jakarta: Museum Kebangkitan Nasional, hlm. 135.

tanpa kurikulum, tahun ajaran, dan administrasi. Mata pelajaran pengajian kitab terdiri atas ilmu *sharaf/nahwu* (gramatika bahasa Arab), ilmu fikih, dan ilmu tafsir. Model pendidikan dan pengajaran dengan basis utama nilai-nilai keagamaan inilah yang kemudian hari berkembang menjadi pesantren dan menyulitkan berbagai lembaga pendidikan Islam untuk berkembang mencapai kemajuan.³⁹

Muhammadiyah mulai mendirikan sekolah-sekolah agama (madrasah) dengan sistem pendidikan modern yang menggunakan ruangan sekolah, kurikulum, tahun ajaran, serta administrasi yang teratur. Kurikulum tersebut disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, Muhammadiyah mengejawantahkannya dengan berbagai strategi, yaitu: mengusahakan nilai-nilai islami dalam pendidikan Islam menjadi ketentuan standar bagi pengembangan moral masyarakat, mengusahakan peran pendidikan Islam dalam mengembangkan moral peserta didik sebagai dasar menghadapi normasekuler, dan mengusahakan nilai-nilai islami menjadi pengikat hidup bersama dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam yang kokoh. Dengan demikian, Muhammadiyah mempelopori sistem pendidikan dengan memodifikasi kurikulum sekolah madrasah dan menambahkan pelajaran agama pada kurikulum sekolah umum.

Muhammadiyah yang mulai berkembang di Minangkabau sejak tahun 1925, memperkuat arus pembaruan ini. Melalui pendirian sekolah-sekolah dengan sistem pendidikan modern dan kurikulum terpadu, Muhammadiyah menjadi kekuatan penting dalam transformasi pendidikan Islam di Padang Panjang. Kehadiran Muhammadiyah tidak hanya membawa pembaruan metodologi pendidikan, tetapi juga memperkenalkan nilai-nilai rasionalitas, modernitas, dan manajemen kelembagaan yang lebih tertib. Namun demikian, Muhammadiyah juga menghadapi tantangan dari kelompok adat dan pendidikan tradisional yang khawatir bahwa sistem pendidikan modern akan menggerus nilai-nilai adat Minangkabau. Ketegangan antara adat dan pembaruan Islam ini menjadi dinamika sosial yang mewarnai perjalanan pendidikan Muhammadiyah di Padang Panjang.

Pada masa-masa awal terbentuknya, Muhammadiyah di Sumatera Barat memang cenderung membangun sekolah umum tingkat dasar hingga menengah

³⁹ Fandy Aprianto Rohman dan Mulyati. 2019. "Rintisan Awal Pendidikan Muhammadiyah di Sumatra Barat tahun 1925-1939", *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya* Vol. 5 No. 1, hlm. 26

dengan tujuan memberikan pemerataan pendidikan bagi sebanyak-banyaknya penduduk Bumiputera. Muhammadiyah mulai melaksanakan pembaruan pendidikan di Sumatera Barat dengan mendirikan HIS Met de Quran pada 1 Juli 1927 yang dipimpin oleh Parwoto Adiwijoyo, yang kemudian menjadi cikal-bakal pendirian sekolah-sekolah Muhammadiyah lain yang berada di Sumatera Barat.⁴⁰ Sekolah tersebut didirikan untuk membendung membludaknya anak-anak bumi putera yang masuk ke *Europeesche Lagere School* (ELS). HIS juga dibentuk untuk memenuhi keinginan masyarakat bumiputera yang ingin melanjutkan pelajaran sampai tingkat setinggi-tingginya.

Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada 1931, menyusul pendirian sekolah kader pemimpin yang diberi nama Tabligh School yang dipimpin oleh Hamka. Selain mempelajari ilmu agama dan pengetahuan umum, sekolah ini juga mengajarkan jiwa Muhammadiyah atau ilmu kemuhammadiyahan. Artinya, di samping mencetak ilmuwan, Muhammadiyah juga berusaha mencetak kader-kader Muhammadiyah yang tangguh dan handal. Pendirian Tabligh School juga didorong oleh minat dan keinginan para siswa yang berasal dari Sekolah Sumatera Thawalib, Diniyah Putra, dan sekolah-sekolah kolonial yang ingin belajar kursus kemuhammadiyahan di bawah bimbingan langsung para pemimpin Muhammadiyah.⁴¹

Selanjutnya, salah satu keputusan yang dihasilkan dalam Kongres Muhammadiyah ke-11 di Minangkabau 1936 di Sungai Batang, Maninjau adalah memutuskan Tabligh School dijadikan SMA (Sekolah Menengah Atas) 3 tahun. Hal inilah yang membuat Tabligh School diubah namanya menjadi Kuliyyatul Mubalighin pada Februari 1936 dan pimpinannya diserahkan kepada Yakub Rasyid sebagai direktur dan Buya Datuk Sinaro sebagai wakilnya. Faktor perubahan nama ini disebabkan karena Muhammadiyah pada waktu itu belum memiliki sekolah yang setara dengan SMA. Para siswa lulusan dari Sumatera Thawalib dan Diniyah

⁴⁰ Siti Rohanah (et.al). 2001. *Peranan Muhammadiyah dalam Sistem Pendidikan Islam di Padang Panjang Tahun 1950-1965*. Padang: Depdibud, hlm. 26.

⁴¹ Dedi Asmara. 2016. "Muhammadiyah Wilayah Sumatra Barat (1925-1950)". *Jurnal Analisis Sejarah*, Vol. 5, No. 1, hlm. 52.

Putra harus melanjutkan ke Normalschool dan Islamic College yang berada di Padang.⁴²

Sehubungan dengan keputusan dalam Kongres Muhammadiyah ke-11 di Minangkabau tersebut, para murid-murid dari Madrasatun Niswah (Tsanawiyah Putri) pimpinan Djohan Nurdin yang didirikan pada 1 Juni 1929 dan Tsanawiyah Putra pimpinan A. Malik Ahmad yang didirikan pada 1 Januari 1935, mendesak untuk dapat mendirikan SMA bagian putri. Hal inilah yang menyebabkan didirikanlah *Tabligh School Istri* dengan pimpinan A. Malik Ahmad pada 15 Januari 1938, yang dalam perkembangannya berganti nama menjadi Kuliyyatul Mubalighat pada 1941. Sebelum mendirikan Kuliyyatul Mubalighat, Muhammadiyah telah mendirikan sekolah khusus putri pada 1932 yang dikelola oleh Aisyiyah dengan nama Madrasatun Niswah. Sekolah ini setara dengan SMP (Sekolah Menengah Pertama) pada saat ini.⁴³ Pada 1950-an, Madrasatun Niswah diubah namanya menjadi Muallimin Muhammadiyah dengan lama studi lima tahun.

Muhammadiyah juga mendirikan *Frobelschool* atau TK ABA (Taman Kanak-Kanak 'Aisyiyah Bustanul Athfal) di Sumatera Barat pada 1939. Sekolah ini dipimpin oleh Encik Nurse dan didirikan dalam rangka menandingi *Frobelschool* yang didirikan oleh gereja Katholik yang berada di sebelah TK Kauman.⁴⁴ Itulah sekolah-sekolah yang didirikan oleh Muhammadiyah semenjak hadir di Sumatera Barat. Sekolah-sekolah yang didirikan itu semuanya berada di kompleks perguruan Kuliyyatul Mubalighin, Kauman Padang Panjang. Sampai dengan kemerdekaan Indonesia, sekolah-sekolah yang didirikan oleh Muhammadiyah terdiri dari dua jalur, yaitu, jalur agama dan jalur umum. Adapun jalur agama meliputi Ibtidaiyah (SD), Tsanawiyah (SMP), dan Kuliyyatul Mubalighin (SMA), sedangkan jalur umum meliputi TK, SD, SMP, dan SMA Muhammadiyah.

⁴² Siti Rohanah. 2001, hlm. 41.

⁴³ Dedi Asmara. 2016, hlm. 52.

⁴⁴ *Frobelschool* adalah pendidikan yang diperuntukkan bagi anak-anak usia dini yang menggunakan kurikulum sekolah umum seperti sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial Hindia-Belanda. Salah satu metode pendidikan yang dituangkan Muhammadiyah dalam *Frobelschool* adalah pemakaian peralatan sekolah seperti papan tulis, bangku, kursi, dan sebagainya. Adapun mata pelajaran umum yang diperkenalkan pertama kali di sekolah ini adalah membaca, menulis huruf latin, dan berhitung. Materi pelajaran tersebut disampaikan melalui nyanyian dan cerita yang diselingi dengan permainan di dalam maupun di luar ruangan. Lihat Siti Rohanah. 2001, hlm. 42.

Sejak awal berdirinya pada 1912, Muhammadiyah telah menempatkan pendidikan sebagai salah satu pilar utama dalam misi dakwah dan pembaruan sosial keagamaannya. Dalam konteks gerakan Islam modernis di Indonesia, Muhammadiyah bukan hanya membangun jaringan sekolah, tetapi juga turut mengembangkan lembaga pendidikan tinggi yang berakar pada nilai-nilai keislaman dan rasionalitas modern. Upaya ini menjadi bagian dari agenda besar Muhammadiyah dalam menjawab tantangan zaman, memperkuat identitas keislaman, dan menciptakan kader-kader Muslim terdidik yang mampu berkiprah di berbagai bidang kehidupan.⁴⁵

Di antara berbagai wilayah di Indonesia, Sumatera Barat khususnya Padang Panjang memiliki posisi yang unik dalam peta sejarah pembaruan Islam. Daerah ini sejak awal abad 20 telah menjadi pusat perkembangan pemikiran reformis Islam melalui lembaga seperti Diniyah School dan Sumatera Thawalib.⁴⁶ Padang Panjang, kota kecil yang terletak di antara Bukittinggi dan Solok, merupakan episentrum dari gerakan intelektual tersebut. Dalam konteks ini, kehadiran Muhammadiyah di Padang Panjang pada 1925 bukanlah sesuatu yang asing, melainkan bagian dari kelanjutan tradisi pembaruan yang telah lama tumbuh di Minangkabau.⁴⁷ Muhammadiyah tidak hanya beradaptasi dengan budaya lokal, tetapi juga turut membentuk ruang sosial baru bagi umat Islam modernis dalam menghadapi kolonialisme, nasionalisme, dan tantangan negara pasca kemerdekaan.

Namun, meskipun akar intelektual dan religius telah tertanam kuat, proses pendirian lembaga pendidikan tinggi Muhammadiyah di Padang Panjang tidak berlangsung secara cepat dan mulus. Fakultas Falsafah dan Hukum Muhammadiyah yang dibuka pada 1955 merupakan tonggak penting dalam upaya pelembagaan pendidikan tinggi berbasis Islam modernis di Sumatera Barat.⁴⁸

⁴⁵ Alfian. 1989. *Muhammadiyah: The Political Behavior of a Muslim Modernist Organization under Dutch Colonialism*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 14-15.

⁴⁶ Azyumardi Azra. 2007. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*. Jakarta: Kencana, hlm. 226.

⁴⁷ Deliar Noer. 1996. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900–1942*. Jakarta: LP3ES, hlm. 205-210.

⁴⁸ Hasan Ahmad. 1955. *Pembukaan Fakultas Falsafah dan Hukum*. Arsip Pribadi. Puncak dari perjalanan panjang ini berdirinya Fakultas Falsafah dan Hukum Muhammadiyah pada tahun 1955, yang menjadi cikal bakal Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Meski inisiasi telah dimulai sejak 1955, proses transisi menuju universitas yang mapan memakan waktu hingga lebih dari tiga

Fakultas ini dibentuk dengan semangat untuk menjembatani pemikiran keislaman dan filsafat hukum modern.⁴⁹ Akan tetapi, langkah ini tidak segera berkembang menjadi universitas dalam struktur kelembagaan yang mapan. Justru, proses transisi menuju bentuk universitas Muhammadiyah di Padang Panjang memakan waktu hampir tiga dekade hingga mendapatkan bentuk kelembagaan yang stabil pada dekade 1980-an.⁵⁰

Penting untuk dicatat bahwa penundaan transformasi institusional juga berkaitan dengan resistensi sosial terhadap pendidikan tinggi modern yang dibentuk atas dasar organisasi. Sebagian masyarakat masih memiliki keterikatan kuat dengan model pendidikan tradisional berbasis surau atau madrasah. Mereka khawatir bahwa pendekatan Muhammadiyah yang lebih rasional dan berbasis manajemen organisasi akan mereduksi dimensi spiritualitas dan keberkahan dalam pendidikan Islam.⁵¹ Ketegangan ini menjadi bagian dari realitas historis yang harus dihadapi oleh Muhammadiyah dalam proses membangun konsensus kelembagaan.

Penelitian ini menjadi penting untuk menjawab pertanyaan bagaimana dinamika pendirian Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Padang Panjang. Melalui pendekatan historis, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana interaksi antara struktur sosial, agensi, dan konsensus mempengaruhi dinamika kelembagaan pendidikan tinggi Muhammadiyah di Padang Panjang. Penelitian ini juga membuka ruang untuk melihat lebih jauh bagaimana konsensus sosial terbentuk dalam organisasi keagamaan modernis, serta bagaimana dinamika lokal turut mempengaruhi arah dan bentuk pendidikan tinggi Islam di daerah. Dengan mengkaji periode 1955 hingga 1985, penelitian ini bertujuan tidak hanya untuk

dekade. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi kelembagaan dalam pendidikan tinggi Muhammadiyah di Padang Panjang merupakan proses yang kompleks dan memerlukan konsensus sosial yang panjang.

⁴⁹ Hasan Ahmad. 1955. *Pembukaan Fakultas Falsafah dan Hukum*. (Arsip Pribadi).

⁵⁰ Salah satu masalahnya yang cukup serius mengenai situasi pergolakan politik, yaitu sekitar peristiwa PRRI/PERMESTA yang membuat rintisan awal ini mengalami kendala sangat berarti dan kerja fakultas tersebut terhenti 3 tahun lamanya. Langkah antisipatif pun dijalankan. Konferensi Majelis Pengajaran di Jakarta 1956, memutuskan Fakultas Hukum dan Falsafah di Padang Panjang ini dipindah ke Jakarta, dengan nama baru Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG), yang diresmikan pada 18 November 1957. Pada 1958, PTPG Muhammadiyah diubah menjadi Fakultas Keguruan dalam Ilmu Pendidikan (FKIP), berada di bawah lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ)

⁵¹ Taufik Abdullah. *Schools and Politics: The Kaum Muda Movement in West Sumatra 1927-1933*, hlm. 92-95.

merekonstruksi fakta sejarah, tetapi juga untuk menawarkan analisis teoritik yang dapat memperkaya khazanah historiografi pendidikan Islam dan studi kelembagaan Perguruan Tinggi di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian, dapat disimpulkan bahwa historiografi mengenai perguruan tinggi Muhammadiyah, khususnya Universitas Muhammadiyah di Padang Panjang, masih terbatas dan belum banyak dikaji secara mendalam. Penelitian yang ada umumnya lebih menyoroti aspek umum tentang Muhammadiyah dan pendidikan Islam tanpa memberikan perhatian khusus pada dinamika pendirian dan perkembangan perguruan tinggi dalam konteks sosial, budaya, dan kelembagaan Muhammadiyah di Padang Panjang.

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk merumuskan permasalahan yang tidak hanya menelusuri aspek historis pendirian lembaga pendidikan tinggi Muhammadiyah di Padang Panjang, tetapi juga menelaah secara komprehensif dinamika struktur sosial, peran agensi lokal, serta dinamika pembentukan konsensus kelembagaan yang berlangsung dalam kurun waktu yang panjang.

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara sistematis dan terukur bagaimana perguruan tinggi Muhammadiyah di Padang Panjang mengalami proses transisi kelembagaan dan bagaimana konsensus sosial terbentuk dalam mendukung pendirian dan perkembangannya. Dengan demikian, pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah “Bagaimana dinamika pendirian Universitas Muhammadiyah di Padang Panjang?”.

Untuk menjawab pertanyaan utama tersebut secara lebih terperinci, penelitian ini dirumuskan ke dalam empat sub-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana pembaruan pendidikan Islam di Padang Panjang 1905-1942?
2. Bagaimana pengumpulan pendirian Perguruan Muhammadiyah di Padang Panjang 1925-1935?
3. Bagaimana proses transisi dari Fakultas Falsafah dan Hukum menjadi Universitas Muhammadiyah Padang Panjang 1935-1955?
4. Bagaimana dinamika konsensus dalam pendirian Universitas Muhammadiyah di Padang Panjang 1955-1985?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara historis dan analitis dinamika transisi dan konsensus kelembagaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Padang Panjang, mulai dari fase inisiasi awal pada pertengahan abad 20 hingga fase stabilisasi kelembagaan pada dekade 1980-an. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengungkap dinamika pertumbuhan pendidikan Islam di Padang Panjang sejak awal abad 20 sebagai latar sosial dan intelektual bagi pendirian pendidikan tinggi Muhammadiyah.
2. Mengkaji pergumulan ideologis, sosial, dan struktural Muhammadiyah dalam mendirikan Universitas di Padang Panjang pada periode 1925-1935.
3. Menganalisis tahapan dan tantangan dalam proses transisi dari Fakultas Falsafah dan Hukum menuju bentuk Universitas Muhammadiyah pada periode 1935-1955.
4. Menganalisis dinamika konsensus yang terjadi dalam lingkungan Muhammadiyah dalam membentuk institusi pendidikan tinggi di Padang Panjang pada rentang waktu 1955-1985.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara akademik maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah historiografi pendidikan Islam di Indonesia, khususnya dalam konteks lokal Sumatera Barat yang selama ini relatif kurang mendapat perhatian dalam kajian perguruan tinggi Islam. Penelitian ini juga memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan studi tentang interaksi antara struktur sosial dan agensi dalam dinamika sejarah kelembagaan pendidikan Islam modern.

2. Manfaat Praktis

Temuan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi organisasi keagamaan, pengelola perguruan tinggi, dan pengambil kebijakan dalam memahami proses konsolidasi institusi pendidikan Islam yang berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan wawasan reflektif bagi

Muhammadiyah maupun organisasi keagamaan lainnya dalam menyusun strategi pengembangan pendidikan tinggi yang adaptif terhadap perubahan sosial dan tantangan masa depan.

1.4. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis yang menekankan pada dimensi *temporal* (waktu) dan *spasial* (ruang) secara sistematis untuk memahami dinamika transisi dan konsensus dalam pendirian Universitas Muhammadiyah di Padang Panjang.

Pada dimensi temporal penelitian ini mencakup kurun waktu antara tahun 1955 hingga 1985. Pemilihan rentang waktu ini didasarkan pada pertimbangan berikut: pertama, tahun 1955 menandai inisiasi pendirian pendidikan tinggi Muhammadiyah di Padang Panjang melalui pembentukan Fakultas Falsafah dan Hukum.⁵² Kedua, tahun 1985 merupakan periode ketika struktur kelembagaan Universitas Muhammadiyah di Padang Panjang mulai stabil dan menunjukkan perkembangan signifikan.⁵³

Meskipun fokus penelitian berada pada periode 1955-1985, latar belakang historis yang mempengaruhi perkembangan pendidikan Islam di Padang Panjang pada awal abad 20, khususnya melalui Diniyah School dan Sumatera Thawalib, tetap dikaji secara proporsional sebagai fondasi sosial dan intelektual yang relevan. Penelitian ini juga akan mengkaji setiap fase waktu secara rinci untuk mengidentifikasi perubahan struktur sosial, peran agensi, dan dinamika konsensus

⁵² Pada dimensi temporal, tahun 1955 dipilih sebagai tonggak awal sejarah lahirnya Universitas Muhammadiyah di Padang Panjang dengan Fakultas Falsafah dan Hukum, yang bersumber dari isi Piagam yang diterbitkan pada 18 November 1955 oleh Pusat Pimpinan Muhammadiyah. Dari sumber arsip ini menyimpan tiga kunci pembuka (*the key to unlock*), yaitu peristiwa di tahun 1955, Padang Panjang, dan Manusia Muslim yang berpendidikan Universitas. Lihat Arsip Nasional Republik Indonesia, *Inventaris Arsip Muhammadiyah 1922-2001*, Jakarta, 2016, Nomor Arsip 3348.

⁵³ Sementara itu, tahun 1985 dipilih menjadi batasan akhir penelitian ini, sebab pada masa tersebut terjadi perubahan bentuk dan penggabungan (*merger*) beberapa Sekolah Tinggi Muhammadiyah yang mulai berdiri di Sumatera Barat. Penggabungan Sekolah Tinggi Muhammadiyah di Sumatera Barat, di antaranya adalah Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Padang Panjang, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Muhammadiyah Bukittinggi, Sekolah Tinggi Ilmu Teknik (STIT) Muhammadiyah Bukittinggi, Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIP) Muhammadiyah Payakumbuh, dan Akademi Manajemen (AMA) Muhammadiyah Padang. Melalui SK Menteri P dan K Republik Indonesia Nomor 0125/0/1985 tanggal 13 Maret 1985 semua Sekolah Tinggi dan Akademi Muhammadiyah yang ada di wilayah Sumatera Barat bergabung menjadi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang berlokasi di Padang Panjang.

yang mempengaruhi perjalanan pendirian dan perkembangan Universitas Muhammadiyah di Padang Panjang.

Sementara itu, pada dimensi spasial, penelitian ini berfokus pada wilayah Padang Panjang sebagai pusat utama kajian. Padang Panjang dipilih atas pertimbangan posisinya yang strategis sebagai pusat intelektual dan pendidikan Islam di Minangkabau, serta menjadi tempat awal pendirian dan perkembangan institusi pendidikan tinggi Muhammadiyah di Sumatera Barat. Selain Padang Panjang, beberapa wilayah penunjang yang memiliki keterkaitan historis dan organisatoris, seperti Bukittinggi dan Padang, juga akan dianalisis sebagai bagian dari jejaring kelembagaan Muhammadiyah di Sumatera Barat. Wilayah-wilayah ini penting dalam memahami dinamika konsensus organisasi dan pengembangan institusi pendidikan Muhammadiyah secara regional.

Dengan demikian, penelitian ini mengintegrasikan analisis ruang dan waktu secara komprehensif untuk memberikan pemahaman yang utuh mengenai dinamika transisi, konsensus, serta pelebagaan pendidikan tinggi Muhammadiyah di Padang Panjang dalam konteks sejarah sosial keagamaan masyarakat Minangkabau. Penelitian diharapkan mampu menggambarkan secara holistik interaksi antara ruang dan waktu dalam proses pembentukan universitas berbasis nilai Islam modernis di ranah Minangkabau. Pendekatan ini sekaligus menghindari reduksi historis terhadap aspek lokal dan memungkinkan pembacaan yang lebih mendalam atas perubahan sosial-keagamaan yang berlangsung dalam jangka panjang.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Studi Sejarah Pemikiran Muhammadiyah dan Pendidikan Tinggi

Studi tentang Universitas dalam perspektif sejarah merupakan topik yang penting dan menarik. Beberapa penelitian yang telah dilakukan, baik berupa disertasi, artikel ilmiah atau buku cukup banyak, namun, hingga saat ini, penelitian yang mengkaji secara khusus dan komprehensif sejarah pendirian dan perkembangan Perguruan Tinggi Muhammadiyah, terutama dalam konteks lokal seperti di Padang Panjang, masih sangat terbatas. Untuk itu pada bagian ini, peneliti

berupaya menyajikan penelitian terdahulu yang relevan sebagai fondasi untuk menopang penelitian, melalui karya-karya sebagai berikut:

Pertama, Arifin (1990) dalam karyanya yang berjudul “*Muhammadiyah Potret yang Berubah*” memberikan analisa bahwa pemikiran yang terkandung di dalam akidah tauhid yang diusung oleh Muhammadiyah diformulasikan secara filosofis dalam suatu rumusan yang singkat, yaitu bahwa Tuhan secara realitas bersifat esa dan tiada realitas lain yang berporos kepada Tuhan. Dalam kehidupan Muhammadiyah, filsafat ini merupakan dasar motivasi, pengaruh tujuan, serta pedoman pokok para anggota Muhammadiyah dalam menyebarkan pemahamannya.

Kedua, karya Mardjohan (2006) yang khusus membahas kajian perkembangan “*Embrio Muhammadiyah di Kauman Padangpanjang*”. Mardjohan menyampaikan bahwa Padan Panjang merupakan daerah pertama yang melakukan perubahan sistem pendidikan pesantren menjadi sistem sekolah modern. Sementara itu, Rohanah, Noveri dan Djurip (2001) dalam buku berjudul “*Peranan Muhammadiyah dalam Sistem Pendidikan Islam di Padangpanjang Tahun 1950-1965*” menambahkan bahwa Diniyah Putra maupun Diniyah Putri adalah sekolah madrasah pertama yang didirikan di Padang Panjang. Kedua sekolah inilah yang merupakan cikal bakal berdirinya pembaruan Islam di bidang pendidikan.

Ketiga, sebagai pembanding, digunakan karya Mestika Zeid (1989) berjudul “*Kolonialisme Pendidikan dan Munculnya Elit Minangkabau Modern: Sumatera Barat Abad ke-19*”. Zeid menguraikan bahwa sistem pendidikan yang dirintis oleh Muhammadiyah di Sumatera Barat juga digunakan untuk membendung misi kristenisasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Hindia-Belanda melalui berbagai sekolah-sekolah modern.

Keempat, karya Tamrin Kamal berupa Disertasi Doktor yang berjudul “*Purifikasi Ajaran Islam Pada Masyarakat Minangkabau*” menjelaskan tentang purifikasi ajaran Islam pada masyarakat Minangkabau. Karya ini mengangkat pemikiran purifikasi Haji Abdul Karim Amrullah, tentang pemikiran pembaharu lokal Minangkabau yang punya jaringan internasional, terutama dengan para pembaharu atau ulama Timur Tengah pada awal abad ke 20, sebagai seorang purifikator ia telah berhasil melakukan pemurnian ajaran Islam yang dilihat dari

aspek pemurnian di bidang aqidah, ibadah, muamalah, tasawuf, dan tarekat. Pada prinsipnya beliau berusaha agar ajaran Islam itu harus dihayati dan dilaksanakan sesuai menurut Al-Qur'an dan Sunnah.

Kelima, penelitian relevan yang lainnya, dari karya Zulmuqim berupa Disertasi Doktor yang berjudul "*Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia Pada Abad XX: Refleksi Pemikiran Abdul Karim Amrullah*" menjelaskan pembaharuan Islam yang dilakukan Haji Abdul Karim Amrullah telah berlalu, lebih kurang satu abad, namun beberapa pemikiran dan pendapat yang telah mewarnai berbagai aktivitasnya pada waktu itu ada yang masih relevan untuk saat ini, di samping ada juga yang perlu disempurnakan sesuai perkembangan zaman.

Keenam, karya Alfian (1989) dengan judul "*Muhammadiyah: The Political Behaviour of a Muslim Modernist Organization Under Dutch Colonialism*". Karya ini sangat baik memuat sumber-sumber yang komprehensif yang dapat peneliti gunakan untuk mengaitkan pendidikan Muhammadiyah di zaman kolonial. Tetapi, karya ini hanya memfokuskan pada perilaku politik Muhammadiyah pada zaman kolonial Belanda saja.

Ketujuh, karya lainnya dari Weinata Sairin (1995) mengenai "*Gerakan Pembaharuan Muhammadiyah*". Karya ini membahas mengenai sikap organisasi Muhammadiyah terhadap pemberlakuan kebijakan asas tunggal oleh pemerintahan Orde Baru, dengan memuat sebagian sejarah persyarikatan pada bagian awalnya.

Kedelapan, karya Abdul Munir Mulkhan (1990) tentang "*Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah dalam Perspektif Perubahan Sosial*" tidak banyak mendalami sejarah Muhammadiyah, penulis hanya berfokus pada pemikiran Muhammadiyah terhadap masalah-masalah sosial yang sedang terjadi.

Dari karya-karya tersebut di atas, dapat dikatakan begitu luasnya ruang lingkup penelitian mengenai Muhammadiyah. Namun, peneliti tidak dan atau belum menemukan karya utama yang membahas mengenai sejarah lahir dan berkembangnya pendidikan Muhammadiyah yang secara spesifik tentang Perguruan Tinggi atau Universitas Muhammadiyah.

Karya-karya lain mengenai Muhammadiyah yang dapat peneliti temukan kebanyakan juga bersifat hanya melengkapi dari penelitian terdahulu atau topik pembahasan yang lain dan dengan tema-tema berbeda yang tidak begitu relevan

dengan penelitian ini. Seperti topik tentang Muhammadiyah dan pendidikan yang ada kebanyakan merupakan karya dengan latar belakang ilmu pendidikan (pedagogik atau *tarbiyah*), sehingga masalah yang diangkat pun hanya bersifat masalah teknis ilmu pendidikan dan pengajaran.

Dari literatur yang telah dipaparkan di atas, dapat direduksi bahwa kajian Muhammadiyah dan pendidikan cukup beragam, namun penelitian yang secara khusus menelusuri sejarah perguruan tinggi Muhammadiyah, terutama di Padang Panjang, belum banyak dikaji secara mendalam. Kajian pendidikan Muhammadiyah pada umumnya lebih banyak dibahas dalam perspektif pendidikan atau pedagogi, bukan dalam pendekatan sejarah sosial yang menelusuri dinamika organisasi, transisi dan dinamika konsensus pembentukan konsensus. Oleh karena itu, penelitian ini diupayakan memberikan kontribusi penting untuk memperkaya studi sejarah pendidikan tinggi Islam di Indonesia.

Dengan demikian, peneliti memilih tema sejarah Muhammadiyah dan pendidikan tinggi, khususnya tentang sejarah Perguruan Tinggi Muhammadiyah, karena tema ini belum digarap atau diteliti secara spesifik dalam perspektif sejarahnya dan mendorong peneliti untuk lebih fokus dalam melakukan penelitian tentang sejarah universitas pertama milik Muhammadiyah yang ada di Padang Panjang.

1.5.2 Studi Transisi Institusional dan Agensi dalam Sejarah Sosial

Studi mengenai transisi institusional dan agensi dalam sejarah sosial telah menjadi perhatian penting dalam literatur sosiologi dan sejarah modern. Transisi kelembagaan dalam organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah tidak hanya merupakan peristiwa administratif, tetapi juga merupakan hasil dari proses sosial yang kompleks yang melibatkan interaksi antara struktur, agensi, dan konsensus sosial.

Kajian tentang transisi institusional dalam konteks sejarah sosial mendapatkan pondasi teoritis yang kuat dari karya Anthony Giddens. Giddens menekankan pentingnya memahami struktur dan agensi secara simultan dalam

pembentukan dan transformasi sosial melalui konsep “*duality of structure*”.⁵⁴ Struktur tidak hanya membatasi tindakan, tetapi juga menjadi media yang memungkinkan tindakan. Dalam konteks perubahan kelembagaan, tindakan para aktor organisasi memanfaatkan peluang dan sumber daya dalam struktur yang ada untuk menciptakan inovasi sosial. Pemikiran Giddens ini dikembangkan lebih lanjut dalam studi-studi sosiologi kelembagaan dan modernisasi.

Selain itu, studi tentang perubahan institusional juga sangat dipengaruhi oleh pendekatan fungsionalisme struktural Talcott Parsons. Parsons menekankan pentingnya sistem nilai bersama dan integrasi sosial dalam menjaga stabilitas dan transisi lembaga.⁵⁵ Dalam teorinya tentang sistem sosial, Parsons menjelaskan bahwa institusi harus mampu menyesuaikan diri (*adaptation*), mencapai tujuan (*goal attainment*), mengintegrasikan elemen-elemen sosial (*integration*), dan menjaga pola budaya (*latency*), yang dikenal dengan skema AGIL. Prinsip ini menjadi landasan dalam memahami bagaimana Muhammadiyah mempertahankan nilai-nilai inti sambil melakukan adaptasi kelembagaan.

Dalam perkembangan lebih lanjut, Jurgen Habermas melalui “*The Theory of Communicative Action*” menyoroti bahwa konsensus dalam masyarakat modern tidak semata-mata terbentuk melalui kesepakatan fungsional, tetapi dicapai melalui komunikasi yang rasional dan bebas dari dominasi.⁵⁶ Habermas menekankan pentingnya ruang publik sebagai arena pembentukan kesepakatan melalui diskursus. Pendekatan Habermas ini relevan dalam melihat bagaimana konsensus internal Muhammadiyah terbentuk melalui forum-forum deliberative, seperti musyawarah, muktamar, dan rapat-rapat organisasi yang mendorong legitimasi partisipatif dalam transisi kelembagaan.

Beberapa studi kontemporer memperkuat pentingnya integrasi antara struktur, agensi, dan komunikasi dalam perubahan sosial. Misalnya, karya Sewell dalam “*A Theory of Structure: Duality, Agency, and Transformation*” menekankan bahwa perubahan sosial bergantung pada kemampuan aktor untuk menginterpretasi

⁵⁴ Anthony Giddens. 1984. *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. Berkeley: University of California Press, hlm. 27

⁵⁵ Talcott Parsons. 1951. *The Social System*. New York: The Free Press, hlm. 30.

⁵⁶ Jurgen Habermas. 1984. *The Theory of Communicative Action*. Boston: Beacon Press, hlm. 87.

ulang aturan dan sumber daya.⁵⁷ Sementara itu, Scott dalam "*Institutions and Organizations: Ideas and Interests*" menjelaskan bagaimana legitimasi dan norma sosial berperan dalam membentuk kelangsungan institusi.⁵⁸

Dengan demikian, studi transisi institusional dan agensi dalam sejarah sosial tidak hanya memetakan perubahan struktural, tetapi juga menelaah bagaimana aktor-aktor sosial berkontribusi dalam membentuk arah perubahan tersebut. Dalam konteks Universitas Muhammadiyah di Padang Panjang, dinamika ini menjadi penting untuk dianalisis agar dapat memahami bagaimana proses transisi kelembagaan dan konsensus sosial terbangun dalam jangka waktu yang panjang.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan Historis

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis untuk mengkaji proses transisi dan konsensus dalam pendirian Universitas Muhammadiyah di Padang Panjang. Pendekatan historis memungkinkan peneliti untuk merekonstruksi peristiwa masa lalu secara komprehensif, menempatkan fakta dalam konteks ruang dan waktu, serta menelusuri hubungan kausal antara aktor, struktur, dan dinamika sosial yang terlibat dalam proses perubahan kelembagaan.

Senada dengan itu Nugroho Notosusanto menegaskan, bahwa sekumpulan prinsip dan aturan yang sistematis dimaksudkan untuk memberikan bantuan secara efektif dalam usaha mengumpulkan bahan-bahan sejarah, menilai secara kritis dan kemudian menyajikan suatu sintesis daripada hasil-hasilnya (berupa historiografi).⁵⁹ Sedangkan Louis Gottschalk memperkaya bahwa, metode sejarah digunakan sebagai proses menguji dan menganalisis kesaksian sejarah guna menemukan data yang autentik dan dapat dipercaya, serta usaha sintesis atas data semacam itu menjadi kisah sejarah yang dapat dipercaya.⁶⁰

⁵⁷ William H. Sewell. 1992. "A Theory of Structure: Duality, Agency, and Transformation". *American Journal of Sociology*, Vol. 98, No. 1, pp. 1-29.

⁵⁸ W. Richard Scott. 2008. *Institutions and Organizations Ideas, Interests, and Identities*. United States of America: SAGE Publications, Inc

⁵⁹ Nugroho Notosusanto. 1984. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer (Suatu Pengalaman)*. Jakarta: Inti Idayu Press, hlm.10-11.

⁶⁰ Louis Gottschalk. 1985. *Mengerti Sejarah*. (diterjemahkan oleh Nugroho Notosusanto), Jakarta: UI-Press, hlm. 32.

Senada dengan penjelasan di atas, Sartono Kartodirdjo mengatakan bahwa, masalah teori dan metodologi sejarah sebagai bagian pokok ilmu sejarah mulai diketengahkan apabila penelitian sejarah tidak semata-mata bertujuan menceritakan kejadian tetapi bermaksud menerangkan kejadian itu dengan mengkaji sebab-sebabnya, kondisi lingkungannya, konteks sosial-kulturalnya, pendeknya, secara mendalam hendak diadakan analisis tentang faktor-faktor kausal, kondisional, kontekstual, serta unsur-unsur yang merupakan komponen dan eksponen dari proses sejarah yang dikaji.⁶¹

Selanjutnya, landasan utama metode sejarah ialah bagaimana menangani bukti-bukti sejarah dan bagaimana menghubungkannya.⁶² Sehingga, penelitian yang dilakukan tidak hanya memaparkan sebatas kisah-kisah seorang tokoh atau organisasi saja, tetapi menjabarkan secara naratif dan argumentatif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan untuk mencapai suatu bentuk peristiwa sejarah yang nyata terjadi di masa lalu.

Pendekatan historis dipilih karena sesuai dengan fokus penelitian yang menekankan pentingnya memahami dan memaknai pertumbuhan serta perkembangan pendidikan tinggi Muhammadiyah dalam jangka panjang, serta proses konsensus yang tidak terlepas dari konteks sosial, budaya, dan politik di Padang Panjang. Penelitian sejarah bertujuan untuk menggali dan menafsirkan peristiwa masa lalu berdasarkan bukti yang tersedia, dengan mempertimbangkan keragaman sumber dan perspektif yang beragam.⁶³

Maka para ahli sejarah sepakat untuk menetapkan empat kegiatan pokok dalam penelitian sejarah. Menurut Louis Gottschalk, terdapat empat langkah-langkah penelitian sejarah sebagai berikut: 1) Pengumpulan objek yang berasal dari suatu zaman dan pengumpulan bahan-bahan tertulis dan lisan yang relevan; 2) Menyingkirkan bahan-bahan (atau bagian-bagian daripadanya) yang tidak autentik; 3) Menyimpulkan kesaksian yang dapat dipercaya berdasarkan bahan-bahan yang autentik; dan 4) Penyusunan kesaksian yang dapat dipercaya itu menjadi suatu kisah

⁶¹ Sartono Kartodirdjo. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT. Gramedia, hlm. 2.

⁶² William H. Frederick dan Soeri Soeroto. 1991. *Pemahaman Sejarah Indonesia: Sebelum dan Sesudah Revolusi*. Jakarta: LP3ES, hlm. 13.

⁶³ J. Tosh. 2015. *The Pursuit of History: Aims, Methods and New Directions in the Study of Modern History*. London: Routledge.

atau penyajian yang berarti. Ringkasnya, setiap langkah tersebut dapat diimplementasikan dalam penelitian secara berurutan, sebagai berikut: (a) Heuristik; (b) Verifikasi; (c) Interpretasi; dan (d) Historiografi. Berdasarkan keempat tahapan tersebut, maka memudahkan peneliti untuk menjawab masalah atau persoalan yang diajukan dalam penelitian ini secara sistematis.⁶⁴

Dengan demikian, penelitian ini dilaksanakan untuk mengumpulkan data guna mendapatkan jawaban atas pokok permasalahan yang dirumuskan. Pelaksanaan penelitian membutuhkan metode penelitian yang dapat berjalan lebih rinci, sistematis, sehingga data yang diperoleh dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang dirumuskan.

1.6.2 Sumber Sejarah

Sumber sejarah untuk penelitian ini, terutama diperoleh dari sumber tertulis berupa primer maupun sekunder dan sumber lisan. Peneliti berupaya melakukan heuristik terhadap sumber-sumber tertulis seperti *Besluiten van den Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indie* 20 den July 1927 (No. 36), *Besluiten van den Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indie* 22 den Augustus 1914 (No. 81). sejarah pendirian Universitas Muhammadiyah yang tersimpan di ANRI dalam bundel Inventaris Arsip Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta 1922-2001, sumber sejamin juga tersedia di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Sumber primer tersebut berupa arsip-arsip atau terbitan resmi persyarikatan Muhammadiyah berupa *Almanak Muhammadiyah* edisi 1950-1955, 1956-1957, 1958-1959, 1960-1965, 1966-1970. Sumber lainnya berupa “*Boeah Kongres Muhammadiyah*” hasil Kongres/Muktamar Muhammadiyah mulai tahun 1925-1955 yang memuat berbagai ide, gagasan dan keputusan tentang pendirian Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

Sumber primer lainnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah arsip pribadi dalam periode 1925-1975 milik Hasan Ahmad dalam bundel Komplek Perguruan Kauman Padang Panjang dan Pembukaan Fakultas Faslafah dan Hukum

⁶⁴ Louis Gottschalk. 1985. *Mengerti Sejarah*. (diterjemahkan oleh Nugroho Notosusanto), Jakarta: UI-Press, hlm. 18.

Universitas Muhammadiyah Padang Panjang. Selain itu terdapat arsip liputan khusus tentang pendirian Universitas Muhammadiyah yang tersedia di Gedung *Suara Muhammadiyah*, Yogyakarta. Majalah resmi *Suara Muhammadiyah* ini memuat berbagai artikel pendukung untuk peneliti memanfaatkan dalam penulisan disertasi ini. Ada juga arsip dari Pimpinan Wilayah Sumatera Barat, Pimpinan Daerah Padang, Pimpinan Ranting Padang Panjang serta arsip yang tersimpan pada Universitas Muhammadiyah di Padang Panjang yang saat ini telah menjadi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Untuk pembahasan tentang Muhammadiyah, peneliti juga sudah melacak melalui *Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië* dan sumber sejaman yang tersimpan pada koran-koran atau majalah di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Sumber kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber lisan yang diperoleh datanya melalui wawancara mendalam kepada agensi atau pelaku sejarah yang terlibat atau hidup sejaman dalam dinamika Universitas Muhammadiyah pertama di Padang Panjang. Untuk memverifikasi sumber tertulis diperlukan wawancara mendalam terhadap pelaku sejarah seperti Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Padang, Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Padang Panjang serta dewan guru Perguruan Kauman Padang Panjang serta tokoh Pimpinan Pusat Muhammadiyah lainnya untuk memperkuat paradigma penelitian ini dan disesuaikan dengan kebutuhan data penelitian.

1.7 Landasan Teoritis

Landasan teoritis dalam penelitian ini bertumpu pada dua pendekatan utama, yakni teori strukturasi Anthony Giddens dan teori konsensus yang diusung oleh Talcott Parsons dan Jurgen Habermas. Kedua pendekatan ini digunakan secara komplementer untuk menganalisis hubungan antara struktur sosial, agensi individu, serta dinamika kesepakatan normatif dalam transisi dan pelebagaan Universitas Muhammadiyah di Padang Panjang.

1.7.1 Teori Strukturasi Anthony Giddens

Anthony Giddens merupakan salah satu pemikir sosiologi terkemuka abad 20 yang memperkenalkan teori strukturasi sebagai jawaban atas dikotomi klasik antara “struktur” dan “agensi”. Dalam *The Constitution of Society* (1984), Giddens mengemukakan bahwa struktur sosial tidak dapat dipisahkan dari tindakan sosial karena keduanya bersifat dualistik dan saling membentuk. Struktur tidak hanya membatasi tindakan, tetapi juga menjadi media yang memungkinkan tindakan tersebut berlangsung. Dalam istilah Giddens, manusia adalah "agens aktif" yang mereproduksi struktur melalui praktik sosial sehari-hari, sedangkan struktur merupakan "aturan dan sumber daya" yang dimobilisasi oleh agen sosial dalam praktik mereka.⁶⁵

Tiga konsep utama dalam teori strukturasi Giddens yaitu *duality of structure*, *time-space distanciation*, dan *reflexivity* menjadi instrumen teoritis penting dalam membaca sejarah institusional seperti pendirian Universitas Muhammadiyah di Padang Panjang. Dualitas struktur menjelaskan bahwa tindakan para tokoh Muhammadiyah tidak dapat dipahami hanya sebagai hasil dari tekanan struktur, tetapi juga sebagai wujud dari agensi reflektif yang memanfaatkan sumber daya dan menciptakan perubahan kelembagaan. Time-space distanciation menggambarkan bagaimana ide-ide modernisasi pendidikan Islam menempuh lintasan geografis dan historis dari pusat Muhammadiyah di Jawa hingga ke Minangkabau. Sedangkan reflexivity memberi perhatian pada kapasitas aktor untuk secara sadar merevisi tindakan mereka dalam merespons dinamika sosial yang berubah.

Dengan demikian, teori strukturasi digunakan untuk mengungkap bagaimana tokoh-tokoh Muhammadiyah di Padang Panjang, melalui refleksi, adaptasi, dan inovasi, membentuk serta mengubah struktur pendidikan lokal dalam lintasan sejarah yang panjang. Lembaga pendidikan tinggi seperti Fakultas Falsafah dan Hukum tidak semata-mata muncul dari kehendak pusat organisasi, tetapi merupakan hasil dari negosiasi antara struktur organisasi, budaya lokal, dan agensi para pelaku sejarah.

⁶⁵ Anthony Giddens. 1984. *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. Berkeley: University of California Press, hlm. 25.

1.7.2 Teori Konsensus Talcott Parsons dan Jurgen Habermas

Talcott Parsons, sebagai arsitek teori fungsionalisme struktural, menjelaskan bahwa keteraturan sosial dapat tercapai karena adanya konsensus normatif, yaitu kesepakatan kolektif atas nilai-nilai dasar yang mengikat sistem sosial. Dalam karyanya *The Social System* (1951), Parsons menyatakan bahwa lembaga-lembaga sosial seperti pendidikan, agama, dan keluarga menjalankan fungsi integratif dalam sistem sosial. Ia merumuskan empat fungsi imperatif sistemik yang dikenal sebagai AGIL (*Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency*), yang dapat dijadikan alat untuk menganalisis bagaimana institusi seperti Universitas Muhammadiyah berfungsi menjaga stabilitas sosial dan reproduksi nilai-nilai modernitas Islam di tengah perubahan zaman.⁶⁶

Dalam konteks ini, pendirian lembaga pendidikan tinggi oleh Muhammadiyah di Padang Panjang dapat dibaca sebagai bentuk pemenuhan fungsi integratif masyarakat Islam modernis Minangkabau. Fakultas Falsafah dan Hukum Muhammadiyah, misalnya, bukan hanya sebagai institusi pendidikan, tetapi sebagai sarana pelestarian identitas, integrasi sosial antar elite Islam, dan penjaga nilai normatif Muhammadiyah.

Sementara itu, Jurgen Habermas menawarkan kerangka teoritis yang lebih kritis melalui *Theory of Communicative Action* (1984). Ia memandang bahwa konsensus tidak cukup dijelaskan hanya melalui keteraturan fungsional, tetapi juga harus dipahami sebagai hasil dari praktik komunikasi rasional yang bebas dari dominasi. Dalam masyarakat modern, menurut Habermas, ruang publik menjadi arena tempat berlangsungnya diskursus yang ideal, di mana aktor-aktor sosial menggunakan argumen, bukan kekuasaan, untuk membangun kesepakatan dan legitimasi.⁶⁷

Dalam penelitian ini, pendekatan Habermas digunakan untuk menelaah bagaimana diskursus internal dalam tubuh Muhammadiyah, baik di tingkat lokal maupun pusat menjadi arena pembentukan kehendak kolektif dalam membangun lembaga pendidikan tinggi. Proses-proses deliberatif, musyawarah, dan negosiasi

⁶⁶ Talcott Parsons. 1951. *The Social System*. New York: The Free Press, hlm. 27-44.

⁶⁷ Jurgen Habermas. 1984. *The Theory of Communicative Action*. Boston: Beacon Press, hlm. 86-101.

yang terjadi antara tokoh Muhammadiyah, masyarakat lokal, dan otoritas pemerintah mencerminkan upaya untuk menciptakan konsensus rasional sebagai dasar legitimasi kelembagaan.

Gabungan antara pendekatan struktural-fungsional Parsons dan pendekatan komunikasi rasional Habermas memberikan kerangka teoritis yang kokoh untuk menelaah konsensus institusional. Dengan itu, dinamika pembentukan Universitas Muhammadiyah di Padang Panjang dapat dipahami sebagai hasil interaksi antara sistem nilai bersama dan praktik komunikasi yang membentuk struktur sosial baru.

Lambannya proses transisi ini menandakan bahwa transformasi institusi pendidikan tidak semata-mata ditentukan oleh faktor administratif atau teknokratis. Terdapat dinamika kompleks yang melibatkan relasi kuasa, struktur sosial, agensi tokoh-tokoh Muhammadiyah lokal, dan konteks politik nasional. Dalam pandangan Anthony Giddens, perubahan institusional seperti ini merupakan hasil dari dialektika antara struktur dan agensi.⁶⁸ Struktur dalam hal ini mencakup norma organisasi, jejaring sosial, dan tradisi intelektual, sementara agensi mewakili kapasitas individu dan kolektif untuk bertindak dan menciptakan perubahan. Proses ini berlangsung secara simultan dan saling mereproduksi.

Selain itu, transformasi kelembagaan dalam tubuh Muhammadiyah juga tidak dapat dilepaskan dari proses konsensus sosial. Dalam kerangka teori Talcott Parsons, setiap institusi memerlukan kesepakatan normatif sebagai landasan keberlanjutan.⁶⁹ Sementara itu, Jurgen Habermas menekankan pentingnya rasionalitas komunikatif sebagai basis dari konsensus, yakni melalui proses diskursif yang terbuka, rasional, dan inklusif.⁷⁰ Dalam konteks Padang Panjang, konsensus tidak terbentuk secara otomatis, tetapi melalui interaksi yang panjang antara elite Muhammadiyah, masyarakat lokal, dan aktor-aktor pendidikan lainnya. Konsensus ini mencakup dimensi nilai, identitas organisasi, serta orientasi masa depan pendidikan Islam di Sumatera Barat.

⁶⁸ Anthony Giddens. 1984. *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. Berkeley: University of California Press, hlm. 28.

⁶⁹ Talcott Parsons. 1951. *The Social System*. New York: The Free Press, hlm. 25-36.

⁷⁰ Jurgen Habermas. 1984. *The Theory of Communicative Action*. Boston: Beacon Press, hlm. 88.

Dengan menggabungkan teori Giddens, Parsons, dan Habermas, penelitian ini dapat menjelaskan secara holistik bagaimana interaksi antara struktur sosial, agensi individu, dan komunikasi rasional membentuk dinamika transisi kelembagaan Universitas Muhammadiyah di Padang Panjang.

1.8 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis dalam lima bab utama yang membentuk alur berpikir historis dan analitis tentang proses transisi dan konsensus Universitas Muhammadiyah di Padang Panjang antara tahun 1955 hingga 1985. Adapun sistematika penulisan disertasi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini memuat uraian tentang Latar Belakang Penelitian, Pendidikan Padang Panjang era Kolonial, Munculnya Sekolah atas Inisiasi Bumiputera, Masuknya Muhammadiyah dan Ide Pembabaruan, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup Penelitian, Tinjauan Pustaka, Studi Sejarah Pemikiran Muhammadiyah dan Pendidikan Tinggi, Studi Transisi Institusional dan Agensi dalam Sejarah Sosial, Metodologi Penelitian, Pendekatan Historis, Sumber Sejarah, Landasan Teoritis, Teori Strukturasi Anthony Giddens, Teori Konsensus Talcott Parsons dan Jurgen Habermas dan Sistematika Penulisan.

Bab II Padang Panjang sebagai Pusat Pembaruan Pendidikan Islam di Minangkabau 1905-1925. Bab ini menjelaskan Kondisi Sosial dan Budaya Padang Panjang Awal Abad 20, Dualisme Pendidikan Kolonial di Ranah Minangkabau, Reformasi Pendidikan Islam: dari Surau ke Sekolah, Gerakan Sekolah Islam Pembaru, Adabiyah School, Thawalib Padang Panjang Diniyah School Padang Panjang, Tokoh Utama Pembaruan Minangkabau Syekh M. Jamil Jambek, Dr. Abdullah Ahmad, Dr. H. Abdul Karim Amrullah dan Respon Masyarakat Padang Panjang terhadap Sekolah Pembaruan.

Bab III Akar Organisasi dan Embrio Perguruan Muhammadiyah di Padang Panjang 1925-1935. Bab ini menganalisis Relasi Muhammadiyah dan Budaya Minangkabau, Kedatangan Muhammadiyah di Padang Panjang, Pergulatan Identitas: Islam Modernis dan Tradisionalis, Figur Sentral Haji Rasul, Buya Hamka, Jaringan Pembaru Muhammadiyah, dan Embrio Perguruan Muhammadiyah Tablig School dan Kuliyatul Muballighien.

Bab IV Transisi Perguruan Muhammadiyah: Dari Gagasan ke Realisasi 1935-1985. Bab ini membahas Inisiasi Perguruan Kauman: Tablig School dan Kulliyatul Muballighien, Kulliyatul Muballighat dan Kesetaraan Gender dalam Pendidikan, Fragmentasi Kepemimpinan dan Perbedaan Arah, Strukturasi Sosial: Agensi, Otoritas, dan Nilai-nilai Organisasi, dan Dinamika Periode 1935-1955: Konflik, Adaptasi, dan Reformulasi Tujuan.

Bab V Dinamika Konsensus Universitas Muhammadiyah di Padang Panjang 1955-1985. Bab ini mengulas Fase Konsensus: Penyatuan Visi dan Kepemimpinan, Dialog dan Negosiasi Sosial antar Struktur Muhammadiyah, Pendirian Fakultas Falsafah dan Hukum 1955, Dinamika setelah Peristiwa PRRI, Pendirian Akademi dan Fakultas: Kulliyatul, Adab, Syari'ah, Niaga, Konsensus sebagai Produk Strukturasi: Narasi, Kompromi, dan Koalisi Sosial. Analisis akan difokuskan pada aspek konsensus yang berlangsung dalam rentang waktu 1955-1985.

Bab VI Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh temuan penelitian, refleksi teoritis, serta rekomendasi yang dapat dijadikan rujukan bagi pengembangan studi kelembagaan pendidikan Islam modern di Indonesia

Dengan sistematika ini, diharapkan disertasi mampu menyajikan narasi historis yang koheren serta analisis teoritis yang mendalam terhadap proses transisi dan konsensus dalam konteks sejarah kelembagaan pendidikan tinggi Islam Muhammadiyah di Padang Panjang.

BAB II

PADANG PANJANG SEBAGAI PUSAT PEMBARUAN PENDIDIKAN ISLAM DI MINANGKABAU 1925-1935

2.1 Kondisi Sosial dan Budaya Padang Panjang Awal Abad 20

Sub bab ini menguraikan kondisi sosial dan budaya Padang Panjang pada awal abad 20 sebagai konteks penting dalam memahami proses pembaruan pendidikan Islam di Minangkabau. Padang Panjang, sebagai salah satu kota kecil yang terletak di jalur strategis antara Bukittinggi dan Padang, menjadi pusat interaksi sosial, ekonomi, dan budaya yang berkembang pesat.

Pada awal abad 20, masyarakat Padang Panjang hidup dalam struktur sosial yang sangat dipengaruhi oleh sistem matrilineal Minangkabau. Sistem ini mengatur kepemilikan tanah, garis keturunan, dan hak waris yang diwariskan melalui pihak ibu.⁷¹ Struktur kekerabatan matrilineal menjadi fondasi sosial yang kokoh, di mana peran mamak (paman dari pihak ibu) memiliki posisi penting dalam pengambilan keputusan keluarga.

Selain sistem kekerabatan matrilineal, prinsip *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah* menjadi norma fundamental yang mengatur kehidupan sosial masyarakat Minangkabau, termasuk di Padang Panjang.⁷² Sinergi antara adat dan syariat Islam menciptakan pola kehidupan yang menghormati tradisi lokal, tetapi tetap berlandaskan ajaran agama. Namun, keseimbangan antara adat dan syarak ini

⁷¹ Christine Dobbin. 1983. *Islamic Revivalism in a Changing Peasant Economy: Central Sumatra, 1784-1847*. London: Curzon Press, hlm. 185. Orang Minangkabau tumbuh sebagai kelompok etnis yang memiliki kecenderungan kuat untuk hidup berkelompok dalam ragam bentuk ikatan sosial. Ikatan yang paling utama dan mendasar adalah kekerabatan sedarah melalui garis keturunan ibu (matrilineal). Struktur kekerabatan ini bersifat hierarkis, mulai dari satuan terkecil hingga melebar menjadi satu kesatuan sosial yang lebih besar dan kompleks. Keseluruhan struktur tersebut membentuk suatu sistem yang utuh, bulat, dan padu.

⁷² Taufik Abdullah. 1971. *Adat dan Islam: dalam Sejarah Minangkabau*. Jakarta: Pustaka Grafitipers, hlm. 56-58. Jika ditelusuri lebih dalam, struktur sosial ini dapat diibaratkan seperti permukaan telaga yang bening dan tenang, lalu dijatuhi suatu benda hingga menimbulkan riak-riak kecil yang merambat menjadi gelombang yang lebih besar. Selain ikatan kekerabatan berdasarkan garis nasab (nasabiyah), masyarakat Minangkabau juga hidup dalam kelompok-kelompok berdasarkan wilayah pemukiman, seperti taratak, dusun, korong, koto, dan nagari.

mulai mengalami tantangan seiring dengan masuknya pengaruh kolonial dan modernisasi.

Kebijakan Politik Etis yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada awal abad 20 membawa dampak signifikan bagi Padang Panjang. Pendirian sekolah-sekolah pemerintah seperti Hollandsch-Inlandsche School (HIS) dan Sekolah Guru menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk mengakses pendidikan modern.⁷³ Pendidikan Barat membuka peluang mobilitas sosial bagi generasi muda, tetapi sekaligus memunculkan ketegangan antara pendidikan Islam tradisional yang berbasis surau dengan pendidikan kolonial yang berorientasi sekularisasi.

Pendidikan di surau pada masa ini tetap menjadi pusat pembelajaran utama bagi masyarakat. Di surau, generasi muda dididik dalam ilmu agama, pembacaan Al-Qur'an, dan kitab-kitab klasik.⁷⁴ Ulama-ulama lokal memainkan peran sentral sebagai pemimpin pendidikan dan sosial. Namun, terjadi pergeseran penting ketika sebagian ulama mulai mempertanyakan efektivitas metode pendidikan di surau yang dinilai ketinggalan zaman dan kurang sistematis.

Inspirasi pembaruan mulai muncul melalui pengaruh pemikiran ulama Minangkabau yang belajar di Timur Tengah, seperti Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi.⁷⁵ Melalui karya-karyanya dan murid-muridnya yang kembali ke tanah air, Syekh Ahmad Khatib mengkritik praktik keagamaan yang penuh taklid

⁷³ Sartono Kartodirdjo. 1987. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900*. Jakarta: Gramedia, hlm. 209. Dorongan kuat untuk merantau ini, dalam perspektif struktur sosial Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, didasari oleh kenyataan bahwa laki-laki tidak memiliki hak milik atas harta benda, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Hak kepemilikan atas tanah, sawah, ladang, kebun, hewan ternak, serta alat produksi seperti pedati dan gerobak, secara geneologis merupakan milik kaum dan perempuan sebagai pewaris garis ibu. Laki-laki hanya memiliki hak pakai dan hak pelihara, dan itu pun harus melalui persetujuan serta musyawarah dengan kaum, termasuk perempuan yang menjadi representasi struktur matrilineal.

⁷⁴ Hamka, 1982. *Ayahku*. Jakarta: Umminda, hlm. 32. Dari perspektif sosial keagamaan, komunitas perantau Minang memiliki kecenderungan tajdid (pembaharuan) dalam keberislaman mereka. Fakta ini dapat ditelusuri melalui tumbuh suburnya gerakan Muhammadiyah di kalangan masyarakat Minangkabau di berbagai daerah. Hal ini tidak terlepas dari bekal budaya dan spiritual dari kampung halaman yang menjadikan mereka lebih responsif, proaktif, dan inovatif dalam mengembangkan cabang, ranting, serta amal usaha Muhammadiyah, organisasi yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada 18 November 1912.

⁷⁵ Deliar Noer, 1987. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES, hlm. 45.

dan mendorong ijtihad serta pemahaman agama yang lebih rasional. Kritik ini menjadi fondasi bagi lahirnya gerakan pembaruan Islam di Minangkabau.

Kondisi sosial Padang Panjang juga memperlihatkan stratifikasi sosial yang mulai berubah. Kaum adat, kaum ulama, dan kelompok pedagang memainkan peran penting dalam struktur sosial. Kelompok pedagang yang mendapatkan akses lebih luas ke pendidikan Barat mulai menempati posisi strategis dalam ekonomi dan pemerintahan lokal.⁷⁶ Sementara itu, kaum muda terpelajar mulai menantang dominasi kaum tua yang mempertahankan tradisi. Selain itu, kehidupan budaya di Padang Panjang pada masa ini menunjukkan perkembangan yang dinamis. Kesenian tradisional seperti randai, dendang, dan silek (silat) tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga menjadi media penyebaran nilai-nilai sosial dan keagamaan.⁷⁷ Tradisi lisan seperti pantun dan syair digunakan untuk menyampaikan pesan moral dan dakwah Islam secara efektif di tengah masyarakat.

Ketegangan antara kaum tua dan kaum muda semakin terasa dengan munculnya gerakan modernis Islam. Kaum muda yang terinspirasi oleh pembaruan Islam di Timur Tengah mendorong pentingnya pendidikan formal, penguatan ekonomi umat, dan penerapan pemikiran rasional dalam kehidupan beragama.⁷⁸ Di sisi lain, kaum tua menganggap bahwa perubahan tersebut mengancam tatanan sosial yang telah mapan dan dapat merusak harmoni antara adat dan agama.

Arsip-arsip internal Muhammadiyah tentang Padang Panjang pada periode ini mencatat adanya peningkatan aktivitas keagamaan, pendidikan, dan perdagangan di kota ini.⁷⁹ Kehadiran Padang Panjang sebagai simpul pergerakan sosial dan pendidikan menjadikannya pusat pembaruan Islam yang penting di Sumatera Barat. Kondisi ekonomi masyarakat Padang Panjang pada awal abad 20 sebagian besar masih berbasis pada pertanian dan perdagangan lokal. Namun, perkembangan jalur

⁷⁶ Radjab, Mohammad. 1964. *Perang Paderi di Sumatera Barat (1803-1838)*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 245.

⁷⁷ Gusti Asnan. 2007. *Memikir Ulang Regionalisme: Sumatera Barat tahun 1950-an*. Padang: UNP Press, hlm. 15.

⁷⁸ Alfian. 1989. *Muhammadiyah: The Political Behavior of a Muslim Modernist Organization under Dutch Colonialism*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 100-102.

⁷⁹ Arsip Muhammadiyah Sumatera Barat. *Amal Bakti Muhammadiyah Sumatera Barat 1925-1965*.

kereta api meningkatkan akses ke pasar yang lebih luas, memungkinkan terjadinya pertukaran barang dan ide dengan lebih cepat.⁸⁰ Ekspansi ekonomi ini mendorong terjadinya mobilitas sosial yang lebih terbuka bagi masyarakat Minangkabau.

Kondisi sosial dan budaya Padang Panjang juga diperkaya oleh hubungan interkomunal yang relatif harmonis antara Muslim dan kelompok etnis lainnya, seperti Tionghoa dan Batak. Interaksi ekonomi dan sosial antar komunitas ini berlangsung dalam kerangka yang saling menguntungkan meskipun tetap didominasi oleh identitas Islam Minangkabau yang kuat.

Selanjutnya, dalam konteks sejarah pembaruan Islam di Nusantara, tidak dapat disangkal bahwa Minangkabau telah memosisikan dirinya sebagai salah satu pusat ide, penginspirasi, dan penyemangat utama dari gerakan tajdid Islam yang kemudian bertumbuh secara signifikan melalui Muhammadiyah, terutama di tanah Jawa. Satu catatan penting lainnya ialah bahwa dengan sistem sosial dan budaya perantauannya, masyarakat Minangkabau telah secara gigih menjadikan Muhammadiyah yang pada awalnya berakar di Jawa dan Minang sebagai gerakan nasional. Peran Minangkabau⁸¹ tidak hanya menapaki jalan mulus, tetapi juga menyusuri medan berat penuh rintangan. Dengan peluh dan perjuangan, mereka berhasil menembus batas dan membuka jalan bagi Muhammadiyah sebagai gerakan pembaruan Islam yang kokoh dan berpengaruh di tingkat nasional. Tinjauan menarik diajukan oleh sosiolog Mochtar Naim yang menyatakan bahwa,

kebesaran Muhammadiyah pada masa lampau sangat ditentukan oleh kontribusi para pedagang Minang yang independen, mandiri, wirausaha, kritis, dan vokal terhadap isu-isu internal maupun eksternal. Sebaliknya, kondisi Muhammadiyah kontemporer ia ibaratkan seperti “gajah tidur” tubuh besar namun minim gerak dan suara. Menurutny, hal ini terjadi karena dominasi pengelolaan oleh kalangan birokrat, politisi, dan mantan pejabat yang kurang

⁸⁰ Christine Dobbin, 1983, hlm. 190.

⁸¹ Transformasi organisasi Sendi Aman Tiang Selamat, sebuah lembaga Islam yang didirikan di Sungai Batang, Maninjau pada tahun 1924, menjadi bagian dari Persyarikatan Muhammadiyah pada tahun berikutnya, menandai tertancapnya akar ideologis Muhammadiyah di Ranah Minangkabau. Seiring waktu, muncul generasi tokoh pelanjut yang turut memperluas dan memperkuat eksistensi Muhammadiyah di daerah ini. Di antaranya adalah Buya H.A. Malik Ahmad, Buya H. Haroun al-Ma'any, Muhammad Yatim, Jamaan Saleh, Dt. Gunuang Hijau, Zainal Abidin Syu'ib (Buya ZAS), Hasan Ahmad, Idris Manaf, H. Amir Ali, Buya Radhin Rahman, Nur Anas Jamil, Shofwan Karim, dan R.B. K.H. Pahlawan Kayo.

merepresentasikan jiwa progresif dan pembaharu Muhammadiyah generasi awal.⁸²

Fenomena ini melahirkan identitas yang nyaris menyatu antara orang Minangkabau dan Muhammadiyah: seolah "orang Minang yang berdarah Muhammadiyah" atau "orang Muhammadiyah yang berdarah Minang" menjadi simbol dari perluasan paham Persyarikatan ke berbagai wilayah Nusantara. Dengan demikian, Padang Panjang pada awal abad 20 merupakan sebuah kota yang berada dalam pusaran perubahan sosial dan budaya. Di satu sisi, kota ini mempertahankan struktur adat dan pendidikan Islam tradisional, namun di sisi lain mulai terbuka terhadap pendidikan modern dan gagasan pembaruan Islam yang diusung oleh kaum muda. Kondisi ini menjadi fondasi penting bagi lahirnya lembaga-lembaga pendidikan pembaruan seperti Thawalib dan Diniyah School pada periode berikutnya.

2.2 Dualisme Pendidikan Kolonial di Minangkabau

Walaupun membangun dan melatih bangsa-bangsa di wilayah koloni merupakan tugas negara penjajah, seperti diargumentasikan tahun 1852, pemerintah Belanda mengabaikan tugas itu selama hampir tiga ratus tahun, khususnya di bidang pendidikan, yang merupakan sarana penting untuk membangun rakyat. Karena itu pendidikan juga berarti reorganisasi, dan prioritas utama adalah didirikannya sekolah-sekolah baru.⁸³ Sementara itu, C.Th. van Deventer, juru bicara Partai Etik dalam laporannya kepada pemerintah Belanda yang diumumkan tahun 1904, menyatakan kondisi pendidikan di Indonesia:

Di tahun 1900 kondisi pendidikan dan pengajaran berada di tingkat sangat rendah kendati Pasal 128 Peraturan Pemerintah tahun 1854 yang menyatakan bahwa Gubernur Jenderal harus mendirikan sekolah-sekolah bagi penduduk pribumi. Akan tetapi pasal ini tidak menarik perhatian para gubernur hingga paruh kedua abad kesembilan belas. Sekolah-sekolah yang ada di tahun 1900 hanya dimaksudkan untuk anak-anak bangsawan Indonesia. Anggaran pendidikan anak-

⁸² Mochtar Naim. 1979. *Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 34-36

⁸³ Alexandre von Arx. 1949. *L'évolution politique en Indonésie de 1900 à 1942*, Fribourg, n.p., hlm. 108.

anak Eropa sekitar dua setengah juta gulden sedangkan untuk anak-anak Indonesia hanya 1,1 juta gulden.⁸⁴

Sepanjang paruh kedua abad 19 di wilayah Minangkabau, perlu dicatat bahwa perkembangan sistem sekolah pemerintah di pedesaan sangatlah lamban. Kecurigaan masyarakat tentang maksud-maksud pemerintah kafir dan kenyataan bahwa pembangunan sekolah sangat tergantung pada prakarsa kepala-kepala nagari atau tuanku laras (kepala sub distrik) merupakan dua faktor yang menghambat. Akan tetapi pada awal tahun 1910-an dimulai introduksi Volksschool (Sekolah Rakyat), yang lamanya tiga tahun, dan langsung di bawah pengawasan pemerintah walaupun dibiayai oleh masing-masing masyarakat nagari, sistem sekolah ini berkembang dengan pesat. Pada tahun 1913 misalnya, di samping 203 sekolah dasar swasta bersubsidi, pemerintah mengawali pembangunan 111 Volksschool baru. Pada tahun 1915 jumlah sekolah ini meningkat menjadi 358.⁸⁵

Sebelum itu, selama paruh kedua abad 19, Pemerintah Belanda telah mengenalkan sistem sekolah baru yang dirancang terutama untuk memberantas buta huruf dan menyediakan sarana pelatihan pegawai negeri rendahan. Siswa-siswa sekolah ini kebanyakan terdiri atas anak-anak laras terpilih, atau bangsawan, yang kesetiaannya terhadap pemerintah Belanda tidak diragukan, sedangkan guru-gurunya terdiri dari orang Belanda yang dipekerjakan resmi oleh kantor pemerintah. Di ibu kota distrik pemerintah mendirikan sekolah lima tahun dengan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar. Di Padang dan Bukittinggi, dua kota terbesar di Minangkabau, didirikan sekolah-sekolah Eropa. Pada pertengahan tahun 1850-an didirikan Kweekschool atau sekolah pelatihan guru. Pada akhir abad 18, sekolah ini dikenal dengan nama Sekolah Raja (sekolah untuk penguasa), dan menjadi lembaga pendidikan terpenting. Sebagian besar tokoh pembaruan Minangkabau adalah lulusan sekolah ini.⁸⁶ Syekh Ahmad Khatib misalnya, pemrakarsa gerakan

⁸⁴ Alexandre von Arx. 1949, hlm. 108. Kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah Belanda, yaitu menyediakan sekolah untuk diikuti hanya oleh keluarga-keluarga bangsawan dan tidak oleh orang banyak diakui oleh Snouck Hurgronje dalam bukunya *La Politique Musulmane de la Hollande*, hlm. 120. Untuk informasi lebih lanjut mengenai "Politik Etik" lihat Dahlan Mansur et.al. 1970. *Sejarah Minangkabau*, Jakarta: Bharata, hlm. 175-176.

⁸⁵ Taufik Abdullah, *Modernization*, hlm. 215; Dahlan Mansur et.al. *Sejarah Minangkabau*, hlm. 188

⁸⁶ Menurut Snouck Hurgronje, Penasihat untuk Urusan Arab dan Pribumi pada Pemerintah Belanda, kebijakan pendidikan Belanda yang seharusnya diterapkan di Indonesia adalah menyebabkan murid-

pembaruan Islam Minangkabau pada abad kedua puluh, belajar di sekolah ini sebelum berangkat ke Mekah.

Pada 1873, Kweekschool dipermodern dengan pelajaran bahasa Belanda, tetapi pada tahun 1884, dengan alasan bahwa bahasa Belanda tidak ada gunanya bagi rakyat dan sulit diajarkan kepada mereka, pemerintah memutuskan untuk tidak menawarkannya lagi. Alasan sebenarnya ialah, dengan mengerti bahasa Belanda, mata rakyat, terutama rakyat Minangkabau akan terbuka, kecerdasan mereka otomatis akan berkembang, dan semua itu bisa membahayakan kedudukan pemerintah.⁸⁷ Baru setelah desakan keras para lulusan Kweekschool, pelajaran bahasa Belanda diperkenalkan kembali di sekolah, dan dipraktekkan secara penuh sejak tahun 1904.

Agar dapat menampung anak-anak yang telah menamatkan pelajarannya di Volksschool dan ingin melanjutkan pendidikan, pemerintah mendirikan Vervolgschool, sekolah lanjutan dengan program dua tahun; tetapi jumlahnya terlalu sedikit untuk dapat menampung 33.440 murid (40 persen terdiri dari anak perempuan). Dari 548 sekolah yang ada di tahun 1925, hanya ada sekitar 55 Vervolgschool dan 8 sekolah untuk anak perempuan (*Meisjesschool*), jumlah yang jauh dari memadai.⁸⁸ Akibatnya, banyak murid sekolah pemerintah yang memilih kembali ke kehidupan biasa di desa, sedangkan yang lain mendaftarkan pada sekolah-sekolah agama untuk anak perempuan, terutama sekolah Diniyah (sekolah sistem reformis Muslim) di Padang Panjang.

Nasib para lulusan Vervolgschool lebih parah daripada lulusan Volksschool. Sarana-sarana yang tidak memadai untuk menampung para lulusan Vervolgschool, yang juga disebut “sekolah kelas dua”, tampaknya lebih gawat. Mereka

murid Muslim tidak memegang kuat kepada kepercayaan-kepercayaan religious mereka, memungkinkan mereka "berpartisipasi dalam kebudayaan modern kami; kami tidak perlu menyuruh mereka masuk agama Kristen tetapi membuat sikap mereka lebih liberal terhadap sistem Islam (ajaran dan praktek-praktek)", lihat bukunya, *La Politique Musulmane de la Hollande*, hlm. 119.

⁸⁷ Kementerian Penerangan, op. cit, hlm. 777.

⁸⁸ Taufik Abdullah. 1970. *Schools and Politics: The Kaum Muda Movement in West Sumatra. 1927-1933*. Cornell University, hlm. 83-84. Untuk informasi lebih lanjut tentang sekolah-sekolah Belanda dan sekolah-sekolah untuk bumiputera di Sumatra, khususnya di Sumatra Barat (Minangkabau) lihat C. Lekkerkerker, *Land en Volk van Sumatra*, hlm. 176-182.

dimaksudkan menjadi pegawai negeri tingkat bawah, tetapi pemerintah tidak mampu memberikan pekerjaan bagi mereka atau menyediakan pendidikan tinggi. Sebenarnya mereka menjadi orang berpendidikan semi Barat. Mengikuti langkah yang diambil oleh anak-anak perempuan, para lulusan "sekolah kelas dua" mendaftarkan diri untuk belajar di Sumatra Thawalib, sekolah agama reformis baru untuk anak laki-laki yang didirikan oleh Dr. H. Abdul Karim Amrullah tahun 1918. Pada tahun 1928 mayoritas siswa-siswa Sumatra Thawalib terdiri atas lulusan "sekolah kelas dua" itu.

Hindia-Belanda pernah disebut sebagai *beambtenstaat*.⁸⁹ Artinya Sebuah negara pegawai, di mana terdapat jaringan birokrasi pemerintah yang sangat luas dan rumit. Karena birokrasi di sini merupakan alat instrumen yang sangat penting bagi pelaksanaan tuntutan-tuntutan kolonial, maka hampir boleh dikatakan, bahwa semua kebijaksanaan diarahkan bagi kepentingan Belanda. Selama abad 19 dan lebih nyata lagi sejak awal kolonial yang sempurna, sedang sebahagian besar tenaga pegawainya didukung oleh orang-orang bumiputera.⁹⁰

Sebab kekuasaan pemerintah kolonial berarti menjalankan administrasi, yang dalam arti teknis, rasional dan termasuk bidang tulis-menulis beserta perangkat upacara-upacaranya, maka yang diperlukan di sini ialah tenaga pegawai yang terdidik dalam ukurannya waktu itu, dan sedikit banyak juga dapat dipercaya. Pendidikan, karenanya, adalah merupakan bagian yang sangat penting dari rangkaian kebijaksanaan pemerintah kolonial untuk mempertahankan dan memperkuat kekuasaannya.

Di dalam sejarah kebijakan pendidikan kolonial⁹¹ di Hindia Belanda, orang dapat mengenal berbagai jenis dan tingkatan sekolah: baik yang langsung didirikan

⁸⁹ H.A. Sutherland. 1976. "*De Javanese Priyayi en het Nederlandse Bestuur*" dalam Symposium 3, hlm. 203.

⁹⁰ G. J. Resink. 1968. *Indonesia's History Between the Myths*. The Hague: Martinus Nijhoff, hlm. 103-105. Agaknya memang benar, bahwa roda pemerintahan yang dikendalikan dari Batavia ini. senantiasa berputar seperti "mesin-mesin pabrik yang siap semaksimal hasilnya" dengan begitu pemerintah kolonial boleh mengharap, bahwa daerah koloni harus dapat memberikan keuntungan bagi perbendaharaan negara. Lihat C.J Hasselman. 1901. "Het Palladium. Een Koloniaal Historische Dwaling", *De Gids*. IV, hlm. 205.

⁹¹ Sistem pendidikan kolonial, seperti dikemukakan oleh seorang penulis, memiliki beberapa karakteristik tertentu. Salah satu cirinya yang paling menonjol ialah, bahwa sekolah sebagai lembaga pendidikan hampir selalu mencerminkan kekuasaan dan kepentingan pihak penjajah. Di dalam

oleh pemerintah, maupun oleh para misionaris, atau pihak swasta⁹² Sekolah-sekolah itu cenderung mencerminkan kekuatan dan kepentingan pemerintah kolonial. Walaupun sistem pendidikan yang digalakkan sedikit banyak memberi peluang bagi penduduk setempat tentu saja sebagai hasil interaksi antara pembuat kebijakan dan penduduk bumiputera. sekolah-sekolah terutama bertujuan untuk memenuhi tuntutan pemerintah kolonial sendiri. Yang paling penting dalam birokrasi pemerintahan, atau menjadi pegawai pada perusahaan-perusahaan industri swasta dan berdagang.

Di bawah kolonialisme, hubungan pendidikan dan masyarakat adalah sesuatu yang kompleks. Sementara kontrol pendidikan dan campur tangan pemerintah berada di tangan orang-orang Eropa, aspirasi-aspirasi yang berkembang dalam masyarakat biasanya sengaja dilupakan. Sekolah sebagai lembaga pendidikan dikembangkan menurut model Barat, baik organisasi, maupun kurikulum "ia merupakan hasil manipulasi kebudayaan yang berakar dari negeri asal si penjajah, dan karenanya bukan hasil pertumbuhan lokal".⁹³

Antara pemerintah dan masyarakat terdapat perbedaan pandangan dalam cara mereka melihat kehadiran lembaga Pendidikan itu. Tetapi di kalangan masyarakat setempat sendiri bahkan juga muncul berbagai pandangan, dengan alasannya sendiri-sendiri. Sementara suatu kelompok sosial tertentu melihat kehadiran sekolah-sekolah itu sebagai yang menguntungkan, dan karenanya mereka dapat menerimanya dengan baik, yang lain sebaliknya menolak atau bersikap apatis. Bagaimanapun, keanekaragaman pandangan ini sekaligus menunjukkan, bahwa dalam situasi kolonial, masyarakat tidak lagi bebas menentukan arah bagi pendidikan mereka, dan untuk itu hanya ada dua pilihan, yaitu menerima atau menolak apa yang ditawarkan pemerintah kolonial, atau mengambil pilihan lain menurut cara-cara yang mereka anggap lebih aman.

tulisan ini istilah pendidikan kolonial kadang-kadang juga disebut dengan 'sekolah sekuler' atau 'Pendidikan Barat' untuk menunjuk pada konsep yang sama. Konsep-konsep pendidikan kolonial beserta karakteristiknya dapat ditemukan terutama pada Bab Pendahuluan dalam Philip G. Altbach and Gail P. Kelly. 1978. *Education and Colonialisme*. New York: Longman, hlm. 1-47.

⁹² Tentang sejarah pendidikan di Hindia Belanda lihat I.J. Burgmans. 1938. *Geschiedenis van het Onderwijs in Nederlandsch-Indie*. Batavia: Wolters.

⁹³ Mestika Zeid, *Kolonialisme Pendidikan*, hlm. 2.

Segera sesudah menaklukkan benteng Paderi yang terakhir (1837), dan berkat jasa-jasa perjuangannya. A.V. Michiels, sang penakluk atau Napoleon Kecil untuk Sumatera.⁹⁴ Diangkat sebagai gubernur Sumatra's Westkust yang pertama. Sebagai bagian dari programnya yang utama kemudian adalah membangun suatu administrasi kolonial yang bersungguh-sungguh dan jika situasi mengizinkan juga menerapkan kebijaksanaan Sistem Tanam Paksa Kopi.

Tidak lama kemudian Sumatra Barat telah dibaginya ke dalam tiga unit administratif: Residensi Padangsche Benedenlanden, Residensi Padangsche Bovenlanden, dan akhirnya yang ketiga Residen Tapanuli.⁹⁵ Gubernur adalah orang pertama dalam struktur ini. Di bawahnya dan yang bertanggung jawab kepadanya terdapat Residen dan pembantunya Asisten Residen. Dan dibawahnya lagi adalah Controleur. Yang terakhir ini menduduki posisi kunci yang unik. Kecuali sebagai titik temu antara birokrasi orang Eropa (kulit putih), yaitu *Binnenlandschbestuur* dan birokrasi bumi putera sebagai "korp" pegawai pemerintah yang sering disebut *Indlandsche Bestuur*. Controleur sekaligus juga menjadi penasihat dan sedikit banyak mengawasi gerak-gerik pegawai bumiputera.

Beberapa kesatuan administratif dalam birokrasi bumiputera telah diciptakan sedemikian rupa. Susunan ini pada dasarnya, meskipun telah mengalami sedikit perubahan, tetap mengikut konsep pemerintahan lokal sebagaimana yang telah disusun oleh de Stuers sebelumnya.⁹⁶ Dalam hal ini Laras merupakan kesatuan administratif tertinggi, yang dikepalai oleh seorang Tuanku Laras. Di bawahnya terdapat negeri yang dikepalai oleh seorang Kepala Negeri atau lebih sering disebut Penghulu Kepala, di mana ia membawahi sejumlah penghulu suku, yang mewakili setiap suku yang ada dalam suatu negeri.⁹⁷

⁹⁴ Paul van 't Veer. 1979. *Het Leven van Multatuli*. Amsterdam: Uitgeverij De Arbeiderspers, hlm. 128.

⁹⁵ Residensi Tapanuli baru terbentuk kemudian pada tahun 1840-an di mana sebelumnya ada seorang 'kontrolir', yang ditempatkan di Natal. Tetapi pada 1906 Residensi sendiri, terpisah dari Sumatra's Westkust, lihat M. Joustra. 1926. *Batakspiegel*. Leiden: S.C. van Dusburg, hlm. 32.

⁹⁶ *Algemeen Rijksarchief* (ARA). "Rapport van den Generaal de Stuers", Verbaal, 23 Oktober 1826, No. 48.

⁹⁷ Dalam pandangan pemerintah, mereka ini adalah penyangga administrasi kolonial di tingkat bawah. Karena itu masing-masingnya mendapat gaji yang resmi: Seorang Kepala Laras mendapat gaji f. 30 per bulan sedang Penghulu Kepala f. 20 per bulan. Lihat E. B. Kielstra. 1888, "De

Sejak semula terbukti nyata, bahwa untuk melaksanakan rancangan-rancangan besar yang disusunnya, Michiels dihadapkan pada rintangan-rintangan, terutama dalam menarik pegawai kulit putih ke daerahnya. Berulangkah dia mengajukan keluhan ke Batavia, agar pemerintah pusat di sana mengirimkan tenaga personal bagi mengisi beberapa jabatan penting daerahnya.⁹⁸ Tetapi yang datang, jika pun ada, hanya satu atau dua klerk atau kommies; kadang-kadang malah tidak memenuhi syarat yang dimintanya. Dan karena berbagai alasan sebagian dari mereka ini segera menghilang lagi.⁹⁹

Betapa sulitnya usaha Michiels untuk mencoba menarik tenaga personal yang terlatih sesuai dengan keinginannya, sementara ekspansi ke daerah pedalaman Minangkabau belum dapat dikuasai sepenuhnya. Dalam jangka panjang dan merupakan tumpuan dari usaha pemerintah kolonial untuk membenahi masalah kekurangan tenaga pegawai yang berpendidikan adalah dengan mendirikan sekolah-sekolah.

Sampai pertengahan 1840-an, pengembangan sekolah-sekolah sekuler yang diusahakan pemerintah tidaklah menunjukkan kemajuan yang berarti. Kecuali ada dua buah di Padang,¹⁰⁰ tidak satu pun sekolah serupa dapat dibangun di kawasan pedalaman (Padangsche Bovenlanden). Suatu usaha yang lebih bersungguh-sungguh dan merupakan sukses pertama dari dalam rangka pengembangan sekolah-sekolah itu baru terjadi kemudian ketika Steinmetz, Residen Padangsche Bovenlanden mencoba mendorong berdirinya apa yang disebutnya sekolah nagari di Bukittinggi pada tahun 1843.¹⁰¹

Koffijkultuurter Sumatra's estkust", IG, X, hlm. 1458. Pada akhir masa pemerintahan Gubernur Michiels pada 1849, ada kira-kira 114 Laras dan 337 Penghulu Kepala yang bekerja dalam birokrasi pemerintah. Di samping itu terdapat lagi sejumlah besar pegawai yang ditempatkan pada jabatan-jabatan lainnya terutama sejak diterapkannya Sistem Tanam Paksa Kopi tahun 1847. Khusus mengenai tema ini lihat hasil penelitian Mestika Zeid. 1983. *Melayu Kopidaun: Eksploitasi Kolonial dalam Sistem Tanam Paksa Kopi di Minangkabau Sumatera Barat (1847-1908)*, Universitas Indonesia.

⁹⁸ Paul van 't Veer, 1979, hlm. 98.

⁹⁹ Paul van 't Veer, 1979, hlm. 98.

¹⁰⁰ Algemeen Rijksarchief (ARA). "*Rapport van den Gouverneur Van Swieten*". Verbaal 15 Juni 1852, No. 3.

¹⁰¹ RE. Steinmetz. 1924. "*Indlansch Onderwijs van Overheidswege in de Padangsche Bovenlanden voor 1850*", TBG, hlm. 303-320. Agak berlainan dengan sekolah-sekolah sekuler yang didirikan di

Pada tahun yang sama (1846) ada 75 orang tamatan sekolah ini yang kemudian ditempatkan sebagai tenaga administrative dalam birokrasi pemerintah, seperti klerks, dan yang diperbantukan pada kantor Laras, tetapi sebahagian juga menjadi personal pada sistem Tanam Paksa Kopi. Tawaran yang diajukan pemerintah melalui kesempatan kerja yang relatif baik, agaknya telah mendorong penduduk untuk memasuki sekolah-sekolah itu. sementara Minangkabau ketika itu memang mulai terikat ke dalam pengarahannya Sistem Tanam Paksa Kopi.¹⁰²

Sekolah-sekolah yang dikembangkan Steinmetz, bagaimana pun telah menjadi model bagi pengembangan sekolah-sekolah kolonial pada periode selanjutnya, sekurangnya sampai tahun 1870-an. Cirinya yang utama ialah, bahwa sekolah-sekolah didirikan atas kerjasama pemerintah lokal kulit putih dengan pejabat bumiputra setempat, di mana pihak yang pertama mendorong para kepala untuk merasa bertanggungjawab dalam pengadaan fasilitas belajar. Sebelum bangunan fisik dapat dipersiapkan, murid-murid biasanya mengambil tempat belajar pada gudang-gudang kopi pemerintah, atau di "Balai Adat" negeri setempat. Sedangkan penyediaan fasilitas lainnya seperti bangku, meja dan kursi, sekalipun masih dalam bentuk yang sangat sederhana sekali (dan lebih banyak terbuat dari bahan bambu), dikerjakan secara bergotong royong dengan penduduk setempat.¹⁰³

Pengadaan tenaga guru merupakan rintangan yang paling sukar dipecahkan, dan karena itu hanya ada satu atau dua orang yang kebetulan sudah mengenal pengetahuan tulis baca secara baik, atau melek huruf yang diperolehnya dari pengalaman sendiri. Biasanya mereka ini diambilkan dari pejabat-pejabat bumiputra yang bekerja sebagai Kepala Gudang (*Pakhuis Meester*), atau

Padang, sekolah yang dipelopori oleh Residen C.P.C. Steinmetz ini lebih bersifat otonom dan menerima murid dari kalangan masyarakat tanpa terlalu mempertimbangkan status atau posisi keluarganya dalam masyarakat. Sebab itu ketika sekolah ini baru saja dibuka cukup banyak yang datang mendaftarkan diri. Dalam tahun 1846, yakni tiga tahun setelah sekolah pertama dibuka di Bukittinggi, terdapat tidak kurang dari 11 buah sekolah yang didirikan; lima buah di antaranya terdapat di pusat-pusat pemerintahan di kawasan pedalaman, seperti di Bukittinggi, Batusangkar, Payakumbuh, Solok dan Sijunjung, sedang enam sekolah yang lain berada di daerah pelosok penghasil kopi, seperti di Maninjau, Bonjol, Sungai Puar, Buo, Singkarak dan Rao.

¹⁰² Sungguhpun sistem Tanam Paksa itu resminya baru berlaku sejak 1847, namun prakteknya sudah mulai berjalan beberapa tahun sebelumnya. Lihat Mestika Zeid, 1989, hlm. 6.

¹⁰³ Steinmetz, "Indlandsch Onderwijs. . .". hlm. 311.

sekretarisnya. Sedang gaji guru ini ditarik dari uang kas negari.¹⁰⁴ Hampir semua sekolah tidak pernah mengadakan pungutan uang sekolah, tetapi semua murid pada umumnya dibebankan membiayai sendiri perlengkapan sekolahnya, seperti pakaian dan lain-lain.

Kurikulum yang dikembangkan pada sekolah-sekolah ini pada prinsipnya masih sangat sederhana sekali. Selama tiga tahun masa belajar di sekolah-sekolah ini, murid-muridnya diajarkan beberapa mata pelajaran melalui empat tahap. Pada tahap pertama, murid-murid diajarkan pengetahuan membaca dan menulis, dan pada tahap kedua mulai dengan berhitung. Pada tahap ketiga dan keempat mata pelajaran ditambah dengan pengetahuan seperti, cara membuat surat, pembukuan yang sederhana, geografi dan pengetahuan berhitung dalam tingkat yang lebih rumit.¹⁰⁵

Semua mata pelajaran berlangsung dan disajikan dalam bahasa Melayu. Kecuali pada tahun pertama, di mana murid-murid masih dibiarkan menulis bahasa Melayu dalam alpabet Arab, pada tahun-tahun berikutnya mereka secara lambat laun diajarkan menulis bahasa Melayu dalam abjad Latin. Sejauh menggunakan bahasa Melayu, murid-murid sama sekali tidak mengalami kesulitan, terutama karena bahasa Minangkabau yang mereka pergunakan sehari-hari sangat dekat dengan Bahasa Melayu yang dipergunakan di Hindia Belanda ketika itu.¹⁰⁶

Dalam tahun 1850-an, usaha penyebaran sekolah-sekolah nagari semakin diperluas ke beberapa tempat di luar Padangsehe Bovenlanden. Terutama di kawasan pantai Barat dan sekitarnya (atau Padangsche Benedenlanden). Selain di Padang, yang sejak periode awal pendudukan Belanda di daerah ini (1819) setidaknya sudah ada dua buah sekolah yang didirikan, pada 1853 didirikan sebuah sekolah lagi. Juga di Pariaman (1854) dan di Air Bangis pada tahun yang sama. serta di pesisir selatan, Pelangi (1858), dan Asam Kumbang (1859).¹⁰⁷ Demikian juga di kawasan utara pedalaman, dengan kekecualian di Bonjol, di mana sekolah nagari sudah ada sejak tahun 1840-an, didirikan beberapa buah sekolah serupa

¹⁰⁴ Steinmetz, "Indlandsch Onderwijs. . .". hlm. 311.

¹⁰⁵ Steinmetz, "Indlandsch Onderwijs. . .". hlm. 206-209.

¹⁰⁶ Mestika Zeid, 1989, hlm. 7.

¹⁰⁷ Algemeen Rijksarchief (ARA). *Verbaal*, 16 November 1865, No. 45.

seperti di Lubuk Sikaping, Panti. Talu dan Rao. Pada dasawarsa yang sama sekolah-sekolah sudah menyebar ke hampir seluruh Sumatera Barat, termasuk ke Residensi Tapanuli.¹⁰⁸

Suatu perkembangan baru dalam sejarah pendidikan Barat di daerah ini ditandai dengan didirikannya sebuah sekolah guru. Normal School atau Kweekschool di Bukittinggi pada April 1856.¹⁰⁹ Sebagai akibat logis dari perluasan sekolah-sekolah nagari, adalah semakin meningkatnya kebutuhan tenaga guru. sedang pemerintah tidak mungkin untuk mendatangkannya dari luar.¹¹⁰ Akan tetapi hal itu juga berhubungan dengan perluasan geografis dan jabatan-jabatan baru dalam birokrasi pemerintah. Selama ini kriteria untuk menjadi pegawai pada dinas pemerintah, termasuk dinas Tanam Paksa Kopi tidak mempertimbangkan kecakapan dan pendidikan yang diperoleh. Pejabat-pejabat bumiputera, seperti juga dengan Kepala Gudang dan sekretarisnya, meskipun sebagian memiliki pengetahuan tulis-baca yang baik. sejak semula lebih banyak ditentukan berdasarkan sifat hubungan keluarganya dengan elit tradisional, atau mengutamakan mereka yang dekat hubungannya dengan rezim kolonial. Sebab itu, pengangkatan mereka adalah hasil pengaruh, kewibawaan status yang diwariskan.¹¹¹

Tahap awal dari pengembangan sekolah Normal School, lebih banyak mengikut model yang dikembangkan pada Normal School yang pertama di

¹⁰⁸ Sekolah-sekolah Barat di sini dikembangkan atas usaha misionaris Kristen, tetapi beberapa orang tenaga guru pada sekolah-sekolah rendahnya sejak awal mulanya juga datang dari Sumatera Barat (antara lain Si Laut dari Koto Gadang dan Haji Nawawi dari Natal), ketika Asisten Residen A.P Godon mendirikan sebuah sekolah rendah di Panyabungan pada 1853. Salah seorang muridnya bernama Sati, adik Sutan Kumala, kemudian dikirim melanjutkan sekolahnya ke Negeri Belanda pada tahun 1857. Ia adalah merupakan putra Batak yang pertama, yang dikirim ke Belanda yang kemudian dikenal dengan nama baru Willem Iskandar. Lihat Basyral Hamidi Harahap. 1979. *103 Tahun Wafatnya Willem Iskandar. Tokoh Pendidikan dan Sastrawan Indonesia*. Jakarta: Panitia Peringatan 103 Tahun Wafatnya Willem Iskandar.

¹⁰⁹ Herman. 1868. *Het Onderwys in Nederlandsch-Indie (Historisch Overzicht Sedert 1816)*, hlm. 476.

¹¹⁰ Herman. 1868, hlm. 476.

¹¹¹ Algemeen Rijksarchief (ARA). *Verbaal* 15 Juni 1852. Sekolah Normal School 1 adalah di Surakarta (1852), di Tanabato (1862) dan di Bandung (1866).

Surakarta.¹¹² Murid-murid yang diterima pada sekolah ini tidak perlu tamatan sekolah nagari, tetapi batasan umur paling kurang sudah harus mencapai 14 tahun. Selain itu mereka yang mendaftar pada sekolah ini juga dikenakan persyaratan, bahwa calon murid sudah harus memiliki pengetahuan siap sebelumnya seperti, membaca dan menulis Bahasa Melayu secukupnya, baik dalam alfabet Arab, maupun Latin, tetapi juga berhitung yang sederhana. Selama tiga tahun masa belajar di sekolah ini, murid-murid menerima berbagai macam mata-pelajaran: kecuali membaca dan menulis dalam bahasa Melayu (bahasa Belanda kemudian membuat surat, tetapi belum ada paedagogi).

Sebagai satu-satunya sekolah guru di Sumatera, Normal School Bukittinggi pada fase awalnya lebih banyak dikelola oleh penduduk bumiputera. Kepala sekolahnya yang pertama adalah Abdul Latif Sutan Nagari, seorang pegawai yang tidak memiliki latar belakang pendidikan keguruan, sementara Asisten Residen dan bawahannya tidak mengambil banyak bagian dalam pengembangannya. Karena itu, dalam usianya yang masih muda, sekolah ini tidak lebih dari sekolah dasar biasa. Tahun pertama sejak sekolah ini dibuka tidak lebih dari 10 orang murid yang mendaftarkan diri.¹¹³

Pemerintah bermaksud untuk membuatnya sebagai duplikat Kweekschool. tidak lebih dari 10 orang murid yang mendaftarkan diri. Pemerintah bermaksud untuk membuatnya sebagai duplikat Kweekschool Surakarta, tetapi alam ukurannya yang lebih kecil. Beberapa buku bacaan dan pelajaran yang dipakai di Surakarta, juga dipergunakan di Kweekschool di Bukittinggi. Namun karena berbagai kesukaran, seorang pejabat Belanda yang mengunjungi sekolah ini pada 1866, mendapat kesan yang mengecewakan. Selama 10 tahun berjalan, sekolah ini hanya mampu menamatkan 10 orang murid, dan itu pun tidak semuanya menjadi guru.¹¹⁴ Namun demikian, dalam tahun 1863 saja, guru-guru yang mengajar di 9 buah sekolah di kawasan Padangsche Bovenlanden, jika tidak semuanya tamat, pernah bersekolah pada Normal School.

¹¹² *Verslag van het Indlandsch Onderwijs in Sederlandsclh Indie*, 1866. Batavia: Landsdrukkerij, hlm. 2-4.

¹¹³ Mestika Zeid, 1989, hlm. 8.

¹¹⁴ *Verslag van het Indlandsch Onderwijs in Sederlandsclh Indie*, 1866. Batavia: Landsdrukkerij, hlm. 6-8.

Beberapa perubahan penting dalam kebijaksanaan pendidikan pemerintah kolonial baru nampak sejak tahun 1870-an, yakni bersamaan dengan perubahan-perubahan besar dalam kerangka politik kolonial yang ditandai dengan Era Liberal. Pertama, terjadinya perubahan secara bertahap dari sekolah-sekolah negeri yang otonom ke sekolah dasar yang langsung berada di bawah kontrol pemerintah. Campur tangan pemerintah kemudian bukan saja dari segi pembiayaan, tetapi juga organisasi dan kurikulum sekolah. Sebelum tahun 1870-an sekolah-sekolah nagari yang ada hampir sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah lokal dan penduduk setempat. Sekitar tahun 1860-an misalnya hanya beberapa sekolah saja, seperti di Padang, Pariaman, Tarusan dan Normal School di Bukittinggi yang mendapat bantuan biaya dari pemerintah pusat,¹¹⁵ sedang yang 26 buah lainnya hampir sepenuhnya bergantung pada usaha setempat.

Keterlibatan pemerintah dalam pengembangan sekolah juga terlihat sejak sekolah guru Normal School (Kweekschool) berubah nama menjadi Sekolah Raja pada 1872. Kecuali mendapat sokongan keuangan yang lebih besar, sekolah itu juga memberikan mata pelajaran yang lebih rumit dari yang sebelumnya. Kecuali beberapa mata pelajaran yang sudah diajarkan juga pada tahun-tahun sebelumnya, sejak itu ditambah dengan beberapa mata pelajaran baru seperti, paedagogi, geometri, menggambar, menyanyi dan beberapa pengetahuan keahlian, terutama mengenai teknik-teknik pertanian; sedang mata pelajaran bahasa Belanda termasuk mata pelajaran wajib.

Sekolah Raja Bukittinggi kemudian menjadi simbol dan kebanggaan penduduk di sekitar. Seorang pengamat Belanda menilai, bahwa Sekolah Raja, setidaknya sejak dua dasawarsa terakhir abad 19, kurang lebih menyamai sekolah-sekolah menengah di Negeri Belanda, baik dari segi bangunan fisiknya, maupun dari segi kurikulum yang diajarkan pada murid-muridnya.¹¹⁶

Bagi murid-muridnya disediakan asrama, dengan kamar-kamar tempat tinggalnya, lengkap dengan seorang pembantu yang siap melayani urusan

¹¹⁵ *Verslag van het Indlandsch Onderwijs in Sederlandsclh Indie*, 1866. Batavia: Landsdrukkerij, hlm. 71.

¹¹⁶ M. Buys. 1886. *Twee Jaren op Sumatra's Westkust*. Amsterdam: Akkeringan, hlm. 50-55.

keperluan sehari-hari. Mereka juga mendapat pengarahan dan bimbingan yang seksama, bukan saja dalam kegiatan-kegiatan di kelas, akan tetapi juga di luar sekolah. Di samping itu, juga terdapat beberapa orang guru kulit putih yang diperbantukan ke sekolah ini. Efek dari perlakuan istimewa ini jelas berlangsung dalam suasana seperti "diperbelandakan", baik dalam bahasa sehari-hari, maupun disiplin dan cara berpakaian mereka, tetapi diragukan apakah nilai-nilai baru yang mereka anut dimengerti sepenuhnya.¹¹⁷

Suatu perubahan penting lainnya dalam arah perkembangan pendidikan sejak akhir abad ke 19 di daerah ini ialah ketika pemerintah mencoba membagi sekolah dasar (bekas sekolah nagari yang sebelumnya) ke dalam dua kategori, yaitu Sekolah Kelas Satu (*Eerste Klasse Scholen*) untuk anak-anak para pejabat pemerintah dan bangsawan, dan Sekolah Kelas Dua untuk umum. Dilihat dari sudut pandangan pemerintah, kebgaksanaan ini merupakan suatu langkah maju, terutama untuk menanggulangi mereka yang tidak mampu melanjutkan sekolahnya sampai tamat selama masa lima tahun, kini dengan diadakan Sekolah Kelas Dua, mereka dapat menyelesaikan sekolahnya dalam tempo tiga tahun, dan kemudian dapat memanfaatkan untuk keperluan mencari kerja, atau mengajar di kampung. Tetapi pada kenyataannya dugaan ini berlainan dengan apa yang diharapkan pemerintah. Sampai awal abad 20, setidaknya menjelang diadakannya pembaharuan pendidikan setelah masa Politik Etis, gagasan mengenai Sekolah Kelas Satu tidak mendapat sambutan masyarakat. Anak-anak pejabat lokal jarang yang mau bersekolah di sana, dan mereka malah lebih senang memilih sekolah swasta di mana kegiatan belajar disajikan sepenuhnya dalam bahasa Melayu.¹¹⁸ Reaksi ini agak berbeda

¹¹⁷ M. Buys. 1886, hlm. 55.

¹¹⁸ Setidaknya ada dua macam sekolah swasta, yang pernah berkembang di Sumatera Barat abad 19. Pertama, sekolah-sekolah negeri yang tidak mau diambil alih menjadi sekolah pemerintah ketika diadakannya pembaharuan kebijakan pendidikan sejak 1871. Tidak banyak yang dikatakan sumber tentang perkembangan sekolah ini. tetapi jumlahnya setidaknya ada 11 buah antara tahun 1878-1898 dan 33 buah pada 1908. Algemeen Rijksarchief (ARA). Verbaal. 7 September 1910. No. 32. Yang kedua adalah sekolah-sekolah agama, atau madrasah yang tampil dalam bentuk 'sistem surau' yang mempelajari Al Quran dan Ilmu agama lainnya secara intensif, biasanya berada di bawah jaringan persekutuan tarekat. Dari suatu daftar yang tidak lengkap, tercatat 15 buah madrasah sampai pertengahan abad 19 dan itu sebahagian besar berada di pedalaman, A.W.P. Verkerk Pistorius. 1869. *De Priester en zijn Invloed op de Samenleving in de Padangsche Bovenlanden*. hlm. 423-455. Mengenai sejarahnya dan kekuatannya sebagai pembaru sejak perempat terakhir abad 19, lihat Taufik Abdullah. 1972. *Modernization in the Minangkabau World: West Sumatera in the Early*

dari yang berlaku di Jawa. di mana kalau bukan memasuki Sekolah Kelas Satu anak-anak para bangsawan dapat masuk ke sekolah dasar Eropa.¹¹⁹

Bagaimana pun meningkatnya minat pendidikan anak-anak bumiputera sebetulnya mencerminkan gejala umum di kalangan masyarakat Minangkabau dari kelas atas dan menengah.¹²⁰ Pendidikan nampaknya tidak lagi sekedar prestise dan alat untuk mempertahankan status, melainkan juga menjadi arena persaingan dalam merebut kesempatan-kesempatan yang terbuka dalam sistem kolonial. Itu bukan saja berkenaan dengan kemungkinan perbaikan prospek ekonomi mereka, melainkan juga menjadi sarana mobilitas sosial. Apalagi dengan dibukanya lagi sebuah sekolah baru OSVIA (*Opleiding School voor Inlandsche Ambtenaren*) di sekitar pergantian abad ini, maka peluang untuk mengambil kesempatan pendidikan sebagai calon pegawai terdidik secara khusus semakin diperluas.¹²¹ Pada akhir abad 19 lengkaplah gambaran ideal yang menjadi cita-cita dan kebanggaan semua anggota masyarakat, yaitu seperti yang telah diungkapkan dengan tepat oleh seorang penulis “kalau bukan menjadi angku doctor (dokter jawa), boleh jadi angku laras atau angku guru”.¹²²

Data di atas memberi gambaran jelas tentang betapa kurangnya sarana pendidikan yang tersedia bagi masyarakat Minangkabau, khususnya dari pihak Pemerintah Kolonial. Namun demikian, walaupun jumlah orang berpendidikan yang lulus dari sekolah-sekolah pemerintah tidak besar, sumbangan yang mereka berikan untuk gerakan kebangkitan rakyat cukup besar, misalnya mereka merangsang rakyat Minangkabau untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan dan untuk mengirim anak-anak mereka, terutama anak laki-laki, untuk belajar di sekolah yang terorganisasi baik. Walaupun jumlah sekolah yang didirikan pemerintah jauh lebih kurang dari kebutuhan dan kesempatan untuk mengikutinya

Decades of the 20th Century", dalam Claire Holt (ed), *Culture and Politics in Indonesia*. Ithaca New York: Cornell University Press, hlm. 179-245.

¹¹⁹ Algemeen Rijksarchief (ARA). Verbaal, 24 Maret 1902, No. 19.

¹²⁰ Algemeen Rijksarchief (ARA). Verbaal, 24 Maret 1902, No. 19.

¹²¹ Selama ini pendidikan untuk calon pegawai yang terbaik masih berasal dari sekolah guru, Kweeschool, atau Sekolah Raja.

¹²² E. Graves. 1981. *The Minangkabau Response to Dutch Colonial Rule in the Nineteenth Century*. Ithaca, New York: Monograph Series Cornell Modern Indonesia Project, hlm. 110.

begitu terbatas, mereka menggunakan peluang-peluang seperti itu untuk memperbaiki perkembangan pendidikan mereka. Para lulusan sekolah pemerintah kemudian ambil bagian dalam proses pendirian sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga lain untuk melatih dan mendidik sesama bangsa agar dapat memenuhi tuntutan hidup modern.

2.3 Reformasi Pendidikan Islam: dari Surau ke Sekolah

Bagi anak-anak Minangkabau, pengalaman bersekolah bersifat transformatif. Pedagogi-pedagogi yang saling bersaing bergabung dengan gagasan-gagasan yang saling bertentangan mengenai rumah dan keluarga mengakibatkan destabilisasi konsepsi-diri mereka. Bagi anak-anak laki-laki dan perempuan Minangkabau, pendidikan Islam di surau dan pelajaran-pelajaran praktis di rumah sangat penting sebagai pengalaman masa kecil dan perjalanan menuju kedewasaan.

Bahkan di masa prakolonial, lembaga-lembaga keagamaan besar menarik muridmurid dari seluruh wilayah itu, dan pada akhir abad 19 suatu jaringan sekolah kolonial bergabung dengan surau-surau menciptakan semacam rantau pendidikan pradedwasa. Pada awal abad 20, tumbuhnya sekolah-sekolah sekuler dan reformis Islam membuat partisipasi dalam suatu komunitas siswa, lepas dari keluarga dan rumah, suatu bagian kontroversial kehidupan Minangkabau. Adalah di sekolah-sekolah kampung Sumatra Barat, bukan di akademi-akademi Belanda di Batavia dan Leiden atau universitas-universitas dan madrasah Kairo dan Mekah, intelektual-intelektual Indonesia pertama kali digodok.¹²³

Dari memoar masa Padri dari Syekh Jalaluddin kita tahu mengenai pergerakan reformasi Islam akhir abad 18 di Sumatra Barat.¹²⁴ Sekolah-sekolah dan jaringan-jaringan ulama bersifat kosmopolitan dan tidak selalu berbasis kampung. Kaum reformis, dengan jubah Arab yang mencolok, mulai masuk ke jantung wilayah itu. Dan pusat-pusat tarekat yang penting, dengan guru-guru yang sangat hebat, sudah lama menarik calon murid.

¹²³ Jeffrey Hadler. 2010. *Sengketa Tiada Putus: Matriarkat, Reformisme Islam, dan Kolonialisme di Minangkabau*. Jakarta: Freedom Institute, hlm. 145

¹²⁴ Jeffrey Hadler. 2010, hlm. 145.

Sebelum memenangi Perang Padri, pada 1833, Belanda sudah menyadari perlunya pendidikan Barat di dataran tinggi itu. Menulis pada 5 April 1824, Kolonel Nahuijs mengeluh bahwa hanya di Padang, di mana seorang “pemisi Inggris Evangelikal Mr. Evans” berhasil mengumpulkan dana yang cukup, ada terdapat sekolah bergaya Barat.¹²⁵ Pengembangan lebih lanjut suatu sistem persekolahan dibahas nanti dalam bab ini. Namun memoir Jalaluddin adalah satu-satunya sumber riil informasi mengenai pendidikan Minangkabau prakolonial. Setelah sekolah-sekolah kolonial didirikan selama pertengahan abad 19, pejabat-pejabat Belanda memberikan perhatian kepada kehadiran suatu jaringan surau-sarau yang meluas jauh di luar kampung dan nagari.

Pada 1860-an, Arnold Willem Pieter Verkerk Pistorius mengadakan riset mengenai surau-sarau di dataran tinggi itu, memberikan perhatian kepada “imam dan pengaruhnya dalam masyarakat”. Dalam studinya, Verkerk Pistorius berkonsentrasi pada Surau “Jembatan Besi” di kota Silungkang, yang dianggap surau terbesar di dataran tinggi itu.¹²⁶ Sejak kembali dari Mekah, Haji Mohammed, yaitu Tuanku Syekh Silungkang, berhasil menarik lebih dari 1.000 murid ke dalam lembaganya. Beberapa bangunan di dalam lingkungan surau disumbangkan oleh orang dari nagari Sulit Air dan 13 Kota. Murid-murid memanfaatkan perpustakaan, makan pagi di warung-warung sekitar, dan memperkuat diri menghadapi godaan-godaan perempuan dan opium.¹²⁷ Sepuluh tahun setelah Verkerk Pistorius mengadakan risetnya, Christiaan Snouck Hurgronje meneliti traktat-traktat religius di surau ini. Dia terutama tertarik kepada tulisan-tulisan Jawi (Melayu Arab), marginalia Minangkabau yang menafsirkan teks Arab. Walaupun dia terkesan

¹²⁵ H.G. Nahuijs. 1926. *Brieven over Bengcoolen, Padang, het Rijk van Minangkabau, Rhiouw, Sincapoera, en Poelo-Pinang*. Breda, hlm. 186.

¹²⁶ Patut dicatat bahwa Surau Jembatan Besi Silungkang ini tidak berkaitan dengan surau reformis bernama sama yang dibangun kemudian di Padang Panjang.

¹²⁷ Verkerk Pistorius, *Studien over de Inlandsche Huishouding*, 188-211. Bab ini pertama kali diterbitkan sebagai “De Priester en Zijn Invloed op de Samenleving in de Padangsche Bovenlanden”, *Tijdschrift voor Nederlandsch Indië* (seri ke-3), no. 2 (1869).

dengan buku-buku itu, Snouck mewantiwanti bahwa kecil kemungkinan semua murid mencapai level kepakaran guru-guru mereka.¹²⁸

Tidak satu pun dari studi-studi awal ini menggambarkan seintip saja pun keadaan kehidupan sehari-hari dunia surau itu. Tulisan-tulisan lain oleh orang Minangkabau lebih mencerahkan. Mahmud Yunus adalah seorang reformis masa awal, transliterator Alquran dengan huruf Romawi, dan pendiri madrasahnyanya sendiri yang terkenal.¹²⁹ Pada akhir 1950-an, dia menempatkan diri sendiri sebagai pencatat sejarah pedagogi Muslim “modernis” di Indonesia. Karyanya *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* mencatat rencana-rencana pelajaran, jadwaljadwal kelas, dan buku-buku teks, teknologi-teknologi pedagogis baru yang diadopsi oleh ulama reformis.¹³⁰ Tetap saja, Yunus menyajikan sedikit saja penerangan mengenai pengalaman sekolah di luar ruang kelas. Hamka, seorang pengamat cermat sejarah Minangkabau, juga gagap ketika membahas sistem sekolah. Ayahnya sendiri, Haji Rasul, adalah reformis yang kuat, dan Hamka menyajikan sedikit saja gambaran tentang ruang kelas, bersiteguh bahwa dia biasanya membolos.¹³¹ Untuk penggambaran terbaik surau, kita harus beralih pada memoar-memoar sanak Hamka yang lebih tua, *Pengalaman Masa Kecil* dari Nur Sutan Iskandar.

Iskandar lahir di Sungai Batang, di tepi kaldera danau Maninjau, pada 3 November 1893. Maninjau adalah wilayah yang tidak biasa. Pada 1850-an, dua bersaudara orang China bermukim di sana, mengumpulkan damar sarang dan pala untuk ekspor.¹³² Akhirnya mereka masuk Islam, mengambil nama Muslim di Mekah, dan berintegrasi ke dalam penduduk lokal. Pada 1902, Kontrolleur Belanda C. Lulofs mendorong penanaman kayumanis (cinnamon), serta kopi, di tanah subur

¹²⁸ C. Snouck Hurgronje, “Een en Ander over het Inlandsch Onderwijs in de Padangsche Bovenlanden”, *Bijdragen tot de Taal-, Land-, en Volkenkunde*, volume khusus Kongres Orientalis (1883): 57-84.

¹²⁹ Mahmud Yunus. 1982. *Riwayat Hidup Prof. Dr. H. Mahmud Yunus: 10 Pebruari 1899 – 16 Januari 1982*. Jakarta: Hidakarya Agung.

¹³⁰ Mahmud Yunus. 1992. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.

¹³¹ Hamka. 1951. *Kenang-kenangan Hidup 1: Dimasa Ketjil*. Djakarta: Gapura.

¹³² Sumber data ini mengacu pada damar sarang, yang diterjemahkan sebagai shellac (lak). Lihat M. N. Soetan Ma'aroef. 1931. *Riwayat X Koto Manindjau*. Manindjau: Comité Pembangoenan Sekolah P. M. I., hlm. 13-19. Mungkin juga bahwa damar sarang adalah semacam damar dari pohon atau sarang burung yang bisa dimakan bahwa Maninjau adalah sumber sarang-sarang ini dikonfirmasi dalam Bickmore, *Travels in the East Indian Archipelago*, 402.

di lereng-lereng kawah. Dengan cara itu, orang Maninjau mendapatkan penghasilan sejati dari tanaman devisa selama masa sistem tanam paksa kopi.¹³³ Sungai Batang adalah pangkalan Haji Rasul, dan pada 1924 kampung kecil ini menjadi cikal bakal Muhammadiyah di wilayah Minangkabau.¹³⁴ Namun, dalam memoarnya, Iskandar mengenang dasawarsa pertama abad 20, ketika pendidikan agama masih didominasi mereka yang disebut ulama tradisional. Pada masa penulisannya, Iskandar telah bekerja sebagai seorang administrator untuk badan penerbit kolonial Balai Pustaka, dan memoarnya pada 1948 diakui diilhamkan oleh *bildungsroman*¹³⁵ dan sastra pendidikan Eropa.¹³⁶ Itulah sebabnya kisah itu sangat mementingkan bentuk yang indah; tapi biar bagaimana pun, isinya tetap sangat penting. Iskandar menggambarkan inisiasinya ke dalam sebuah surau pinggir danau yang besar tidak jauh dari rumah gadangnya. Suatu hari Jumat, ketika dia belum lagi berumur enam tahun, kepala surau itu datang ke rumah orangtuanya,

Sesudah makan dan minum, ayah saya menyerahkan saya kepadanya, agar diajarkan mengaji Al Quran. Sambil mengucapkan kata penyerahan itu, ayah memberikan sebuah cambuk dari lidi daun kelapa yang berpilin tiga ke tangannya, akan pemukul saya, kalau saya tidak menurut perintah atau nakal.”¹³⁷

Begitulah pengenalan pertamanya yang melemahkan semangat itu ke dalam suatu rangkaian pengalaman yang membuat trauma si Iskandar muda. Pada permulaan abad 20 terjadi beberapa perubahan dalam Islam di Indonesia yang dalam garis besarnya dapat digambarkan sebagai kebangkitan, pembaharuan, bahkan pencerahan (*renaissance*). Perubahan ini berbeda sifat dan asalnya serta

¹³³ Lihat C. Lulofs. 1914. “*Passar Inrichting en Pasarbeheer*”, Tijdschrift van het Binnenlandsch Bestuur 46, lampiran 4.

¹³⁴ Muhammadiyah yang didirikan di Kauman Yogyakarta pada 1912 adalah organisasi Muslim reformis yang menganut gagasan-gagasan Mesir sezaman dan kecenderungan-kecenderungan pedagogis Eropa. Cabang Minangkabau sangat ketat dalam penafsirannya atas Al Quran. Alfian. 1989. *Muhammadiyah: The Political Behavior of a Muslim Modernist Organization under Dutch Colonialism*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 244-245.

¹³⁵ Bildungsroman adalah jenis novel atau cerita roman yang mengisahkan proses pendewasaan seorang tokoh dengan melewati berbagai pengalaman dan tantangan sosial, psikologis, dan etis di dunia luas sejak meninggalkan masa kanak-kanaknya sampai berhasil menjadi anggota masyarakat yang matang.

¹³⁶ Iskandar, *Pengalaman Masa Kecil*, 7.

¹³⁷ Iskandar, *Pengalaman Masa Kecil*, 14

tidak semua saling berhubungan secara harmonis dan logis. Seperti kehidupan lain pada umumnya, perkembangan Islam juga tidak dapat diramalkan secara pasti sebelumnya dan kadang-kadang dalam pengamatan pertama menurut sistematika umum, perkembangan tersebut tidak begitu logis.

Pertama, semenjak tahun 1900 di beberapa tempat muncul keinginan untuk kembali kepada Al Qur'an dan Sunnah yang dijadikan titik tolak untuk menilai kebiasaan agama dan kebudayaan yang ada. Tema sentral dari kecenderungan ini adalah menolak taqlid. Dorongan ini terutama datang dari Mohammad Abduh dan murid-muridnya dari Mesir. Unsur ini juga mendorong umat Islam Indonesia untuk kembali kepada Qur'an dan Sunnah, yang mengakibatkan perubahan dalam bermacam-macam kebiasaan agama.¹³⁸

Meskipun sebagian besar umat Islamn tetap berpegang pada apa yang dibawa oleh ke empat mazhab, khususnya mazhab Imam Syafi'i yang banyak berpengaruh di Indonesia. Mungkin bagi kalangan luar, perbedaan pengikut mazhab dan yang menolak taqlid hampir tidak terasa, karena perdebatan antar keduanya hanya pada hal yang kecil-kecil saja, meskipun sekitar tahun 1910-1930 perdebatan tersebut menjadi semakin tajam. Orang yang menolak taqlid, kebanyakan disebut "kaum muda," sedangkan yang ikut mazhab (khususnya Syafi'i) disebut "kaum tua". Dalam beberapa studi kaum muda tersebut disebut reformis atau modernis, sedang pihak lain disebut dengan kaum ortodoks atau konservatif.¹³⁹

Kedua, sifat perlawanan nasional terhadap penguasa kolonial Belanda. Dalam hal ini walaupun Belanda juga cemas terhadap Pan-Islamisme, namun mereka yang menentang Belanda hampir tidak mau menerima Pan-Islamisme.¹⁴⁰ Penentangan terhadap kolo-nialisme selalu bersifat nasionalis. Akan tetapi organisa-si yang didirikan atas dasar Islam tidak semua berhasil mempertahankan dasar ini juga,

¹³⁸ Karel A. Steenbrink. 1994. *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen*. Jakarta: LP3ES, hlm. 26.

¹³⁹ Istilah reformis dipakai oleh Benda, *The crescent*, hlm. 45 dan seterusnya serta Van Niel, *The emergence of the modern Indo-nesian elite*; istilah modernis dipakai Geertz, *The Religion of Java*, hlm. 133, Deliar Noer, *The rise and development* dan Wertheim, *Indonesian society in transition*, hlm. 207-233. Yang terakhir ini memakai istilah reformis, modern dan progresif tanpa menunjukkan perbedaannya.

¹⁴⁰ Tentang Pan-Islamisme lihat Snouck Hlurgronje, *Adviézen* 11,1541-1555 dan 11, 1615-1761.

contoh yang paling menonjol di sini Sarekat Islam. Sesudah Sarekat Islam ini didirikan pada tahun 1912, beberapa aliran di dalamnya lebih menekankan sifat nasionalis, malah juga cenderung untuk membela aliran komunis, sehingga akhirnya dalam aliran ini Islam tidak memainkan peranannya lagi. Memang dorongan nasionalis tidak selalu bersifat agama seperti reformasi, namun untuk perkembangan Islam di Indonesia ia mempunyai arti yang cukup penting.

Ketiga, usaha yang kuat dari orang-orang Islam untuk memperkuat organisasinya di bidang sosial ekonomi, baik demi kepentingan mereka sendiri, maupun untuk kepentingan rakyat banyak. Dalam aspek ini, di samping Sarekat Islam organisasi seperti Perserikatan Ulama, dan Muhammadiyah juga akan dibicarakan.

Keempat, berasal dari pembaharuan pendidikan Islam. Karena cukup banyak orang dan organisasi Islam tidak puas dengan metode tradisional dalam mempelajari Qur'an dan studi agama, maka pribadi-pribadi dan organisasi Islam pada permulaan abad 20 ini berusaha memperbaiki pendidikan Islam, baik dari segi metode maupun isinya. Mereka juga mengusahakan kemungkinan memberikan pendidikan umum untuk orang Islam.

Kebanyakan para pembaru dan gerakan pembaruan Islam di Indonesia dipengaruhi oleh salah satu dari empat dorongan tersebut. Sepanjang penelitian yang telah dilakukan, tidak terdapat contoh sempurna dari para pembaharu maupun organisasi pembaharuan Islam di Indonesia, yang menerima satu corongan maupun empat dorongan sekaligus. Oleh karena itu, semua istilah modernis, konservatif harus diterima dalam arti tertentu saja, karena ada terjadi pribadi atau organisasi yang termasuk taqlid dalam jadi perbedaan yang lebih mendasar tentang beberapa organisasi dalam bidang taqlid dan jalannya Islam dalam sejarah, tetapi perbedaan itu juga disebabkan oleh faktor bukan teologis yang memainkan peranannya.

2.4 Gerakan Sekolah Islam Pembaruan

Pada umumnya, membaca *Algemeen Verslag van het Onderwijs* (laporan umum tentang pendidikan) tidak begitu menarik karena keterangan mengenai pendidikan Islam yang diberikan, bersifat umum dan sering jauh dari lengkap.

Setiap tahun hanya mengisi satu dua halaman saja. Tetapi laporan 1906 memberikan satu gambaran yang terperinci dan menarik tentang sebuah sekolah di Surakarta, "sekolah tinggi yang didirikan oleh Susuhunan Pakubuwono yang digabungkan dengan masjid, mempunyai 14 orang guru dan 325 orang murid. Pelajaran agama terdiri dari membaca dan menghafal Al-Qur'an, kitab Safinab dan Ummul Barabim. Selanjutnya pelajaran diberikan dalam bahasa Arab, juga diberikan mata pelajaran ilmu falak, pengetahuan tentang peredaran matahari, perhitungan tentang gerhana matahari, aljabar dan mantik.¹⁴¹

Pelapor tidak memberikan laporan yang lengkap mengenai pesantren yang waktu itu secara umum disebut dengan istilah 'sekolah pastor tinggi'.¹⁴² Akan tetapi sebagai inspektur pendidikan dasar, dia hanya memberitakan tentang dimasukkannya ma-ta pelajaran membaca dan berhitung ke dalam kurikulum pendidikan dasar. Kemudian tidak terdengar lagi berita tentang sekolah ini dalam laporan Inspeksi Pendidikan. Walaupun begitu, sekolah ini (*Mamba'ul Ulum*) dapat dianggap sebagai pelopor dalam pembaharuan pendidikan, antara lain memasukkan beberapa unsur pendidikan Barat ke dalam kurikulum pendidikan Islam di Indonesia.

Barangkali terlalu sulit untuk membuktikan tokoh dan lembaga pendidikan mana yang mulai dengan perubahan isi, didaktik maupun metodik yang diambil dari sistem pendidikan Barat. Terlalu banyak inisiatif seperti halnya kraton Surakarta yang kemudian terlupakan begitu saja. Inisiatif pertama yang dikenal di seluruh Indonesia dan memberikan hasil yang cukup lama, haruslah dicari pada gerakan salaf di Minangkabau yang juga disebut dengan modernis Padang atau modernis kaum muda. Akan tetapi sifat umum tersebut tidak akan membawa kita kepada satu pendapat bahwa yang akan dibicarakan di sini adalah suatu kelompok yang homogen, karena di dalamnya terdapat beberapa perbedaan yang agak besar.

¹⁴¹ Algemeen Verslag van Het Inlandsch Onderwijs, Loopende over het Jaar 1906, hlm. 74.

¹⁴² Safinab di sini adalah karangan Salim bin Sumayr al Hadrami, Safinatu'l naja': Oemoel' Ibrabim tidak merupakan cerita tentang Nabi Ibrahim, seperti sering diduga orang Belanda tetapi karangan Abu Abdallah Muhammad, Yusuf as Sanusi, Ummu'l Barabim; lihat juga Van den Berg, *Het godsdienstonderwijs, serta Voo hoeve*, Handlist of arabic manuscripts, hlm. 387.

Sebagian besar tokoh pertama gerakan ini belajar di Mekkah di bawah bimbingan Ahmad Chatib yang mampu-nyai kedudukan tinggi dalam mazhab Syafii. Akan tetapi sekembalinya dari Mekkah mereka menolak taqlid pada Imam Syafii dan secara tajam mulai menentanginya.

Perubahan sikap tersebut banyak disebabkan oleh pengaruh membaca al-Manarnya Muhammad Abduh dan murid-muridnya. Demikian juga semangat pembaharuan yang tam-pak dalam majalah ini dilanjutkan oleh para pemimpin kaum muda. Tokoh terpenting dalam gerakan ini adalah Thahir Jalaluddin yang sebagian besar hidupnya dilewatkan di Singapura dan Malaysia, tetapi tetap mempunyai hu-bungan yang erat dengan Abdullah Ahmad, Abdul Karim Amrullah, Djamil Djambek dan lain sebagainya. Terutama Abdullah Ahmad dan Abdul Karim Amrullah, keduanya mempunyai peranan penting dalam pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia.¹⁴³

Kaum pembaharu sadar akan pentingnya pendidikan bagi pelatihan dan pembangunan generasi muda. Perubahan gagasan dan pemikiran apa pun pasti akan bernilai abadi jika mereka bisa mempengaruhi generasi muda. Gerakan reformis dapat dilihat sebagai persaingan antara ulama (orang-orang terpelajar) dengan pendapat berbeda-beda. Di samping itu, mereka juga merasa kehilangan pengaruh sehubungan didirikannya sekolah-sekolah pemerintah, yang secara resmi bersifat netral dalam hal agama.

Para reformis menyadari kebutuhan akan sekolah-sekolah ini, khususnya segi positif sistem yang menjamin kemajuan anak-anak dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Para ulama reformis memang menjalin hubungan dengan siswa-siswa sekolah pemerintah, tetapi itu hanya dianggap sebagai tambalan terhadap sistem yang mengabaikan pendidikan agama. Lagi pula masyarakat menuntut didirikannya lebih banyak sekolah-sekolah yang tidak dapat dipenuhi pemerintah, maupun kaum tradisional dengan sistem pengajaran tradisional mereka. Dengan alasan itu hampir semua reformis terkemuka di Minangkabau mendirikan sekolah reformis sendiri dengan maksud mempercepat penyebaran gagasan-gagasan pembaruan.

¹⁴³ Hamka, Ayahku, hlm. 112.

Sistem sekolah ini dapat dibagi menjadi tiga, yaitu Adabiyah School, Sumatra Thawalib dan Sekolah Diniyah.

2.4.1 Adabiyah School

Dr. H. Abdullah Ahmad, salah satu tokoh utama dari Gerakan Pembaruan Islam, juga dipengaruhi oleh sahabat dan gurunya Syekh Tahir Jalaluddin al-Azhari yang tinggal di Singapura. Dengan maksud memberi sumbangan pada pembangunan pendidikan Islam, Haji Abdullah Ahmad meluangkan waktu untuk mengunjunginya kota itu guna mempelajari rencana sekolah reformis Syekh Tahir, al-Iqbal al-Islamiyah (Penerapan Islam). Ia menjadikan sekolah ini sebagai contoh untuk sekolahnya sendiri, yaitu sekolah Adabiyah yang didirikan di Padang tahun 1909.¹⁴⁴

Sejauh diketahui, sebelum sekolah Adabiyah didirikan oleh Haji Abdullah Ahmad tahun 1909, belum ada sekolah sejenis di mana mata pelajaran agama maupun mata pelajaran umum diberikan sekaligus. Pada mulanya diharapkan sekolah itu akan mampu mempertahankan identitasnya sebagai sekolah reformis dan berhasil mencapai tujuan-tujuan utamanya untuk menawarkan pendidikan yang lebih baik kepada kaum Muslimin di Minangkabau. Sayang sekali, tidak lama setelah sekolah ini disubsidi oleh Pemerintah Belanda beberapa tahun kemudian, malah membawa pengaruh Belanda di sekolah ini yang menyebabkan sekolah itu menyimpang dari tujuan-tujuan sebenarnya. Misalnya, Adabiyah lebih banyak memperhatikan mata pelajaran sekuler dan sistem sekolah diubah serta disesuaikan dengan sekolah dasar pemerintah, H.I.S. (*Hollandsch Inlandsche School*).¹⁴⁵

Informasi ini jelas menunjukkan bahwa sekolah Adabiyah berorientasi Barat. Pendidikan agama hanya menjadi latar belakang, sedangkan karakter umum sekolah itu hanya dapat menghasilkan lulusan yang tidak mampu memenuhi

¹⁴⁴ Tamar Jaya. 165. *Pusaka Indonesia*. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, hlm. 296. Untuk pembicaraan lebih lanjut mengenai masalah yang sama lihat Deliar Noer. 1963. *The Rise and Development of the Muslim Modernist Movement in Indonesia during the Dutch Colonial Period 1900-1942*. Cornell University, hlm. 50-59.

¹⁴⁵ Untuk informasi lebih lanjut tentang sekolah Adabiyah, Deliar Noer, *ibid.*, hlm. 65-66; Alfian. 1969. *Islamic Modernism in Indonesian Politics*. University of Wisconsin, hlm. 164 dan Mahmud Yunus, hlm. 137-139.

kebutuhan masyarakat akan orang-orang yang terlatih. Sejak itu sekolah ini tersingkir dari kegiatan-kegiatan Kaum Muda (reformis), karena harapan semula sewaktu didirikannya sekolah tersebut, untuk menjadikannya tonggak gerakan pembaruan akhirnya gagal akibat tekanan orientasi Barat. Walaupun demikian, satu hal jelas, yaitu Adabiyah adalah yang pertama-tama yang memutuskan sistem tradisional pendidikan di daerah Minangkabau. Upaya pertama ini dilanjutkan oleh suatu kelompok modernis lain yang mendirikan Diniyah dan Madrasah Diniyah.

2.4.2 Sumatera Thawalib Padang Panjang

Jauh sebelum tahun 1900, sudah berjalan lama Pengajian di Surau Jembatan Besi Padang Panjang di bawah asuhan Syekh Abdullah, merupakan salah satu di antara pengajian-pengajian cara lama yang banyak tersebar di Minangkabau. Pada mulanya terdapat di tempat itu hanya jembatan kayu yang pakai atap, kemudian diganti dengan jembatan besi. Itulah pertama kali adanya jembatan besi di Padang Panjang dan terkenal Surau Jembatan Besi, yang kemudian menjadi pusat pertumbuhan 'Ulama dan Zu'amna Islam yang bertebaran ke seluruh Sumatera Barat).¹⁴⁶

Pada 1907 Syekh Abdullah pindah mengajar ke Padang, dan pimpinan Pengajian Surau Jembatan Besi pindah kepada Syekh Daud Rasjidi (ayah dari H.M.D. Dt. Palimo Kayo) dan murid-murid pengajian bertambah memperoleh kunjungan dari negeri-negeri sekelilingnya dan pelajaran Kitab-kitab 'Arab meningkat. Berhubung dengan keberangkatan Syekh Daud Rasjidi ke Makkah Al Mukarramah untuk memperdalam pengetahuannya dengan Syekh Ahmad Chatib, sementara digantikan oleh kakak beliau Syekh Abdul Lathif Rasjidi (ayah dari H. Muchtar Luthfi. Tidak lama, kemudian pada tahun 1901 Pimpinan Pengajian Surau Jembatan Besi pindah ke tangan Syekh Abdul Karim Amarullah yang di waktu itu lebih terkenal dengan sebutan Inyik Haji Rasul.¹⁴⁷

¹⁴⁶ H.M.D. Datuk Palimo Kayo. Tanpa Tahun. *Sejarah Perguruan Thawalib Padangpanjang*. Padang: Yayasan Thawalib Padangpanjang, hlm. 5

¹⁴⁷ H.M.D. Datuk Palimo Kayo, hlm. 5

Di bawah asuhan Syekh Abdul Karim Arnarullah, Pengajian Surau Jembatan Besi bertambah maju, pelajaran kitab-kitab Arab bertambah meningkat, penuntut-penuntut ilmu Agama (yang di waktu itu terkenal dengan sebutan orang Siak) bertambah banyak berdatangan dari sekeliling Minangkabau dan juga dari daerah-daerah lain, Tapanuli, Aceh, Bengkulu, Malaya, Siam dan lainnya. Pada 1912 jiwa berorganisasi bertiup kencang menghidupkan kebathinan penuntut-penuntut ilmu Surau Jembatan Besi, maka terbentuklah satu organisasi dari Guru-guru dan pelajar-pelajar pengajian Surau Jembatan Besi, mulanya bernama “Sumatera Thuwailib” dan kemudian bernama Sumatera Thawalib.¹⁴⁸

Organisasi tersebut pada tahun 1914 telah berubah bentuk pengajian Surau Jembatan Besi mendekati bentuk Sekolah, terdiri atas tujuh kelas, dengan kitab-kitab yang lebih teratur untuk setiap kelas dengan Pimpinan Guru Besar Syekh Abdul Karim Amarullah dan Tuanku Mudo Abdul Hamid Hakim selaku wakil Guru Besar dan dibantu oleh Guru-guru dibawahnya, dan pengawasan dari, pengurus Sumatera Thawalib yang ketika itu diketuni oleh Engku Hasjim Tiku, dan dibimbing oleh Zainuddin Labay El Jumnsy yang baru saja pulang dari Padang Jepang, Pengajian Surau Jembatan Besi semakin maju dan ramai, walaupun masih duduk bersila di kelas masing-masing.

Pada 1915 Zainuddin Labay El Junusy menciptakan suatu sistem perguruan Islam yang terbaru bernama Diniyah School atau Madrasah Diniyah, yang lebih banyak memasukkan pelajaran-pelajaran ilmu umum, telah menyebabkan Perguruan Sumatera Thawalib semakin hebat berlomba-lomba atas kebajikan. Kemajuan perguruan Islam bertambah meningkat dengan Sumatera Thawalib yang lebih menjurus kepada alim ulama ahli fiqih, sedang Madrasah Dinniyah mengikut sertakan ilmu umum. Sehingga kedua-duanya merupakan kader alim ulama yang intelek.¹⁴⁹

Modernisasi pengajian surau-surau yang telah dimulai oleh Surau Jembatan Besi tersebut sudah menjalar ke tempat lain-lain, dan bertumbuhlah Sumatera

¹⁴⁸ H.M.D. Datuk Palimo Kayo, hlm. 6.

¹⁴⁹ Murni Djamal. 2002. *Dr. H. Abdul Karim Amrullah: Pengaruhnya dalam Gerakan Pembaruan di Minangkabau pada Awal Abad ke-20*. Leiden-Jakarta: INIS, hlm. 59.

Thawalib di Parabek di bawah pimpinan Syekh Ibrahim Musa, di Padang Japang di bawah pimpinan dua orang bersaudara Syakh Mushthafa Abdullah Syekh Abbas Abdullah, di Sungayng dibawah pimpinan Syekh Muhammad Thaib, di Maninjau dibawah pimpinan Syekh Abdul Rasjid, dan lain-lain. Masing-masing berlomba-lomba untuk lebih maju, sehingga pelajar-pelajarpun semakin bertambah membanjiri, juga yang berdatangan dari luar pulau Sumatera dan juga dari Malaya dan Siam.¹⁵⁰

Pada 1918 Sumatera Thawalib Padang Panjang melangkah maju, di samping meningkatkan pelajaran dalam perguruan Thawalib, juga mulai mengadakan penerbitan Majalah Al Munir dipimpin oleh Zainuddin Labay El Junusy dibantu oleh Tuanku Mudo Abdul Hamid Hakim, memuat karangan-karangan yang berisi pelajaran atau nasihat Agama, menjawab pertanyaan-pertanyaan, membanteras khurafat, takhyul dan bid'ah, serta sejarah dan lainnya.¹⁵¹ Untuk kesempurnaan dan memupuk perkembangan ilmu karang mengarang, Sumatera Thawalib mengadakan debating club sekali seminggu yang diikuti oleh guru-guru dan pelajar-pelajar Thawalib yang sudah agak besar. Dalam *Debating Club*, diasuh mengarang, berpidato, berdebat, dan berlatih mengemukakan suatu pandangan dan mempertahankan pendapat-pendapat masing-masing. Di samping itu, usaha penerbitan Majalah Al-Munir itu diadakan perpustakaan untuk mengumpulkan surat-surat Kabar dan majalah-majalah dari seantero Indonesia (yang waktu itu disebut Hindia Belanda), juga surat-surat kabar dari Mesir. Sehingga kantor Al Munir itu setiap sore penuh dikunjungi oleh pelajar-pelajar untuk membaca surat-surat kabar dan buku-buku baik yang berisikan politik, ekonomi, sosial dan

¹⁵⁰ H.M.D. Datuk Palimo Kayo, hlm. 6.

¹⁵¹ Pada 1918, Haji Rasul secara resmi memperkenalkan sistem kelas ala sekolah Barat di Surau Jembatan Besi dengan kurikulum disusun ulang, metode mengajar diperbarui, dan buku-buku pelajaran umum dimasukkan sebagai materi ajar. Inilah transformasi surau menjadi madrasah bernama Thawalib. Sumatra Thawalib Padang Panjang menggunakan kurikulum kombinasi, selain pelajaran agama (tafsir, hadis, fikih, nahwu, dan sebagainya), para siswa diajarkan ilmu umum seperti pengetahuan sosial, ilmu alam, berhitung modern, bahasa asing, dan lain-lain. Dengan demikian Thawalib mencetak ulama intelektual yang memahami agama sekaligus menguasai ilmu modern. Murni Djamal. 2002. *Dr. H. Abdul Karim Amrullah: Pengaruhnya dalam Gerakan Pembaruan di Minangkabau pada Awal Abad ke-20*. Leiden-Jakarta: INIS, hlm. 21.

pendidikan, menyebabkan pelajar-pelajar Thawalib mendapat pandangan yang luas selain dari pelajaran-pelajaran di Thawalib atau Dinniyah.¹⁵²

Secara formal nama “Sumatra Thawalib” lahir pada 15 Januari 1919, ketika digelar pertemuan pelajar dari Padang Panjang, Parabek, dan Padang Japang untuk membentuk federasi sekolah-sekolah agama pembaruan. Pertemuan yang diadakan di surau Syekh Jamil Jambek Bukittinggi itu menghasilkan organisasi Sumatra Thawalib sebagai wadah koordinasi madrasah-madrasah modern di Sumatra Barat. Thawalib Padang Panjang sendiri kemudian berkembang menjadi perguruan Islam terbesar di Minangkabau pada awal 1920-an. Murid-muridnya datang tidak hanya dari Padang Panjang, tapi juga daerah lain yang terinspirasi oleh reputasi Thawalib sebagai pusat pembelajaran Islam progresif.¹⁵³

2.4.3 Sekolah Diniyah Padang Panjang

Harapan pihak reformis Minangkabau untuk menjadikan Adabiyah tonggak kelompok-kelompok reformis dalam menyebarkan gagasan-gagasan mereka, tampaknya dikompensasi dengan upaya tanpa henti yang dilakukan Zainuddin Labai El-Yunusi (1890-1924). Pada tahun 1915, Labai, seorang pemuda otodidak, membuka sekolah Diniyahnyayang terkenal di Padang Panjang. Sekolah ini menampung anak laki-laki maupun perempuan dan memperkenalkan sistem radikal baru yang berbeda dari “sistem surau” yang lazim dengan memperkenalkan meja dan kursi serta sistem tingkat/kelas. Pada tahun 1922, ia mampu menyebarkan sistem ini di lima belas sekolah di Minangkabau. Kurikulum pelajaran umum

¹⁵² H.M.D. Datuk Palimo Kayo, hlm. 7.

¹⁵³ Kegiatan di perguruan ini bukan cuma belajar formal, para siswa juga didorong berdiskusi, berorganisasi, dan mengikuti perkembangan pemikiran Islam melalui bacaan majalah seperti Al-Munir dan Al-Imam. Pada 1922, misalnya, tercatat para pelajar Thawalib Padang Panjang sudah berani mengadakan pertemuan politik untuk mendukung gerakan kebangsaan. Hal ini menandakan munculnya kesadaran sosial-politik di kalangan santri Thawalib. Namun, keterbukaan Thawalib pada gagasan dari luar juga membawa tantangan. Awal 1923, salah seorang guru muda di sana, Haji Datuk Batuah, mulai memasukkan paham komunisme kepada sebagian siswa. Pengaruh ide kiri ini ditentang keras oleh Haji Rasul selaku pimpinan Thawalib, ia dikenal tegas menjaga kemurnian akidah sekolahnya. Bahkan, disebutkan Haji Rasul berusaha mengekang penyebaran ide “atheis” tersebut di kalangan murid-murid. Lihat Murni Djamal. 2002. *Dr. H. Abdul Karim Amrullah: Pengaruhnya dalam Gerakan Pembaruan di Minangkabau pada Awal Abad ke-20*. Leiden-Jakarta: INIS, hlm. 61.

seperti bahasa, termasuk bahasa Inggris, matematika, sejarah dan geografi, juga tercantum di samping agama.¹⁵⁴

Sebelum kembali ke Padang Panjang pada 1913, ia menghabiskan waktu enam tahun untuk membantu Syekh Haji Abbas, seorang alim tradisional dari Padang Papang, di sebuah surau di Payakumbuh. Ketika ia kembali ke Padang Panjang, ia mulai mengajar di Surau Jembatan Besi, yang guru-gurunya antara lain Haji Abdul Karim Amrullah dan Haji Abdullah Ahmad. Di Padang Panjang ia juga belajar di bawah bimbingan Haji Abdul Karim Amrullah. Ia menyumbangkan artikel-artikel yang diterbitkan di majalah al-Munir (Penyuluh) dan bahkan majalah ini diterbitkan kembali di Padang Panjang setelah publikasinya dihentikan di Padang (yang semula didirikan oleh Haji Abdullah Ahmad dan Haji Abdul Karim Amrullah).

Dengan maksud membela al-Munir dari serangan Kaum Tua, Labai, seorang alim muda produktif dan terkenal dari Kaum Muda, menerbitkan majalah bernama *al-Akhbar* (Berita). Ia menerjemahkan biografi reformis Muslim di luar Indonesia ke bahasa Indonesia (seperti Mustafa Kamil dari Mesir) dan menerbitkannya sebagai seri dalam al-Munir. Pemahaman bahasa Arab dan bahasa Inggris yang baik memungkinkannya untuk menulis buku pelajaran yang digunakan di sekolah, Diniyah, khususnya di tingkat rendah.¹⁵⁵

Kecerdasannya membanggakan kelompok Kaum Muda, yang percaya bahwa Labai akan mampu menyumbangkan segala kemampuannya untuk Muslimin di Minangkabau. Ia diangkat sebagai anggota dewan pengurus Thawalib, dan pada 1922 ia mendirikan Persatuan Murid-Murid Sekolah Diniyah, organisasi siswa yang bermaksud melestarikan dan mendorong sekolah Diniyah. Tampaknya harapan-harapan besar Kaum Muda tidak dapat membuahkan hasil yang diharapkan, karena

¹⁵⁴ Tamar Jaya, op. cit, hlm. 323-330. Lihat juga untuk informasi lebih lanjut tentang hal yang sama Boekoe Peringatan Diniyah School Poetri, Padang Panjang tahun 1938 dan Jeanne Cuisinier. 1955. *Les Madrasahs Feminines de Minangkabau* dalam *Revue des Etudes Islamiques* XXIII, hlm.107-120.

¹⁵⁵ Mahmud Yunus, hlm.146-147. Kementerian Penerangan, Sumatra Tengah, hlm.869-870. Deliar Noer, op. cit., hlm. 63. Labai juga menulis buku-buku tentang Fiqh (Yurisprudensi), seperti *Durus al-Fiqhiyyah*, mengenai teologi ia menulis 'Aqā'id ad-Diniyyah dan mengenai bahasa Arab Mabadī' al-'Arabiyyah.

ia meninggal pada usia muda (34 tahun), dan mereka kehilangan jasa-jasanya. Karyanya dilanjutkan oleh adik perempuan yang sekaligus muridnya, Rahmah el-Yunusiyah.¹⁵⁶

Dengan bantuan asosiasi siswa tersebut di atas, pada 1 November 1923 Rahmah mendirikan sekolah untuk anak perempuan, Madrasah Diniyah, dengan 70 murid pertama, yang kebanyakan terdiri atas ibu-ibu muda.¹⁵⁷ Lalu, dengan maksud menghapuskan buta huruf, Rahmah, yang telah belajar di bawah bimbingan Haji Abdul Karim Amrullah selama hampir delapan tahun (1918-1926), memulai kampanyenya untuk kaum perempuan berusia lebih lanjut, dengan hasil 125 orang ikut ambil bagian. Akan tetapi ia terpaksa menghentikan upaya ini karena perlu memberi perhatian penuh kepada sekolahnya yang telah dihancurkan gempa bumi tahun 1926. Sekolah itu kemudian didirikan kembali satu tahun kemudian. Untuk memulai fondasi bangunan yang baru, semua siswa Diniyah dan Madrasah Diniyah serta Sumatra Thawalib masing-masing diminta membawa satu buah batu setiap hari dari kali yang terletak tidak jauh dari sekolah itu.¹⁵⁸

Seperti halnya dengan Sumatra Thawalib, sekolah ini kelak menjadi pusat gerakan pembaruan, terutama untuk mendidik anak perempuan. Sekolah ini menjadi tempat bagi orang tua yang mengirim anak perempuannya untuk belajar dan memperoleh pengetahuan ilmu-ilmu agama. Sekolah ini dan upaya-upaya pendirinya, merupakan salah satu perintis wanita terpenting di Indonesia,¹⁵⁹ yang juga memperkenalkan reformasi kelompok Kaum Muda perempuan yang terpelajar dan energik serta berperan besar dalam gerakan-gerakan sosial dan politik Minangkabau.

Pentingnya Diniyah dan Madrasah Diniyah untuk tujuan saat ini ialah menunjukkan betapa besar pengaruh Dr. H. Abdul Karim Amrullah dalam Gerakan

¹⁵⁶ Deliar Noer, hlm. 64. Lihat untuk informasi lebih lanjut tentang bagian ini dalam Jeanne Cuisiniere, hlm. 109 dan Mahmud Yunus, hlm. 146-148.

¹⁵⁷ Cora Vrede de Stueurs. 1959. *L'emancipation de la Femme Indonesienne*, Paris, hlm. 49. Lihat juga Jeanne Cuisiniere, hlm. 109-110 dan Mahmud Yunus, hlm. 60.

¹⁵⁸ Cuisiniere, hlm. 111.

¹⁵⁹ Cora Vrede de Stueurs, hlm. 48-50. Misalnya, dengan mendidik gadis-gadis remaja di sekolahnya. Rahmah el-Yunusiyah telah maju beberapa langkah dengan penghindaran kawin muda (*marriage d'enfants*) yang merupakan kebiasaan di Minangkabau pada waktu itu

Pembaruan Islam di Minangkabau, khususnya berkaitan dengan perkembangan pendidikan agama. Menurut pendapat penulis, walaupun Diniyah yang didirikan beberapa tahun lebih dulu oleh Zainuddin Labai El-Yunusi daripada Sumatra Thawalib, tetapi gerakan pembaruan yang dirintis Haji Abdul Karim Amrullah tahun 1906, yang melicinkan jalan untuk kesuksesan Diniyah. Jika kita melihat masa belajar Rahmah El-Yunusiyah pada Haji Abdul Karim Amrullah yang hampir delapan tahun,¹⁶⁰ dan jika kita mengingat bahwa hampir semua orang penting serta guru senior sekolah itu, termasuk Zainuddin Labai El-Yunusi, adalah mantan murid Haji Abdul Karim Amrullah, maka sulit menyembunyikan kenyataan bahwa pengaruh Haji tersebut tidak dijumpai dalam pendidikan Diniyah. Memang Haji Abdul Karim Amrullah tidak langsung melibatkan dirinya dalam sekolah itu, tetapi gagasan-gagasannya diambil alih oleh mereka yang bertanggung jawab di sekolah itu. Hubungan baik antara Diniyah, Madrasah Diniyah Puteri dan Sumatra Thawalib telah terbentuk sejak lama. Misalnya, beberapa siswa di zaman awal Sumatra Thawalib diizinkan untuk belajar bahasa Arab dan mata pelajaran lain di Diniyah, karena tidak semua muridnya bertingkat pengetahuan yang sama.

2.5 Tokoh Utama Pembaruan Minangkabau

Sejarah pendidikan reformis Islam di Indonesia dapat ditelusuri dalam jejak suatu trilogi disertasi yang ditulis di universitas-universitas Amerika Serikat oleh orang-orang Minangkabau, Deliar Noer, Taufik Abdullah, dan Alfian.¹⁶¹ Buku Deliar Noer pada intinya adalah ensiklopedia Islam Indonesia, dengan penekanan pada sumbangan-sumbangan Sumatra Barat. Alfian membahas sejarah organisasi Muhammadiyah dan memakai faksionalisme Minangkabau atau Jawa yang teranggap itu sebagai alur naratif. Alfian dan Deliar membuka lahan baru, memberi komunitas ahli-ahli berbahasa Inggris suatu petunjuk akan topik-topik dan sumber-sumber yang tersedia bagi para sejarawan Islam Indonesia.

¹⁶⁰ Hamka. *Ayahku*, hlm. 194. Rahmah El-Yunusiyah belajar pada Dr. H. Abdul Karim Amrullah mulai tahun 1918 sampai saat yang tersebut terakhir meninggalkan Padang Panjang menuju Kairo untuk menghadiri Konperensi Khalifah tahun 1926.

¹⁶¹ Deliar Noer/ 1973. *The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-1942*. Singapura: Oxford University Press; Taufik Abdullah, 1971. *Schools and Politics: The Kaum Muda Movement in West Sumatra (1927-1933)*. Ithaca: Cornell SEAP; Alfian, Muhammadiyah.

Taufik Abdullah lebih tersamar pendekatannya, yang sangat terfokus. Taufiklah yang terutama menyebabkan timbulnya perspektif rantau dalam sejarah Minangkabau, suatu “spiral dengan lingkaran yang makin meluas” di mana orang-orang yang paling dinamis dan menarik adalah juga yang paling mungkin menyerah pada daya tarik keluar dan pergi dari jantung wilayah.¹⁶²

Ketiga buku ini memberikan pengenalan berjangkauan luas pada sejarah pendidikan Islam di Indonesia; Alfian dan Deliar Noer khususnya mencerminkan perspektif Minangkabauis modernis yang sekarang diterima sebagai paling berotoritas di Indonesia. Sulit menarik sejarah pengalaman sekolah sehari-hari dari teks-teks dan sumber-sumber yang menekankan pedagogi dan sikap-sikap keguruan. Baik Deliar Noer maupun Alfian berfokus pada sekolah Adabijah (Adabiyah) di Padang sebagai momen kunci dalam sejarah pendidikan reformis di Minangkabau.

Didirikan oleh Haji Abdullah Ahmad pada 1909, Adabiyah mengikuti model sekolah Iqbal di Singapura, yang menekankan pemikiran rasional dan buku-buku teks cetak modern. Pada 1915, sekolah itu diambil-alih oleh pemerintah kolonial dan menjadi Hollandsch Maleische School Adabijah bersubsidi, dan kehilangan sebagian karakter reformisnya.¹⁶³ Tapi buku-buku teks awal itu membantu pemahaman akan pengalaman di ruang kelas. Satu syair menggugah, Sjaier Peroekoenan, mengacu pada rukunrukun Islam dan menyajikan ajaran-ajaran dasar bagi muridmurid muda. Reformis-reformis tidak lari dari dunia modern, dan Abdullah Ahmad menasihati murid-murid bagaimana menjawab dengan pantas bila ditanya tentang agama.

Dalam suatu surau tradisional, murid-murid termaju duduk dalam suatu lingkaran yang disebut halakah (bahasa Arab, *halqa*), menghadap ke guru, dan mendengarkan pengajaran mengenai makna Quran dan Hadis.¹⁶⁴ Sekolah Adabiyah memakai meja dan bangku, ia memperkenalkan suatu sistem tingkat-tingkat

¹⁶² Abdullah, “*Modernization in the Minangkabau World*”, hlm. 189.

¹⁶³ Noer, *Modernist Muslim Movement*, hlm. 38-39, hlm. 43-44; Alfian, *Muhammadiyah*, hlm. 108.

¹⁶⁴ Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, hlm. 45-46; lihat juga Abdullah, *Schools and Politics*, hlm. 55.

hierarkis berdasarkan lebih pada usia anak daripada perkiraan tingkat kemampuan belajar mereka. Buku teks formal pertama Abdullah Ahmad, *Titian Kesoerga*, adalah juga upaya Minangkabau pertama untuk menghasilkan suatu karya yang mengikuti prinsip-prinsip baik reformis Islam maupun *kemadjoean*. Kombinasi pedagogi reformis Islam Timur Tengah dan progresivisme pengaruh Eropa menghasilkan apa yang di Indonesia disebut modernisme Islam, moderen.

Titian Kesoerga menyarankan penimbangan informasi yang diperoleh lewat kelima indra, lewat berita-berita eksternal, dan lewat pemikiran sendiri untuk sampai pada kesimpulan-kesimpulan. Ini khususnya penting dalam mempertimbangkan beritaberita perang. Abdullah Ahmad mengutip konflik-konflik antara Rusia dan Jepang (1904) dan antara Italia dan Turki (1912) sebagai peristiwa-peristiwa yang tidak berkaitan langsung dengan orang Minangkabau tapi yang punya dampak pada kesadaran politik di Sumatera Barat.¹⁶⁵ Adalah Perang Rusia-Jepang dan Perang Dunia I yang membuat orang Minangkabau pada umumnya sadar akan berita-berita dunia. *Titian Kesoerga* ditutup dengan dialog-dialog platonik ekstensif antara seorang guru dan murid, semacam interaksi yang pastilah bersifat revolusioner dalam suatu sistem pendidikan tradisional yang menekankan hafal mati dan diskursus tanpa bantah.

Upaya-upaya Abdullah Ahmad mengilhami suatu reformasi total madrasah-madrasah di Minangkabau. Pada 1912, koleganya Haji Rasul bergabung dengan Surau Jembatan Besi di Padang Panjang. Pada 1918, dia sudah memperkenalkan tingkat-tingkat kelas, buku-buku teks, dan diploma-diploma; pada 1920-an, dia sudah mengubah surau itu menjadi Sumatra Thawalib modern, sekolah reformis paling berpengaruh di dataran tinggi itu.¹⁶⁶ Madrasah-madrasah ini, dan khususnya sekolah-sekolah di Padang Panjang, menjadi makin terpolitisasi selama 1920-an. Setelah malaise (istilah yang disukai di dalam surat kabar) depresi ekonomi tiba di Minangkabau, gagasan-gagasan provokatif Tan Malaka dan berita antikolonial komunisme internasional bergabung dengan Islam reformis untuk menciptakan

¹⁶⁵ Abdoellah Ahmad. 1914. *Titian Kesoerga: Kitab Oetsoeloe'ddin*. Padang: Snelpersdrukkerij "Almoenir", hlm. 14-15.

¹⁶⁶ Abdullah, *Schools and Politics*, hlm. 34-59; Noer, *Modernist Muslim Movement in Indonesia*, hlm. 45.

suatu jenis Komunisme-Islam yang dinamis di Sumatra Barat. Setelah sekolah-sekolah menjadi agresif secara politik, dan makin ganas bersikap menentang, matriarkat pun tak urung makin disorot. Pemikir-pemikir komunis mencari-cari di dalam tulisan-tulisan etnografik Friedrich Engels dan menemukan bahwa matriarkat Minangkabau adalah semacam komunisme primitif. Reformis-reformis Islam, yang lebih-lebih lagi mengikuti perkembangan-perkembangan di Mesir, Turki, dan Timur Tengah, cenderung kurang mau berkompromi dengan beberapa adat lokal yang dianggap murtad. Para antropolog dan feminis dari Eropa dan Amerika Serikat beramai-ramai turun ke Sumatera Barat untuk melaporkan menghilangnya kemuliaan suatu matriarkat yang masih tersisa.

2.5.1 Syekh Muhammad Jamil Jambek

Satu lagi tokoh pembaruan di Minangkabau ialah Syekh Muhammad Jamil Jambek. Ia lahir di Bukittinggi tahun 1860. Ayahnya, Muhammad Saleh Datuk Malaka, adalah Kepala Nagari (desa) Kurai. Syekh Jambek belajar di sekolah dasar yang mempersiapkan siswanya untuk menjadi guru sekolah pelatihan guru (Kweekschool) tetapi ia lebih tertarik akan gagasan parewa dan baru belajar Quran dan agama dengan serius ketika berusia sekitar 22 tahun. Menurut Hamka, ketika Syekh Jambek berada di Mekah, Syekh Ahmad Khatib merupakan salah satu gurunya dan banyak berperan dalam mengantarnya menjadi orang saleh. Di samping studi agama, ia juga belajar praktek-praktek sihir dari seorang Maroko di Kota Suci. Dilaporkan bahwa ia mempraktekkan sihir tidak lama setelah kembali dari Mekah, tetapi kemudian menjauhinya sama sekali sekitar tahun 1905.¹⁶⁷

Di bawah ini penjelasan kata parewa yang sering digunakan dalam bahasa Minangkabau:

Ada orang-orang muda di Minangkabau yang disebut parewa. Mereka tidak mengganggu kehidupan keluarga. Mereka hidup dengan main judi, sabung ayam dsb. Mereka juga ahli dalam pencak dan silat. Mereka mempunyai hubungan luas, parewa dari berbagai desa saling menghormati dan menjunjung satu sama lainnya. Tetapi

¹⁶⁷ Umar Usman. "*Mengenang Almarhum Syekh Muhammad Jamil Jambek*", Hikmah IX No. 48, Jakarta; 26 Jumadilawal 1376 H, 29 Desember 1956, hlm. 15. Juga Tamar Jaya, Pusaka Indonesia, Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1965, hlm. 285.

mereka sangat membela kehormatan suku atau desa. Menyangkut hubungan dengan sahabat, mereka akan membela sahabat itu sampai mati; mereka menganggap saudara-saudara sahabat mereka sebagai saudara mereka sendiri, seakan-akan mereka saudara seibu, sedarah, sesuku. Mereka menjauhi rayuan atau menyebut gadis dengan julukan buruk. Kepada orang yang kalah dalam permainan judi, sehingga seluruh uangnya habis, pemenang akan memberi sekadar pakaian dan uang, ongkos orang yang kalah untuk perjalanan pulang dibayar oleh pemenang. Parewa menghormati orang beragama, dan kadang-kadang mereka bermurah hati. Mereka setia dan siap untuk membantu.¹⁶⁸

Ia mulai mengajar menurut garis-garis tradisional sekembalinya di Bukittinggi tahun 1903. Murid-muridnya kebanyakan terdiri dari guru dan kulipah (pembantu guru dalam praktek mistik) dalam tariqah, yang menghormatinya karena ia adalah syekh tarekat Naqsyabandiyah, suatu atribut yang meresahkan Jambek.¹⁶⁹ Ia memperkenalkan sistem tablig (pertemuan umum keagamaan), yang belum pernah dikenal di Minangkabau sebelumnya. Sistem ini lalu dianut oleh para pembaru, terutama organisasi Muhammadiyah.

Untuk mencapai para pengikutnya di Minangkabau, khususnya di Bukittinggi dan desa-desa di sekitar kota itu, ia biasa berkunjung ke rumah mereka, mengadakan tablig dan mengimbau mereka untuk kembali ke ajaran murni Islam. Tablig-nya yang sering diberikan di balai, atau gedung besar lainnya, dihadiri sejumlah besar pengikutnya. Dalam tablig, biasanya ia menyerang berbagai praktek tidak benar seperti bid'ah, kepercayaan takhayul dan sebagainya. Ia juga menyerang praktek-praktek tarekat, yang dianggapnya sebagai penyimpangan ajaran murni Islam, dan menyerukan kaum Muslimin untuk memperbaiki iman mereka.¹⁷⁰

Bertentangan dengan cara Haji Abdul Karim Amrullah, yang menentang keras setiap praktek yang dianggapnya tidak sesuai dengan ajaran Islam, Syekh Muhammad Jamil Jambek, yang meninggal dunia 31 Desember 1947

¹⁶⁸ Lihat Deliar Noer *the Rise*., hlm. 53, yang diterjemahkannya dari buku Hamka. 1957. *Tenggelamnya Kapal van der Wijck*, Jakarta: Balai Pustaka

¹⁶⁹ Tamar Jaya, *Pusaka Indonesia*, hlm. 267-288.

¹⁷⁰ Mahmud Yunus, *op. cit.*, hlm. 142.

mengungkapkan kritiknya secara diplomatis tanpa menyinggung perasaan orang yang masih mempraktekkan tarekat dan cara tradisonal lainnya.¹⁷¹

2.5.2 Dr. H. Abdullah Ahmad

Haji Abdullah Ahmad lahir di Padang Panjang tahun 1878, putra Haji Ahmad, seorang alim dan pedagang tekstil. Usai pendidikan dasar pada sekolah negeri serta pendidikan agama di rumah, ia berangkat ke Mekah bersama dengan Haji Abdul Karim Amrullah dan Syekh Muhammad Jamil Jambek, untuk belajar pada Syekh Ahmad Khatib. Ia terutama menentang bid'ah (inovasi palsu) dan praktek-praktek tariqah.¹⁷² Ia juga tertarik pada penyebaran gagasan-gagasan reformis melalui publikasi. Pertama-tama ia menyumbangkan gagasan-gagasannya dengan menjadi agen berbagai terbitan berkala bersifat reformis seperti al-Imam lewat Syekh Tahir Jalaluddin al-Azhari di Singapura dan al-Ittihad dari Kairo.¹⁷³ Di samping itu, dipengaruhi oleh al-Imām serta sistem sekolah modern al-Iqbal al-Islamiyyah (Penerapan Islam), Haji Abdullah Ahmad mendirikan terbitan berkala al-Munir (Cahaya) pada tahun 1911-1916, dan mendirikan Adabiyah, sekolah modernis pertama di Padang tahun 1909.

Pada tahun 1926, ia pergi ke Konferensi Khalifah di Kairo dengan Haji Abdul Karim Amrullah sebagai utusan PGAI, Persatuan Guru-guru Agama Islam. Pada kesempatan itu, kedua ulama dari Minangkabau ini menerima gelar doktor honoris causa di bidang agama dari Hai'at al-Jam'iyyat Kubbār al-Ulama (Organisasi Masyarakat Ulama Utama Timur Tengah).¹⁷⁴ Oleh karena kedua pembaru akan sering disebut dalam makalah ini, rincian lebih lanjut mengenai diri mereka akan diuraikan dalam pembahasan kemudian.

¹⁷¹ Mukti Ali. 1957. *Liberalism and Islam in Indonesia*. Institute of Islamic Studies, McGill University, hlm. 5.

¹⁷² Mahmud Yunus. 1960. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Mahmudiyah, hlm. 137.

¹⁷³ Deliar Noer, *op. cit*, hlm. 58.

¹⁷⁴ Duski Nawawi. 1960. "Perjuangan Dr. H. Abdul Karim Amrullah", *Hikmah* XIII No. 12, hlm. 8. Lihat juga H.A. Mukti Ali. 1957. *Liberalism and Islam in Indonesia*. Montreal: Institute of Islamic Studies McGill University, hlm. 5.

Riwayat hidup Abdullah Ahmad, tokoh pembaharuan Islam di Minangkabau agak mirip dengan riwayat hidup ulama lain. Sebagai putera ulama, Abdullah Ahmad juga belajar di beberapa surau di daerahnya. Pada tahun 1895, dalam usia 17 tahun dia pergi ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji dan mendalami agama. Ketika kembali ke Sumatera Barat pada tahun 1899, dia langsung ke Padang Panjang untuk membantu ayahnya mengajar di surau.

Beberapa tahun kemudian, pamannya yang mempunyai surau di Padang meninggal dunia. Abdullah Ahmad ke-mudian menggantikan kedudukan pamannya dan mengajar di sana selama 3 tahun. Untuk memenuhi kebutuhan hidup-nya sehari-hari, Abdullah Ahmad berdagang kain. Dia suka dan sering bepergian, baik untuk kepentingan dagang maupun untuk kepentingan agama. Dia juga sering mengadakan surat menyurat yang berhubungan dengan kepentingan dagang dan agama tersebut.

Pada 1905 dia menulis surat kepada bekas guru-nya Syaikh Ahmad Chatib di Makkah, untuk meminta fatwa mengenai Tarekat Naqsyabandiyah. Berdasarkan fatwa yang diterimanya, dia menerbitkan tulisan yang menentang tarekat. Barangkali peristiwa itu merupakan tanda pertama modernisasi Islam di Minangkabau pada abad ini.¹⁷⁵ Teman sekelas dan sekelas Abdullah Ahmad, Thahir Djalaluddin setelah menamatkan pelajaran di Mekkah untuk sementara waktu belajar di Al-Azhar, Kairo dan kemudian menetap di Singapura. Sekitar tahun 1906 dia merencanakan mendirikan sekolah menurut cara moderen. Sekolah ini mengajarkan agama, di mana taqlid tidak berperan lagi di dalamnya. Sekolah ini juga mendorong ijtihad untuk penelitian bebas terhadap Qur'an dan Hadits. Rencana pendirian sekolah dan cita-cita keagamaan serta kemasyarakatan disebar luaskan melalui majalah Al-Imam, yang juga tersebar di Minangkabau. Majalah ini terbit antara 1906 hingga 1910.

Pada 1906 Abdullah Ahmad mengunjungi Syaikh Thahir Djalaluddin di Singapura. Di bawah pengaruh ide-ide pendidikan Thahir Djalaluddin dan sekolah gubernemen yang dilihatnya di Padang, pada tahun 1907 Abdullah Ahmad

¹⁷⁵ Alfian, hlm. 158.

mendirikan sekolah Adabiyah di Padang Panjang. Berbeda dengan pendidikan di surau, dalam sekolah Adabiyah sistem klasikal diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen. Di samping pelajaran agama, pelajaran membaca dan menulis huruf latin dan ilmu hitung dalam sekolah ini juga diberikan, tetapi rencana sekolah ini ga-gal dan belum sampai usia setahun sekolah ini sudah ditutup dan dipindahkan ke Padang. Sebab-sebab kegagalannya antara lain: letaknya yang kurang menguntungkan untuk perdagangan kain (di mana Abdullah Ahmad aktif bekerja) dan keinginan untuk menerbitkan koran, sedangkan fasilitas dan relasinya yang baik terdapat di Padang.

Faktor terpenting yang menyebabkan kepindahannya ke Padang adalah karena adanya perlawanan di Padang Panjang terhadap pendirian sekolah tersebut, sehingga pada permulaan berdirinya hampir tidak ada muridnya.¹⁷⁶ Keberatan terhadap sekolah ini tidak ditekankan pada isi mata pelajaran yang diberikan, sudah cukup luas.¹⁷⁷ Tetapi cukup mengherankan kepada dua unsur dalam metode digunakannya papan tulis dan meja, bangku.¹⁷⁸

Di Padang sekolah Adabiyah ini berjalan jauh lebih maju dibanding ketika masih di Padang Panjang. Pendidikan umum lebih ditekankan daripada pendidikan agama, sebab ternyata pendidikan umum sangat laku di Padang. Untuk memperbaiki mutu pendidikan umum Abdullah Ahmad memasukkan empat orang guru berbangsa Belanda, disamping dua orang Indonesia, yang juga mempunyai ijazah untuk mengajar di tingkat HIS. Pada tahun 1916 sekolah Adabiyah ini diakui oleh pemerintah sebagai HIS pertama yang didirikan oleh organisasi Islam. Setahun berikutnya mendapat subsidi penuh dari gubernemen.

Perbedaan antara sekolah Adabiyah dengan HIS yang lain di Padang, terletak pada pemberian pelajaran agama 2 jam perminggu, yang diberikan oleh Abdullah Ahmad sendiri. Sekolah HIS lain pada umumnya hanya terbuka bagi anak-anak pegawai dan keluarga tertentu saja, sedangkan sekolah Adabiyah terbuka untuk

¹⁷⁶ Hamka, *Ajahku*, hlm. 95-96

¹⁷⁷ Hal ini secara langsung hanya dilaporkan oleh seorang peninjau Belanda, Van Ronkel, hlm. 17.

¹⁷⁸ *Sedjarah Adabijah*, hlm. 2; Tamar Djaja, *Pusaka Indonesia* hlm. 296.

semua orang yang dapat membayar uang sekolah. Oleh karena itu, sekolah ini sangat laku dan disukai oleh anak-anak pedagang.¹⁷⁹

Selain kepada sekolah Adabiyah dan perdagangannya, Abdullah Ahmad masih giat dalam masalah agama. Pada tahun 1910 dia menerbitkan majalah Al-Munir yang dapat bertahan terbit hingga tahun 1916. Dalam majalah ini, dua kali sebulan dibicarakan ilmu pengetahuan umum seperti ilmu bumi, astronomi, dan kesehatan, akan tetapi pusat perhatian tetap pada bidang agama.¹⁸⁰ Disamping itu, Abdullah Ahmad juga memberikan pengajian kepada para pedagang, sekali dalam seminggu. Mulai tahun 1920 dia mengadakan aksi untuk mendirikan sekolah guru agama, dan untuk maksud ini, dia berkeliling ke seluruh Sumatera untuk mengumpulkan dana.¹⁸¹

Pada tahun 1925 Haji Abdullah Ahmad dikirim ke Kairo bersama Haji Abdul Karim Amrullah sebagai wakil umat Islam Minangkabau untuk menghadiri kongres internasional yang diselenggarakan Universitas Al-Azhar, untuk membicarakan penghapusan khalifah di Turki. Keduanya kemudian mendapat gelar doktor kehormatan dari Al-Azhar. Penugasan ini membuktikan bahwa Abdullah Ahmad dipandang sebagai ulama terkemuka, sekurang-kurangnya oleh kelompok kaum muda.

Walaupun Abdullah Ahmad merupakan tokoh terke-muka dalam bidang agama, namun ketokohan yang paling menonjol terletak pada bidang pendidikan. Akan tetapi usahanya di bidang pendidikan dengan sekolah Adabiyah ini oleh kebanyakan orang tidak dinilai tinggi. Sekolah ini sesungguhnya merupakan bentuk adaptasi dari sistem pendidikan surau kepada suatu penyesuaian total kepada sistem Barat. Perhatian terhadap pendidikan agama di sekolah ini sangat kecil, sedang seluruh unsur tradisional dalam waktu beberapa tahun saja telah ditinggalkan. Oleh karena itu kalangan ulama tradisional Minangkabau sebagian besar tidak dapat

¹⁷⁹ Algemeen Verslag van bet Onderwijs, hlm. 45 dan lihat juga Alfian, Muhammadijah, hlm. 163-165

¹⁸⁰ Hamka, Ajahku, hlm. 234 menyebut ayahnya, H. Abdul Karim Amrullah sebagai "lidah" kaum muda dan Abdullah Ahmad "penanya", karena yang terakhir ini kurang pandai berpidato.

¹⁸¹ Dia pernah juga membela (dengan argumentasi yang agak aneh), bahwa *loterij* tidak diharamkan oleh syariat Islam (Schrieke, Bijdzage hlm. 287-298). Sekolah itu didirikan pada tahun 1930/31 lihat Mahmud Junus, hlm. 89-91.

menerima perubahan yang cepat ini. Dengan demikian penyesuaian diri kepada sistem pendidikan Barat ini, membuat Abdullah Ahmad kehilangan kesempatan untuk mengadakan pembaharuan agama. Lebih-lebih lagi ketika dia berpihak pada Belanda dalam perlawanan terhadap guru ordonansi di Sumatera Barat.¹⁸²

2.5.3 Dr. H. Abdul Karim Amrullah

Haji Abdul Karim Amrullah dikenal sebagai Haji Rasul atau *Inyak deer* (Doktor), lahir di Sungai Batang, Maninjau tahun 1298H/1879M dan meninggal di Jakarta, Sabtu tanggal 21 Jumadilawal 1364H/2 Juni 1945. Setelah mengecap pendidikan dasar menurut garis-garis tradisional di berbagai tempat di Minangkabau, ia berangkat ke Mekah tahun 1894 untuk melanjutkan pelajarannya dan kembali ke Minangkabau tujuh tahun kemudian. Pada 1903, ia kembali ke Mekah untuk kedua kalinya dan pulang ke Minangkabau 1906. Sebelum berangkat ke Mekah, Haji Abdul Karim Amrullah belajar mengaji pada Haji Muhammad Salih dan tata bahasa Arab pada Haji Hud di Tarusan (Sumatra Barat). Ia melanjutkan belajar fikih (hukum Islam) dan tafsir (interpretasi Quran) pada ayahnya sendiri, Syekh Muhammad Amrullah, dan Sutan Muhammad Yusuf di Sungai Rotan, Pariaman (Sumatera Barat).¹⁸³

Seperti banyak pemuda di zamannya, Haji Abdul Karim Amrullah tidak mengecap pendidikan Barat seperti Sekolah Raja, tempat gurunya Ahmad Khatib serta rekan-rekannya belajar. Hal ini dapat dipahami, pertama-tama karena sekolah itu dimaksudkan untuk mencetak pegawai pemerintah, tetapi juga, para ulama ketika itu beranggapan bila mengirim anaknya ke sekolah pemerintah, sama seperti mempercayakan pendidikannya kepada pemerintah kafir. Dapat dipahami bahwa pendidikan yang diperoleh Haji Abdul Karim Amrullah dari Syekh Ahmad Khatib, ayahnya, begitu pula studi sendiri, terutama bersifat keagamaan.

¹⁸² Ordonansi guru dari 1925 mewajibkan sebuah pendaftaran bagi para guru agama. Dalam arti tertentu ordonansi ini bersifat sedikit kurang keras dari ordonansi guru tahun 1905, yang mewajibkan sebuah prosedur untuk minta izin bagi para guru agama. Ordonansi dari tahun 1905 hanya berlaku di Jawa dan Madura, sedangkan peraturan tahun 1925 mestinya diterapkan di seluruh Indonesia. Tentang perlawanan lihat Hamka, *Ayahku*, hlm. 149-154.

¹⁸³ Hamka, *Ayahku*, hlm. 23.

Haji Abdul Karim Amrullah banyak bepergian ke luar Minangkabau, terutama ke Jawa dan Malaya. Tahun 1916 ia pergi ke Malaya, tetapi tidak lama berdiam di sana karena ajarannya ketika itu oleh instansi pemerintah dianggap "tidak ortodoks". Ketika di Jawa, ia berhubungan dengan para pemimpin Sarekat Islam dan Muhammadiyah. Setelah perkenalannya ia membawa Muhammadiyah ke Minangkabau tahun 1925, dan beberapa tahun kemudian menyebar sangat pesat di seluruh daerah.¹⁸⁴

Haji Abdul Karim Amrullah sangat aktif dalam gerakan pembaruan. Suraunya di Padang Panjang berubah nama menjadi Sumatra Thawalib, sistem sekolah reformis Muslim yang melahirkan Persatuan Muslimin Indonesia (PERMI). Di samping itu ia menjadi penasihat Persatuan Guru-Guru Agama Islam, atau PGAI, pada tahun 1920 dan memberikan bantuannya bagi pendirian sekolah menengah, Norma Islam di Padang pada tahun 1931. Pada 1920-an Haji Abdul Karim Amrullah berjuang melawan komunisme di Minangkabau, khususnya dalam Sumatra Thawalib. Pada 1928 ia menjadi pemimpin suatu gerakan yang memaksa pemerintah Belanda untuk membatalkan rencana pelaksanaan *Guru Ordonnantie* (Ordinansi Guru) dan pada tahun 1932 ia memerangi *Ordonnantie* Sekolah Liar di Minangkabau. Antara tahun 1929 sampai 1939, dengan maksud menyebarkan gagasan-gagasan pembaruannya di luar Minangkabau, ia menjelajahi seluruh Sumatra untuk memberi ceramah.¹⁸⁵

Karakter para pembaru di atas dilukiskan oleh Ph. S. van Ronkel, seorang pejabat Belanda urusan Studi Bahasa-bahasa Indonesia, dalam laporannya kepada Pemerintah Belanda tahun 1916 bahwa,

¹⁸⁴ Ibid., hlm. 98-99.

¹⁸⁵ Deliar Noer, *op.cit*, hlm. 57. Dr. H. Abdul Karim Amrullah yang tidak pernah mendaftarkan diri sebagai anggota partai politik manapun, kecuali untuk alasan penguasa pemerintah yang sah maupun adat tidak bisa berfungsi di Minangkabau, menurut Belanda, ia ditahan dan dibuang ke Sukabumi (Jawa Barat) tahun 1941. Tidak lama setelah Jepang mengalahkan tentara Belanda tahun 1942, Dr. H. Abdul Karim Amrullah dibebaskan dari penjara. Lalu, penguasa militer Jepang, untuk tujuan-tujuan politik, mengangkatnya sebagai penasihat Pusat Tenaga Rakyat, suatu organisasi yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta, Dewantoro dan K.H. Mas Mansur. Sesudah itu ia diangkat sebagai penasihat Pusat Kebudayaan Keagamaan. Di samping itu, Jepang juga mengangkat Haji Abdul Karim Amrullah sebagai instruktur pada Latihan Ulama, suatu pusat pelatihan bagi guru-guru Islam di pulau Jawa; kursus-kursus ini diselenggarakan oleh MIAI, Majelis Islam A'la Indonesia. Lihat Nawawi Duski, *op. cit.*, hlm.8 dan Hamka Ayahku, hlm. 149-151.

Haji Abdullah Ahmad lebih merupakan penulis daripada guru, lebih merupakan Muslim universalis daripada Muslim Melayu. Haji Abdul Karim Amrullah merupakan tokoh paling agresif di antara ulama modernis, yang fanatik dan paling ditakuti para lawannya. Syekh Muhammad Jamil Jambek adalah 'manusia praktis'. Ia yang paling persuasif dan paling berpengaruh di antara para ulama modernis. Ia bukan seorang orator seperti Haji Abdul Karim Amrullah dan tidak dapat bersaing dengan penulis Haji Abdullah Ahmad tetapi mampu melampaui mereka dalam mempromosikan gagasan-gagasan modernis tanpa membosankan pendengarnya.¹⁸⁶

Hamka, putra Haji Abdul Karim Amrullah, melukiskan watak ayahnya sebagai keras kepala, lugas, puritan, angkuh, kukuh, fanatik, serta bertemperamen tinggi.¹⁸⁷ Maka, walaupun ketiga pembaru ini memiliki tujuan yang sama untuk mengubah tradisi kehidupan beragama di Minangkabau, watak mereka mengantarnya menggunakan cara-cara berbeda untuk mendekati massa. Haji Abdullah Ahmad, dengan kemampuannya yang luas di bidang tulis-menulis, tampaknya terbuka dan luwes. Sikap luwesnya dalam mendekati orang memungkinkannya bekerja sama dengan pemerintah Belanda. Misalnya, untuk kelanjutan sekolahnya, Adabiyah di Padang, ia mendapat subsidi dari pemerintah kolonial. Mungkin karena alasan yang sama, ia menyetujui rencana Pemerintah Belanda untuk melaksanakan *Guru Ordonnantie* di Minangkabau pada tahun 1928.¹⁸⁸

Syekh Muhammad Jamil Jambek kelihatannya lebih berhasil dalam kegiatan-kegiatan pembaruannya dengan menggunakan pendekatan persuasif. Kritiknya diungkapkan dengan cara yang tidak melukai perasaan orang. Haji Abdul Karim Amrullah, seperti disebutkan di atas, sehubungan praktek keagamaan, tidak menawarkan kebijakan kompromi kepada penguasa adat yang melaksanakan hukum waris adat dalam masyarakat, mnaupun kepada Kaum Tua (tradisionalis). Ia teguh melawan pemerintah Belanda yang menjadi mitra kedua pembaru terakhir. Ia menyerang keras siapa pun yang mempraktekkan apa yang dianggapnya sebagai *bid'ah* (inovasi), seperti *uṣalli* (niat), *marhaban* (selamat datang), *talqin* (instruksi

¹⁸⁶ Taufik Abdullah. 1967. *Minangkabau 1900-1927: Preliminary Studies in Social Development*. Ithaca: Cornell University, hlm. 87.

¹⁸⁷ Hamka, *Ayahku*, hlm. 117.

¹⁸⁸ Ibid., hlm.182.

yang diberikan kepada orang yang meninggal pada penutupan acara pemakaman). Kritiknya terhadap mere kayang membela *taqlid* (penerimaan buta), serta praktek tarekat Naqsyabandiyah yang dianggapnya menyimpang dari ajaran asli di Minangkabau, membedakannya dari siapa pun di antara rekan sezamannya.

Dalam rencana membersihkan Islam dari apa yang dianggapnya sebagai penyimpangan ajaran-ajaran Islam, para pemimpin Kaum Muda (reformis) memperbarui upaya guru mereka, Syekh Ahmad Khatib dan Syekh Tahir Jalaluddin al-Azhari yang menentang keras praktek-praktek tarekat Naqsyabandiyah dan hukum waris adat. Haji Abdul Karim Amrullah di Padang Panjang, Haji Abdullah Ahmad di Padang dan Syekh Jambek di Bukittinggi, yang merupakan lokalitas tiga kota besar di Minangkabau, mengimbau kaum Muslimin untuk meninggalkan praktek-praktek tidak benar tarekat Naqsyabandiyah, khususnya dalam menggunakan *rābitah* pada awal suluk (praktek-praktek mistik) dan menolak memakan daging. Mengenai praktek-praktek ini, Haji Abdul Karim Amrullah mengatakan bahwa

...ada orang lain yang menyebut dirinya mistikus, yang menundukkan kepala mereka dengan menggunakan sorbannya dan baju panjangnya... "para sufi" tidak menginginkan pakaian bagus... (mereka) memisahkan dirinya dari orang lain, tidak menginginkan makanan enak dan lezat... dan (mereka) menyerahkan dirinya sama sekali untuk beribadah dan mengulangi zikir. Praktek-praktek itu sebenarnya bukan mistik dan hendaknya dianggap sebagai menyesatkan.¹⁸⁹

Dengan menyerang praktek-praktek itu mereka menantang para pemimpin tarekat yang tetap berkuasa dalam masyarakat, terutama dalam persaudaraan. Pada saat yang sama mereka mengutuk ulama yang, menurut mereka, bertanggung jawab atas kemerosotan ajaran Islam dan praktek-prakteknya yang membawa kaum Muslimin di Minangkabau dalam "kegelapan". Mereka juga menyerang dan mengecam sikap *taqlid* para ulama yang umumnya bersatu sebagai Kaum Tua. Haji Abdul Karim Amrullah mengatakan bahwa,

¹⁸⁹ R.L. Archer. 1937. "Muhammadan Mysticism in Sumatra", JMBRAS, 15 September, Bagian 2, hlm. 112.

jangan berat sebelah, seakan-akan Anda membela mazhab (aliran yurisprudensi Islam) dari Syafi'i dan mengutuk yang lain, karena ini merupakan kekerasan kepala yang dilarang keras oleh Allah dan Rasul-Nya. Anda harus menerima pendapat-pendapat mereka, jika benar, dan meninggalkannya jika berlawanan dengan Quran dan Hadis.¹⁹⁰

Kemudian Haji Abdul Karim Amrullah menyatakan bahwa keempat Imam Yurisprudensi Islam tidak mengizinkan para pengikutnya untuk menerima ajaran-ajaran mereka secara buta tanpa mempelajari dan menganalisa kebenaran dan keabsahan argumentasi mereka dibandingkan dengan Quran dan Hadis. Selanjutnya Haji Abdul Karim Amrullah menyatakan, “Mereka (keempat Imam) bahkan meminta kepada para pengikutnya untuk kembali kepada Quran dan Hadis, jika pendapat-pendapat mereka ternyata bertentangan dengan Quran dan Hadis.¹⁹¹

Pandangan Haji Abdul Karim Amrullah, menurut Schrieke, didukung oleh Haji Abdullah Ahmad dalam bukunya Muqaddimah halaman 16: “Apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh mazhab Syafi'i? Mazhab yang mana? Yang asli atau yang direkayasa oleh orang lain sesudahnya? Apakah mazhab Syafi'i yang paling tepat dan layak diterima, sedangkan mazāhib lain (bentuk jamak mazhab) tidak benar?”.¹⁹²

Dengan menyerang mereka yang mempertahankan sikap taqlid dan, di lain pihak membela ijtihad, Kaum Muda dengan program reformasinya, membuka jalan bagi perkembangan intelektual kaum Muslimin. Melalui ini mereka berharap, Islam akan mampu menghasilkan para pemikir intelektualnya sendiri (*mujtahidin*), mereka yang mampu menafsirkan Islam dari sumber-sumber aslinya, yaitu Al Quran dan Hadis, menurut zaman dan tempat mereka hidup. Mereka percaya bahwa

¹⁹⁰ Haji Abdul Karim Amrullah, *Sendi Aman Tiang Selamat*, Sungai Batang, 1340 H., Jilid 1, hlm. 17-33.

¹⁹¹ Ibid, hlm. 17. Untuk mendukung pendapatnya, Haji Abdul Karim Amrullah mengutip ucapan salah seorang dari keempat Imam (ia tidak menyebut Imam yang mana), yang meminta para pengikutnya untuk meninggalkan pendapat-pendapatnya, dan kembali pada Quran dan Hadis, jika pendapat-pendapat keempat Imam sangat bertentangan. Haji Abdul Karim Amrullah mengutip: *izāikhtalafa al-kalāmu yu'khaḏu bimā yuwāfiq al-adillat az-zāhirah* (Bila ajaran keempat Imam saling bertentangan, maka yang sesuai dengan Quran dan Hadis hendaknya diambil).

¹⁹² B. J. O. Schrieke, op. cit., hlm. 65.

upaya-upaya mereka akan menyembuhkan sesama Muslimin di Minangkabau dari pembiasaan anti-intelektual berasal dari Barat.

2.6 Respon Masyarakat Padang Panjang terhadap Sekolah Pembaruan

Kehadiran sekolah-sekolah Islam pembaruan di Padang Panjang awalnya memicu beragam reaksi dari masyarakat. Masyarakat awam dan kalangan muda umumnya menyambut baik lembaga pendidikan model baru ini, karena dianggap memberi harapan kemajuan tanpa meninggalkan agama. Antusiasme kalangan Minangkabau terhadap pendidikan modern tercermin dari ramainya anak nagari yang ingin bersekolah, baik di sekolah kolonial maupun madrasah.

Padang Panjang pun mengalami lonjakan pelajar, kota kecil ini menjadi magnet bagi siswa dari berbagai daerah yang ingin belajar di Adabiyah, Thawalib atau Diniyah, mengingat reputasinya sebagai pusat pembaruan pendidikan Islam para orang tua yang sebelumnya ragu menyekolahkan anak ke sekolah Belanda, kini punya alternatif madrasah modern yang diajarkan ulama setempat.¹⁹³ Dengan demikian, banyak keluarga mengalihkan anak mereka dari surau tradisional ke sekolah pembaruan yang dianggap lebih prospektif. Pemerintah kolonial sendiri relatif toleran pada awalnya, karena sekolah atau madrasah ini tidak secara langsung berlawanan dengan kebijakan etis (bahkan membantu mencerdaskan pribumi). Namun, kontrol tetap ada, misalnya melalui kewajiban register dan inspeksi meski hingga 1925 belum ada pelarangan berarti.

Di sisi lain, kalangan adat dan ulama tradisional (Kaum Tuo) memberikan respon yang lebih kritis. Bagi sebagian penghulu adat, masuknya sistem sekolah dipandang dapat mengikis fungsi surau yang juga merupakan sentra adat. Benar saja, fungsi surau sebagai lembaga sosial adat perlahan berkurang ketika madrasah mengambil alih peran mendidik generasi muda. Para ulama tua pun merasa

¹⁹³ Tiga institusi utama dapat disebut sebagai ujung tombak, yaitu Adabiyah School di Padang, Sumatra Thawalib di Padang Panjang, dan Diniyah School di Padang Panjang. Ketiganya berdiri dalam rentang 1909-1915 dan saling berbagi visi reformis. Ciri khas sekolah-sekolah pembaruan ini adalah penerapan kurikulum integratif (agama dan umum), penggunaan metode klasikal, serta semangat tajdid (pembaharuan) dalam materi ajar. Lihat Mardjohan. 2006. *Embrio Muhammadiyah Ada di Kauman Padangpanjang*. Padangpanjang: Peringatan 80 Tahun Perguruan Muhammadiyah Kauman Padangpanjang.

kewibawaan mereka tertantang oleh ulama muda lulusan Mekkah yang membawa ide-ide baru. Pertentangan antara Kaum Tuo dengan Kaum Mudo pun tak terhindarkan, berkembang menjadi polemik terbuka melalui tulisan dan debat publik di Minangkabau. Misalnya, terjadi perdebatan tentang boleh tidaknya tradisi tertentu (kenduri, doa qunut, tarekat, dan sebagainya) yang melibatkan ulama muda vs tua.

Polarisasi masyarakat pun terjadi sebagian memihak pembaruan, sebagian lagi bertahan pada tradisi lama. Sebagai puncaknya, di tahun 1920-an masyarakat Minangkabau terbelah dalam organisasi formal, yaitu Kaum Mudo mendukung lembaga seperti Sumatra Thawalib dan kemudian Muhammadiyah (masuk ke Padang Panjang sekitar 1925), sementara Kaum Tuo mendirikan organisasi Persatuan Ulama (PU) yang kelak menjadi Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah) pada 1928. Di Padang Panjang sendiri, gesekan itu terasa misalnya saat upaya Abdullah Ahmad mengajak rujuk ulama tua melalui PGAI (1920) gagal karena kubu konservatif enggan berkompromi.

Walaupun sempat terjadi ketegangan, lambat laun masyarakat Padang Panjang secara umum mulai menerima sekolah-sekolah pembaruan sebagai bagian dari kehidupannya. Keberhasilan sekolah-sekolah itu mencetak generasicerdas dan berakhlak, yang kemudian hari berkontribusi di tengah masyarakat, membuat keraguan publik mencair. Bahkan beberapa ulama Kaum Tuo akhirnya mendirikan madrasah juga agar tidak ditinggalkan umat, contohnya Syekh Sulaiman ar-Rasuli di Candung yang mendirikan Madrasah Tarbiyah Islamiyah (1928) dengan tetap berhaluan tradisional.

Hal ini menandakan model sekolah pembaruan telah diakui efektif, hingga diadaptasi oleh pihak yang tadinya menolak. Masyarakat Padang Panjang pun merasakan manfaat nyata kota ini berkembang sebagai “kota pendidikan” dengan julukan Serambi Mekkah yang semakin kuat, dan para lulusan sekolah Islam modern mengharumkan nama Padang Panjang di kancah regional. Meski perdebatan agama lama dengan baru masih berlanjut (bahkan hingga ke media dan novel-novel era 1920-1940 menggambarkan konflik tersebut), secara sosial tidak terjadi pergolakan kekerasan. Kultur demokratis Minang cenderung menyalurkan

perbedaan pendapat dalam bentuk polemik wacana ketimbang bentrokan fisik. Aliansi ulama muda-tua pun mulai terjalin menjelang akhir 1920-an, terutama saat menghadapi isu-isu bersama seperti polemik politik kolonial dan sebagainya. Kesimpulannya, respon masyarakat Padang Panjang terhadap sekolah pembaruan bergerak dari awalnya skeptis dan terbelah menuju diterima dan diinstitusionalisasi. Gerakan pendidikan Islam modern akhirnya mengakar sebagai bagian dari identitas kota Padang Panjang, yang terus dikenang sebagai pusat pembaruan pendidikan Islam di Minangkabau pada era 1905-1925.

BAB III

AKAR ORGANISASI DAN EMBRIO PERGURUAN MUHAMMADIYAH DI PADANG PANJANG 1925-1935

3.1 Relasi Muhammadiyah dan Budaya Minangkabau

Dalam bidang pendidikan, Muhammadiyah melanjutkan model sekolah yang digabungkan dengan sistem pendidikan gubernemen. Di samping sekolah desa di kampungnya sendiri Ahmad Dahlan juga membuka sekolah yang sama di Kauman Yogyakarta dan tempat lainnya.¹⁹⁴ Hubungan Ahmad Dahlan dengan murid-murid sekolah pendidikan guru dilanjutkan terus. Untuk beberapa waktu dia masih tetap mengajar agama di sana, walaupun hanya diijinkan di luar jam sekolah.¹⁹⁵ Sedangkan beberapa anggota Muhammadiyah lainnya, setelah menunggu dalam waktu yang cukup lama, mendapatkan ijin mengajar pada sekolah calon pegawai (OSVIA) di Magelang.

Pada akhir 1923, di Yogyakarta telah didirikan empat sekolah dasar Muhammadiyah, dan sudah mulai mempersiapkan mendirikan sekolah HIS dan sekolah pendidikan guru.¹⁹⁶ Demikian pula Muhammadiyah juga sibuk mendirikan sekolah di luar Yogyakarta, misalnya mendirikan HIS di Jakara.¹⁹⁷

¹⁹⁴ Amir Hamzah Wirjosukarto, *Pembabaruan*, hlm. 117.

¹⁹⁵ Amir Hamzah Wirjosukarto, *Ibid.*, hlm. 82.

¹⁹⁶ Alfian, *Muhammadiyah*, hlm. 267-268.

¹⁹⁷ Verslag "Moehammadiyah" di Hindia Timoer, Tahun X (Januari-Desember 1923), hlm. 90-91.

Di samping mendirikan sekolah yang mengikuti model gubernemen, Muhammadiyah dalam waktu singkat juga mendirikan sekolah yang lebih bersifat agama. Sekolah ini, seperti Madrasah Diniyah di Minangkabau dimaksudkan untuk mengganti dan memperbaiki pengajian Qur'an yang tradisional. Untuk pengajian kitab, Muhammadiyah juga segera mencari penggantinya yang sesuai dengan tuntutan jaman moderen, usaha tersebut dapat dianggap sebagai realisasi dari rencana Sarekat Islam yang semenjak tahun 1912 berusaha mendirikan sekolah pendidikan agama, yang dapat menyaingi sekolah pendidikan guru gubernemen.¹⁹⁸

Pada 8 Desember 1921, Muhammadiyah sudah dapat mendirikan Pondok Muhammadiyah sebagai sekolah pendidikan guru agama. Dalam sekolah tersebut, pelajaran umum diberikan oleh dua orang guru dari sekolah pendidikan guru (*kweekschool*), sedangkan Ahmad Dahlan sendiri dan beberapa orang guru lainnya memberikan pelajaran agama yang lebih mendalam.¹⁹⁹ Melihat kegiatan-kegiatan ini, nampak jelas bahwa Muhammadiyah mengikuti pola yang sama dengan kegiatan yang dilakukan Abdullah Ahmad di Padang.²⁰⁰ Persamaan tersebut dapat dilihat dalam hal-hal berikut ini. Pertama adalah kegiatan tabligh, yaitu pengajaran agama kepada kelompok orang dewasa dalam satu kursus yang teratur. Kedua, mendirikan sekolah swasta menurut model pendidikan gubernemen dengan ditambah beberapa jam pelajaran agama perminggu. Ketiga, untuk membentuk kader organisasi dan guru-guru agama, didirikan Pondok Muhammadiyah seperti Normal Islam di Padang pada 1931.

Akan tetapi dalam bidang sosial ekonomi Muhammadiyah jauh lebih aktif dari pada gerakan reformis Islam di Padang. Pada 1917 Muhammadiyah membentuk bagian khusus untuk wanita yaitu Aisyiah. Bagian ini menyelenggarakan tabligh khusus untuk wanita, memberikan kursus kewanitaan,

¹⁹⁸ Hazeu, *Sarikat Islam Congres*. 17-24 Juni 1916

¹⁹⁹ Alfian, Muhammadiyah, hlm. 268. Pondok Muhammadiyah ini merupakan lanjutan dengan bentuk yang sudah disempurnakan daripada kursus yang dimulai oleh Dahlan pada tahun 1918 didalam rumahnya. Pada waktu permulaan ini masih disebut Al Qismul arqa dan jumlah muridnya delapan orang. Sekolah ini lalu diberikan beberapa nama lagi, sedangkan Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah baru merupakan nama yang definitif. Lihat Amir Hamzah Wirjosukarto, Pembabaruan, hlm. 118.

²⁰⁰ Beberapa kali terjadi pertemuan antara Ahmad Dahlan dan Abdullah Ahmad, yaitu pada kongres-kongres Sarekat Islam: keduanya mendapat kedudukan dalam pimpinannya.

pemeliharaan fakir miskin serta memperhatikan orang-orang sakit. Kegiatan Muhammadiyah dengan Aisyiahnya ini berjalan baik, terutama karena banyak orang Islam baik yang menjadi anggota maupun simpatisan Muhammadiyah memberikan zakatnya kepada organisasi ini. Sebelum tahun 1942, Muhammadiyah sudah dapat mendirikan klinik bersalin dan balai kesehatan ibu dan anak.

Kegiatan Abdullah Ahmad sebenarnya tidak berpengaruh terhadap pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia karena dianggap terlalu progresif. Di samping itu karena di Sumatera Barat muncul satu gerakan yang kuat dari Padang Panjang yang memusatkan diri pada kegiatan pendidikan agama yaitu Madrasah Diniyah dan Sumatera Thawalib. Hal ini berbeda dengan Muhammadiyah yang berhasil mendirikan dan mengembangkan model pembaharuan pendidikan dengan meniru model pendidikan *gubernemen*, meskipun hal ini tidak berarti bahwa tidak terjadi perlawanan terhadap Muhammadiyah.

Salah seorang peninjau Belanda melaporkan bahwa pada tahun-tahun pertama sekolah dasar yang didirikan Muhammadiyah walaupun masih sangat sederhana, namun ia merupakan elemen moderen dalam kraton Yogyakarta yang ultra konservatif. Oleh karena itu penguasa pribumi merasa ngeri terhadapnya.²⁰¹ Muhammadiyah berhasil melanjutkan model pembaharuan pendidikan disebabkan oleh adanya kenyataan bahwa ia menghadapi lingkungan sosial yang terbatas pada pegawai, guru maupun pedagang di kota. Kelompok menengah di kota dalam banyak hal merupakan latar belakang sosial yang dominan dalam Muhammadiyah hingga sekarang ini. Kelompok ini menguasai perusahaan percetakan yang secara ekonomis penting dalam masyarakat. Kelompok ini juga mementingkan pendidikan model Barat. Oleh karena itu Muhammadiyah dengan menyediakan model pendidikan Barat yang ditambah dengan pendidikan agama, mendapatkan hasil yang baik dalam kalangan ini.

Mendirikan cabang baru Muhammadiyah pada umumnya identik dengan mendirikan sekolah baru, dan hampir semua cabangnya terbatas di kota dengan kelompok masyarakat "kota".²⁰² Mungkin satu pengecualian dapat ditemukan di

²⁰¹ Van Der Wal, *De opkomst*, hlm. 194 (dari laporan Rinkes).

²⁰² Lihat khusus Pijper, *Fragmenta Islamica*, hlm. 165-168.

Minangkabau, di mana banyak cabang Muhammadiyah didirikan di kota-kota kecil, dan sekolah model gubernemen agak lebih sedikit ditemukan.

Pada 1932 Muhammadiyah di Jawa Tengah telah mempunyai 165 sekolah model gubernemen, di samping 68 sekolah agama yang pada umumnya dibuka pada siang hari atau sore, sebagai tambahan pendidikan gubernemen pagi harinya. Tetapi di Minangkabau hanya terdapat 4 sekolah model gubernemen dan 45 madrasah.²⁰³

Di kalangan umat Islam Indonesia, Muhammadiyah mempunyai pengaruh yang lebih luas dibanding dengan usaha Abdullah Ahmad yang terbatas di Padang. Muhammadiyah merupakan pembaharuan yang berbeda dengan Madrasah Diniyah dan Sumatera Thawalib yang tidak mau secara drastis menyesuaikan diri kepada sistem gubernemen. Akan tetapi untuk sementara ia masih terbatas pada kelompok sosial tertentu yaitu kelompok yang secara prinsipil terbuka untuk pendidikan Barat.

Hasil karya para pemimpin reformasi seperti Dr. H. Abdullah Ahmad, Syekh Jamil Jambek dan Dr. H. Abdul Karim Amrullah, serta keberhasilan Sumatra Thawalib dan Diniyah School bersama-sama dengan upaya-upaya reformis Muslim Kaum Muda, pada awal 1920-an menetapkan Pembaruan Islam sebagai kekuatan dominan sosial-politik masyarakat Minangkabau. Kekuatan Kaum Muda dalam angka dan pengaruh jauh melebihi kaum tradisional religius maupun lulusan sekolah Barat. Banyak di antara mereka yang disebut terakhir ini memilih untuk tinggal di "rantau", beberapa di antara mereka, seperti akan kita lihat, membantu mendirikan Muhammadiyah di Minangkabau.

Fraksi lain lagi di Minangkabau adalah Kaum Adat, yang kedudukan tradisionalnya sebagai kaum penguasa elite didukung oleh kolonialis Belanda. Gerakan Kaum Muda, seperti Gerakan Padri di abad kesembilan belas, menentang Belanda maupun Kaum Adat. Ini menjadi ancaman serius ketika Dr. H. Abdul Karim Amrullah dan Syekh Jamil Jambek serta para pengikutnya dari Kaum Muda,

²⁰³ Alfian, Muhammadiyah, hlm. 309 dan 406.

dengan tujuan mengubah masyarakat sesuai dengan reformisme Islam, menjadi pendukung Muhammadiyah di Minangkabau. Pertumbuhan yang pesat dan kecurigaan instansi pemerintah, membuat Kaum Muda lahan subur radikalisme politik.²⁰⁴

Walaupun pemimpin Muhammadiyah di Minangkabau tidak aktif di bidang politik, gerakan itu sering terlibat dengan politik. Belanda telah membuang banyak di antara pemimpinnya, dan dengan memasukkan mayoritas reformis Muslim ke dalam Kaum Muda yang dicurigai oleh Belanda sebagai komunis, dan mendapat tempat aman dalam Muhammadiyah, Dr. H. Abdul Karim dituduh Belanda membahayakan keamanan dan ketertiban. Kaum Muda (reformis) membawa sebagian radikalisme politiknya ke dalam gerakan ini, dan berniat mengawasi Muhammadiyah jika diberi kesempatan.

Karena pendirian dan pengembangan organisasi Muhammadiyah di Minangkabau tidak dapat dipisahkan dari pengaruh Dr. H. Abdul Karim Amrullah terhadap Gerakan Pembaruan Islam di daerah melalui Kaum Mudanya, maka laporan singkat tentang upaya-upaya dini untuk mendirikan organisasi ini kiranya pada tempatnya.

Pada 1907, ayah Dr. H. Abdul Karim Amrullah, seorang ulama yang disegani di nagarinya dan sekitarnya, meninggal dunia. Bertentangan dengan pendapat pamong distrik dan kehormatan tradisional, Haji Abdul Karim Amrullah berpendapat bahwa penyelenggaraan upacara pemakaman religius secara adat yang rumit, tidak sah menurut Hukum Islam. Sebagai akibatnya, ia ditolak sebagai guru agama, sampai beberapa bulan kemudian ia diundang untuk mengajar di surau di Kubu, bagian Sungai Batang.²⁰⁵ Di tempat inilah Haji Abdul Karim Amrullah mengawali karir yang sesungguhnya sebagai pembaru agama.

Enam belas tahun kemudian (1923), ketika gagasan-gagasan pembaruannya telah diterima secara luas dan pengaruhnya telah menyentuh hampir semua orang

²⁰⁴ Alfian. 1969. *Islamic Modernism in Indonesian Politics*. University of Wisconsin, 1969, hlm. 391.

²⁰⁵ Hamka. 1967. *Ayahku: Riwayat Hidup Dr. H. Abdul Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama*. Jakarta: Penerbit Wijaya, hlm. 8-83.

Muslim di Minangkabau dan di luar itu melalui sistem pendidikannya yang terkenal, Sumatra Thawalib, dan sekolah-sekolah reformis lain yang kebanyakan didirikan oleh mantan murid-muridnya, ia harus mengundurkan diri dari sekolah di Padang Panjang, dan kembali ke desanya sendiri, Sungai Batang. Pendirian-pendiriannya tentang komunisme dan partisipasi siswa dalam politik telah membuatnya kehilangan murid-murid dan asisten-asisten setianya yang membuat sekolah itu menjadi pusat gerakan komunis yang berpengaruh.

Pada Oktober 1924, di bawah pengaruhnya, saudara lelakinya Haji Yusuf Amrullah, yang menjadi *qadi* (hakim), pejabat agama tertinggi di Sungai Batang, dan Datuk Penghulu Besar (wafat 1933), seorang pegawai pemerintah pensiunan, mendirikan organisasi pendidikan, Sendi Aman. Organisasi ini tidak terlalu berhasil, karena dianggap sebagai perwujudan buku Haji Abdul Karim Amrullah, Sandi Aman Tiang Selamat, yang diterbitkan tahun 1922, dan dianggap sebagai ajaran anti-adat dan anti-penghulu.²⁰⁶ Haji Abdul Karim Amrullah tidak saja menguraikan bagaimana seseorang harus menjalankan kehidupan sosial etis tetapi ia juga menyerang beberapa aspek adat. Serangan-serangannya mengungkapkan konsep ortodoks Islamnya tentang kekuatan sekuler.

Ia memperbaharui kritik yang dilancarkan gurunya, Syekh Ahmad Khatib, mengenai hukum waris adat. Ia mengecam keras apa yang dianggapnya sebagai kewenangan penghulu ketika berurusan dengan rakyat dan mempertanyakan hak-hak pemerintah untuk memungut pajak. Haji Abdul Karim Amrullah mengatakan, karena penguasa sebenarnya adalah Tuhan, semua undang-undang dan peraturan yang dibuat oleh manusia harus didasarkan pada perundangan-Nya. Karena itu, pemerintah sekuler harus selamanya berkonsultasi dengan ulama, pakar di bidang hukum agama. Tanpa konsultasi itu, ia menambahkan, hukum Tuhan dan hukum manusia akan saling bertentangan. Jika ini terjadi, Dr. H. Abdul Karim Amrullah menggarisbawahi maksudnya, lebih baik mati daripada hidup. Barangsiapa yang

²⁰⁶ Taufik Abdullah. 1970. *Schools and Politics*. Cornell University, hlm.108-109.

menaati hukum yang tidak sesuai dengan hukum Tuhan sebenarnya tidak lebih dari seorang kafir.²⁰⁷

Walaupun ketua organisasi merupakan seorang penghulu, tampaknya nama *Sendi Aman* cukup menimbulkan kecurigaan bahwa organisasi ini adalah anti adat. Tetapi, Juni 1925, ketika Haji Abdul Karim Amrullah mengubah *Sendi Aman* menjadi Muhammadiyah, organisasi itu langsung menjadi kekuatan utama di Sungai Batang. Nagari ini menjadi pangkalan pertama Muhammadiyah di Sumatra.

Pada Maret dan April 1925, Haji Abdul Karim Amrullah pergi ke Jawa untuk dua tujuan utama. Pertama, ia ingin bertemu anak perempuannya, Fatimah, dan suaminya A. R. Sutan Mansur di Pekalongan. Sutan Mansur pada waktu itu adalah pemimpin Muhammadiyah di Pekalongan dan juga ketua Nurul Islam, organisasi pedagang asal Minangkabau di Pekalongan. Kedua, Haji Abdul Karim Amrullah ingin mencari bantuan keuangan dari orang-orang asal Minangkabau, terutama para pedagang Maninjau, untuk mendirikan sekolah agama di Sungai Batang, bernama *Sendi Aman*, Oktober 1924, dengan adiknya Haji Yusuf Amrullah sebagai ketua. Rupanya, anak mantunya, Sutan Mansur, anggota terkemuka Nurul Islam, telah membujuk Haji Abdul Karim Amrullah untuk menggabungkan *Sendi Aman* dengan Muhammadiyah dan menjadi benih pertama di Minangkabau. Sebelum menerima saran menantunya, Haji Abdul Karim Amrullah mengunjungi Hoofdbestuur (pimpinan pusat) Muhammadiyah di Yogyakarta, di mana ia bertemu dengan K. H. Ibrahim, ketuanya yang ia kenal sejak naik haji ke Mekah.²⁰⁸

Sesudah pertemuan itu, Haji Abdul Karim Amrullah menyetujui gagasan untuk menggabungkan *Sendi Aman*, dan ia mendapat jaminan bahwa sekolah itu akan menerima bantuan keuangan dari para pedagang. Tidak lama setelah itu, ketika Haji Abdul Karim Amrullah kembali ke Maninjau, dikirim utusan oleh para pedagang atas nama Muhammadiyah ke Maninjau. Utusan itu terdiri dari dua orang pedagang, berasal dari Maninjau, dan sekarang menetap di Pekalongan, Datuk Majolelo dan Sutan Marajo, serta seorang pedagang Maninjau lain dari Yogyakarta.

²⁰⁷ Diskusi panjang mengenai aturan adat dan fungsi penghulu di Minangkabau, lihat Abdul Karim Amrullah. 1925. *Sendi Aman Tiang Selamat*, Vol. I, Sungai Batang.

²⁰⁸ Hamka, *Ayahku*, hlm. 89.

Datuk Nan Bareno. Utusan itu mencapai tujuannya dengan baik membujuk para pemimpin Sendi Aman untuk menjadi cabang Muhammadiyah dan menamakan sekolah agama yang akan didirikan Madrasat al-Ibtida'iyah.²⁰⁹

Dari hasil bantuan keuangan para pedagang perantau, Haji Abdul Karim Amrullah membangun sekolah agama dasar Muhammadiyah yang pertama. Dalam waktu sangat singkat sekolah itu, yang juga menyediakan pekerjaan untuk beberapa lulusan Thawalib di Padang Panjang dan Maninjau, menarik banyak murid. Pada akhir tahun 1925 sekolah itu sudah mempunyai sekitar 250 murid. Keberhasilan awal sekolah itu menyumbang perluasan Muhammadiyah lebih lanjut. Dukungan keuangan para pedagang perantau merupakan faktor utama dalam keberhasilan awal Muhammadiyah.

Dengan maksud membujuk sebagian besar masyarakat untuk menjadi anggota Muhammadiyah yang baru didirikan, Haji Abdul Karim Amrullah dan para penyelenggaranya di desa menemukan metoda baru. Bersama-sama, mantan pemimpin Sendi Aman dan ketiga perantau tersebut di atas, memberi para pemimpin Muhamaddiyah status adat yang tinggi. Datuk Majolelo adalah penghulu dari sukunya, Tanjung, yang juga merupakan suku ketua nagari. Datuk Nan Bareno merupakan penghulu suku Melayu, sedangkan Datuk Penghulu Besar adalah penghulu Piliang yang paling disegani. Lagi pula, Tanjung dan Melayu adalah dua di antara keempat suku terbesar di Sungai Batang.²¹⁰ Kepemimpinannya tidak saja memastikan dukungan keuangan terus menerus dari rantau untuk Muhammadiyah tetapi di samping itu memberi martabat adat.

Saluran lain, yang telah digunakan dengan sukses oleh Nabi Muhammad untuk menyebarkan Islam pada zamannya, juga diikuti oleh anggota-anggota Muhammadiyah di Maninjau. Mereka melaksanakan perkawinan antarsuku untuk meningkatkan dan memperbanyak anggotanya dan memperluas pengaruhnya. Di samping itu, saudara-saudara kandung dan saudara-saudara tiri Haji Abdul Karim

²⁰⁹ Alfian, *op.cit.*, hlm. 396.

²¹⁰ Hamka, *Ayahku*, hlm. 42. Buku ini sangat baik digunakan untuk memperoleh informasi tentang Gerakan Pembaruan Islam di Minangkabau, khususnya tentang perjuangan agama Dr. H. Abdul Karim Amrullah, salah satu pembaru terkemuka awal abad 20 di Minangkabau.

Amrullah menjadi promotor organisasi itu pada awal keberadaan Muhammadiyah di Sungai Batang. Di kemudian hari anak-anaknya maupun lulusan dari Sumatra Thawalib menjadi pemimpin-pemimpin penting dan penyokong organisasi ini. Datuk Penghulu Besar dan saudara Haji Abdul Karim Amrullah, Haji Yusuf Amrullah adalah ketua dan sekretaris organisasi yang memperluas Muhammadiyah ke desa tetangganya, Tanjung Sani. Di situ, di Sungai Batang, promotor-promotor penghulu berusaha menyebarkan pengaruh gerakan mereka melalui sistem adat.

Muhammadiyah maju dengan mantap pada tahun-tahun pertamanya. Pada tahun 1925 Sekolah Kelas Dua didirikan, sedangkan cabang-cabangnya, bagian wanita 'Aisyiyah dan pramuka Hizbul Wathan (Partai Tanah Air) merupakan alat-alat propaganda Muhammadiyah. Aisyiyah, di bawah bimbingan Fatimah, anak perempuan Haji Abdul Karim Amrullah, mampu memberi dukungan keuangan kepada beberapa usaha Muhammadiyah. Pada November 1927, hampir seperlima penduduk Sungai Batang dan Tanjung Sani telah menjadi anggota organisasi itu.²¹¹

Pada waktu kunjungan Haji Fakhruddin, Wakil Ketua Dewan Pengurus Pusat Muhammadiyah dari Yogyakarta sampai Sungai Batang, martabat Muhammadiyah di nagari meningkat. Ini juga saat yang tepat bagi Muhammadiyah, cabang Sungai Batang, untuk mendirikan Penolong Kesengsaraan Umum, PKU, yang akan memusatkan usahanya pada kerja sosial dan kesehatan masyarakat. Pada akhir 1927 Muhammadiyah di distrik Danau memiliki dua sekolah agama dan dua Sekolah Kelas Dua. Ketika itu Muhammadiyah menjadi organisasi paling kuat di Sungai Batang.²¹² Rencana Pemerintah Kolonial Belanda untuk melaksanakan *Guru Ordonnantie*, yang bertujuan menguasai sekolah-sekolah agama, telah membuka kesempatan besar bagi Muhammadiyah di Sungai Batang untuk memperkuat posisinya dan memperluas pengaruhnya di seluruh Minangkabau.²¹³

Dengan melakukan ini, pemerintah Belanda mungkin tidak menyadari bahwa mereka memberikan senjata ampuh kepada seorang yang terlatih baik, Haji Abdul Karim Amrullah, untuk dipakai sebagai bumerang menghancurkan kebijakan

²¹¹ Taufik Abdullah, *Schools and Politics*, hlm. 117.

²¹² *Ibid.*, hlm. 118.

²¹³ *Ibid.*, hlm.124.

Belanda. Haji Abdul Karim Amrullah dipilih, tanpa sengaja oleh Belanda, untuk memanen benih yang telah disebarkannya selama gerakan pembaruan di Padang Panjang, yang sekarang disebarkan di seluruh Minangkabau dan Indonesia, ia mengimbau mantan murid-muridnya untuk datang dan memberi dukungan sepenuhnya kepada mantan guru mereka untuk menolak dan tidak mengakui rencana pemerintah. Para lulusan Sumatra Thawalib maupun Diniyah dan sekolah-sekolah reformis lainnya di Padang Panjang.

3.2 Kedatangan dan Pertumbuhan Muhammadiyah di Padang Panjang 1925

Kelompok Muhammadiyah pertama di luar daerah Danau Maninjau, ada di Padang Panjang, basis gerakan Kaum Muda di Minangkabau. Atas nasihat Haji Abdul Karim Amrullah, beberapa murid Sumatra Thawalib dari daerah Danau mendirikan perkumpulan perdebatan, Tabligh Muhammadiyah pada 20 Juni 1925. Dalam perkumpulan ini, murid-murid belajar teknik berdakwah, atau tablig, dan mempraktekannya di antara mereka sendiri. Pidato-pidato mereka kemudian dikumpulkan dan diterbitkan dalam jurnal pertama, disebut Khatibul Ummah (Khatib al-Ummah, Pengkhotbah Masyarakat) yang merupakan milik Muhammadiyah Padang Panjang. "Jamaan Sidi Sutan dan Makmur Salim telah dipilih masing-masing sebagai ketua dan sekretaris organisasi. Van der Plas, pegawai tinggi Belanda di Indonesia, beranggapan bahwa organisasi baru di Padang Panjang (Muhammadiyah) kemungkinan besar telah diilhami oleh Dr. H. Abdul Karim Amrullah.²¹⁴

Kecaman pertama yang dihadapi oleh Muhammadiyah di Padang Panjang datang dari murid-murid Thawalib dari partai komunis, sementara bertentangan dengan itu, hal ini juga menjadi alternatif untuk murid-murid sekolah yang tidak mau bergabung dengan komunis. Menurut pandangan komunis, Tabligh Muhammadiyah di Padang Panjang tidak saja berada di bawah pengarahan Haji Abdul Karim Amrullah tetapi juga berafiliasi dengan organisasi Muslim di Jawa yang menerima subsidi Belanda, sesuatu yang dikutuk oleh partai tersebut.²¹⁵

²¹⁴ Alfian, *op.cit.*, hlm. 396.

²¹⁵ Hamka, *op. cit.*, hlm. 90.

Sementara itu, bagi pemerintah Belanda Muhammadiyah menjadi salah satu sasaran utama untuk dicurigai, karena mereka tahu bahwa tokoh di balik organisasi itu adalah Haji Abdul Karim Amrullah. Sikap terbuka yang agresif dari Haji Abdul Karim Amrullah dalam menyerang setiap hal yang dianggapnya berlawanan dengan hukum agama membuatnya salah satu ulama yang paling tidak dipercaya di mata pejabat-pejabat Belanda kendati ia sangat anti-komunis.²¹⁶ Walaupun Haji Abdul Karim Amrullah dicurigai oleh kedua belah pihak, Belanda dan komunis, pandangan-pandangannya tetap tidak berubah dan ia tidak menawarkan kompromi sama sekali. Di satu sisi sikapnya membuat Tabligh Muhammadiyah tetap merupakan perkumpulan perdebatan tanpa kemampuan untuk berkembang, tetapi di lain sisi sikapnya itu juga menarik garis umum yang tampaknya diikuti oleh Muhammadiyah dalam menjalankan dan menggunakan kebijakannya kemudian.

Pada Juni 1926, Saalah Sutan Mangkuto (mantan murid Haji Abdul Karim Amrullah) dan Datuk Sati, dua anggota pimpinan Tabligh Muhammadiyah di Padang Panjang, mengalihkan organisasi ini menjadi cabang penuh Muhammadiyah yang menjadikannya cabang kedua gerakan ini di Minangkabau, setelah yang pertama di Maninjau didirikan resmi Januari 1926. Pada tahun yang sama, kedua cabang ini mengaku beranggotakan 3.664 orang, yaitu Maninjau (1.400) dan Padang Panjang (2.244).²¹⁷

Tidak lama setelah pembentukan cabang Padang Panjang, di bawah pengaruh Saalah Sutan Mangkuto, Syekh Muhammad Jamil Jaho (wafat 1945), pemimpin Kaum Tua yang paling berpengaruh di Padang Panjang, pendiri salah satu madrasah terbesar di Minangkabau, bergabung dengan Muhammadiyah. Dengan maksud untuk melawan pengaruh komunis, ia mendaftarkan diri sebagai anggota Muhammadiyah dan tidak lama kemudian menjadi pemimpin organisasi itu.²¹⁸

Di bawah pimpinan Syekh Jamil Jaho, Muhammadiyah mengalami kemajuan penting di Padang Panjang. Pemimpin Kaum Tua lain yang berpartisipasi dalam Muhammadiyah adalah Syekh Muhammad Zain (wafat 1957), pemimpin tariqah di Simabur. Pengaruhnya terhadap para penghulu nagari menyebabkan mereka

²¹⁶ Taufik Abdullah, *op. cit.*, hlm. 125.

²¹⁷ A.R. Sutan Mansur, *Pergerakan Islam dan Muhammadiyah di Sumatra 1927-1928*, hlm.252.

²¹⁸ B. J. Schricke. 1955. *Indonesian Sociological Studies*. Vol. I, Den Haag, Bandung: W. van Hoeve, hlm. 154.

bergabung dengan Muhammadiyah. Dalam waktu relatif singkat kelompok itu telah berkembang menjadi lebih dari 400 orang anggota.²¹⁹

Namun demikian, tampaknya partisipasi mereka dalam Muham-madiyah tidak berlangsung lama. Beberapa tahun kemudian, baik Syekh Jamil Jaho dan Syekh Muhammad Zain, yang telah menyumbang banyak untuk perkembangan Muhammadiyah, lambat laun kehilangan perhatian akan organisasi itu. Salah satu penyebabnya adalah kesan mereka ketika menghadiri Kongres ke-16 Muhammadiyah di Pekalongan. Dalam Kongres itu organisasi menentukan cara untuk mendirikan suatu "Majelis Pendapat" (Majlis Tarjih),²²⁰ yang akan memutuskan masalah-masalah religius, di mana Muhammadiyah jelas mengumumkan bahwa mereka tidak mau mengikuti secara buta hukum yang ditetapkan di abad pertengahan. Inilah masalah peka yang dua dasawarsa sebelumnya telah menyebabkan perpecahan di Minangkabau antara Kaum Muda di bawah pimpinan Haji Abdul Karim Amrullah dan rekan-rekannya di satu pihak, dan Kaum Tua di bawah pimpinan Syekh Khatib Ali dan Syekh Jamil Jaho di lain pihak. Syekh Jamil Jaho dan Syekh Zain menyadari bahwa mereka telah bergabung dengan organisasi yang keliru. Pengunduran kedua orang ini merupakan kerugian besar bagi cabang Padang Panjang. Syekh Jaho membiarkan organisasi itu dipimpin oleh orang-orang muda. Hamka (Haji Abdul Malik Karim Amrullah), putra Dr. H. Abdul Karim Amrullah yang pada waktu itu merupakan wakil ketua Muhammadiyah di Padang Panjang menceritakan tentang peristiwa ini dalam bukunya *Ayahku* sebagai berikut:

Setelah ia (Syekh Jaho) kembali dari Pekalongan lambat laun ia mengundurkan diri dari organisasi. Sebagai ulama besar ia tidak mengatakan apa pun, ia tidak mengecam maupun memfitnah. Ia tidak lagi menunaikan kewajibannya sebagai ketua Muhammadiyah sehingga saya, penulis buku ini, sebagai wakil ketua organisasi, harus menentukan posisi. Tetapi sebelum ia mengundurkan diri saya telah mempunyai kesempatan untuk bekerja erat dengan beliau.²²¹

²¹⁹ Taufik Abdullah, *op. cit.*, hlm. 126.

²²⁰ Majlis Tarjih merupakan salah satu dewan Muhammadiyah yang "dimaksudkan memeriksa dan mengamati kehidupan masyarakat serta memberi pendapat dari sudut pandang ajaran Islam". Lihat Kusnadi. 1972. *Muhammadiyah in Brief*. Yogyakarta: Jamiat Muhammadiyah, hlm. 7.

²²¹ Hamka, *Ayahku*, hlm. 249.

Di Bukittinggi, Muhammadiyah dipimpin seseorang bernama Hitam Sutan Mudo, yang pada 11 September 1927 mengadakan rapat di Surau Syekh Jamil Jambek. Salah satu keputusan rapat itu adalah mendirikan cabang baru di kota. Pada waktu yang sama, bagian wanita, Aisyiyah, dan pramuka, Hizbul Wathan, juga dibentuk.²²² Sama seperti Haji Abdul Karim Amrullah di Sungai Batang, Syekh Jambek adalah instrument dalam mengembangkan Muhammadiyah di Bukittinggi. Sekolahnya(surau) merupakan markas organisasi, dan putra-putrinya ikut dalam kepemimpinannya. Putra-putranya, Zain Jambek, Zainal Abidin Jambek, dan Sa'aduddin Jambek merupakan tiga pemimpin Muhammadiyah yang paling berpengaruh, sedangkan putrinya, Jamilah Jambek adalah Konsul Muhammadiyah pada afiliasinya, konsulat Aisyiyah di Palembang (Sumatra Selatan).²²³

Dari segi keuangan, berbagai cabang Muhammadiyah itu tidak begitu positif. Pungutan iuran pada pertemuan-pertemuan agama, atau tablig, yang merupakan sumber utama keuangan, memungkinkan Muhammadiyah menjalankan programnya, tetapi tidak memungkinkan organisasi itu untuk menciptakan situasi keuangan yang sehat.

Pada Konferensi Regional Keempat yang diselenggarakan di Simabur (Batu Sangkar) pada Mei 1929, dengan maksud mempersatukan kegiatan-kegiatan semua cabang Muhammadiyah, diputuskan untuk mengelompokkan semua cabang di pesisir barat Sumatra dan bergabung dengan Persatuan Muhammadiyah Minangkabau atau PMM, yang bertindak sebagai perantara untuk cabang-cabang di Minangkabau dengan Dewan Pengurus Pusat di Yogyakarta, dan juga antara organisasi dan instansi-instansi lokal.²²⁴

Langkah positif pertama yang diambil oleh persatuan baru ini adalah mengirim para promotornya ke berbagai bagian Minangkabau, Aceh dan Bengkulu. Sementara itu Dr. H. Abdul Karim Amrullah, penasihat tidak terdaftar untuk Muhammadiyah, memainkan peranan penting dalam mempercepat proses

²²² Taufik Abdllah, *op. cit.*, hlm. 132.

²²³ Hamka, *op.cit.*, hlm. 121. Perlu dicatat bahwa cabang-cabang Muhammadiyah di Minangkabau, khususnya di luar Sungai Batang, Padang Panjang dan Bukittinggi belum diperluas sebelum 1928 ketika kampanye melawan Guru Ordonnantie dilancarkan.

²²⁴ Taufik Abdullah, hlm. 134.

perluasan organisasi. Kehadirannya pada pengangkatan Konsul-Konsul Muhammadiyah selalu diharapkan, dan dia sendiri aktif mengangkat mereka. Ia juga hadir ketika Muhammadiyah memutuskan untuk mempercayakan Haji Junus Jamaluddin, Muhammad Said, Teuku M. Hasan, Marah Kamin, Hasan Arifin sebagai konsul di daerah-daerah lain, yaitu Bengkulu, Sumatra Timur, Aceh, Tapanuli dan Riau. Dalam perjalanannya di seluruh Sumatra, Haji Abdul Karim Amrullah biasanya mengumandangkan informasi tentang Muhammadiyah kepada rakyat, dengan menyebutnya sebagai organisasi non-politik yang baik yang dapat diharapkan menjalankan sepenuhnya ajaran-ajaran dan praktek-praktek Islam.²²⁵

Sangat menarik untuk melihat bagaimana Haji Abdul Karim Amrullah mengumandangkan Muhammadiyah kepada rakyat. Misalnya, pada Mei 1927, ia menjelaskan pentingnya organisasi atas dasar agama dalam arti wawasan ketiga kebutuhan spiritual dasar manusia. Haji Abdul Karim Amrullah berpendapat bahwa manusia ditakdirkan untuk bergantung pada "tiga sahabat", yaitu Tuhan, nafsu dan manusia. Sahabat pertama adalah Tuhan. Adalah hak Tuhan untuk dipuja oleh makhluk-makhluk ciptaan-Nya termasuk manusia. Kedua, nafsu, adalah salah satu sarana penting yang diberikan kepada manusia, yang tanpa keberadaannya mereka tidak bisa hidup. Tetapi, nafsu bisa membahayakan kehidupan orang, bila ia tidak sanggup mengendalikannya. Sahabat ketiga adalah sesama manusia, karena ia tidak bisa hidup sendirian. Untuk mencapai hidup bahagia di dunia ini dan di akhirat, Haji Abdul Karim Amrullah percaya bahwa tidak ada jalan lain bagi manusia kecuali memenuhi kewajibannya terhadap "tiga sahabat" itu. Haji Abdul Karim Amrullah menegaskan, bahwa di bidang inilah gerakan Muhammadiyah memberi perhatian utamanya.

Gerakan itu bermaksud membina anggota-anggotanya dalam hubungan mereka dengan ketiga sahabat tersebut. Muhammadiyah dalam tujuan-tujuan religiusnya, bermaksud memperbaiki hubungan antara manusia dan Tuhan, sedangkan dalam sasaran-sasaran sosialnya, organisasi ini berusaha mengarahkan nafsu manusia ke tujuan-tujuan yang baik. Haji Abdul Karim Amrullah mempertahankan kepastiannya bahwa Muhammadiyah, masyarakat orang beriman

²²⁵ Hamka, *op. cit.*, hlm. 120.

dengan tekanan pada kegiatan sosial, akan mampu membimbing anggota-anggotanya ke masyarakat religius yang sempurna.²²⁶

Melalui kepercayaan itu, seperti kita lihat di atas, Haji Abdul Karim Amrullah mendirikan cabang Muhammadiyah pertama di Sumatra, di desanya sendiri, Sungai Batang. Di samping cita-citanya, Haji Abdul Karim Amrullah juga melihat Muhammadiyah sebagai sarana untuk memerangi mantan murid-muridnya di Sumatra Thawalib, yang aktif dalam partai komunis. Muhammadiyah yang segera menjadi alternatif lulusan non-komunis sekolah-sekolah Kaum Muda (produk-produk ulama Kaum Muda), terutama lulusan Thawalib dan Diniyah, juga bermaksud menjadi lahan bersama kegiatan Ulama Kaum Muda dan murid-muridnya.

Persatuan Guru-Guru Agama Islam (PGAI), yang didirikan pada 1919 oleh Haji Abdullah Ahmad dan Haji Abdul Karim Amrullah, hanyalah sebuah organisasi guru, sedangkan Sumatra Thawalib khusus merupakan organisasi siswa, tetapi Muhammadiyah merupakan persatuan pertama Ulama Kaum Muda dan para pengikutnya. Sesudah pemberontakan komunis pada tahun 1927 yang ditumpas oleh pemerintah Belanda, Muhammadiyah menjadi organisasi utama lulusan sekolah-sekolah Kaum Muda yang ingin mengejar berbagai sasaran. Peranan ini membuat Muhammadiyah tidak saja menjadi organisasi pendidikan yang berkonsentrasi pada pembentukan sekolah agama dan sekuler, tetapi juga partai politik yang mempertanyakan keadaan politik yang ada serta keabsahan kekuatan politik pada waktu itu.

Kekuatan Muhammadiyah di Minangkabau didasarkan pada sifat kepemimpinannya. Para pemimpinnya berasal dari Minangkabau dan membentuk satu kelompok yang mempunyai hubungan erat. Pimpinan ini terdiri dari reformis Muslim anti-komunis, termasuk trio terkenal, Dr. H. Abdul Karim Amrullah, Dr. H. Abdullah Ahmad dan Syekh Jamil Jambek. Akhirnya, banyak di antara anak, saudara dan mantan murid mereka menjadi tokoh penting dalam kepemimpinan organisasi itu di Minangkabau.

²²⁶ Taufik Abdullah, *op. cit.*, hlm. 105.

Kita telah melihat bahwa menantu Haji Abdul Karim Amrullah, Sutan Mansur, menjadi wakil resmi Hoofd-Bestuur Muhammadiyah untuk seluruh wilayah Pulau Sumatra, sedangkan putrinya Fatimah, istri Sutan Mansur, perbatasan Minangkabau untuk tujuan yang sama.²²⁷

Dari segi kegiatan pendidikan maupun tablignya jelas bahwa Muhammadiyah memainkan peranan yang sangat penting sebagai gerakan pembaruan religius. Ini memang telah diperkirakan sebelumnya, karena seperti dibicarakan terlebih dulu, sebelum Muhammadiyah datang di Minangkabau, masyarakat Minangkabau sudah mengenal pembaruan Islam. Sumbangan utama Muhammadiyah adalah usahanya yang cukup besar untuk mempercepat proses tersebut. Seperti kita lihat, pekerjaan ini hanya berkat upaya-upaya Dr. H. Abdul Karim Amrullah, Dr. H. Abdullah Ahmad, Syekh Muhammad Jamil Jambek dan Syekh Ibrahim Musa Parabek maupun mantan murid-murid Haji Abdul Karim Amrullah, seperti Abdul Hamid Hakim dengan Sumatra Thawalib, Rahmah El-Yunusiyah dengan Diniyahnya, Adam B.B. dengan Madrasah Irsyadunnas (MIN)nya, A. R. Sutan Mansur dengan Kuliyatu Muballighin-nya (semuanya terletak di Padang Panjang), serta berbagai lembaga pendidikan reformis yang didirikan kemudian.

Namun demikian, sebagai pendiri Muhammadiyah dan ayah para pemimpin Muhammadiyah di Minangkabau, Haji Abdul Karim Amrullah tampaknya tidak selalu sepakat dengan setiap langkah dan kegiatan organisasi itu. Organisasi itu sendiri diserang oleh Haji Abdul Karim Amrullah, yang mengecam para pemimpin Muhammadiyah karena kurangnya pengetahuan agama mereka. Ia menegur pedas para pemimpin muda yang secara buta mengikuti arahan-arahan Muhammadiyah dari Jawa. Dengan kata lain, para pemimpin Muhammadiyah telah menjadi taqlid terhadap Dewan Pengurus Pusat mengenai hal-hal agama dan bukannya berusaha mencari pemecahan melalui upaya rasional mereka sendiri (*ijtihad*).

Ia juga mencela prestasi religius Muhammadiyah sehubungan dengan pengumpulan dan pembagian derma (zakāt al-fitrāh). Ia berpendapat bahwa Muhammadiyah tidak berhak untuk melakukan upaya seperti itu karena pemberi

²²⁷ Mengenai kegiatan pendidikan dan tablig Muhammadiyah di Minangkabau, lihat lampiran disertasi ini.

derma itu sendiri mengetahui lebih baik daripada penyelenggara Muhammadiyah kepada siapa derma itu patut diberikan. Haji Abdul Karim Amrullah juga mengecam kegiatan Aisyiyah sebagai penyimpangan dari jalan agama yang benar. Ia mengecam perempuan yang pergi jauh dari rumahnya untuk tujuan organisasi tanpa didampingi oleh mahram mereka.²²⁸

Sifat reformasi Islam di Minangkabau berbeda dengan di Jawa, pusat Muhammadiyah di Indonesia. Sementara Muhammadiyah di Minangkabau memperhatikan kemurnian agama, dengan demikian memberi warna introspeksi dalam pandangannya, Muhammadiyah di Jawa menekankan pemodernisasian orang Muslim, dan dengan demikian menjadi lebih liberal dalam pandangannya. Sifat kedua pusat itu yang berbeda dilukiskan dalam Kongres ke-19 Muhammadiyah, yang diadakan dari 14 sampai 21 Maret 1930, di mana timbul debat antara ulama Muhammadiyah dari Jawa, Kiai Haji Mas Mansur yang tersohor, dan Haji Abdul Karim Amrullah, pemimpin ulama Kaum Muda dan penasihat Muhammadiyah dari Minangkabau, tentang subyek pembicara wanita di hadapan pendengar campuran. Haji Abdul Karim Amrullah, yang mencerminkan fanatisme agama Minangkabau, beranggapan adalah haram bagi seorang wanita untuk berbicara di hadapan pendengar campuran karena hal itu bisa mengundang fitnah. Fleksibilitas lebih besar Muhammadiyah di Jawa diperagakan oleh Kiai Haji Mas Mansur, yang berpendapat bahwa tindakan seperti itu tidak haram, tetapi makrūh (tidak dianjurkan oleh agama tetapi tidak berdosa dan bisa digunakan dalam keadaan darurat untuk agama).²²⁹

Kongres itu sendiri yang untuk pertama kali diadakan di luar Jawa dan dihadiri oleh 15 sampai 20.000 peserta, dan merupakan sukses besar. Haji Ibrahim (meninggal dunia 1933), ketua umum, pemimpin utusan Dewan Pengurus Pusat dari Yogyakarta. Dua ratus empat puluh wakil dari 99 cabang Muhammadiyah di

²²⁸ Informasi lebih lanjut tentang pandangan-pandangan Dr. H. Abdul Karim Amrullah tentang kegiatan perempuan dalam organisasi Muhammadiyah, lihat, Cermin Terus, Sungai Batang, 1929. Buku ini yang terdiri dari sekitar 200 halaman, terutama dimaksud mengecam berbagai kegiatan anggota Aisyiyah yang dianggapnya bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam, misalnya pergi ke konferensi atau rapat yang diadakan jauh dari desa mereka. Cara mereka berbusana juga dikecam pedas oleh bapak spiritual ini.

²²⁹ Hamka, *op.cit.*, hlm. 128.

Jawa, satu dari Kalimantan, dan satu dari Sulawesi, menghadiri kongres tersebut. Di samping itu, 158 utusan dari 30 seksi Aisyiyah juga hadir. Hampir semua organisasi lokal di Minangkabau mengirim wakilnya sebagai pengamat.²³⁰

Gaya sambutan yang disampaikan para utusan sekali lagi memperlihatkan betapa berbeda Muhammadiyah di Jawa dengan di Minangkabau. Para pembicara dari Jawa memusatkan perhatian pada kesejahteraan sosial dan pembaruan pendidikan menurut Islam, sedangkan para pembicara Minangkabau menggunakan forum untuk mengecam pemerintah Belanda, dan Dr. H. Abdul Karim Amrullah memberi ceramah tentang masa jaya Islam yang sirna.²³¹ Pembicaraan berikut akan menjelaskan sikapnya terhadap pemerintah Belanda.

3.3 Penolakan dan Negoisasi Sosial terhadap Muhammadiyah

Pada April 1927, seorang jurnalis dari Minangkabau mengeluarkan peringatan yang menyentuh kepada para pembaca dengan meminta untuk tidak mudah menyerah pada daya tarik Muhammadiyah, yaitu sebuah organisasi yang baru muncul dari Jawa.²³² Peringatan ini melakat dalam ingatan kolektif, menggarisbawahi kerentanan pada masyarakat Minangkabau terhadap organisasi yang menganut prinsip-prinsip ideologis atau propaganda yang berakar pada Islam. Misalnya, kegelisahan masyarakat dapat dilihat dengan jelas dalam kekhawatiran yang berkepanjangan terhadap Sarekat Islam (SI) dan pengaruh yang diberikan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) yang beraliran Islam. Meskipun Muhammadiyah berupaya meyakinkan masyarakat bahwa gerakan ini sepenuhnya merupakan organisasi agama, namun jurnalis itu tetap mengingatkan pembacanya bahwa,

.... kaum komunis juga menggunakan agama, akibatnya kehancuran. Penyebaran Muhammadiyah dapat mengakibatkan kontroversi agama antara kelompok Kaum Muda dan Kaum Tua, sebab Muhammadiyah jelas-jelas merupakan organisasi Kaum Muda.²³³

²³⁰ Taufik Abdullah, *op. cit.*, hlm. 137.

²³¹ Alfian, *op. cit.*, hlm. 451-454.

²³² Lihat Taufik Abdullah. 2018. *Sekolah dan Politik: Pergerakan Kaum Muda di Sumatera Barat 1927-1933*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, hlm. 89.

²³³ *Tjaja Soematra*, 16 April 1927. Surat kabar ini milik orang Belanda, tetapi dipimpin oleh bumiputra.

Gejolak semacam itu sudah berlangsung pada dua dekade pertama abad 20 yang menegaskan istilah kaum muda dengan simbol kemajuan dan kaum tua sebagai lambang kemunduran.²³⁴ Maka, dalam perspektif sosiologis konflik ini dapat direpresentasikan sebagai konflik antara kelompok reformis dan konservatif. Sedangkan, dalam sudut pandang agama, konflik ini merupakan benturan antara kaum ulama modern dengan ulama tradisional.

Respons terbuka terhadap masalah kemajuan dan modernitas pertama kalinya dilontarkan pada 1906 oleh kelompok yang disebut *Melayu Muda* di bawah kepemimpinan Datuk Sutan Maharaja. Kelompok ini lahir di Padang sebagai gerakan politik-kultural perantau dalam melawan kaum bangsawan pesisir dan terutama *tuanku regen*. Mereka berpendapat bahwa kemajuan seharusnya merupakan elaborasi dan artikulasi dari ide-ide dan cita-cita yang melekat dalam adat Minangkabau sejati, dan mereka mencela institusi politik di daerah pesisir sebagai penyimpangan dari Alam Minangkabau.²³⁵

Menurut pemimpinnya, gerakan itu dimaksudkan untuk mengembalikan Padang pada lingkungan alam dan untuk menghapuskan jurang yang memisahkan para penguasa yang disebut *manusia kelas satu* dan kawulanya.²³⁶ Dipengaruhi oleh gerakan Turki Muda (*Young Turks*) di Timur Tengah, Datuk Sutan Maharaja menyebut kelompoknya sebagai Kaum Muda dan melabeli lawannya sebagai Kaum Tua.

Pada pertengahan 1910-an, gerakan kemajuan yang berorientasi adat ini harus menghadapi tantangan keras dari kaum Islam modernis. Murid-murid Syekh Ahmad Chatib sudah mulai bergerak dan menyebarkan pemikiran reformasi ortodoks di distrik asal mereka. Tokoh yang menonjol di antara mereka adalah Syekh M. Jamil Jambek di Bukittinggi, Haji Abdullah Ahmad di Padang dan Padang Panjang, Haji Rasul di Maninjau dan Padang Panjang, Syekh Thaib Umar

²³⁴ Taufik Abdullah, 2018, hlm. 16. *Kaum muda* juga biasa diartikan ‘tidak berakar’ sementara *kaum tua* digadang-gadang sebagai perwakilan dari ‘kemegahan Gunung Merapi’, pengikat Alam Minangkabau.

²³⁵ G. de Wal van Anckeveen, “Maleische Democratie en Padangsche Toestanden” *Adatrechtbundels*, 1 tahun 1911, hlm. 114-128.

²³⁶ Datuk Sutan Maharadha, “Kaoem Moeda Tahoen 1906”, *Oetoesan Melajoe*, 22 Desember 1917.

di Batu Sangkar. Tokoh-tokoh ini menyerang tarekat dan menentang bidah dalam praktik keagamaan. Gerakan pemurnian yang mereka lancarkan sangat dipengaruhi oleh pemikiran pembaru Mesir abad 19, Syekh Muhammad ‘Abduh. Hingga dekade kedua abad 20, para ulama muda ini yang juga disebut sebagai Kaum Muda, mulai mengecam ulama-ulama tradisional karena mereka mendasarkan penilaian agama semata-mata atas *naql* atau otoritas yang mapan.²³⁷

Para reformasi berpendapat bahwa akan salah jika iman didasarkan atas *taklid* (penerimaan yang tidak kritis atas sumber tertulis), karena sumber sejati bagi hukum agama adalah Al-Qur’an dan hadist. Menurut ulama Kaum Muda, para ulama harus kembali kepada Al-Qur’an dan hadist dan harus berusaha sekuat tenaga untuk menggapai kebenaran dengan menggunakan akalnya, sebuah proses yang dikenal sebagai *ijtihad*.

3.4 Figur Sentral Perguruan Kauman Padang Panjang

Sub bab ini menguraikan secara komprehensif figur-figur sentral yang menjadi penggerak utama dalam perkembangan Perguruan Kauman Muhammadiyah di Padang Panjang pada periode 1925-1935. Ketiga elemen kunci yang dibahas meliputi peran Buya Hamka, A. Malik Ahmad, dan jaringan pembaru Muhammadiyah yang menjadi kekuatan kolektif dalam transformasi pendidikan Islam di Minangkabau.

3.4.1 Buya Hamka

Buya Hamka, yang memiliki nama lengkap Haji Abdul Malik Karim Amrullah, lahir pada 17 Februari 1908 di Maninjau, Sumatera Barat. Ia adalah putra dari ulama terkemuka Haji Abdul Karim Amrullah (Haji Rasul), seorang pembaru Islam yang memainkan peran penting dalam gerakan modernisasi pendidikan Islam di Minangkabau.²³⁸ Pendidikan Buya Hamka dimulai di lingkungan keluarga yang kuat dalam tradisi keislaman. Ia belajar di Thawalib Padang Panjang, sebuah

²³⁷ Taufik Abdullah, 2018, hlm. 18

²³⁸ Hamka, *Ayahku*. Jakarta: Umminda, 1982, hlm. 15.

lembaga yang menjadi pusat gerakan pembaruan Islam pada masyarakat Padang Panjang.

Di usia yang sangat muda, Buya Hamka telah menunjukkan semangat pembaruan dan kemampuan intelektual yang luar biasa. Ia menjadi salah satu penggerak utama dalam Muhammadiyah Padang Panjang dan berperan aktif dalam mendirikan dan memimpin Perguruan Kauman Muhammadiyah.²³⁹ Hamka dikenal sebagai pendidik yang progresif, memadukan pelajaran agama dengan pelajaran umum, serta menerapkan metode pengajaran yang lebih sistematis dan rasional dibandingkan pendidikan tradisional berbasis surau.²⁴⁰

Selain sebagai guru, Hamka juga dikenal sebagai penulis produktif yang memanfaatkan media massa untuk menyebarkan ide-ide pembaruan. Ia menulis di berbagai majalah seperti Panji Islam dan Suara Muhammadiyah yang berpengaruh dalam membentuk opini umat Islam pada masa itu.²⁴¹ Buya Hamka juga menjadi penghubung penting antara Muhammadiyah Sumatera Barat dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Yogyakarta, memungkinkan terjadinya transfer ide dan strategi pembaruan pendidikan yang lebih luas.

Kontribusi Buya Hamka dalam membangun jejaring pembaruan tidak hanya berdampak di Padang Panjang, tetapi juga di Medan dan Yogyakarta. Ia menjalin hubungan intelektual dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah seperti Ki Bagus Hadikusumo dan Fakhruddin, yang memperkuat arah perjuangan Muhammadiyah dalam penguatan pendidikan Islam modern.²⁴²

3.4.2 A. Malik Ahmad

A. Malik Ahmad adalah tokoh organisatoris yang memainkan peran penting dalam manajemen dan pengembangan kelembagaan Perguruan Kauman Muhammadiyah Padang Panjang. Ia dikenal sebagai administrator yang memiliki

²³⁹ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES, 1987, hlm. 51.

²⁴⁰ Alfian. 1989. *Muhammadiyah: The Political Behavior of a Muslim Modernist Organization under Dutch Colonialism*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 108.

²⁴¹ Hamka. 1974. *Kenang-kenangan Hidup*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hlm. 82.

²⁴² Alfian, *Muhammadiyah*, hlm. 109-110.

kemampuan dalam membangun struktur pendidikan yang efektif dan berorientasi pada profesionalisme.²⁴³

Peran A. Malik Ahmad dalam penguatan Perguruan Muhammadiyah terlihat dalam usahanya membangun jaringan antarsekolah Muhammadiyah di Sumatera Barat, khususnya dalam penguatan kurikulum dan perekrutan guru. Arsip Muhammadiyah mencatat keterlibatannya dalam proses standarisasi pelajaran dan sistem administrasi yang lebih terintegrasi dengan pusat Muhammadiyah di Yogyakarta.²⁴⁴

A. Malik Ahmad juga dikenal sebagai perekat komunitas Muhammadiyah lokal, mendorong kolaborasi antara guru, pimpinan organisasi, dan wali murid dalam membangun kesadaran bersama tentang pentingnya pendidikan Islam modern. Dalam beberapa dokumen arsip, Malik Ahmad disebutkan sebagai tokoh yang mendorong integrasi pelajaran agama dengan pelajaran umum serta mendorong keterbukaan dalam pola pengelolaan keuangan lembaga pendidikan Muhammadiyah di Padang Panjang.²⁴⁵ Peran strategis A. Malik Ahmad dalam Perguruan Muhammadiyah menjadikannya sebagai figur penting yang mampu menjaga kesinambungan dan kestabilan lembaga di tengah dinamika sosial yang berkembang saat itu.

3.4.3 Jaringan Pembaru Muhammadiyah

Perkembangan Perguruan Kauman Muhammadiyah di Padang Panjang tidak dapat dilepaskan dari kekuatan jaringan pembaru Muhammadiyah yang terjalin dengan baik di berbagai kota di Sumatera dan Jawa. Jaringan ini terdiri dari ulama, pendidik, dan aktivis muda Muhammadiyah yang terlibat aktif dalam pertukaran ide dan strategi pendidikan modern.

²⁴³ Amal Bakti Muhammadiyah Sumatera Barat 1925-1965. Arsip Muhammadiyah Sumatera Barat.

²⁴⁴ Arsip Muhammadiyah Sumatera Barat, Notulen Rapat Muhammadiyah 1925-1935.

²⁴⁵ Arsip Muhammadiyah Sumatera Barat, *Dokumen Pengelolaan Pendidikan Muhammadiyah 1925-1935*.

Melalui Kongres Muhammadiyah, pertemuan wilayah, dan media seperti Panji Islam dan Suara Muhammadiyah, jaringan pembaru Muhammadiyah memainkan peran signifikan dalam menyebarluaskan ide-ide modernisasi pendidikan Islam.²⁴⁶ Muhammadiyah Padang Panjang mendapatkan dukungan dari tokoh-tokoh nasional seperti Ki Bagus Hadikusumo dan Ahmad Dahlan, serta kolaborasi dengan jaringan sekolah Muhammadiyah di Medan dan Bukittinggi.

Jaringan ini tidak hanya berfungsi dalam pertukaran ideologi, tetapi juga menjadi saluran penting dalam penguatan logistik dan sumber daya pendidikan. Dukungan Pimpinan Pusat Muhammadiyah memungkinkan Perguruan Kauman mendapatkan akses buku, guru, dan beasiswa yang memperkuat daya saingnya sebagai lembaga pendidikan modern di Sumatera Barat. Arsip Muhammadiyah Sumatera Barat juga mencatat bagaimana jaringan ini memungkinkan murid-murid dari berbagai daerah di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi untuk menempuh pendidikan di Padang Panjang.²⁴⁷ Perpindahan murid dan guru antarwilayah menciptakan suasana akademik yang dinamis dan mempercepat proses internalisasi nilai-nilai pembaruan di Padang Panjang.

Kolaborasi dengan tokoh-tokoh seperti Buya A.R. St. Mansur dan Dr. H. A. Karim Amarullah semakin memperkuat posisi Perguruan Kauman sebagai pusat pendidikan Islam modern yang terkemuka di Sumatera Barat. Jaringan pembaru Muhammadiyah menjadi tulang punggung gerakan modernisasi pendidikan yang berhasil menghubungkan daerah-daerah terisolasi dengan pusat pembaruan nasional.

Dengan demikian, kekuatan Perguruan Kauman Muhammadiyah di Padang Panjang pada periode 1925-1935 bertumpu pada sinergi yang kuat antara figur sentral seperti Buya Hamka, A. Malik Ahmad, dan jaringan pembaru Muhammadiyah yang mampu membangun kekuatan kolektif dalam penguatan pendidikan Islam modern di Minangkabau.

²⁴⁶ Suara Muhammadiyah, Arsip Edisi Tahun 1930-an.

²⁴⁷ Arsip Muhammadiyah Sumatera Barat. *Amal Bakti Muhammadiyah Sumatera Barat 1925-1965*.

3.5 Embrio Perguruan Muhammadiyah Kauman Padang Panjang:

HIS Med de Quran, Tablig School dan Kulliyatul Muballighien

Berdirinya HIS Med de Quran pada 1 Juli 1927 bukanlah peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan hasil dari proses panjang yang melibatkan serangkaian musyawarah yang intensif di kalangan Cabang Muhammadiyah Padang Panjang. Diskusi yang berulang-ulang tersebut akhirnya menghasilkan keputusan untuk mendirikan HIS Med de Quran dengan menunjuk A. Aziz St. Kenaikan sebagai *hoofder school* atau kepala sekolah pertama. Pimpinan Pusat Muhammadiyah memberikan pengakuan dan dukungan penuh atas berdirinya HIS Med de Quran dengan menugaskan Prawoto Adi Widjojo untuk melanjutkan kepemimpinan sekolah tersebut setelah masa jabatan St. Kenaikan.²⁴⁸

Komplek Perguruan Muhammadiyah Kauman Padang Panjang yang kini menjadi pusat pendidikan terkemuka, pada awalnya merupakan sebuah hotel bernama Hotel Merapi. Hotel ini disewa oleh Muhammadiyah untuk digunakan sebagai lokasi pendirian HIS Med de Quran. Hotel tersebut dimiliki oleh Ny. Johannes Paulus Stephanus Roks dan terletak di kawasan Guguk Malintang, berseberangan langsung dengan Gereja Katolik. Pada tahun 1930, Konsulat Muhammadiyah Minangkabau di bawah kepemimpinan A.R. St. Mansur berhasil membeli hotel beserta lahannya, sehingga kepemilikan secara penuh berada di bawah otoritas Muhammadiyah.²⁴⁹

Setelah penguasaan penuh atas lahan seluas dua hektar tersebut, Muhammadiyah dengan cepat mengembangkan amal usaha di bidang pendidikan. Sebagai respon terhadap perkembangan persyarikatan yang semakin dinamis, Konsulat Muhammadiyah Minangkabau melalui A.R. St. Mansur mendirikan Tabligh School atau Sekolah Kader Muhammadiyah pada tahun 1931. Sekolah ini dipimpin untuk pertama kalinya oleh Hamka yang kemudian menjadi salah satu tokoh sentral dalam pendidikan dan dakwah Muhammadiyah.

²⁴⁸ Arsip Muhammadiyah Sumatera Barat, *Dokumen Pengelolaan Pendidikan Muhammadiyah 1925-1935*.

²⁴⁹ Hasan Ahmad, *Sejarah Perguruan Muhammadiyah Kauman Padang Panjang*. Arsip Muhammadiyah Padang Panjang.

Pelaksanaan pendidikan di HIS Med de Quran pada masa awal memunculkan berbagai pertanyaan di kalangan pemuka Islam ortodoks. Mereka mempertanyakan keberanian Muhammadiyah mendirikan sekolah yang memadukan pelajaran agama dengan ilmu umum, meninggalkan sistem pendidikan tradisional di surau yang menggunakan metode duduk bersila dan belajar melingkari guru. Pertanyaan yang mengemuka adalah mengapa Muhammadiyah mengadopsi model madrasah dengan sistem belajar menggunakan meja, kursi, dan papan tulis yang bernuansa kemoderenan?

Pertanyaan tersebut dapat dipahami dengan mencermati catatan Hasan Ahmad yang menjelaskan bahwa modernisasi pendidikan Muhammadiyah merupakan bagian dari gerakan reformasi Islam. Tujuan utamanya adalah menyetarakan kapasitas intelektual lulusan pendidikan Islam dengan lulusan pendidikan Barat yang unggul dalam pengetahuan umum namun lemah dalam fondasi akidah.²⁵⁰ Di Padang Panjang, pendirian madrasah oleh Muhammadiyah dipandang sebagai langkah strategis, meskipun juga berpotensi menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

Muhammadiyah mengadopsi konsep pendidikan modern dari Yogyakarta yang dirancang oleh Ahmad Dahlan. Konsep tersebut menekankan penerapan sistem klasikal dengan kurikulum modern yang terstruktur. Ahmad Dahlan meyakini bahwa keterbelakangan umat Islam di Hindia Belanda disebabkan oleh sistem pendidikan tradisional yang tidak mampu mencetak lulusan yang dapat bersaing dengan alumni pendidikan Barat, khususnya mereka yang menempuh pendidikan di Belanda.²⁵¹

Menurut Ahmad Dahlan, pola pendidikan pondok pesantren yang waktu itu umum di kalangan umat Islam dengan sistem pendidikan tradisional yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan seperti nahwu sharaf, ushul fiqh dan sejenisnya tidak memberikan bekal yang memadai untuk menghadapi tantangan kehidupan modern. Para murid tidak diperkenalkan dengan ilmu-ilmu sosial, politik, ekonomi,

²⁵⁰ Hamka, Ayahku. Jakarta: Umminda, 1982, hlm. 45-47.

²⁵¹ Deliar Noer. 1987. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES, hlm. 134.

dan ilmu-ilmu praktis lainnya yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Ironisnya, dalam bidang studi yang sepenuhnya berorientasi ilmu agama.²⁵²

Di sisi lain, lembaga pendidikan yang dikelola pemerintah kolonial Belanda justru menjadi primadona bagi masyarakat Hindia Belanda. Lembaga-lembaga ini menawarkan pendidikan modern dengan pendekatan klasikal, kurikulum terstruktur, dan materi pelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Namun, pendidikan kolonial tersebut tidak menanamkan pendidikan moral dan nilai-nilai agama. Akibatnya, lulusan pendidikan model Eropa tersebut menjadi pribadi-pribadi yang kering secara spiritual dan cenderung sekuler.

Mencermati dua model pendidikan yang ada pada masa itu, Ahmad Dahlan berusaha merancang sistem pendidikan yang memadukan keunggulan keduanya. Ia menginginkan pendidikan Islam yang mampu mencetak lulusan yang menguasai ilmu-ilmu umum sekaligus memiliki akhlak mulia dan dasar keislaman yang kuat. Harapannya, pendidikan Muhammadiyah dapat melahirkan generasi yang cakap, percaya diri, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan bangsa.²⁵³

Kerangka berpikir seperti tersebut di atas oleh Ahmad Dahlan diwujudkan dalam pendirian sekolah Muhammadiyah pertama pada 1911 di Yogyakarta. Melalui sekolah ini, Ahmad Dahlan menerapkan gagasan tentang lembaga pendidikan yang ideal, yakni memadukan pendidikan agama dan umum dengan metode pembelajaran yang komprehensif, modern, dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Seiring berjalannya waktu, lulusan Perguruan Muhammadiyah Kauman Padang Panjang mulai tersebar ke berbagai pelosok Nusantara dan Semenanjung Melayu. Keberadaan mereka menempatkan Kauman Padang Panjang sebagai pusat perhatian di kalangan internal Muhammadiyah dan umat Islam secara luas. Pada dekade 1940-an, pengaruh Kauman semakin diakui dan diperhitungkan. Alumni

²⁵² Alfian, *Muhammadiyah: The Political Behavior of a Muslim Modernist Organization under Dutch Colonialism*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1989, hlm. 117-120.

²⁵³ Ifian, *Muhammadiyah: The Political Behavior of a Muslim Modernist Organization under Dutch Colonialism*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1989, hlm. 117-120.

Perguruan Muhammadiyah Kauman Padang Panjang mulai dipercaya untuk memegang berbagai posisi strategis. Hal inilah yang kemudian melahirkan ungkapan populer dalam sejarah Muhammadiyah, yaitu “Muhammadiyah dilahirkan di Kauman Yogyakarta dan dibesarkan di Kauman Padang Panjang.”²⁵⁴

Selain mencerdaskan umat dan memperluas pengaruh Muhammadiyah ke berbagai daerah, alumni Perguruan Muhammadiyah Kauman Padang Panjang juga turut mengobarkan semangat perjuangan umat Islam dan bangsa Indonesia melawan penjajahan Belanda. Perjuangan tersebut mencapai puncaknya pada tahun 1942 ketika Belanda menyerah kepada Jepang. Namun perjuangan belum usai, karena dominasi Jepang menghadirkan bentuk penjajahan baru yang oleh sebagian kalangan dianggap lebih kejam dibandingkan kolonialisme Belanda.

Selain mencerdaskan umat dan mengembangkan Muhammadiyah di manapun mereka berada, para alumni Perguruan Muhammadiyah Kauman Padang Panjang juga memberikan kontribusi pemikiran untuk menggelorakan semangat perjuangan umat Islam dan bangsa Indonesia melawan penjajahan Belanda. Perjuangan itu berakhir hingga 1942, saat Belanda bertekuk lutut kepada Jepang. Namun belum berakhir, sebab kemenangan Jepang juga berbuntut pada penjajahan gaya baru yang oleh sebagian kalangan disebut jauh lebih kejam dari apa yang diperbuat Belanda di Nusantara ini.²⁵⁵

Dalam sejarah perjuangan bangsa dan pengembangan persyarikatan Muhammadiyah, dari sekian lembaga pendidikan yang ada di Perguruan Muhammadiyah Kauman pada waktu itu, ternyata tamatan Tabligh School yang kemudian disempurnakan dengan Kulliyatul Muballighien dan Muballighat punya andil yang jauh lebih besar dibandingkan dengan tamatan lembaga pendidikan lainnya. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bila dalam data-data sejarah lebih banyak menyingkap kiprah Kulliyatul Muballighien beserta alumninya dibandingkan dengan sekolah dan madrasah lainnya.

²⁵⁴ Hasan Ahmad, *Sejarah Perguruan Muhammadiyah Kauman Padang Panjang*. Arsip Muhammadiyah Padang Panjang.

²⁵⁵ Hasan Ahmad, *Sejarah Perguruan Muhammadiyah Kauman Padang Panjang*. Arsip Muhammadiyah Padang Panjang.

Sejauh mana kiprah Kuliyatul Muballighien itu dalam membesarkan Kauman dan menyebarkan Muhammadiyah? Kendati tidak bisa dijawab dengan sederhana, namun bisa dipahami kalau konsul dan pimpinan-pimpinan Muhammadiyah lainnya sejak awal kebanyakan adalah alumni Kuliyatul Muballighien.

Dengan semakin menonjolnya peran alumni Kuliyatul Muballighien, permintaan tenaga pimpinan terus membanjir kepada Consul Muhammadiyah Padang Panjang. Permintaan itu datang dari Sulawesi Selatan, Kalimantan, Sumatera Selatan, Bengkulu, Aceh, Sumatera Timur, Tapanuli, Riau, Lampung dan daerah-daerah lainnya. Mereka meminta agar Consul Muhammadiyah Padang Panjang bisa mengirim mereka calon-calon pimpinan yang telah dididik dan 'diasah' di Kauman Padang Panjang, terutama tamatan Kuliyatul Muballighien. Sebab, tamatan Kuliyatul Muballighien itu selain dikenal mampu menjadi pimpinan juga bisa mengajar pada sekolah-sekolah yang ada di daerah kerjanya.

Dukungan warga Muhammadiyah terhadap Kuliyatul Muballighien ternyata tidak hanya datang dari anggota yang berdomisili di Padang Panjang. Lembaga ini mendapat partisipasi penuh dari anggota Muhammadiyah Minangkabau. Buktinya, berdasarkan Konferensi Muhammadiyah Minangkabau ke-11 di Maninjau, segenap warga Muhammadiyah bersepakat untuk menggerakkan madrasah yang waktu itu dipimpin oleh Ya'cub Rasjid.²⁵⁶

Pada masa itu, popularitas dua sekolah yang telah eksis sebelumnya, yakni Normal School yang dipimpin Mahmud Yunus dan Islamic College di bawah pimpinan Mukhtar Yahya mulai bergeser. Popularitas tidak lagi milik kedua sekolah itu, tapi telah berganti jadi milik tiga sekolah setelah Kuliyatul Muballighien mengambil peran yang turut menentukan jalannya sejarah Muhammadiyah di Nusantara beberapa tahun kemudian.

Kuliyatul Muballighien ternyata tidak hanya dibesarkan oleh anggota Muhammadiyah Minangkabau, tetapi juga oleh anggota Muhammadiyah dari daerah-daerah lainnya. Tercatat sejumlah ranting dan cabang Muhammadiyah di

²⁵⁶ Hasan Ahmad, *Sejarah Perguruan Muhammadiyah Kauman Padang Panjang*. Arsip Muhammadiyah Padang Panjang.

Jawa dan Sulawesi sempat mengirimkan kadernya untuk mengecap pendidikan sekolah khusus calon pimpinan dan guru Muhammadiyah itu.

Murid-murid kader itu sesungguhnya adalah generasi muda yang sedang memangku jabatan, baik sebagai kepala sekolah maupun pimpinan ranting, cabang dan konsulat Muhammadiyah yang ada di daerah asalnya. Sesuai dengan kondisi zaman, Kulliyatul Muballighien pada waktu itu masih mengalami kekurangan dan keterbatasan sarana dan prasarana. Melalui Konsulat Muhammadiyah Minangkabau dan Direktur Kulliyatul Muballighien Yacub Rasyid, sejumlah bangku dan meja belajar milik Sekolah Guru Muhammadiyah yang ada di Padang berhasil dipinjam dan dibawa ke Padang Panjang.

Sementara untuk mendukung proses belajar mengajar, dibutuhkan banyak tenaga pengajar yang berkualitas. Syukurlah, dalam kondisi yang demikian sulit, AR St. Mansur berkenan mengajar Ilmu Kepemimpinan, lalu disusul oleh Dr. Hamka. Melihat semangat juang kedua tokoh yang telah 'uzur' itu, timbul pulalah semangat generasi muda untuk membaktikan dirinya bagi pengembangan dan peningkatan mutu Kulliyatul Muballighien. Tidak hanya menyumbangkan ilmu dan tenaga, generasi muda itu juga menyumbang dalam bentuk materi...

Ketika semangat mengelola Kulliyatul Muballighien itu tengah menyala-nyala, tiba-tiba ada pula sejumlah generasi muda dari Medan yang datang ke Padang Panjang untuk menjemput Hamka, mereka meminta agar tokoh ini diizinkan diboyong ke Medan. Yang namanya medan jihad menantang, Hamka sendiri langsung saja setuju. Dengan 'pandangan berat' rekan sejawatnya, Hamka berangkat juga ke Medan memenuhi permintaan tersebut.²⁵⁷

Ini adalah 'musibah' bagi peningkatan mutu Kulliyatul Muballighien. Namun bersamaan dengan 'musibah' itu datang pulalah sederetan keberuntungan seiring dengan tibanya H. Haroun 'I Ma'any (tamatan MULO) dan H. Badarudin Zein (dari Mesir) untuk mendarmabaktikan ilmunya di madrasah tersebut. Pada 1937, Kulliyatul Muballighien berhasil menamatkan 14 alumninya yang pertama. Mereka itu langsung dipulangkan ke kampung masing-masing untuk memimpin

²⁵⁷ Hasan Ahmad, *Sejarah Perguruan Muhammadiyah Kauman Padang Panjang*. Arsip Muhammadiyah Padang Panjang.

Muhammadiyah dan mengelola lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah di Padang Panjang.²⁵⁸

Masih dalam tahun 1937 itu, tamatan MTsM Puteri kian meningkat jumlahnya. Untuk menampung mereka, ada saran agar Kuliyatul Muballighien menerima pula siswa khusus puteri. Namun saran itu masih dipertimbangkan lantaran Muhammadiyah sudah punya Sekolah Guru Puteri (Kweekschool Isteri) di Bukittinggi. Akhirnya pada November, desakan itu semakin deras. Pelajar-pelajar MTsM Puteri menuntut Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangpanjang agar segera mendirikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) khusus putera.

Lewat keputusan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangpanjang pada 15 Januari 1938 akhirnya didirikanlah Tabligh School Isteri dengan direktur pertamanya dipercayakan pada H. A. Malik Ahmad, sedangkan tempat belajarnya menggunakan lokal MTsM Puteri yang telah ada sebelumnya di Komplek Perguruan Muhammadiyah Kauman tersebut. Guru-gurunya adalah H. A. Malik Ahmad, H. Haroun 'I Ma'any, H. Badaruddin Zein, Zahrial, Malik Thaher dan Johan Nurdin dengan mata pelajaran di antaranya Dakwah Islamiyah, Pengetahuan Aalam.²⁵⁹

Pada 1941, seiring dengan perkembangan lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah di Padangpanjang, Tabligh School Isteri pun diganti namanya menjadi Kuliyatul Muballighat. Pada 15 Juli tahun yang sama, Malik Ahmad meletakkan jabatannya selaku direktur dengan alasan ingin berkonsentrasi untuk mengajar dan membina Kuliyatul Muballighien. Posisi Malik Ahmad digantikan oleh H. Iskandar Zulkarnaini.

Memasuki Februari 1942, pertempuran hebat antara Belanda dan Jepang kian mencemaskan. Hampir tak ada kota-kota di Hindia Belanda yang jadi incaran pesawat-pesawat tempur Jepang. Perang antara Jepang dan Belanda pun tak dapat dihindari lagi. Saking menakutkannya penggunaan alat-alat perang oleh kedua belah pihak, pada 15 Februari sekolah-sekolah yang ada di Komplek Perguruan

²⁵⁸ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES, 1987, hlm. 132.

²⁵⁹ Hasan Ahmad, *Sejarah Perguruan Muhammadiyah Kauman Padang Panjang*. Arsip Muhammadiyah Padang Panjang.

Muhammadiyah Kauman Padang Panjang terpaksa ditutup. Dua hari setelah itu, persisnya pada 17 Februari, semua kota pun jatuh dan lumpuh.

Suasana tak menentu itu hanya berlangsung sebentar, sebab pada Mei semua sekolah yang ada di Komplek Kauman sudah mulai dibuka lagi, guru-guru dan murid-muridnya sudah kembali dari pengungsian. Kondisinya jadi semakin stabil setelah AR St. Mansur dan SY St. Mangkuto dapat izin untuk mengajar kembali oleh Jepang. Pada tahun itu, sekolah-sekolah yang ada di Kauman umumnya hanya mengajarkan ilmu-ilmu keislaman ditambah dengan Bahasa Jepang.

Pada 5 Maret 1943, dilakukanlah penyempurnaan sekolah-sekolah yang ada di Komplek Perguruan Muhammadiyah Kauman Padang Panjang, mencakup Muhammadiyah Kedua (HIS Lama), Tsanawiyah Putera, Tsanawiyah Puteri, Kulliyatul Muballighien dan Kulliyatul Muballighat. Kepemimpinannya dilakukan secara kolegal yang terdiri dari A. Malik Ahmad (ketua) dan Palizir Hafliil (sekretaris) dengan anggota-anggota H. Haroun 'I Ma'any, Zulkarnaini, Sahrial, Johan Nurdin dan Aisyah Ilyas. Lembaga ini dinamakan dengan Majelis Pengajaran.

Pola pendidikan yang diterapkan Muhammadiyah, pada lembaga pendidikan pesantren dan madrasah, diajarkan ilmu-ilmu keduniaan, sementara pada sekolah yang oleh kalangan awam disebut sebagai sekolah agama, Ahmad Dahlan juga mengajarkan ilmu-ilmu keislaman. Mencermati perkembangan pola pendidikan Muhammadiyah yang dikembangkan Ahmad Dahlan di Yogyakarta, para pemuka Muhammadiyah di Minangkabau dengan sigap meresponnya. Pada 1932, Komplek Perguruan Muhammadiyah Kauman tidak hanya punya HIS Med de Quran, tetapi terdapat Kulliyatul Mubhallighien.

Tiga tahun kemudian, tepatnya 1935, Komplek Perguruan Muhammadiyah Kauman kian lengkap dengan didirikannya Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah (MTsM) dengan menggunakan kurikulum terpadu, yakni menggunakan kurikulum yang mengajarkan ilmu-ilmu keislaman, kerohanian dan keduniaan. MTsM Kauman pertama kali dipimpin HA Rahman Yatim yang kemudian dilanjutkan oleh

Djohan Nurdin. Madrasatun Niswah yang ada sebelumnya, dilebur ke MTsM Khusus Putri.²⁶⁰

Seiring dengan semakin diminatinya MTsM karena membawa metodologi pendidikan yang oleh orang banyak dianggap sebagai sesuatu yang baru, maka metodologi yang dipakai “ditularkan” secara internal Muhammadiyah ke MTsM lain yang didirikan di berbagai cabang Muhammadiyah Minangkabau. Untuk menampung para tamatan MTsM dan alumni lembaga pendidikan lain yang banyak berdatangan ke Kauman Padangpanjang, oleh pimpinan Muhammadiyah diputuskan untuk menyempurnakan Tabligh School dan meleburnya ke lembaga pendidikan baru yang dinamakan Kulliyatul Muballighien Muhammadiyah (KMM) pada Februari 1936.

Masih dalam 1936 itu, di Kauman Padang Panjang juga didirikan lembaga pendidikan dasar yang dinamakan dengan Madrasah Ibtidaiyah. Selain mengajarkan ilmu-ilmu yang diajarkan di Sekolah Dasar milik pemerintah Belanda, di Madrasah Ibtidaiyah itu juga diajarkan ilmu-ilmu dasar keislaman. Tiga tahun kemudian di Perguruan Muhammadiyah Kauman Padang Panjang didirikan lembaga pendidikan usia dini yang dinamakan dengan Frobel School alias Taman Kanak-kanak pada 1939. Sekolah ini dipimpin oleh Encik Nurce.

Memasuki 1940, Komplek Perguruan Muhammadiyah Kauman Padang Panjang telah punya lima lembaga pendidikan, yakni HIS Med de Quran, MTsM, Kulliyatul Muballighien, Madrasah Ibtidaiyah dan Frobel School. Dengan lembaga-lembaga pendidikan itu, Komplek Perguruan Muhammadiyah Kauman Padang Panjang telah menunjukkan eksistensinya di bumi Minangkabau, bahkan juga menggema ke Semenanjung Melayu dan seantero Nusantara. Di hari yang sama, A. Malik Ahmad ditunjuk pula oleh Consul Muhammadiyah Minangkabau untuk menjabat Kepala Pengajaran Muhammadiyah dengan tugas utama membangun kembali sekolah-sekolah di daerah, menguatkan semangat hizbullah di kalangan murid dan pimpinan sekolah, membangun kembali gedung Kulliyatul Muballighien dan membangun semangat kemuhammadiyah di

²⁶⁰ Hasan Ahmad, *Sejarah Perguruan Muhammadiyah Kauman Padang Panjang*. Arsip Muhammadiyah Padang Panjang.

kalangan guru sekolah Muhammadiyah. Pada 1944, proses kaderisasi dengan mengaryakan langsung alumni-alumni perdananya mulai dilakukan oleh Kuliyatul Muballighien Muhammadiyah.²⁶¹

Semangat juang para guru yang ada di Komplek Perguruan Muhammadiyah Kauman yang mengajar selama masa penjajahan Jepang, pantas untuk kita acungi jempol. Sebab, selain harus bisa menyampaikan materi pelajaran secara maksimal, kepada mereka tidak diberikan gaji yang memuaskan oleh pengurus, bahkan makan nasi pun mereka diberi hanya sekali sehari, yakni makan pagi saja, sementara untuk makan siang dan malam, pengurus hanya memberikan bubur. Alumni-alumni Kuliyatul Muballighien dan sekolah-sekolah lainnya yang ada di Perguruan Muhammadiyah Kauman tapi tidak mengajar, dimotivasi untuk bergabung dengan laskar-laskar ketentaraan yang dilatih oleh pasukan Jepang. Beberapa pemuka Muhammadiyah Cabang Padang Panjang dipercaya pula oleh Jepang untuk memimpin sejumlah wadah bentukannya, diantaranya SY St. Mangkuto dan Udin diamanahi untuk memimpin Gyu Gun Tyo Sa Ngi Kai Sumatera Barat.²⁶²

Dengan pola perjuangan demikian, alhasil baik Muhammadiyah maupun lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah yang ada di Kompleks Perguruan Muhammadiyah selamat dari keganasan penjajahan Jepang. Muhammadiyah oleh kolonial itu dianggap cukup toleran dan tidak membahayakan. Kondisi demikian bertahan hingga akhirnya Hindia Belanda memproklamasikan kemerdekaannya selaku sebuah negara merdeka yang bernama Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, seiring dengan kekalahan Jepang melawan sekutu.

²⁶¹ Hasan Ahmad, *Sejarah Perguruan Muhammadiyah Kauman Padang Panjang*. Arsip Muhammadiyah Padang Panjang.

²⁶² *Suara Muhammadiyah*, Edisi Tahun 1930-an.

BAB IV

TRANSISI PERGURUAN MUHAMMADIYAH: DARI GAGASAN KE REALISASI 1935-1955

4.1 Dari Tablig School Menjadi Kuliyatul Muballighien

Sub bab ini menguraikan secara mendalam perjalanan transformasi lembaga pendidikan Muhammadiyah di Padang Panjang dari Tablig School menjadi Kuliyatul Muballighien. Proses transformasi ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial, politik, dan budaya Minangkabau pada awal abad 20. Lahirnya lembaga pendidikan ini menjadi manifestasi dari semangat pembaruan Muhammadiyah dalam menjawab tantangan modernitas dan kolonialisme yang mengancam eksistensi umat Islam di Indonesia.²⁶³

Tablig School didirikan pada 1931 atas inisiatif Buya A.R. St. Mansur, Konsul Muhammadiyah Minangkabau, sebagai respon terhadap kebutuhan mendesak akan kader dakwah yang terdidik dan berorientasi pada kepemimpinan umat. Sekolah ini dibuka di Kantor Muhammadiyah Guguk Malintang Padang Panjang dengan jumlah murid angkatan pertama sebanyak 16 orang yang berasal dari berbagai daerah di Sumatera Barat.²⁶⁴ Tablig School menjadi pusat kaderisasi yang membentuk calon pemimpin dan muballigh Muhammadiyah yang memahami ajaran Islam dan memiliki keterampilan sosial serta wawasan keumatan yang luas.²⁶⁵

²⁶³ Tablig School bertujuan untuk membina kader-kader muballigh Muhammadiyah yang memiliki kemampuan kepemimpinan, pengetahuan agama, dan keterampilan sosial yang relevan dengan kebutuhan umat pada masa itu. Lihat Haedar Nashir. 2003. *Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah, Resistensi Modernisme*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, hlm. 65.

²⁶⁴ Nama-nama 16 murid dan asal daerahnya sebagai berikut: A. Malik Ahmad (Sumanik Batusangkar), Saleh Jafas, Saidina Hemzah (Pauh IV Padang), Yacub Thalib (Nanggalo Padang), Jamaidin Yatim (Nanggalo Padang), Jamaris (Tanjung Sani, Maninjau), Samsudin Idris, Bakhtiar Aniny (IV Angkat Bukittinggi), Thaher Idris (Padang), Amarullah Daud (IV Angkat Bukittinggi), A. Kahar Ahmad (Tanjung Sani, Maninjau), Nu'man Burhani (Bukittinggi), Darwis Kijai (Kurai Taji, Pariaman), M. Zen Rahimi (Pasar Baru, Pariaman), Zakaria Salam (Padang), dan Sabaruddin (Cingkaring Bukittinggi) lihat Hasan Ahmad. *Sejarah Komplek Perguruan Muhammadiyah Kauman Padang Panjang*. (Arsip Pribadi).

²⁶⁵ Alfian, Muhammadiyah. 1989. *The Political Behavior of a Muslim Modernist Organization under Dutch Colonialism*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 110.

Tablig School didirikan dalam konteks masyarakat Minangkabau yang sedang mengalami pergeseran orientasi pendidikan dari tradisional berbasis surau menuju model pendidikan modern yang terorganisasi. Kebutuhan akan pendakwah yang mampu mengartikulasikan dakwah Islam dalam bahasa modern menjadi semakin penting seiring dengan semakin gencarnya penetrasi pendidikan kolonial dan perubahan struktur sosial. Dalam teori strukturasi Anthony Giddens, pendirian Tablig School merupakan manifestasi nyata dari interaksi dialektis antara agensi dan struktur. Dalam hal ini, para agen Muhammadiyah di Padang Panjang tidak semata-mata tunduk pada struktur kolonial yang menekan, melainkan justru memanfaatkan peluang yang ada untuk mereproduksi dan mentransformasi struktur sosial melalui pendirian lembaga pendidikan alternatif.²⁶⁶

Namun, Tablig School mengalami tekanan berat dari pemerintah kolonial Belanda yang memandangnya sebagai potensi ancaman. Akibatnya, sekolah ini terpaksa ditutup pada tahun kedua berdirinya.²⁶⁷ Penutupan ini tidak memadamkan semangat kader-kader Muhammadiyah. Pada 1935, para pemuda alumni Thawalib dan Diniyah Padang Panjang menginisiasi pembukaan kembali Tablig School dengan dukungan penuh dari Buya Hamka, A. Kamil, dan Buya R.I. Dt. Sinaro Panjang.²⁶⁸ Proses ini mencerminkan bahwa dalam teori Giddens, agen Muhammadiyah secara aktif melanjutkan reproduksi struktur meski dihadap oleh dominasi kolonial.

Kondisi pendidikan pada masa itu sangat sederhana. Para murid belajar dalam ruang seadanya, duduk di atas tikar, dan menjalankan kegiatan belajar tiga kali sehari, yaitu pagi, sore, dan malam.

²⁶⁶ Anthony Giddens. 1984. *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. Cambridge: Polity Press, hlm. 25-28.

²⁶⁷ Taufik Abdullah. 1971. *Schools and Politics: The Kaum Muda Movement in West Sumatra 1927-1933*. Ithaca: Cornell University, hlm. 217.

²⁶⁸ Hamka. 1974. *Kenang-kenangan Hidup*. Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 102. Setelah hal tersebut dimusyawarahkan oleh Konsulat Muhammadiyah Minangkabau dengan penuh pertimbangan, maka dibentuklah panitia kecil sehingga pada tahun itu juga dapatlah Sekolah Tablig School tersebut dimulai Kembali. Ditunjuklah guru-guru yang akan memberikan tenaganya pada Tablig School tersebut, disamping ulama-ulama besar seperti Dr. A. Karim Amarullah, Buya A.R. St. Mansur, St. Mangkuto, R.I. Dt. Sinaro Panjang dan lainnya, serta menetapkan Buya Hamka sebagai Direktur dan A. Kamil sebagai administratur.

Keadaan belajar waktu itu hanya duduk diatas tikar (duduk bersela diatas lantai), dan sesuai pula dengan keadaan, pelajarnya terpaksa ikut ambil bagian untuk mensukseskan sekolah, sehingga mengakibatkan jam belajar terpaksa 3 kali sehari semalam, yaitu pagi jam 6.30 s/d 10.00, sore jam 14.00 s/d 16.30, (untuk vak umum) dan 18.30 s/d 22.00 malam untuk ilmu pemimpin.²⁶⁹

Model pembelajaran ini menunjukkan etos kerja yang tinggi dan dedikasi luar biasa dari para pelajar dan guru. Dalam kerangka teori sistem sosial Talcott Parsons, perubahan dari Tablig School menuju Kulliyatul Muballighien dapat dilihat sebagai bentuk adaptasi sistem Muhammadiyah dalam memenuhi kebutuhan sosial yang semakin kompleks.²⁷⁰ Muhammadiyah berusaha memenuhi fungsi adaptasi (A) dengan menyusun lembaga pendidikan yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, sementara fungsi pencapaian tujuan (G) diwujudkan dalam kaderisasi muballigh berkualitas.

Pada akhir 1935, Tablig School mengalami penguatan kurikulum dengan menambahkan pelajaran bahasa Belanda dan bahasa Inggris sebagai respons terhadap meningkatnya kebutuhan penguasaan bahasa asing. Penambahan pelajaran ini menjadi indikator penting keterbukaan Muhammadiyah terhadap ilmu dan budaya luar yang tetap dikritisi dalam kerangka Islam.²⁷¹

Pada Februari 1936, Tablig School resmi bertransformasi menjadi Kulliyatul Muballighien Muhammadiyah Padang Panjang dalam Konferensi Muhammadiyah Minangkabau ke-11 di Sungai Batang Maninjau. Perubahan ini bukan sekadar pergantian nama, tetapi sebuah restrukturisasi institusi yang menjadikan Kulliyatul Muballighien sebagai sekolah menengah atas Muhammadiyah yang sistematis dan terorganisasi.²⁷² Murid-murid berdatangan dari seluruh Sumatera, bahkan dari Jawa dan Sulawesi. Banyak di antara mereka merupakan pemimpin daerah dan tokoh

²⁶⁹ Hasan Ahmad. *Sejarah Komplek Perguruan Muhammadiyah Kauman Padang Panjang*. (Arsip Pribadi).

²⁷⁰ Talcott Parsons. 1951. *The Social System*. New York: Free Press, hlm. 76-80.

²⁷¹ Pada akhir 1935, Tablig School mengalami sedikit perubahan karena pada waktu itu terlampau banyak pemuda-pemuda yang menghayati bahasa Belanda dan bahasa Inggris, maka diadakan pula kursus bahasa Belanda dan bahasa Inggris, dibawah pimpinan Adam Ibrahim yang dibantu oleh Amanan Mangan dengan upaya penyesuaian zaman.

²⁷² Arsip Muhammadiyah Sumatera Barat. *Amal Bakti Muhammadiyah Sumatera Barat 1925-1965*.

Muhammadiyah setempat yang dikirim secara resmi untuk memperdalam ilmu di Kuliyatul Muballighien.

Kuliyatul Muballighien berjalan dalam kondisi serba terbatas. Keterbatasan fasilitas seperti bangku dan buku pelajaran menjadi tantangan utama. Namun, keterbatasan tersebut tidak mematahkan semangat para pengajar dan siswa. Para guru besar seperti Buya A.R. St. Mansur dan Dr. H. A. Karim Amarullah mengajar dengan penuh dedikasi tanpa pamrih. Bahkan ketika Buya Hamka harus berangkat ke Medan, kepemimpinan dan semangat pendidikan tetap dilanjutkan oleh Buya Haroun Al Maany yang dikenal luas sebagai ulama serbabisa.²⁷³

Dalam konteks teori tindakan komunikatif Jurgen Habermas, perubahan kelembagaan ini terjadi melalui konsensus sosial yang dibangun secara rasional. Muhammadiyah menciptakan ruang dialog terbuka antara pimpinan, guru, murid, dan masyarakat. Transformasi dari Tablig School ke Kuliyatul Muballighien bukanlah hasil paksaan atau otoritarianisme organisasi, melainkan lahir dari kebutuhan bersama yang disepakati melalui komunikasi yang bebas dari distorsi.²⁷⁴

Setiap tahun, Kuliyatul Muballighien menghasilkan lulusan yang langsung disebar ke berbagai wilayah sebagai guru, muballigh, dan pemimpin Muhammadiyah. Mereka menjadi ujung tombak dakwah Muhammadiyah di tingkat lokal maupun regional. Eksistensi Kuliyatul Muballighien tidak hanya memperluas jaringan Muhammadiyah, tetapi juga memperkuat akar sosial organisasi melalui kaderisasi yang sistematis dan berkelanjutan.

Perjalanan dari Tablig School ke Kuliyatul Muballighien menggambarkan bagaimana Muhammadiyah mampu mengatasi hambatan struktural kolonial dengan membangun institusi yang berorientasi pada pemberdayaan umat. Dalam perspektif Giddens, Muhammadiyah berhasil mereproduksi struktur sosial yang baru melalui tindakan-tindakan agensinya. Dalam kerangka Parsons, Muhammadiyah telah beradaptasi secara fungsional untuk mempertahankan stabilitas dan keberlanjutan sistem sosialnya. Sementara dalam pandangan

²⁷³ Hamka, *Kenang-kenangan Hidup*, hlm. 120.

²⁷⁴ Jurgen Habermas. 1984. *The Theory of Communicative Action*. Boston: Beacon Press, hlm. 285-287

Habermas, Muhammadiyah berhasil membangun konsensus sosial melalui komunikasi yang rasional dan demokratis.

Selanjutnya, transformasi Tablig School menjadi Kuliyatul Muballighien pada Februari 1936 merupakan titik penting dalam sejarah pendidikan Muhammadiyah di Padang Panjang. Perubahan ini terjadi setelah terlihat pesatnya perkembangan dan keberhasilan Tablig School dalam beberapa bulan masa operasinya. Dalam waktu yang hampir bersamaan, sekolah-sekolah lanjutan atas agama seperti Normal Islam dan Islamic College di Padang telah berkembang pesat dan dibanjiri oleh murid-murid dari berbagai sekolah dasar agama seperti Thawalib, Diniyah, Parabek, dan Padang Jepang. Selain itu, madrasah tingkat Tsanawiyah Muhammadiyah telah banyak berdiri di berbagai daerah dan mencetak lulusan yang terus meningkat jumlahnya.

Melihat keadaan yang demikian dalam tubuh Muhammadiyah sendiri timbul pertanvaan "bagaimanakah Muhammadiyah"? Kemanakah akan ditampung tamatan dari Tsanawiyah? Mau tak mau terpaksa Muhammadiyah mempunyai sendiri Sekolah Menengah Lanjutan Atas.²⁷⁵

Dalam kerangka teori strukturasi Anthony Giddens, keputusan Muhammadiyah untuk mendirikan Kuliyatul Muballighien dapat dipahami sebagai upaya agensi Muhammadiyah dalam menciptakan struktur baru yang mampu mereproduksi nilai-nilai dan orientasi organisasi ke masa depan. Agensi Muhammadiyah tidak hanya bereaksi terhadap situasi, tetapi secara aktif membentuk realitas sosialnya melalui tindakan pendidikan.²⁷⁶

Melalui Konferensi Muhammadiyah Minangkabau ke-11 di Sungai Batang Maninjau, diputuskan secara formal bahwa Tablig School diubah menjadi Sekolah Menengah Atas dengan nama Kuliyatul Muballighien Muhammadiyah, yang berkedudukan di Padang Panjang. Konferensi tersebut juga menetapkan Yakub

²⁷⁵ Pertanyaan ini menjadi dorongan struktural yang menuntut adanya lembaga pendidikan lanjutan yang mampu menampung dan membina lulusan tersebut. Muhammadiyah dihadapkan pada kebutuhan objektif untuk menyediakan jenjang pendidikan menengah atas bagi kader-kader mudanya. Lihat Hasan Ahmad. *Sejarah Komplek Perguruan Muhammadiyah Kauman Padang Panjang*. (Arsip Pribadi).

²⁷⁶ Anthony Giddens. 1984. *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. Cambridge: Polity Press, hlm. 25-28.

Rasyid sebagai Direktur dan Buya R.I. Dt. Sinaro Panjang sebagai Administrator. Dalam perspektif Talcott Parsons, keputusan ini menjadi bagian dari mekanisme adaptasi sistem sosial Muhammadiyah yang berusaha mempertahankan keseimbangan dan kesinambungan organisasinya dengan membentuk struktur pendidikan yang mampu memenuhi kebutuhan Masyarakat.²⁷⁷

Realisasi keputusan konferensi ini segera dilaksanakan. Kuliyatul Muballighien di bawah pimpinan Yakub Rasyid mulai beroperasi dengan melakukan publikasi di berbagai surat kabar, menyebarkan informasi tentang pendirian sekolah ini. Nama Kuliyatul Muballighien segera menjadi harum, bersanding dengan lembaga-lembaga pendidikan Islam bergengsi lainnya seperti Normal School pimpinan Mahmud Yunus dan Islamic College pimpinan Mukhtar Yahya. Pelajar dari seluruh Sumatera, bahkan dari Pulau Jawa dan Sulawesi, berdatangan. Sebagian besar di antara mereka merupakan pemimpin muda di daerahnya, baik di lingkungan sekolah, cabang Muhammadiyah, maupun konsulat daerah. Para murid lama Tablig School secara otomatis menjadi murid Kuliyatul Muballighien dan melanjutkan ke kelas dua.²⁷⁸

Namun, seperti lembaga baru pada umumnya, Kuliyatul Muballighien menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dalam hal sarana belajar. Bangku dan buku pelajaran sangat terbatas. Dengan kebijakan Konsulat Muhammadiyah Minangkabau dan kepemimpinan Yakub Rasyid, bangku dan meja belajar berhasil disediakan dengan meminjam dari Sekolah Guru Muhammadiyah di Padang. Uang sekolah ditetapkan seringggit sebulan, meski pendapatan dari uang sekolah ini masih jauh dari mencukupi kebutuhan operasional dan pembayaran gaji guru.

Dalam keadaan serba kekurangan, dukungan dari tokoh-tokoh Muhammadiyah menjadi energi penggerak. Buya A.R. St. Mansur secara langsung mengajar ilmu kepemimpinan, diikuti oleh Buya Dr. H. A. Karim Amarullah yang datang dari Maninjau untuk menyumbangkan tenaga. Kehadiran para senior Muhammadiyah ini memberikan inspirasi besar bagi para kader muda untuk ikut

²⁷⁷ Talcott Parsons. 1951. *The Social System*. New York: Free Press, hlm. 76-80.

²⁷⁸ Alfian, Muhammadiyah. 1989. *The Political Behavior of a Muslim Modernist Organization under Dutch Colonialism*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 115.

mengabdikan diri. Di antara mereka yang turut berjuang adalah Adam Ibrahim, Mukhtar, Manan, Buyung, dan Darwis. Mereka siap menjalankan aktivitas sekolah meski dalam keterbatasan ekonomi, dengan semangat yang luar biasa.

Dalam kerangka teori tindakan komunikatif Jurgen Habermas, lahirnya Kulliyatul Muballighien bukanlah hasil keputusan *top-down*, melainkan merupakan konsensus sosial yang dicapai melalui dialog rasional di antara para tokoh Muhammadiyah dan masyarakat. Proses komunikasi yang terbuka dan partisipatif menjadi fondasi terbentuknya lembaga ini, di mana partisipasi masyarakat, tokoh agama, dan kaum muda Muhammadiyah berjalan secara sinergis.²⁷⁹

Kulliyatul Muballighien sempat mengalami pukulan berat dengan kepergian Buya Hamka yang diminta untuk memimpin Perpustakaan di Medan. Kepergian Buya Hamka menjadi kehilangan besar bagi Kulliyatul Muballighien, tetapi tidak mematahkan semangat perjuangan. Tidak lama setelahnya, datanglah Buya H. Haroun Al Maany dan H. Badaruddin Zen dari Patingan. Awalnya, para murid meragukan kapasitas guru baru tersebut. Namun, Buya Haroun Al Maany segera membuktikan dirinya sebagai pendidik yang disiplin, kharismatik, dan serba bisa. Beliau mampu menguasai berbagai mata pelajaran seperti Bahasa Inggris, Stenografi, Al-Asy'ya', Ilmu Falaq, dan Aljabar. Bahkan dalam keadaan mendesak ketika guru bidang tertentu berhalangan hadir, Buya Haroun Al Maany dapat menggantikan mereka tanpa persiapan khusus, yang kemudian membuatnya dijuluki “kamus berjalan” oleh Buya Hamka.

Dalam konteks teori strukturasi, figur seperti Buya Haroun Al Maany menjadi agen perubahan yang krusial dalam menjaga keberlangsungan struktur pendidikan Muhammadiyah. Keberadaan sosok yang mampu membangkitkan kedisiplinan dan membentuk habitus belajar yang kuat di tengah keterbatasan menjadi faktor penting dalam kelangsungan Kulliyatul Muballighien.

Secara keseluruhan, transisi dari Tablig School menjadi Kulliyatul Muballighien tidak hanya sekadar transformasi kelembagaan, tetapi juga

²⁷⁹ Jurgen Habermas. 1984. *The Theory of Communicative Action*. Boston: Beacon Press, hlm. 285-287

merupakan manifestasi dari keberanian Muhammadiyah dalam membangun sistem pendidikan Islam modern yang terorganisasi dengan baik. Muhammadiyah berhasil mengintegrasikan struktur baru dalam tubuh organisasinya untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan membangun konsensus sosial melalui partisipasi yang luas.²⁸⁰

Seiring dengan eksisnya Republik Indonesia sebagai negara yang berdaulat, upaya membangun Komplek Perguruan Muhammadiyah Kauman Padang Panjang selaku pusat pembibitan kader dan pimpinan Muhammadiyah semakin maju. Berbagai program pengembangan dan pembinaan dengan semangat kerjasama bisa direalisasikan secara berangsur-angsur. Sekolah yang ada di Kauman pun mengalami pertambahan. Untuk memahami sepak terjang Perguruan Muhammadiyah Kauman setelah Republik Indonesia merdeka, beban sejarah perjuangan ini sengaja dibagi ke dalam lima periodisasi, yakni 1945-1958, 1959-1965, 1966-1977, dan 1978-1988.

Kulliyatul Muballighien Periode 1945-1958

Pada pekan-pekan awal kemerdekaan, warga Perguruan Muhammadiyah Kauman, baik murid maupun gurunya, masih hanyut dalam suasana gembira sebagaimana halnya bangsa Indonesia keba-nyakan. Namun kegembiraan itu tidak berlangsung lama, sebab sejak 23 September 1945 murid dan guru yang ada di Kauman serentak bergotong royong dengan semangat kemerdekaan. Mereka dengan suka cita membangun kembali gedung-gedung sekolah yang roboh akibat peperangan melawan Jepang maupun Sekutu.²⁸¹

²⁸⁰ Pada tahun 1937, mulailah Kulliyatul Muballighien menghasilkan 14 orang sebagai lulusan yang pertamanya dengan nama dan asal daerah sebagai berikut: Munir Ibrahim (Selayo Solok), Sabri Hunir (Sibolga), Agus Hakin (Sungai Batang Maninjau), Rusli Syahbudin (Mungkar Suliki), A. Rahman Kahar (Sungai Batang Maninjau), Adnun Abdullah (Koto Tuo), Anwar By (Koto Kecil Maninjau), A. Rahman Ibrahim (Pariaman), Hiaz Saad (Lintau), Zainuddin By (Paninjauan Padang Panjang), Samsuddin Ahmad (Sumanik Batu Sangkar), Mansur Areyad (Payakumbuh), Bahrum Sultan (Makassar), dan Zaharuddin (Lintau). Lihat Hasan Ahmad. *Sejarah Komplek Perguruan Muhammadiyah Kauman Padang Panjang*. (Arsip Pribadi).

²⁸¹ Lihat Hasan Ahmad. *Sejarah Komplek Perguruan Muhammadiyah Kauman Padang Panjang*. (Arsip Pribadi).

Dalam catatan sejarah Kauman ditemukan fakta bahwa kayu-kayu yang dibutuhkan untuk membangun gedung sekolah, secara gotong royong dijemput oleh guru dan murid sekolah-sekolah yang ada di Kauman ke Tambangan, sekitar sepuluh kilometer dari Padang Panjang. Sementara untuk mencari uang yang digunakan membayar upah tukang (profesional), sebagian siswa dilugaskan ke daerah-daerah sekitar Padangpanjang untuk menghimpun sumbangan masyarakat, baik dalam bentuk bahan pangan maupun, uang.

Menjelang tutup tahun 1945, gerak perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kedaulatannya selaku negara merdeka dapat cobaan. Lewat siaran radio, orang-orang yang ada di Kauman mengetahui bahwa pada pertempuran sengit telah meletus di kota-kota yang ada di Pulau Jawa. Mencermati realitas itu, pemuka Muhammadiyah mengadakan rapat membahas berbagai kemungkinan yang akan timbul, alhasil pada 25 Desember 1945 disepakati untuk mendirikan Hizbullah. Laskarnya diambilkan dari murid-murid yang ada di Kauman, perwiranya adalah guru-guru, sedangkan komandannya dipercayakan kepada Kolonel Samsuddin Ahmad.²⁸²

Seiring dengan semangat membangun kembali Kauman, penambahan lembaga pendidikan ternyata tetap pula ada dalam pikiran pimpinan Muhammadiyah Cabang Padang Panjang, terutama mematangkan rencana mendirikan Sekolah Muhammadiyah ke-3, yaitu SMP Muhammadiyah yang telah jadi perbincangan sejak pertengahan 1944, namun terhenti saat perang kemerdekaan berlangsung.

Bersamaan dengan kian giatnya Hizbullah mengadakan latihan, pengurus Muhammadiyah mulai mematangkan rencana mendirikan SMP Muhammadiyah Kauman, Padangpanjang. Alhasil pada Januari 1946, rencana tersebut kian mantap dan secara resmi Perguruan Muhammadiyah Kauman telah memilih sebuah SMP. SMP Muhammadiyah itu adalah SMP pertama yang ada di Padangpanjang, belum ada satupun SMP Negeri di kota ini.

²⁸² Lihat Hasan Ahmad. *Sejarah Komplek Perguruan Muhammadiyah Kauman Padang Panjang*. (Arsip Pribadi).

Dengan berdirinya SMP Muhammadiyah, berarti sekolah-sekolah yang ada di Perguruan Muhammadiyah mulai memenuhi dua jalur pendidikan sesuai dengan tingkatannya, ada SD Muhammadiyah ada pula Madrasah Ibtidaiyah, ada MTs Muhammadiyah ada pula SMP Muhammadiyah. Kini tinggal Kuliyatul Muballighien yang masih jalan sendiri untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).

Untuk itu dalam pembahasan kilat pimpinan Muhammadiyah Cabang Padang Panjang mencoba kemungkinan didirikannya SMA Muhammadiyah di Kauman. Pembicaraan tentang rencana itu tidak membutuhkan waktu lama, sebab pada penghujung 1946 rencana untuk mendirikan sekolah tersebut semakin matang, hingga pada akhirnya ditetapkan bahwa pada Tahun Ajaran 1946/1947 SMA Muhammadiyah Kauman Padang Panjang telah mulai menerima murid baru untuk angkatan pertama. Untuk pertama kali, SMA Muhammadiyah dipimpin oleh Raden Sulaiman. Karena keterbatasan gedung, sarana dan prasarana yang ada di Kauman, maka untuk sementara SMA Muhammadiyah terpaksa belajar sore, mereka bergantian dengan siswa Kuliyatul Muballighien yang belajar pagi. Lantaran pola belajar seperti itu pulalah, ada siswa Kuliyatul Muballighien yang juga merangkap jadi siswa SMA Muhammadiyah. Orang yang sempat menamatkan studinya pada kedua sekolah tersebut di antaranya Prof. Dr. Zakiah Dradjat, Sofyan, Dr. Yasni, Aisyah Aminy dan Drs. Jama'an Saleh.²⁸³

Sementara itu setelah perang selama dua bulan, siswa-siswa sekolah dan madrasah lainnya kembali ke sekolahnya di Kauman. Selain kembali ke bangku peajaran, mereka pun terus mendalami ilmu-ilmu kemiliteran di sekolah masing-masing. Siswa-siswa putra tekun berlatih, dan berjuang lewat Laskar Hizbullah, sementara para putrinya juga turut berjuang lewat Laskar Muslimat yang dikomandani oleh Syamsiah Syam. Gereja Katolik yang terletak persis di seberang jalan, dijadikan asrama Laskar Muslimat.

Pada waktu itu, Malik Ahmad yang menjabat Direktur Kuliyatul Muballighien diangkat oleh pemerintah untuk menjabat Kepala Jawatan Sosial

²⁸³ Lihat Hasan Ahmad. *Sejarah Komplek Perguruan Muhammadiyah Kauman Padang Panjang*. (Arsip Pribadi).

Sumatera Tengah, untuk melanjutkan tugas-tugasnya di Kuliyatul Muballighien, pimpinan Muhammadiyah mempercayakannya kepada Yacub Rasjid.

Bersamaan dengan bertambahnya jumlah lembaga pendidikan dan semakin berperannya alumni sekolah-sekolah yang ada di lingkungan Perguruan Muhammadiyah Kauman, perkembangan luar biasa terus mengiringi derap langkah perjuangan pusat pendidikan ini. Pada perang melawan Agresi I Belanda, Komplek Perguruan Muhammadiyah Kauman masih mampu bertahan dan mengalami pertumbuhan, namun pada Agresi II, posisi Kauman sedikit goyah.

Tekanan-tekanan pasukan Belanda membuat murid dan guru sekolah-sekolah Muhammadiyah Kauman Padang Panjang mempertimbangkan untuk mengungsi. Alhasil, lewat persetujuan Pimpinan Muhammadiyah Cabang Padang Panjang dan Consulat Muhammadiyah Minangkabau, sekolah-sekolah yang ada di Kauman dinyatakan ditutup. Sementara khusus Kuliyatul Muballighien, karena posisinya selaku sekolah kader dan pusat pembibitan pimpinan Muhammadiyah, diambil kebijakan untuk tetap melanjutkan aktivitasnya di luar Padang Panjang.

Kuliyatul Muballighien pun berubah kedudukan menjadi 'sekolah dalam pengungsian' yang ditempatkan di Sumanik, Batusangkar. Waktu itu, orang-orang Muhammadiyah terbiasa menyebutnya dengan Kuliyatul Muballighien dan Kuliyatul Muballighat Darurat. Barulah setelah kedaulatan Republik Indonesia kembali diserahkan oleh Belanda, sekolah tersebut dikembalikan ke posisinya seperti sediakala di Kauman pada 19 Desember 1949. Dengan telah dikembalikannya kedaulatan Republik Indonesia oleh agresor Belanda, para siswa dan guru sekolah-sekolah Perguruan Muhammadiyah Kauman yang terpencar karena mengungsi, secara berangsur-angsur mulai datang lagi ke tempat mereka semula bersekolah. Para pemimpin Muhammadiyah yang turut memimpin pertempuran mempertahankan kemerdekaan dari agresi itu pun mulai pula 'turun gunung.' Mereka kembali berkumpul untuk membentuk Perguruan Muhammadiyah Kauman yang porak-poranda akibat peperangan tersebut.²⁸⁴

²⁸⁴ Lihat Hasan Ahmad. *Sejarah Komplek Perguruan Muhammadiyah Kauman Padang Panjang*. (Arsip Pribadi).

Komplek Perguruan Muhammadiyah Kauman Padang Panjang kembali direhabilitasi. Berbagai inventaris dan dokumen yang berserakan pun turut dikumpulkan lagi. Usaha mengumpulkan inventaris dan dokumen ini dilakukan oleh RI Dt. Sinaro Panjang dengan bantuan Hasan Ahmad dan MS. Dt. Parmato Dirajo yang pada waktu itu menjadi anggota Local Joint Committee (LJC) mewakili Pemerintah RI untuk Tanah Datar dan Padang Panjang. Mereka dengan giat kembali mengumpulkan meja, lemari, kursi, papan tulis dan inventaris lainnya, baik yang ada di kantor pemerintah maupun tempat-tempat lainnya.

Pada Januari 1950 semua sekolah yang ada di Perguruan Muhammadiyah Kauman Padang Panjang telah bisa memulai lagi aktifitas belajar mengajar seperti sedia kala. Kuliyatul Muballighien Darurat bersama segenap murid dan gurunya yang mengungsi ke Sumanik Batusangkar juga kembali ke Kauman. Direktornya tetap dipegang oleh H. Haroun 'L Ma'any. Pada pertengahan tahun ini, Kuliyatul Muballighien sudah bisa (kembali berjalan normal.

Pada 1951, pemerintah mengeluarkan regulasi baru di bidang pendidikan, bahwa setiap sekolah swasta dan madrasah diharuskan mengikuti ujian negara. Untuk menyesuaikan diri dengan preregulasi tersebut, Konferensi Pendidikan Muhammadiyah Sumatera Tengah pada 1 Mei 1951 di Padang Panjang menyepakati Kuliyatul Muballighien dan Kuliyatul Muballighat dirubah menjadi Sekolah Guru Agama Atas (SGAA) atau Muallimin Ulya. SGAA menggunakan kurikulum SGA Negeri ditambah dengan pengetahuan keislaman dan bahasa Arab sebagaimana tercantum dalam kurikulum Kuliyatul Muballighien sebelumnya. Dengan kebijakan itu, tamatan SGAA bisa mengikuti ujian SGA Negeri dan membuka kemungkinan pula untuk mengikuti ujian negara pada SMA Negeri. Alhasil, tamatan SGAA diperkenan untuk melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi agama atau perguruan tinggi umum.²⁸⁵

Pada waktu yang bersamaan Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah (MTsM) terpaksa pula berubah nama menjadi SGB atau Muallimin Muhammadiyah. Perubahan itu menyebabkan lama masa belajarnya juga berubah dari empat tahun

²⁸⁵ Lihat Hasan Ahmad. *Sejarah Komplek Perguruan Muhammadiyah Kauman Padang Panjang*. (Arsip Pribadi).

jadi lima tahun. Kurikulumnya juga diselaraskan dengan kurikulum SGB Negeri dengan menambahkan pengetahuan keislaman berdasarkan kurikulum yang pernah ada pada MTsM. Keputusan demikian mengakibatkan tamatan SGB Muallimin bisa mengikuti ujian negara pada SGB Negeri dan SMP Negeri.

Dengan demikian, transisi dari Tablig School menjadi Kuliyatul Muballighien bukan hanya peristiwa sejarah pendidikan semata, tetapi juga contoh nyata dari proses sosial yang kompleks, yang mempertemukan agensi, struktur, adaptasi sistem, dan rasionalitas komunikatif dalam mewujudkan perubahan sosial yang berkelanjutan.

4.2 Transisi dari Kuliyatul menjadi Fakultas Falsafah dan Hukum 1955

Sub bab ini menguraikan proses transisi Kuliyatul Muballighien menjadi Fakultas Falsafah dan Hukum Muhammadiyah pada 1955. Perubahan tersebut bukan sekadar reorganisasi kelembagaan, melainkan juga mencerminkan ekspansi ideologis dan respon Muhammadiyah terhadap kebutuhan zaman pasca kemerdekaan Indonesia. Transformasi ini menandai puncak konsolidasi pendidikan Muhammadiyah di Sumatera Barat dan menjadi tonggak sejarah dalam pengembangan pendidikan tinggi Islam modern di Indonesia.²⁸⁶

Setelah masa-masa sulit selama pendudukan Jepang dan Agresi Militer Belanda, Perguruan Muhammadiyah di Padang Panjang berupaya bangkit dengan mengkonsolidasikan lembaga-lembaga pendidikan yang telah dibangun. Kuliyatul Muballighien yang semula berfungsi sebagai sekolah menengah atas mulai menghadapi tantangan baru seiring dengan diterapkannya sistem ujian negara dan kebutuhan pendidikan yang lebih tinggi.²⁸⁷

²⁸⁶ Alfian. 1989. *Muhammadiyah: The Political Behavior of a Muslim Modernist Organization under Dutch Colonialism*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 110. Konferensi Akbar Muhammadiyah Sumatera Tengah yang dilaksanakan di Lubukalung pada 19-23 Maret 1954, memutuskan Muhammadiyah mendirikan perguruan tinggi pertama dengan nama Fakultas Hukum dan Falsafah di Kauman Padang Panjang. Keputusan inilah yang diresmikan pada 18 November 1955 tersebut, sesuai dengan rekomendasi Konferensi Pengajaran Muhammadiyah Sumatera Tengah tanggal 19-21 April 1955 di Padang Panjang.

²⁸⁷ Arsip Muhammadiyah Sumatera Barat. *Amal Bakti Muhammadiyah Sumatera Barat 1925-1965*.

Keputusan Muhammadiyah untuk mengubah Kulliyatul Muballighien menjadi Fakultas Falsafah dan Hukum Muhammadiyah merupakan hasil dari perjalanan panjang yang telah dimulai sejak Kongres Muhammadiyah Seperempat Abad tahun 1936 di Jakarta. Pada kongres tersebut, telah dicetuskan pentingnya mendirikan Universitas Muhammadiyah sebagai bagian dari visi besar Muhammadiyah dalam membangun kader ulama dan intelektual muslim yang mampu bersaing dalam kancah nasional dan internasional.²⁸⁸

Konperensi mengamanahkan kepada Panitia Pembina Universitas Muhammadiyah ini supaya berusaha dengan segenap daya dan kemampuannya, sehingga Universitas Muhammadiyah tersebut dapat diresmikan pada ulang tahun Muhammadiyah ke 43, yaitu tanggal 18 Nopember 1955. Pada tanggal 28 Djuli 1955 Putusan Konperensi Pengadjaran itu diterima baik oleh Konporensi Kilat Muhammadiyah, dimana Tjabang² dan Ranting² Muhammadiyah bersedia mengerahkan tenaga pemungutan ajam dan zakat dari anggota²nja untuk memenuhi begroting Fakultas yang berdjumlah Rp. 800.000, dan mereka mengadakan djandji tertulis bersedia dischors kalau tidak memenuhi putusan ini. Semendjak tanggal itulah panitia mulai mengumpulkan uang dan bahan.²⁸⁹

Namun, realisasi gagasan tersebut harus tertunda akibat pecahnya Perang Dunia II dan masa perjuangan kemerdekaan. Setelah kedaulatan Indonesia diakui pada 1949, semangat untuk mewujudkan universitas semakin menguat. Melalui serangkaian konferensi wilayah dan keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, disepakati bahwa fakultas pertama Universitas Muhammadiyah akan didirikan di Padang Panjang dengan konsentrasi pada Falsafah dan Hukum Islam.²⁹⁰

Secara sosiologis, transisi kelembagaan ini menunjukkan keberanian Muhammadiyah dalam melakukan lompatan besar dari lembaga kaderisasi muballigh menjadi perguruan tinggi. Dalam teori strukturasi Anthony Giddens, Muhammadiyah tidak hanya mereproduksi struktur pendidikan yang sudah ada, tetapi juga menciptakan struktur baru yang memungkinkan terjadinya mobilitas

²⁸⁸ Hamka. 1974. *Kenang-kenangan Hidup*. Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 118.

²⁸⁹ Hasan Ahmad. *Sejarah Komplek Perguruan Muhammadiyah Kauman Padang Panjang*. (Arsip Pribadi).

²⁹⁰ Arsip Muhammadiyah Sumatera Barat. *Notulen Konferensi Muhammadiyah Sumatera Barat, 1954*.

sosial vertikal bagi kader Muhammadiyah di Sumatera dan wilayah sekitarnya. Para agen Muhammadiyah, baik di pusat maupun daerah, berperan aktif dalam membentuk institusi yang mampu menjawab kebutuhan masa depan umat.²⁹¹

Dalam teori sistem sosial Talcott Parsons, perubahan ini dapat dimaknai sebagai adaptasi struktural Muhammadiyah terhadap kebutuhan pendidikan nasional. Muhammadiyah mampu memenuhi fungsi adaptasi (A), pencapaian tujuan (G), integrasi (I), dan pemeliharaan pola (L) secara simultan. Adaptasi diwujudkan dalam kemampuan Muhammadiyah merespon kebutuhan kader yang mampu mengisi sektor pendidikan dan pemerintahan. Pencapaian tujuan direalisasikan dengan pendirian fakultas yang menjadi simbol kemajuan pendidikan Islam modern. Integrasi sosial terbangun melalui partisipasi seluruh elemen Muhammadiyah di berbagai daerah, dan pemeliharaan pola tercermin dalam komitmen Muhammadiyah menjaga nilai-nilai Islam dan modernitas secara berimbang.²⁹²

Keputusan mendirikan Fakultas Falsafah dan Hukum Muhammadiyah di Padang Panjang juga menjadi contoh penerapan teori tindakan komunikatif Jürgen Habermas. Muhammadiyah melibatkan seluruh lapisan organisasi, mulai dari pimpinan pusat, wilayah, cabang, hingga masyarakat akar rumput untuk mewujudkan fakultas ini. Proses komunikasi yang rasional, terbuka, dan partisipatif menjadi kunci lahirnya konsensus sosial yang kuat. Berbagai sumber pendanaan digerakkan dari zakat, infaq, shadaqah, hingga partisipasi anggota Muhammadiyah di seluruh Sumatera Barat.²⁹³

Pendanaan universitas menjadi isu penting dalam fase transisi ini.²⁹⁴ Muhammadiyah menggalang dana melalui gerakan kolektif yang melibatkan masyarakat luas. Setiap cabang dan ranting Muhammadiyah diwajibkan

²⁹¹ Anthony Giddens. 1984. *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. Cambridge: Polity Press, hlm. 25.

²⁹² Talcott Parsons. 1951. *The Social System*. New York: Free Press, hlm. 76.

²⁹³ Jürgen Habermas. 1984. *The Theory of Communicative Action*. Boston: Beacon Press, hlm. 285.

²⁹⁴ Menariknya, lewat konferensi itu juga disepakati, bila ada anggota yang tidak bersedia mengumpulkan ayam, zakat, infaq dan shadaqah itu, mereka menyatakan kesediaan untuk diskors dari keanggotaan Muhammadiyah.

mengumpulkan ayam, telur, dan zakat sebagai bentuk kehendak kolektif. Langkah ini menjadi simbol bagaimana Muhammadiyah membangun institusi berbasis komunitas dengan partisipasi penuh dari anggotanya. Keputusan Tanwir Muhammadiyah pada 1955 semakin memperkokoh legitimasi pendirian universitas ini sebagai bagian dari gerakan nasional Muhammadiyah.²⁹⁵

Mulai Agustus 1955 kemarin ini seluruh Cabang/Ranting bersama anggotanya sama bergiat memelihara dan mengumpulkan ayam, meraka memadu cita, beramal dan bergembira, ayam jantan berkokok tanda subuh telah datang, beduk berbunyi, azan kedengaran, manusia sembahyang lantas bersiar dimuka bumi, sedang margasatwa berterbangan bergerak mencapai rezekinya. Ayam betina berkotat, naik sangkak dan bertelur, seolah-olahnya berkata kami tahu hidup dan tahu berbakti.²⁹⁶

Peresmian Fakultas Falsafah dan Hukum pada 18 November 1955 menjadi momentum penting dalam sejarah pendidikan Muhammadiyah. Acara ini dihadiri oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Gubernur Sumatera Tengah, dan tokoh-tokoh nasional serta pimpinan Muhammadiyah dari berbagai daerah.²⁹⁷ Keterlibatan para tokoh nasional menunjukkan bahwa Muhammadiyah

²⁹⁵ Arsip Muhammadiyah Sumatera Barat. *Amal Bakti Muhammadiyah Sumatera Barat 1925-1965*. Pada 28 Juni 1955, keputusan Konferensi Pengajaran ini diterima oleh Konferensi Luar Biasa Muhammadiyah yang dihadiri oleh seluruh cabang dan ranting Muhammadiyah seluruh Sumatera Tengah, diiringi dengan semangat kesediaan untuk mengerahkan seluruh tenaga untuk merealisasikannya

²⁹⁶ Hasan Ahmad. *Sejarah Komplek Perguruan Muhammadiyah Kauman Padang Panjang*. (Arsip Pribadi).

²⁹⁷ Tepat jam 20.00, upacara yang sacral dan meriah ini dibuka dengan "Nama Allah" dibawah pimpinan Adam Saleh. Selanjutnya oleh Abdullah MS Sekretaris Fakultas membacakan kawat-kawat berita, serta karangan-karangan bunga yang diterima. Berturut-turut pula menyampaikan pidatonya, yaitu H. A. Malik Ahmad, Ketua Pembangunan Fakultas Falsafah dan Hukum, Sardjono Ketua Pusat Pimpinan Muhammadiyah Majelis Pengajaran, Pidato Inagurasi Dewan Presidium yang disampaikan oleh buya Hamka, dan diakhiri dengan amanat dari Buya A.R. Sutan Mansur Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Puncak acara dari upacara peresmian Fakultas Pertama tersebut, dilakukan Penanda tanganan Piagam dengan susana penuh khidmat yang disaksikan langsung berturut-turut oleh: A.R. St Mansur Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Tengah, K.H. Mohammad Iljas Menteri Agama Republik Indonesia, Menteri Pendidikan & Kebudayaan siwakili oleh Prof. M. Sjaaf, St. Mangkuto Ketua Perwakilan Pimpinan Muhammadiyah Sumatera Tengah, dan Orang Tua Muhammadiyah. Lihat Hasan Ahmad. *Sejarah Komplek Perguruan Muhammadiyah Kauman Padang Panjang*. (Arsip Pribadi).

telah memperoleh pengakuan sebagai kekuatan sosial yang signifikan dalam membangun bangsa.²⁹⁸

Struktur organisasi universitas yang dipimpin oleh presidium dengan anggota dari berbagai latar belakang menunjukkan fleksibilitas dan inklusivitas Muhammadiyah dalam mengelola institusi pendidikan tinggi. Fakultas Falsafah dan Hukum Muhammadiyah menjadi pionir dalam mengembangkan pendidikan tinggi Islam berbasis pemikiran rasional, modern, dan terbuka terhadap perkembangan global.²⁹⁹

Dalam konteks Minangkabau, pendirian fakultas ini meneguhkan Padang Panjang sebagai pusat pendidikan Islam modern yang melanjutkan tradisi pembaruan dari masa Thawalib dan Diniyah. Muhammadiyah berhasil mengintegrasikan nilai-nilai lokal dengan visi global yang berorientasi pada kemajuan umat. Para lulusan Fakultas Falsafah dan Hukum Muhammadiyah tersebar di berbagai daerah dan berperan penting dalam dakwah, pendidikan, serta pembangunan sosial.

Proses transisi ini juga diwarnai oleh tantangan internal seperti keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas yang minim, dan persaingan dengan lembaga pendidikan lain. Namun, Muhammadiyah berhasil mengatasi kendala tersebut melalui jaringan sosial yang kuat dan komitmen ideologis yang kokoh. Perjalanan dari Kuliyatul Muballighien menjadi Fakultas Falsafah dan Hukum Muhammadiyah adalah contoh nyata dari kemampuan Muhammadiyah dalam melakukan manajemen perubahan dan transformasi kelembagaan yang efektif.³⁰⁰

Pegawai kantor negarapun giat membuat les mengumpulkan uan untuk dikirim guna pembangunan fakultas ini. Perlu kami jelaskan betapa perkumpulan dagang Djohan Djohor telah memberikan fasilitas sebulan tempo dengan memberikan bahan seharga Rp. 41.000, Djuga sdr2 Prominent dan penduduk Padang Pandjang telah memberikan tenaga dan uangnja untuk terlaksananja peresmian ini. Murid-murid Sekolah Muhammadiyah Sumatera Tengah memberikan masing2 satu butir telur atau uang Rp. 1 per-kepala. Pers pun tidak

²⁹⁸ Alfian, *Muhammadiyah*, hlm. 115.

²⁹⁹ Hamka, *Kenang-kenangan Hidup*, hlm. 120.

³⁰⁰ Alfian, *Muhammadiyah*, hlm. 118.

ketinggalan, dimana kita membatja artikel2, berita2 interviu jang memuat hal fukultas, terutana surat kabar Harian Haluan, Abadi, Penerangan, Kantor Berita PIA, Antara dan lain-lain.³⁰¹

Sesungguhnya maksud untuk mendirikan Universitas Muhammadiyah telah ditetapkan dalam Kongres Muhammadiyah Seperempat Abad pada 1936 di Jakarta. Tekad itu adalah dorongan yang sangat kuat terhadap kebutuhan lahirnya kader-kader Muhammadiyah yang berpendidikan tinggi, sebagai upaya meningkatkan kinerja sumber daya manusia yang mendukung gerak perjuangan dan perkembangan amal usaha Muhammadiyah pada waktu itu yang sedang meluas dan berkembang. Cita-cita ini pulalah yang melahirkan semboyan perlu adanya kader-kader muda Muhammadiyah yang mempunyai kemampuan sebagai ulama yang intelek atau intelek yang ulama.

Sayangnya, ketika Muhammadiyah mulai mencoba merealisasikan keputusan tersebut, Perang Dunia II meletus, kemudian disusul perang kemerdekaan serta Agresi Belanda I dan II. Akibatnya keputusan tersebut tidak bisa dilaksanakan. Kendati secara nasional terhenti, namun di Sumatera Barat langkah-langkah menuju terbentuknya Universitas Muhammadiyah terus saja dilakukan. Upaya ke arah itu dimulai sejak 1943. Komite nya dipercayakan kepada Malik Ahmad selaku ketua Majelis Pendidikan Muhammadiyah Sumatera Barat.

Gerakan ini diawali dengan pengumpulan 'sen ilmu' dari siswa sekolah-sekolah Muhammadiyah di Sumbar pada 7 dan 17 setiap bulannya. Tanggal ini oleh Muhammadiyah dipopulerkan sebagai Hari Sekolah Tinggi Muhammadiyah dan Hari Gotong Royong. Hingga akhirnya pada 1944, gerakan ini mulai mengadakan kelompok studi dengan nama Persiapan Sekolah Tinggi Muhammadiyah yang pesertanya berasal dari guru-guru sekolah Muhammadiyah yang berijazah SLTA.³⁰²

Agresi Belanda menyebabkan semua persiapan itu jadi berantakan. Barulah pada Rapat kerja Nasional Pendidikan dan Pengajaran Muhammadiyah tanggal 20-

³⁰¹ Lihat Hasan Ahmad. *Sejarah Komplek Perguruan Muhammadiyah Kauman Padang Panjang*. (Arsip Pribadi).

³⁰² Lihat Hasan Ahmad. *Sejarah Komplek Perguruan Muhammadiyah Kauman Padang Panjang*. (Arsip Pribadi).

24 Februari 1954 di Bandung, persoalan ini kembali diungkap. Rapat Kerja Nasional itu menetapkan:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar menugaskan Majelis Pendidikan dan Pengajaran untuk menyelenggarakan Universitas Muhammadiyah, sedangkan penyelenggaraan fakultas-fakultasnya dapat diserahkan kepada provinsi dan daerah yang dipandang mampu.
2. Untuk mengatur dan mempersiapkan isi serta tata organisasi Universitas Muhammadiyah, Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan dan Pengajaran dipersilahkan untuk membentuk panitia persiapan Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Anggota-anggotanya adalah Mr. Kasman Singodimejo, Drs. S. Danuhusodo, Mr. Sujono Harjo Sudiro, Dr. H. Ali Akbar, Prof. Dr. H. Rasyidi, Prof. Dr. Hamka, Ir. Masyhud, Ir. HM. Sanusi, Dr. Ahmad Ramli, Drs. AS. Broto, RB Sabaruddin dan Sujadi.

Konferensi Akbar Muhammadiyah Sumatera Tengah yang dilaksanakan di Lubukalung pada 19-23 Maret 1954, memutuskan Muhammadiyah mendirikan perguruan tinggi pertama dengan nama Fakultas Hukum dan Falsafah di Kauman, Padang Panjang. Keputusan inilah yang diresmikan pada 18 November 1955 tersebut, sesuai dengan rekomendasi Konferensi Pengajaran Muhammadiyah Sumatera Tengah tanggal 19-21 April 1955 di Padang Panjang.

Pada 28 Juni 1955 Keputusan Konferensi Pengajaran ini diterima oleh Konferensi Luar Biasa Muhammadiyah yang dihadiri oleh seluruh cabang dan ranting Muhammadiyah seluruh Sumatera Tengah, diiringi dengan semangat kesediaan untuk mengerahkan seluruh tenaga untuk merealisasikannya. Segenap warga Muhammadiyah sepakat untuk mengumpulkan ayam yang akan dijual untuk membiayai pembangunan gedung Fakultas Falsafah dan Hukum. Selain itu, mereka juga sepakat untuk mengumpulkan zakat, infaq dan shadaqah dari seluruh anggota dan simpatisan Muhammadiyah. Menariknya, lewat konferensi itu juga disepakati, bila ada anggota yang tidak bersedia mengumpulkan ayam, zakat, infaq dan shadaqah itu, mereka menyatakan kesediaan untuk diskors dari keanggotaan Muhammadiyah.

Lewat sidang Tanwir Muhammadiyah pada 21-25 Juli 1955 di Pekalongan, keberadaan Universitas Muhammadiyah semakin kokoh. Hal itu bisa dilihat dari keputusan Tanwir³⁰³, yakni:

1. Bersepakat untuk mewujudkan prinsip adanya perguruan tinggi dalam Persyarikatan Muhammadiyah sebagaimana telah diputuskan dalam Kongres Muhammadiyah Seperempat Abad pada Tahun 1936 di Betawi, yang dikuatkan dengan keputusan Konferensi Pengajaran tahun 1954 di Bandung.
2. Telah cukupnya tenaga ahli dan sarjana di kalangan Muhammadiyah yang mampu dan sanggup memimpin, memberi pelajaran serta menyelenggarakan Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
3. Adanya azham dan hasrat yang kuat di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah agar secepatnya mendirikan perguruan tinggi yang dipelopori oleh Perwakilan PP Muhammadiyah Sumatera Tengah.
4. Bersepakat mendirikan Universitas Muhammadiyah pertama di Indonesia, diawali dengan Fakultas Falsafah dan Hukum dengan mengambil tempat di Komplek Perguruan Muhammadiyah Kauman Padang Panjang (Sumatera Tengah).

Beranjak dari keputusan itulah, mulai Agustus 1955 seluruh cabang dan ranting Muhammadiyah bersama anggota dan simpatisannya merealisasikan keputusan tersebut. Tidak hanya mengumpulkan ayam dan ZIS, tetapi juga telur ayam dan botol-botol kosong untuk dijual. Itu artinya, keputusan tersebut dilaksanakan dengan kreatifitas baru, sehingga terjadi pengayaan potensi sumber pendapatan di lapangan.

Dukungan terhadap usaha mendirikan Universitas Muhammadiyah ternyata tidak hanya datang dari anggota dan simpatisan Muhammadiyah saja, tetapi juga dari para pegawai negeri, pengusaha besar, pengusaha kecil dan segenap warga kota Padang Panjang. Mereka turut memberikan sumbangan materil. Para pejabat dan pegawai negeri giat membuat les mengumpulkan uang untuk dikirimkan kepada

³⁰³ Lihat Hasan Ahmad. *Sejarah Komplek Perguruan Muhammadiyah Kauman Padang Panjang*. (Arsip Pribadi).

panitia guna pembangunan fakultas ini. Demikian pula pengusaha besar dan kecil memberikan fasilitas dari perusahaannya. Sejalan dengan itu, tidak sedikit pula bantuan dari kalangan pers, baik media cetak maupun elektronik yang terus-menerus membuat berita dan melakukan interview yang mendorong masyarakat untuk membantu dan menggembirakan usaha besar ini. Sejalan dengan itu tidak sedikit bantuan berdatangan yang diterima dari pemerintah pusat dan daerah serta bantuan para perantau dari seluruh pelosok tanah air.

Demikianlah, berkat kerjasama dan usaha keras dari panitia dan bantuan dari seluruh pihak, dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT dan dengan perasaan gembira tepat pada 18 Nopember 1955 yaitu pada hari ulang tahun Muhammadiyah yang ke-43, berlangsunglah upacara peresmian berdirinya Universitas Muhammadiyah di bumi Indonesia dengan fakultas pertamanya Fakultas Hukum dan Falsafah yang bertempat di gedung utama yang terletak di kompleks Perguruan Muhammadiyah Kauman Padangpanjang. Dengan diresmikannya fakultas pertama itu, menjadi langkah yang bersejarah dalam perjalanan Muhammadiyah Padangpanjang menuju cita-citanya. Acara peresmian itu sendiri turut dihadiri Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (PPK), Menteri Agama, Gubernur Sumatra Tengah, bupati dan walikota se Sumatra Tengah.

Universitas Muhammadiyah yang pertama ini dipimpin oleh suatu presidium dengan ketua Dr. H. Ali Akbar dengan wakil Prof. Dr. H. Rasjidi. Sedangkan anggota-anggotanya terdiri dari Prof. Dr. Hamka, Prof. Dr. H. Bunyamin dan Dr. Sjamsuddin. Dewan Kurator diketuai oleh Ruslan Mulyoharjo (Gubernur Sumatera Tengah) dan Badan Pembina diketuai oleh Malik Ahmad. Sementara Fakultas Hukum dan Falsafah dipimpin oleh dekan Drs. Danoehoesodo dan wakil dekan Prof. Dr. Hamka, dilanjutkan oleh Mr. Ezeddin, SH yang juga Sekretaris Universitas Andalas, Bukittinggi.³⁰⁴

Dalam analisis Giddens, para agen Muhammadiyah tidak hanya bertindak dalam kerangka struktur yang membatasi, tetapi mereka juga menciptakan peluang

³⁰⁴ Lihat Hasan Ahmad. *Sejarah Komplek Perguruan Muhammadiyah Kauman Padang Panjang*. (Arsip Pribadi).

dan struktur baru yang memungkinkan kader Muhammadiyah untuk menjadi bagian dari elite intelektual nasional. Dalam pandangan Parsons, Muhammadiyah berhasil memenuhi fungsi-fungsi sosial yang vital bagi sistem pendidikan Islam modern. Dalam perspektif Habermas, transisi ini mencerminkan keberhasilan membangun konsensus sosial melalui rasionalitas komunikatif yang melibatkan semua lapisan masyarakat Muhammadiyah.³⁰⁵

Dengan demikian, transisi dari Kuliyatul Muballighien menjadi Fakultas Falsafah dan Hukum Muhammadiyah 1955 adalah hasil dari proses historis yang panjang, melibatkan negosiasi sosial, mobilisasi sumber daya, dan integrasi ideologis yang kuat. Perubahan ini menegaskan kapasitas Muhammadiyah sebagai gerakan modernis yang mampu membangun institusi pendidikan tinggi yang mandiri dan berorientasi pada kemajuan umat.³⁰⁶

4.3 Fragmentasi Kepemimpinan dan Perbedaan Arah

Fragmentasi kepemimpinan dalam tubuh Muhammadiyah Padang Panjang selama periode 1935-1955 merupakan salah satu dinamika penting dalam sejarah perkembangan Perguruan Muhammadiyah di Sumatera Barat. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan perbedaan individu dalam memandang arah organisasi, tetapi juga memperlihatkan gesekan ideologis, perbedaan generasi, serta ketegangan antara kepentingan pusat dan daerah.

Muhammadiyah Padang Panjang sebagai salah satu pusat pendidikan Islam modern di Minangkabau berperan signifikan dalam membentuk kader-kader dakwah dan pemimpin umat. Namun, perkembangan lembaga ini tidak berlangsung tanpa tantangan. Fragmentasi kepemimpinan muncul sebagai akibat dari perbedaan orientasi pendidikan, prioritas dakwah, serta strategi pengembangan organisasi. Dalam konteks teori strukturasi Anthony Giddens, fragmentasi tersebut merupakan

³⁰⁵ Anthony Giddens, *The Constitution of Society*, hlm. 25-28.

³⁰⁶ Hamka, *Kenang-kenangan Hidup*, hlm. 125.

hasil dari dialektika antara agensi para aktor dengan struktur sosial, budaya, dan politik yang ada.³⁰⁷

Sebagian tokoh menginginkan agar Muhammadiyah tetap menekankan pendidikan kaderisasi muballigh dan mempertahankan pola pendidikan agama tradisional yang terstruktur. Mereka berpendapat bahwa Muhammadiyah harus menjadi benteng utama dakwah Islam yang fokus pada penguatan basis keagamaan. Sebaliknya, generasi muda Muhammadiyah yang terpengaruh oleh semangat nasionalisme dan perkembangan pendidikan modern mendorong Muhammadiyah untuk bergerak ke arah pendidikan umum, memperluas cakupan keilmuan, serta meningkatkan kualitas institusi agar setara dengan lembaga pendidikan sekuler yang semakin berkembang.³⁰⁸

Perbedaan orientasi ini menyebabkan gesekan internal dalam menentukan prioritas lembaga. Dalam arsip Muhammadiyah Sumatera Barat dicatat bahwa terjadi perdebatan panjang mengenai kurikulum, metode pengajaran, dan pengelolaan keuangan lembaga. Sebagian pimpinan menginginkan agar lembaga tetap berbasis pengabdian dengan menekan biaya pendidikan, sementara sebagian lainnya mulai mendorong pola manajemen modern dengan standar akademik yang lebih tinggi dan memperkenalkan sistem administrasi yang lebih profesional.³⁰⁹

Dari sudut pandang teori sistem sosial Talcott Parsons, fragmentasi ini adalah bagian dari diferensiasi struktural dalam organisasi Muhammadiyah yang semakin kompleks. Sebagai sebuah sistem sosial, Muhammadiyah secara alamiah harus mengalami spesialisasi dan pembagian peran yang lebih kompleks seiring dengan berkembangnya kebutuhan sosial dan tuntutan modernisasi.³¹⁰ Diferensiasi ini di satu sisi mendorong kemajuan, namun di sisi lain memunculkan ketegangan dan ketidakseimbangan dalam sistem jika tidak diintegrasikan dengan baik.

³⁰⁷ Anthony Giddens. 1984. *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. Cambridge: Polity Press, hlm. 28.

³⁰⁸ Alfian. 1989. *Muhammadiyah: The Political Behavior of a Muslim Modernist Organization under Dutch Colonialism*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 114.

³⁰⁹ Arsip Muhammadiyah Sumatera Barat. *Amal Bakti Muhammadiyah Sumatera Barat 1925-1965*.

³¹⁰ Talcott Parsons. 1951. *The Social System*. New York: Free Press, hlm. 79.

Fragmentasi kepemimpinan juga diperparah oleh perbedaan latar belakang daerah dan basis kekuasaan sosial. Muhammadiyah Padang Panjang dianggap terlalu konservatif oleh beberapa cabang di kota-kota besar seperti Padang dan Bukittinggi yang lebih terbuka terhadap perubahan. Muhammadiyah Padang Panjang dinilai lamban dalam merespons perubahan sosial, sementara Muhammadiyah di kota-kota besar lebih progresif dan mendorong percepatan transformasi pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan zaman.³¹¹

Dalam perspektif teori tindakan komunikatif Jurgen Habermas, fragmentasi yang terjadi sesungguhnya merupakan peluang bagi Muhammadiyah untuk membangun konsensus sosial melalui diskusi rasional dan partisipasi kolektif.³¹² Perdebatan dalam tubuh Muhammadiyah tidak selalu negatif, justru menjadi ruang negosiasi yang produktif untuk mengakomodasi kepentingan dan visi yang berbeda. Muhammadiyah memiliki mekanisme konferensi, rapat cabang, dan forum tanwir yang menjadi wadah deliberasi dalam menyelesaikan perbedaan.

Perbedaan arah dalam kepemimpinan Muhammadiyah juga dipengaruhi oleh perubahan struktur kepemimpinan yang dinamis. Keberangkatan Buya Hamka ke Medan untuk memimpin Perpustakaan Hamzah menjadi kehilangan besar bagi Kulliyatul Muballighien dan Muhammadiyah Padang Panjang.³¹³ Buya Hamka dikenal sebagai pemimpin karismatik yang mampu menjembatani generasi tua dan muda. Kekosongan kepemimpinan intelektual ini sempat menciptakan kevakuman dan ketidakpastian arah.

Namun, kekosongan tersebut segera diisi oleh tokoh-tokoh baru seperti Buya Haroun Al Maany dan H. Badaruddin Zen yang membawa gaya kepemimpinan yang berbeda. Buya Haroun Al Maany, dengan keilmuan yang luas dan sikap disiplin yang tinggi, segera mendapat kepercayaan dari para murid dan guru. Kemampuannya menguasai berbagai mata pelajaran serta keteladanan pribadinya

³¹¹ Hamka. 1974. *Kenang-kenangan Hidup*. Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 119.

³¹² Jurgen Habermas. 1984. *The Theory of Communicative Action*. Boston: Beacon Press, hlm. 286.

³¹³ Hamka, *Kenang-kenangan Hidup*, hlm. 120

menjadikan beliau sebagai tokoh sentral dalam menjaga stabilitas lembaga di tengah ketegangan internal.³¹⁴

Dalam beberapa dokumen arsip Muhammadiyah, tercatat bahwa perbedaan pendapat dalam manajemen lembaga tidak jarang memunculkan dua kutub yang berbeda: kelompok yang menekankan idealisme dan pengabdian sosial, serta kelompok yang mendorong profesionalisme dan modernisasi tata kelola.³¹⁵ Perbedaan ini memengaruhi pola rekrutmen guru, metode evaluasi, serta strategi pengembangan kelembagaan.

Peran tokoh seperti Buya A.R. St. Mansur dan Dr. H. A. Karim Amarullah menjadi sangat penting dalam meredam ketegangan yang mengarah pada fragmentasi lebih jauh. Wibawa dan kharisma mereka berhasil menjaga keseimbangan di tengah perbedaan pandangan. Dalam kerangka teori strukturasi, para tokoh senior ini bertindak sebagai agen stabilisasi yang mampu mereproduksi struktur yang adaptif dan memungkinkan organisasi bertahan dalam situasi penuh dinamika.³¹⁶

Fragmentasi kepemimpinan di Muhammadiyah Padang Panjang tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan politik yang lebih luas. Periode pasca kemerdekaan Indonesia ditandai oleh dinamika politik nasional yang juga mempengaruhi gerakan sosial keagamaan. Muhammadiyah, sebagai organisasi yang besar, tidak dapat menghindari pengaruh perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang turut membentuk arah perkembangan lembaga.

Meskipun fragmentasi kepemimpinan sering menjadi sumber ketegangan, pengalaman Muhammadiyah Padang Panjang menunjukkan bahwa perbedaan pendapat yang dikelola dengan baik dapat menjadi motor penggerak perubahan yang positif. Muhammadiyah mampu mempertahankan kohesi organisasinya dengan mengedepankan musyawarah dan kebijakan yang terbuka terhadap aspirasi anggota.

³¹⁴ Arsip Muhammadiyah Sumatera Barat. *Notulen Konferensi Muhammadiyah 1950-1955*.

³¹⁵ Arsip Muhammadiyah Sumatera Barat. *Amal Bakti Muhammadiyah Sumatera Barat 1925-1965*.

³¹⁶ Alfian, Muhammadiyah, hlm. 113.

Dengan demikian, fragmentasi kepemimpinan dan perbedaan arah yang terjadi dalam tubuh Muhammadiyah Padang Panjang pada periode 1935-1955 bukanlah tanda kelemahan, melainkan bagian dari proses adaptasi dan modernisasi yang wajar dalam perkembangan organisasi besar. Muhammadiyah berhasil melewati fase ini dengan tetap menjaga integritas dan kesatuan gerakannya, sekaligus membuka ruang bagi pembaharuan yang lebih progresif.

4.4 Stukturasi Sosial: Agensi, Otoritas dan Nilai-nilai Organisasi

Sub bab ini menguraikan bagaimana proses stukturasi sosial dalam Muhammadiyah Padang Panjang pada periode 1935-1955 terjadi secara kompleks, melibatkan dialektika antara agensi, otoritas, dan nilai-nilai organisasi. Stukturasi sosial dalam konteks ini tidak hanya berkaitan dengan pembentukan dan pengembangan institusi pendidikan, tetapi juga mencakup reproduksi norma, pergeseran otoritas, dan interaksi sosial yang membentuk pola kepemimpinan serta budaya organisasi yang khas.

Dalam kerangka teori stukturasi Anthony Giddens, agensi dan struktur saling berinteraksi dalam membentuk realitas sosial yang dinamis. Agensi dalam Muhammadiyah Padang Panjang tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan pusat, tetapi juga sebagai aktor yang mereproduksi dan memodifikasi struktur sosial yang ada.³¹⁷ Para pemimpin lokal Muhammadiyah memiliki kapasitas untuk menginterpretasikan nilai-nilai organisasi dalam konteks sosial yang spesifik di Padang Panjang, sehingga menghasilkan variasi praksis yang asli (*genuine*).

Struktur sosial dalam Muhammadiyah Padang Panjang dibentuk oleh relasi yang rumit antara kekuasaan formal dan kekuasaan moral. Pimpinan formal seperti direktur sekolah, konsulat daerah, dan pengurus cabang memegang otoritas administratif, sementara tokoh-tokoh agama seperti Buya A.R. St. Mansur dan Dr. H. A. Karim Amarullah memegang otoritas moral yang besar dalam komunitas.³¹⁸

³¹⁷ Anthony Giddens, 1984. *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. Cambridge: Polity Press, hlm. 27.

³¹⁸ Alfian. 1989. *Muhammadiyah: The Political Behavior of a Muslim Modernist Organization under Dutch Colonialism*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.

Otoritas moral sering kali memiliki pengaruh yang lebih kuat dalam membentuk perilaku anggota dan mengarahkan kebijakan organisasi.

Terdapat ketegangan yang menarik antara pusat Muhammadiyah di Yogyakarta dengan cabang di Sumatera Barat. Arsip Muhammadiyah menunjukkan bahwa meskipun Muhammadiyah menganut sistem desentralisasi, terdapat intervensi pusat dalam pengaturan kurikulum, pengangkatan guru, dan distribusi sumber daya pendidikan.³¹⁹ Dalam beberapa kasus, cabang di Padang Panjang berusaha memperjuangkan otonomi lokal dalam menjalankan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan daerah, namun harus tetap merujuk pada garis besar kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Dinamika ini sejalan dengan pandangan Talcott Parsons tentang bagaimana sistem sosial mengatur relasi antara subsistem melalui proses adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola (AGIL).³²⁰ Muhammadiyah Padang Panjang beradaptasi dengan lingkungan sosial dan pendidikan lokal, berusaha mencapai tujuan pendidikan Islam modern, mengintegrasikan jaringan sekolah dan pimpinan Muhammadiyah di berbagai daerah, serta memelihara nilai-nilai organisasi melalui penguatan ideologi dan ritual sosial.

Distribusi otoritas dalam Muhammadiyah Padang Panjang juga bersifat dinamis. Para agen Muhammadiyah mempraktikkan berbagai strategi untuk mempertahankan dan memperluas pengaruh. Strategi ini meliputi pendekatan informal melalui penguatan jaringan sosial, penguatan otoritas melalui keahlian keagamaan, dan konsolidasi sumber daya finansial melalui gerakan kolektif anggota Muhammadiyah.³²¹ Dalam teori Giddens, kekuasaan bukanlah entitas yang terpisah, tetapi bersifat relasional dan terdistribusi dalam jaringan struktur.

Dalam praktik sosial Muhammadiyah, muncul pola di mana murid, guru, dan masyarakat lokal membentuk relasi yang saling memperkuat. Arsip Muhammadiyah mencatat bagaimana murid-murid Kulliyatul Muballighien

³¹⁹ Arsip Muhammadiyah Sumatera Barat. *Amal Bakti Muhammadiyah Sumatera Barat 1925-1965*.

³²⁰ Talcott Parsons. 1951. *The Social System*. New York: Free Press, hlm. 76-80.

³²¹ Arsip Muhammadiyah Sumatera Barat. *Amal Bakti Muhammadiyah Sumatera Barat 1925-1965*.

dilibatkan dalam aktivitas sosial seperti kerja bakti, pengumpulan dana, dan penyelenggaraan kegiatan dakwah di luar sekolah.³²² Proses ini tidak hanya membentuk solidaritas sosial, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai pengabdian dan kesederhanaan sebagai bagian dari identitas Muhammadiyah.

Dalam konteks pembentukan otoritas, Muhammadiyah Padang Panjang mengembangkan legitimasi melalui musyawarah dan partisipasi anggota. Teori tindakan komunikatif Jürgen Habermas menekankan pentingnya komunikasi bebas dari distorsi dalam membangun legitimasi sosial.³²³ Forum-forum Muhammadiyah seperti konferensi cabang dan rapat sekolah menjadi arena penting dalam membangun konsensus dan legitimasi kebijakan organisasi. Proses pengambilan keputusan dalam Muhammadiyah lebih banyak mengedepankan dialog terbuka.

Perubahan sosial di Muhammadiyah Padang Panjang juga menghasilkan transformasi dalam pola kepemimpinan. Kepergian Buya Hamka ke Medan menjadi titik penting dalam restrukturisasi sosial organisasi.³²⁴ Pergantian kepemimpinan membuka ruang bagi generasi baru seperti Buya Haroun Al Maany untuk mengambil peran strategis dalam pengelolaan pendidikan. Meskipun terjadi pergantian tokoh, Muhammadiyah Padang Panjang mampu menjaga kesinambungan nilai dan budaya organisasinya.

Regenerasi kepemimpinan dalam Muhammadiyah Padang Panjang berlangsung dengan pendekatan yang mengutamakan rekrutmen kader dari dalam jaringan Muhammadiyah. Pola ini memperkuat kohesi sosial dan memastikan kesinambungan ideologi Muhammadiyah. Proses ini juga memperlihatkan bagaimana Muhammadiyah mampu mengelola distribusi otoritas dan memelihara kepercayaan anggota melalui pemilihan pemimpin yang kredibel dan memiliki rekam jejak pelayanan yang panjang.

Arsip Muhammadiyah Sumatera Barat menunjukkan bahwa relasi antara guru, murid, dan pimpinan Muhammadiyah di Padang Panjang membentuk struktur

³²² Arsip Muhammadiyah Sumatera Barat, *Notulen Konferensi Muhammadiyah 1950-1955*.

³²³ Jürgen Habermas. 1984. *The Theory of Communicative Action*. Boston: Beacon Press, hlm. 286.

³²⁴ Hamka. 1974. *Kenang-kenangan Hidup*. Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 118-120.

sosial yang saling menguatkan.³²⁵ Hubungan yang dibangun tidak hanya bersifat vertikal, tetapi juga horizontal dalam komunitas dakwah dan pendidikan. Pola ini menjadi kekuatan utama Muhammadiyah dalam membangun solidaritas sosial dan memperluas pengaruhnya di luar lingkungan sekolah.

Strukturasi sosial Muhammadiyah Padang Panjang tidak bisa dilepaskan dari pengaruh konteks kolonial dan perkembangan politik Indonesia pada masa itu. Muhammadiyah mampu menavigasi tekanan kolonial dan dinamika politik dengan tetap menjaga kemandirian organisasinya. Proses adaptasi ini memperlihatkan fleksibilitas Muhammadiyah dalam menghadapi perubahan lingkungan eksternal yang kompleks.

Dengan demikian, proses strukturasi sosial dalam Muhammadiyah Padang Panjang merupakan hasil interaksi antara agensi individu, distribusi otoritas, dan internalisasi nilai-nilai organisasi yang berlangsung dalam ruang sosial yang dinamis. Muhammadiyah berhasil memadukan kepemimpinan formal, otoritas moral, serta partisipasi komunitas dalam membentuk struktur sosial yang kuat dan berkelanjutan. Pola ini memungkinkan Muhammadiyah Padang Panjang tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang sebagai pusat pendidikan di Sumatera Barat.

4.5 Dinamika Transisi 1935-1955: Konflik, Adaptasi, dan Reformulasi Tujuan

Periode transisi Perguruan Muhammadiyah di Padang Panjang dari 1935 hingga 1955 merupakan fase yang penuh dengan dinamika, yang tidak hanya mencerminkan pertumbuhan kelembagaan tetapi juga menampilkan berbagai ketegangan sosial, ideologis, dan tantangan struktural. Masa transisi ini menjadi titik penting dalam evolusi Perguruan Muhammadiyah dari sebuah gagasan dakwah menjadi lembaga pendidikan modern yang terorganisasi secara matang.

Konflik internal yang terjadi selama masa transisi ini merupakan hasil dari perbedaan visi dan misi di antara para pimpinan Muhammadiyah di Padang Panjang. Sebagian besar pimpinan senior, yang didominasi oleh generasi awal,

³²⁵ Arsip Muhammadiyah Sumatera Barat. *Amal Bakti Muhammadiyah Sumatera Barat 1925-1965*.

berusaha mempertahankan sistem pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai keislaman yang murni. Mereka mengkhawatirkan bahwa pembaruan pendidikan yang terlalu terbuka terhadap ilmu-ilmu umum dapat mengikis identitas keislaman dan mengarah pada sekularisasi pendidikan Muhammadiyah.

Selain perbedaan ideologis, konflik juga terjadi dalam hal pengelolaan kelembagaan, distribusi sumber daya, dan perbedaan dalam memprioritaskan pengembangan lembaga tertentu. Ketegangan antar pihak ini seringkali berakhir dalam kompromi pragmatis yang mengakomodasi keinginan berbagai faksi, namun tetap berpotensi meninggalkan residu ketidakpuasan di kalangan internal Muhammadiyah.

Dalam konteks sosial yang dinamis, Muhammadiyah di Padang Panjang menunjukkan kemampuan adaptasi yang signifikan. Masa pendudukan Jepang, proklamasi kemerdekaan Indonesia, hingga awal kemerdekaan menjadi periode yang menguji fleksibilitas lembaga pendidikan Muhammadiyah. Muhammadiyah berupaya menyesuaikan kurikulum dengan kebijakan pemerintah kolonial Jepang yang mewajibkan pengajaran Bahasa Jepang dan pelajaran yang menguntungkan kepentingan militer Jepang.

Pada masa setelah kemerdekaan, Muhammadiyah harus menghadapi tantangan baru berupa tuntutan integrasi dengan sistem pendidikan nasional yang sedang dibentuk oleh pemerintah Indonesia. Kurikulum Muhammadiyah mulai mengakomodasi pelajaran-pelajaran seperti Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam, tanpa meninggalkan penguatan pendidikan agama. Adaptasi ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah berupaya untuk tetap relevan di tengah arus perubahan kebijakan pendidikan nasional yang semakin m...

Perjalanan Perguruan Muhammadiyah di Padang Panjang selama dua dekade transisi juga menandai reformulasi tujuan pendidikan yang lebih luas. Awalnya, pendidikan Muhammadiyah difokuskan pada kaderisasi internal untuk mendukung penguatan organisasi dan penyebaran dakwah Islam. Namun, seiring dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan situasi nasional, Muhammadiyah mulai menggeser orientasi pendidikan menjadi lebih terbuka dan inklusif.

Tujuan pendidikan Muhammadiyah tidak lagi terbatas untuk melahirkan kader organisasi, tetapi diperluas menjadi upaya mencerdaskan kehidupan bangsa secara umum. Muhammadiyah mulai memandang bahwa tanggung jawab pendidikan adalah bagian dari perjuangan nasional untuk membangun Indonesia merdeka yang berperadaban tinggi. Dalam kerangka ini, lulusan Perguruan Muhammadiyah diharapkan tidak hanya cakap dalam ilmu agama, tetapi juga mampu memberikan kontribusi dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan.

Reformulasi ini juga tercermin dalam upaya Muhammadiyah memperluas jangkauan lembaga pendidikan ke berbagai lapisan masyarakat dan membuka akses pendidikan bagi perempuan secara lebih luas melalui Kulliyatul Muballighat. Langkah ini menjadi bagian dari strategi Muhammadiyah untuk menghadirkan pendidikan Islam yang progresif dan responsif terhadap kebutuhan zaman.

Secara keseluruhan, dinamika transisi Perguruan Muhammadiyah di Padang Panjang pada periode 1935-1955 memperlihatkan bagaimana organisasi ini mampu bertahan dan bertransformasi di tengah kompleksitas sosial, politik, dan ideologis. Proses transisi ini menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak statis, melainkan terus berusaha beradaptasi, mereformulasi tujuan, dan merespons perubahan zaman secara kritis.

Konflik internal yang terjadi justru menjadi pemicu bagi terjadinya dialog yang konstruktif dalam tubuh organisasi, yang pada akhirnya menghasilkan jalan tengah yang memperkuat posisi Muhammadiyah di kancah pendidikan nasional. Kemampuan adaptasi yang tinggi dan reformulasi visi pendidikan menjadikan Muhammadiyah di Padang Panjang sebagai contoh konkret dari institusi pendidikan Islam yang mampu bergerak seiring dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas ideologisnya.

BAB V

KONSENSUS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH DI PADANG PANJANG 1964-1985

5.1 Fase Konsensus: Penyatuan Visi dan Kepemimpinan

Sejak berdirinya pada 1912, Muhammadiyah telah menjadikan pendidikan sebagai salah satu pilar utama gerakannya.³²⁶ Pendirian sekolah-sekolah dari tingkat prasekolah hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Atas menjadi program inti Muhammadiyah yang bertujuan menciptakan sumber daya manusia berkualitas, baik sebagai guru maupun kader persyarikatan. Namun, untuk tingkat perguruan tinggi, hingga usia Muhammadiyah menginjak 40 tahun, belum ada satu pun yang berhasil didirikan meskipun wacana tersebut telah mengemuka sejak Mukhtamar Muhammadiyah ke-24 pada 1936 di Batavia.

Salah satu wilayah yang merespon secara serius keputusan Mukhtamar tersebut adalah Muhammadiyah di Minangkabau, khususnya di bawah kepemimpinan Saalah Jusuf Sutan Mangkuto dan A. Malik Ahmad. Pada tahun 1943, meskipun Muhammadiyah baru 18 tahun berkiprah di Minangkabau, tekad mereka untuk mendirikan perguruan tinggi telah diwujudkan melalui peletakan batu pertama Gedung Persiapan Sekolah Tinggi Muhammadiyah Minangkabau di Kompleks Kauman Padang Panjang.³²⁷

Panitia pembangunan yang dipimpin A. Malik Ahmad menggerakkan pelajar-pelajar Kulliyatul Muballighien untuk menghimpun dana dari warga Muhammadiyah dan masyarakat umum. Mereka bahkan mengumpulkan material bangunan secara swadaya, termasuk mengambil kayu dari hutan di sekitar Padang Panjang dan sekitarnya. Dengan semangat luar biasa, pada awal 1944 kegiatan

³²⁶ Mendirikan sekolah, mulai dari prasekolah hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Atas memang sudah menjadi program inti bagi Muhammadiyah sejak awal berdirinya tahun 1912, di samping program Penolong Kesengsaraan Oemoem yang populer dengan singkatan PKO. Sebab, melalui jalur pendidikan Sumber Daya Manusia berkualitas dapat diciptakan, baik sebagai guru-guru yang cerdas maupun murid-murid yang pintar sekaligus untuk embrio kader-kader persyarikatan yang punya kecerdasan intelektual dan spiritual.

³²⁷ Lihat Hasan Ahmad. *Sejarah Komplek Perguruan Muhammadiyah Kauman Padang Panjang*. (Arsip Pribadi).

belajar mengajar telah dimulai dengan nama Panitia Persiapan Sekolah Tinggi Muhammadiyah, yang diikuti oleh guru-guru berijazah SLTA di Padang Panjang.³²⁸

Sayangnya, perjuangan ini harus terhenti akibat situasi politik pasca proklamasi kemerdekaan. Gedung darurat yang telah dibangun dibakar Belanda dalam agresi militer pada 1947-1949. Setelah penyerahan kedaulatan pada 1950, Muhammadiyah Sumatera Tengah kembali membenahi amal usahanya di bidang pendidikan dan menjadikan Kompleks Kauman Padang Panjang sebagai pusat pendidikan terkemuka di Sumatera Barat.³²⁹

Setelah penyerahan kedaulatan oleh Belanda kepada Pemerintah Republik Indonesia tahun 1950, Muhammadiyah Sumatera Tengah mulai bangkit kembali membenahi amal usahanya, terutama di bidang pendidikan yang dipusatkan di komplek Kauman Padang Panjang. Berbagai lembaga pendidikan diaktifkan mulai dari Sekolah Rakyat, SMP, SMA, SGB, SGA, SGAA, SKP, SMEA, SPKA, dan PGA, sehingga pada waktu itu komplek Kauman Padang Panjang betul-betul merupakan sentral pendidikan yang terlengkap, tidak saja bagi Muhammadiyah Sumatera Tengah (Minangkabau), tetapi juga di tanah air. Popularitasnya melintasi batas wilayah hingga ke luar Minangkabau. Hal itu terbukti dalam waktu singkat saja murid-murid yang ingin belajar di komplek ini berdatangan hampir dari seluruh pelosok tanah air, seperti Aceh, Riau, Jambi, Palembang, Bengkulu, bahkan Kalimantan, dan Sulawesi.³³⁰

³²⁸ Kegiatan itu ditandai dengan peletakkan batu pertama Gedung Persiapan Sekolah Tinggi Muhammadiyah Minangkabau berlokasi di Komplek Kauman Padang Panjang. Pembangunan gedung tersebut di percayakan kepada sebuah panitia yang dipimpin oleh A. Malik Ahmad. Panitia ini dengan serius melaksanakan berbagai kegiatan, seperti menggerakkan pelajar-pelajar Kuliyatul Muballighien untuk menghimpun dana dari warga dan simpatisan Muhammadiyah di cabang dan ranting termasuk dari masyarakat umum. Satu tahun kemudian berdirilah sebuah bangunan darurat herlantal tanah bercampur batu kapur, tiang bambu, dinding tadir, dan atap rumbia, sedangkan kayu-kayu yang diperlukan diambil langsung oleh peiajar-pelajar ke tengah hutan di sekitar perbukitan Kota Padang Panjang. Bahkan ada yang diambil guru-guru Kulliyaatul Muballighien sampai ke nagari Jano Tambangan (arah selatan) yang berjarak lebih kurang 10 km dari pusat Kota Padang Panjang. Lihat Hasan Ahmad. *Sejarah Komplek Perguruan Muhammadiyah Kauman Padang Panjang*. (Arsip Pribadi).

³²⁹ Dengan memanfaatkan gedung darurat itu, pada awal 1944 kegiatan belajar mengajar telah dapat dimulai dengannama "Kelompok Studi Persiapan Sekolah Tinggi Muhammadiyah" siswanya berasal dari guru-guru yang berijazah SLTA yang ada di Padang Panjang. Amat sayang kegiatan yang baru dirintis ini hanya dapat berlangsung dua tahun, karena setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia diproklamlirkan 17 Agustus 1945, semua tenaga dikerahkan untuk perjuangan membela dan mempertahankan kemerdekaan. Gedung darurat yang telah dibangun dengan susah payah itu pun hagus dibakar Belanda, sama halnya dengan gedung-gedung sekolah lainnya di Kota Padang Panjang. Periode 1947-1949, dikenal dengan agresi Belanda I dan II, karena Belanda ingin terus menjajah Republik yang masih berusia balita itu.

³³⁰ Lihat Hasan Ahmad. *Sejarah Komplek Perguruan Muhammadiyah Kauman Padang Panjang*. (Arsip Pribadi).

Melihat potensi dan kebutuhan kader intelektual Muhammadiyah yang semakin mendesak, ide pendirian perguruan tinggi kembali menguat dalam Rapat Kerja Nasional Majelis Pendidikan dan Pengajaran Muhammadiyah di Bandung pada 1954. Muhammadiyah Minangkabau segera merespon dan mengangkat isu ini dalam Konferensi Akbar Muhammadiyah Sumatera Tengah pada 19-23 Maret 1954 di Lubuk Alung. Hasil konferensi ini mengusulkan secara resmi kepada Pimpinan Pusat agar perguruan tinggi Muhammadiyah pertama didirikan di Padang Panjang.³³¹

Usulan ini diperkuat dalam Konferensi Majelis Pendidikan dan Pengajaran Muhammadiyah Sumatera Tengah pada 19-21 April 1955 di Padang Panjang, yang melahirkan kebulatan tekad untuk segera merealisasikan pendirian perguruan tinggi. Meskipun belum ada penugasan tertulis dari Pimpinan Pusat, semangat 'fastabiqul khairat' mendorong pembentukan Panitia Persiapan Pendirian Perguruan Tinggi yang diketuai oleh A. Malik Ahmad dengan komposisi panitia yang solid dan sistematis.

Panitia yang terdiri dari tokoh-tokoh Muhammadiyah dan para ahli ini bekerja keras dalam waktu singkat untuk mempersiapkan pendirian fakultas. Dalam lima bulan, mereka berhasil menghimpun dana yang sebagian besar berasal dari sumbangan masyarakat dan hasil penjualan telur ayam, hingga populer dengan sebutan 'Fakultas Ayam'.³³² Semangat gotong royong ini menjadi manifestasi dari kepercayaan masyarakat kepada Muhammadiyah yang dikenal amanah dan berorientasi pada pelayanan umat.

³³¹ Setelah memperhatikan sumber daya dan potensi kader yang tumbuh melalui wadah pendidikan itu sangat pesat, dan kebutuhan terhadap kader intelektual sebagai penggerak Muhammadiyah juga semakin dirasakan pentingnya. Sementara di forum-forum tingkat nasional, ide dan wacana untuk mendirikan Perguruan Tinggi kembali menguat antara lain ketika Rapat Kerja Nasional Majelis Pendidikan dan Pengajaran yang berlangsung 20-24 Februari 1954 di Bandung.

³³² Kerja keras secara cerdas itu akhirnya memang dapat merampungkan persiapan segala sesuatu sesuai limit waktu yang diberikan, sehingga ada pameo waktu itu yang mengatakan bahwa fakultas yang akan diresmikan itu disebut Fakultas Ayam, karena dana pembangunannya sebagian besar berasal dari hasil penjualan telur ayam yang dikumpulkan dari warga persyarikatan, simpatisan, dan masyarakat umum. Dari kebutuhan dana yang diperlukan dapat dihimpun dalam catatan waktu itu mencapai Rp 800.000. Dana sebesar itu tidak hanya berasal dari warga dan simpatisan Muhammadiyah, tetapi juga dari para pejabat dan pegawai negeri yang mengirimkan weselnya langsung kepada panitia. Lihat Hasan Ahmad. *Sejarah Komplek Perguruan Muhammadiyah Kauman Padang Panjang*. (Arsip Pribadi).

Panitia ini secara resmi mendapat pengesahan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan diberi target agar perguruan tinggi dapat diresmikan pada Milad Muhammadiyah ke-43 pada 18 November 1955. Dengan dukungan penuh dari masyarakat, pemerintah, dan tokoh-tokoh Muhammadiyah, mereka berhasil memenuhi target tersebut. Peresmian Fakultas Falsafah dan Hukum ini menandai keberhasilan fase konsensus yang lahir dari musyawarah panjang dan kerja kolektif.

Ini sebuah fakta bahwa memang Muhammadiyah di Padang Panjang sejak awal telah berhasil merebut hati umat dan kepercayaan masyarakat. Hal itu tentu sebagai bukti bahwa setiap amal usaha yang didirikan oleh Muhammadiyah sangat bermanfaat bagi masyarakat banyak dan dapat diurus dengan amanah. Semua amal usaha yang didirikan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan umat dalam rangka membebaskannya dari belenggu kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan, seperti panti asuhan, sekolah, poliklinik, dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Artinya, Muhammadiyah berupaya membuktikan salah satu karakter filosofi jati dirinya “sedikit bicara, banyak kerja” dan “dengan berorganisasi kita kuat, dan dengan beradministrasi kita terhindar dari fitnah”.³³³

Dalam perspektif teori strukturasi Anthony Giddens, keberhasilan ini menunjukkan bahwa agensi individu dalam Muhammadiyah berhasil mentransformasikan struktur sosial yang ada. Proses ini tidak hanya mencerminkan reproduksi struktur Muhammadiyah, tetapi juga menunjukkan bagaimana agensi mampu menciptakan perubahan melalui tindakan kolektif yang terorganisir. Keberhasilan konsensus ini juga dapat dibaca dalam kerangka teori konsensus Jrgen Habermas, di mana komunikasi rasional dan musyawarah berperan sentral dalam membangun kesepakatan sosial yang mengakar.

Hasil pembahasan pada forum itu dirumuskan menjadi kebulatan tekad untuk segera dilaksanakan. Agar pekerjaan baik itu segera dapat dimulai, meskipun belum ada penugasan tertulis dari pusat, namun dengan berhusnudzon atas dorongan semangat “*fastabiqul khairat*”, ketika itu langsung dibentuk Panitia Persiapan Pendirian Perguruan Tinggi tersebut. Panitia ini kembali dipercayakan kepada A. Malik Ahmad selaku Ketua, dibantu oleh Suin Dt. Malintang Alam dan RI. Dt. Sinaro Panjang, masing-masing Wakil Ketua, dilengkapi dengan Sekretaris I dan II,

³³³ Lihat Hasan Ahmad. *Sejarah Komplek Perguruan Muhammadiyah Kauman Padang Panjang*. (Arsip Pribadi).

masing-masing Abdullah MS dan A. Ghalib, didukung oleh dua buah seksi, yaitu Seksi Teknis dan Seksi Perlengkapan.³³⁴

Fase konsensus ini menjadi fondasi penting bagi perkembangan Universitas Muhammadiyah di Padang Panjang dan menjadi bukti nyata bagaimana kolaborasi sosial, kesadaran kolektif, dan nilai keikhlasan mampu mewujudkan cita-cita besar dalam dunia pendidikan Islam modern di Indonesia.³³⁵

5.2 Dialog dan Negoisasi Sosial antar Struktur Muhammadiyah

Dialog dan negosiasi sosial antar struktur Muhammadiyah dalam proses pendirian Universitas Muhammadiyah di Padang Panjang menjadi fondasi penting untuk membentuk kesepakatan bersama yang berkelanjutan. Muhammadiyah sebagai organisasi besar dengan struktur yang berlapis, mulai dari pusat, wilayah, daerah, cabang, hingga ranting, membawa keragaman kepentingan dan aspirasi yang memerlukan harmonisasi melalui dialog yang produktif dan negosiasi yang berkelanjutan.

Dinamika pembentukan konsensus tersebut tidak terlepas dari interaksi antara Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat, serta Pimpinan Daerah Muhammadiyah di Padang Panjang dan sekitarnya. Dialog ini melibatkan berbagai aktor, termasuk tokoh pendidikan, ulama, birokrat, dan masyarakat luas yang berperan sebagai donatur dan pendukung moral. Setiap lapisan struktur membawa perspektif dan kepentingan yang terkadang

³³⁴ Lihat Hasan Ahmad. *Sejarah Ringkas Universitas Muhammadiyah Padang Panjang*. (Arsip Pribadi). Seksi Teknis terdiri dari S.Dt. Malintaning Alam (Ketua), Mr. St. Haroen Al Rasjid, Dr. Moezbar, Dr. Kaharuddin Junus, St. K.D.M. Pontas Nasution, Djajusman, N. Dt. Batuah, Muchtar Dt. R. Alam, Ambiar, Rd. Suleman, Palizir Hafli, Adam Saleh, Harun 'l Ma'any sebagai anggota. Sedangkan Seksi Perlengkapan, terdiri dari R. I. Dt. Sinaro Panjang (Ketua), Zainuddin Zein, Duski Samad, I. Zulkarnaini, H. Riva'i Burhan, A. Wahab Samad, Adam Ibrahim, Bahar Dt. Mangkuto Alam, H. M. Jatim, Hasan Ahmad, Dinijah Siddik, Husin Salim, H. Samik Ibrahim sebagai anggota. Seksi Teknis bertugas mengatur pedoman fakultas, rencana mata kuliah, rencana perpustakaan dan mengemukakan calon-calon dosen dan lain-lain. Sedangkan Seksi Perlengkapan bertugas mengatur kesempurnaan gedung, menyiapkan alat-alat inventaris, mengatur pemeliharaan hak milik dan lain-lainnya.

³³⁵ Dengan memegang teguh prinsip dan amanah itulah yang dipedomani oleh setiap kader persyarikatan yang terdidik dan terlatih untuk membentengi dan memelihara nama baik persyarikatan dimana pun mereka ditempatkan dan dalam kedudukan apa saja yang dipercayakan. Kepada mereka telah ditanamkan prinsip, sekecil dan serendah apa pun kepercayaan yang diterima adalah amanah yang mesti akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah Yang Maha Adil di akhirat nanti (QS. At Takasur 102: 8)

bertentangan, namun pada akhirnya dapat disatukan dengan prinsip musyawarah yang menjadi tradisi kuat dalam budaya Minangkabau dan Muhammadiyah.³³⁶

Kongres yang untuk pertama di luar Jawa tersebut dianggap sangat sukses luar biasa, karena di samping ramai dikunjungi peserta dan perantau Minang dari hampir seluruh pelosok tanah air, juga mampu menampilkan tokoh-tokoh nasional dan daerah untuk membakar semangat juang merebut kemerdekaan Republik Indonesia dengan memperdalam roh tauhid sebagai landasan perjuangan. Kesempatan itu juga dijadikan ajang menyosialisasikan bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu bangsa. Meskipun kondisi waktu itu tak luput dari intimidasi dan pengawasan intelijen kolonial Belanda, tidak melunturkan keberanian panitia dan peserta, sehingga beberapa orang anggota panitia dan tokoh pemuda rela ditangkap dan di penjara setelah upacara pembukaan, karena pidato mereka bermuatan politik menghasut dan membakar semangat rakyat untuk bersatu melawan penjajah. Kondisi itu juga berdampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan Muhammadiyah makin pesat dan meluas, tidak saja di Minangkabau, bahkan menapak hingga ke Sumatera Utara, Aceh, Jambi, dan Riau darat/lautan. Khusus untuk Minangkabau sampai muncul sebuah semboyan yang populer sebagai produk kongres “menagarikan Muhammadiyah dan me-Muhammadiyah-kan nagari”³³⁷

Sebagaimana yang dijelaskan Anthony Giddens dalam teori strukturasi, struktur sosial Muhammadiyah tidak hanya membatasi tindakan agensi, tetapi juga menjadi medium yang direproduksi dan ditransformasi oleh agensi itu sendiri. Pada bagian ini, tokoh-tokoh Muhammadiyah seperti A. Malik Ahmad dan Saalah Jusuf Sutan Mangkuto memainkan peran sebagai agen yang tidak hanya tunduk pada

³³⁶ Momentum pertama, menjadi tuan rumah pelaksanaan baralek gadang “Congres Moehammadijah ke-19” yang berlangsung pada 14-21 Maret 1930 di Bukittinggi. Waktu itu Muhammadiyah Minangkabau baru berusia kurang lima tahun dengan dukungan 17 Cabang dan 23 Ranting (Groep). Muhammadiyah Minangkabau berdiri untuk pertama kali 29 Mei 1925 di Sungai Batang Tanjung Sani Maninjau atas prakarsa tokoh pembaru Syekh Abdul Karim Amrullah (ayahanda Hamka yang dikenal juga dengan nama Inyiah De-Er) bersama murid yang juga menantu beliau Ahmad Rasyid Sutan Mansur. Lihat Hasan Ahmad. *Sejarah Komplek Perguruan Muhammadiyah Kauman Padang Panjang*. (Arsip Pribadi).

³³⁷ Lihat Hasan Ahmad. *Sejarah Komplek Perguruan Muhammadiyah Kauman Padang Panjang*. (Arsip Pribadi). Tidak lama setelah itu, lahir berbagai organisasi Islam lokal dan berdiri Surau-surau dan Madrasah-madrasah sebagai wadah pembibitan ulama dan kader-kader perjuangan merebut kemerdekaan dari berbagai golongan dan aliran baik yang disebut kaum muda maupun kaum tua. Di tengah-tengah masyarakat semakin berkobar semangat jihad untuk merebut kemerdekaan dan kebencian terhadap penjajahan sebagai hak asasi manusia yang perlu diperjuangkan dengan penuh pengorbanan, baik harta, maupun jiwa sekalipun. Semboyan yang populer saat itu adalah *isy Kariiman au mut syahiidan* (hidup mulia atau mati syahid), atau esa hilang dua terbilang.

aturan yang ada, tetapi juga berupaya menciptakan norma dan struktur baru yang memungkinkan lahirnya Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

Pada konteks praksisnya, musyawarah yang digelar dalam berbagai konferensi dan rapat kerja menjadi media utama bagi terjadinya pertukaran gagasan, pengelolaan perbedaan, serta penyelarasan strategi antar struktur. Konferensi Akbar Muhammadiyah Sumatera Tengah pada 1954 dan Konferensi Majelis Pendidikan dan Pengajaran Muhammadiyah Sumatera Tengah pada 1955 menjadi contoh konkret bagaimana perbedaan dapat diakomodasi dalam kerangka dialog yang konstruktif.³³⁸

Kongres yang penuh kesan dan kenangan itu, telah menjadi tolok ukur dan sumber energi positif untuk menggerakkan Muhammadiyah diseluruh tanah air. Kendatipun kongres ke-19 itu penuh catatan pesan dan kesan tentang keberanian Muhammadiyah Minangkabau dalam membuktikan filosofi budaya kehidupannya yang kompak dan bersatu, ibarat pepatah "*Saciok bak ayam-sadanciang bak basika lurah samo mianurun, kabukik samo mandaki*" nan "*Barek samo dipikuarangan samo dijinjiang*".³³⁹

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam setiap negosiasi sosial, selalu ada potensi resistensi. Beberapa kalangan internal mempertanyakan urgensi pendirian perguruan tinggi, mengingat terbatasnya sumber daya, risiko kegagalan, serta kemungkinan persinggungan kepentingan dengan institusi pendidikan lain yang sudah mapan seperti Universitas Andalas. Perbedaan persepsi ini berhasil dikelola melalui intensifikasi komunikasi, transparansi tujuan, dan jaminan partisipasi yang setara bagi seluruh elemen organisasi.

Dalam narasi sejarah Muhammadiyah Padang Panjang, tercatat bahwa negosiasi sosial tidak hanya bersifat internal, tetapi juga melibatkan jaringan sosial eksternal yang lebih luas. Hubungan dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat,

³³⁸ Momentum kedua, untuk pertama kalinya kader persyarikatan yang berasal dari luar Jawa, tampil dipilih dan dipercaya sebagai pucuk pimpinan Muhammadiyah tingkat nasional. Posisi itu dipercayakan kepada buya Ahmad Rasyid Sutan Mansoer dari Minangkabau yang kemudian hari beliau dikenal dengan panggilan Buya Tuo terutama bagi kalangan murid-murid beliau yang berasal dari ranah Minang. Beliau terpilih sebagai Ketua Umum Pusat Pimpinan Muhammadiyah periode 1953-1956 pada Mukhtamar Muhammadiyah ke-32 di Purwokerto, Banyumas yang berlangsung 9-14 Juli 1953. Lihat Hasan Ahmad. *Sejarah Komplek Perguruan Muhammadiyah Kauman Padang Panjang*. (Arsip Pribadi).

³³⁹ Lihat Hasan Ahmad. *Sejarah Komplek Perguruan Muhammadiyah Kauman Padang Panjang*. (Arsip Pribadi).

serta lembaga pendidikan umum menjadi kunci penting dalam memperlancar proses legalitas dan operasionalisasi perguruan tinggi. Kolaborasi dengan Universitas Andalas dan PTPG Batusangkar dalam pengadaan dosen dan kurikulum menjadi bukti keterbukaan Muhammadiyah dalam membangun koalisi sosial.

Dalam perspektif teori tindakan komunikatif Jurgen Habermas, keberhasilan Muhammadiyah dalam membangun konsensus sosial sangat terkait dengan kemampuannya mengedepankan komunikasi rasional yang didasarkan pada kejujuran, keterbukaan, dan kesetaraan posisi antar berbagai pihak. Muhammadiyah Padang Panjang mampu menciptakan ruang deliberatif yang menegaskan bahwa setiap argumen diuji secara rasional dan keputusan diambil berdasarkan konsensus yang dicapai melalui diskursus publik yang sehat.³⁴⁰

Pada tataran praktis, Muhammadiyah mengembangkan strategi penggalangan dana dan dukungan moral melalui jaringan sosial yang kuat, termasuk memanfaatkan masjid, pengajian, dan organisasi otonom Muhammadiyah. Dialog informal di masjid dan rumah-rumah kader sering menjadi titik awal lahirnya keputusan-keputusan penting yang kemudian diformalkan dalam forum resmi.³⁴¹ Proses ini memperlihatkan sinergi antara struktur formal dan struktur sosial berbasis komunitas. Menarik untuk dicatat bahwa negosiasi sosial dalam Muhammadiyah juga diwarnai oleh integrasi nilai lokal Minangkabau seperti gotong royong,

³⁴⁰ Dalam periode pertama kepemimpinan Buya Sutan Mansur dinilai sukses dan berhasil dalam memimpin umat dan menggerakkan dakwah dengan organisasi yang kuat, terutama dalam penanaman ruh tauhid sebagai landasan perjuangan. Karena keberhasilan mengembangkan organisasi dengan program yang berjalan secara tertib dan manfaatnya semakin dirasakan umat, sehingga dalam Mukhtar Muhammadiyah ke-33 yang berlangsung, 17-24 Dzulhidjah 1375 H bertepatan, 24-29 Juli 1956 M di Palembang beliau dipilih kembali untuk periode kedua 1956-1959. Pada periode kedua ini berhasil dirumuskan landasan perjuangan yang terkenal dengan sebutan "Khittah Palembang". Khittah ini sampai sekarang masih relevan dijadikan sebagai pedoman dasar untuk pembinaan anggota dan pimpinan persyarikatan. Lihat Mardjohan. 2006. *Embrio Muhammadiyah Ada di Kauman Padangpanjang*. Padangpanjang: Peringatan 80 Tahun Perguruan Muhammadiyah Kauman Padangpanjang.

³⁴¹ Momentum ketiga, yaitu Minangkabau merupakan tanah pertama yang menjadi lahan pembibitan kader akademik atau intelektual untuk kepemimpinan Muhammadiyah masa depan, dengan ditempatkannya lokasi Perguruan Tinggi Muhammadiyah pertama dengan diresmikannya Fakultas Falsafah dan Hukum Muhammadiyah di Kauman Padang Panjang. Fakultas ini didirikan pada periode pertama kepemimpinan Buya Sutan Mansur, tepatnya 18 November 1955 bersamaan dengan peringatan Milad ke-43 Muhammadiyah. Fakultas pertama ini, sekaligus juga merupakan cikal bakal berdirinya Universitas Muhammadiyah di Indonesia. Tentang bagaimana usaha perintis dan memperjuangkan idea dan kelahiran fakultas sudah dipaparkan ada Bab IV. Lihat Mardjohan. 2006. *Embrio Muhammadiyah Ada di Kauman Padangpanjang*. Padangpanjang: Peringatan 80 Tahun Perguruan Muhammadiyah Kauman Padangpanjang.

musyawarah, dan prinsip '*Bulek kato dek mufakaik, bulek aia dek pambuluah*' yang menekankan pentingnya konsensus dalam setiap pengambilan keputusan komunitas. Hal ini memperlihatkan kemampuan Muhammadiyah dalam memadukan nilai-nilai Islam modern dengan budaya lokal dalam membangun gerakan pendidikan.³⁴²

Kesepakatan yang dicapai dalam pendirian Universitas Muhammadiyah di Padang Panjang membuktikan bahwa konsensus tidak hanya menjadi hasil akhir, tetapi merupakan sebuah proses panjang yang memerlukan kesabaran, keterampilan komunikasi, dan kesediaan untuk berkompromi. Muhammadiyah berhasil membuktikan bahwa kekuatan sosial tidak hanya terletak pada sumber daya ekonomi, tetapi juga pada soliditas jaringan sosial dan kemampuan membangun kepercayaan lintas struktur.

Dengan demikian, dialog dan negosiasi sosial antar struktur Muhammadiyah di Padang Panjang menjadi sebuah studi penting dalam memahami bagaimana organisasi Islam modern mampu mengelola kompleksitas internal dan eksternal untuk mewujudkan transformasi sosial melalui pendidikan. Pengalaman ini menunjukkan bahwa dalam konteks sejarah pendidikan Islam di Indonesia, kekuatan dialog sosial dan negosiasi internal merupakan pilar yang esensial dalam membangun institusi pendidikan yang berkelanjutan dan berpengaruh luas.

5.3 Fakultas Falsafah dan Hukum pada Masa Peristiwa PRRI

Dinamika Fakultas Falsafah dan Hukum Universitas Muhammadiyah di Padang Panjang mengalami perubahan signifikan setelah peristiwa Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang meletus pada 1958.³⁴³ Pergolakan

³⁴² Berkat usaha Sutan Mansur perkembangan Muhammadiyah bertambah luas. Dengan kemampuannya membaca situasi yang sedang dihadapi dan dengan kemampuannya meyakinkan orang lain akan kebenaran jalan yang ditempuhnya dan dengan ketenangan menghadapi musuh yang agresif, Sutan Mansur mampu memperluas pengaruh Muhammadiyah di Sumatera Barat. Banyak penghulu suku pemangku adat Minangkabau di Padang Panjang, Bukittinggi, Lubuk Basung dan tempat-tempat lain di Sumatera Barat yang menjadi tulang punggung Muhammadiyah di daerahnya masing-masing. Bahkan kader-kader komunis yang telah dibina sejak lama, seperti M. Zein Jambek, Abdullah Kamil, Abdul Malik Sidik dan lain-lain, berbalik menjadi pemuka-pemuka dan mubaligh Muhammadiyah yang terkenal, karena pengaruh Sutan Mansur. Lihat Mardjohan. 2006. *Embrio Muhammadiyah Ada di Kauman Padangpanjang*. Padangpanjang: Peringatan 80 Tahun Perguruan Muhammadiyah Kauman Padangpanjang.

³⁴³ Meskipun ketiga momentum di atas merupakan prestasi yang menunjukkan reputasi membanggakan bagi Muhammadiyah di Sumatera Barat atau Minangkabau, namun bila dikaitkan

politik ini tidak hanya berdampak pada stabilitas nasional, tetapi juga meluas mempengaruhi kelangsungan lembaga pendidikan di berbagai daerah, termasuk Muhammadiyah Padang Panjang.

Berangkat dari kenyataan itu, yang penting dijelaskan dari segi komitmen dan kekonsistensi pengelola terhadap cita-cita yang telah dipadukan sebagai tekad perjuangan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang telah dimulai jauh sebelum mendirikan fakultas ini dengan membina ratusan sekolah dari berbagai tingkat dan jenis di kota maupun di desa. Dengan demikian, ulasan tentang perkembangan ini akan lebih banyak menyangkut tentang dinamika spiritualitas dan kendala yang dihadapi setelah Fakultas pertama ini diresmikan dan hanya sempat beraktivitas lebih kurang dua tahun saja.³⁴⁴

Peristiwa PRRI menyebabkan terganggunya aktivitas akademik Fakultas Falsafah dan Hukum, yang semula berjalan dinamis sejak diresmikan pada 18 November 1955. Dampak dari konflik ini mengakibatkan penghentian total operasional fakultas, serta memaksa Muhammadiyah untuk memindahkan aktivitas pendidikan ke Jakarta. Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengambil keputusan strategis untuk menyelamatkan eksistensi fakultas dengan mengalihkannya ke ibukota yang lebih stabil secara politik dan ekonomi.³⁴⁵

Aktivitas itu berkat kerja sama yang baik dengan Perguruan Tinggi yang ada di Sumatera Tengah seperti Universitas Andalas di Padang atau Bukittinggi dan PTPG di Batusangkar, sehingga proses perkuliahan dapat berjalan dengan lancar, karena banyak bantuan dosen dari kedua Perguruan Tinggi tersebut. Pada waktu itu proses perkuliahan telah diprogramkan tiga tingkat masing-masing, yaitu Propaedeuse, Kandidat, dan Bacaloret. Proses pembelajaran pun berjalan sangat dinamis, karena mahasiswa mulai merasakan betapa bedanya pembahasan dan pendalaman materi setiap mata kuliah yang disuguhkan para dosen, sehingga pemahaman hakikat filsafat ilmu tidak lagi berputar sebatas kulit-kulitnya saja dalam arti sempit dan terbatas, melainkan telah menyauk sehabis gaung untuk memperoleh inti dari sesuatu yang semula samar-samar. Namun situasi yang kondusif itu tiba-tiba terganggu akibat suasana politik dan stabilitas

dengan perkembangan Fakultas Falsafah dan Hukum setelah diresmikan, nampaknya memang agak dilematis, sebab seharusnya perkembangan ada penambahan kuantitas dan kualitas terhadap sesuatu yang sedang berjalan secara seimbang. Akan tetapi, fakultas yang baru lahir satu-satunya di Padang Panjang justru hal itu belum berhasil diwujudkan, karena banyak faktor dan kendala yang dihadapi secara tiba-tiba, terutama faktor eksternal dan sulit dikendalikan.

³⁴⁴ Hasan Ahmad. *Sejarah Ringkas Universitas Muhammadiyah Padang Panjang*. (Arsip Pribadi)

³⁴⁵ Duski Nawawi, 1960. "Perjuangan Dr. H. Abdul Karim Amrullah", Hikmah XIII No. 12.

keamanan hubungan pemerintah Daerah dan Pusat tidak menentu yang berujung dengan meletusnya pergolakan daerah PRRI.³⁴⁶

Transformasi ini kemudian mengantarkan fakultas tersebut menjadi bagian dari Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) Muhammadiyah, yang berkembang menjadi Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ). Perpindahan ini bukan hanya penyelamatan administratif, tetapi juga bagian dari proses restrukturisasi lembaga agar tetap relevan dan mampu beradaptasi dengan situasi politik nasional.³⁴⁷

Mencermati situasi politik yang semakin kacau dan menjurus pada angkat senjata (perang saudara) karena hampir tak menemukan titik temu untuk menyelesaikan polemik antara pusat dan daerah, maka atas kebijaksanaan Pusat Pimpinan Muhammadiyah, Fakultas pertama yang belum berumur setahun jagung itu terpaksa dihentikan kegiatannya di ranah Minang. Kemudian, agar usaha rintisan yang telah mengurai waktu yang cukup panjang dan juga dengan biaya besar itu, berdasarkan Keputusan Konferensi Majelis Pengajaran di Jakarta tahun 1956 menetapkan bahwa untuk menyelamatkan Fakultas Falsafah dan Hukum di Padang Panjang ini, perlu dipindahkan ke Jakarta. Setelah resmi dipindahkandan mulai beraktivitas beberapa waktu, guna menyesuaikan dengan kebutuhan pasar, nama fakultas inidiganti dengan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG).³⁴⁸

Dalam perspektif teori strukturasi Anthony Giddens, keputusan untuk memindahkan fakultas merupakan contoh bagaimana agensi Muhammadiyah merespon krisis dan mentransformasi struktur yang ada. Muhammadiyah tidak terjebak dalam determinasi struktur, tetapi secara reflektif membentuk tindakan baru yang memungkinkan keberlanjutan institusi dalam konteks sosial yang berubah.³⁴⁹

Perubahan nama dengan wajah baru ini diresmikan pada 18 November 1957 dengan Ketua Panitia peresmian H. Arso Sostroatmodjo. Adapun yang dipercaya sebagai Pimpinan, yaitu Prof. Dr. Suganda Purbakawatja. PTPG yang membuka

³⁴⁶ Hasan Ahmad. *Sejarah Ringkas Universitas Muhammadiyah Padang Panjang*. (Arsip Pribadi)

³⁴⁷ Hasan Ahmad. *Sejarah Ringkas Universitas Muhammadiyah Padang Panjang*. (Arsip Pribadi)

³⁴⁸ Lihat Hasan Ahmad. *Sejarah Komplek Perguruan Muhammadiyah Kauman Padang Panjang*. (Arsip Pribadi).

³⁴⁹ Anthony Giddens. 1984. *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. Cambridge: Polity Press, hlm. 5.

Jurusan Ilmu Mendidik pada 1958 berubah nama lagi menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) di bawah naungan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kemudian pada 1965 terjadi lagi perubahan nama menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Jakarta (IKIP Muhammadiyah) yang berdiri sendiri. Perkembangan ini diikuti oleh daerah-daerah lain, seperti Yogyakarta dan Solo, sehingga pada Musyawarah Kerja Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia yang diadakan di Jakarta tanggal 29-31 Juli 1966 telah tercatat dihadiri oleh 80 buah Perguruan Tinggi dalam bentuk Fakultas, Akademi dan Sekolah Tinggi yang bernaung di bawah persyarikatan Muhammadiyah.³⁵⁰

Fakultas Falsafah dan Hukum yang sempat vakum di Padang Panjang meninggalkan dampak psikologis bagi warga Muhammadiyah Sumatera Barat. Trauma akibat konflik politik dan militer membuat sebagian besar kader dan masyarakat kehilangan kepercayaan diri untuk melanjutkan aktivitas pendidikan tinggi di daerah tersebut. Namun, sebagaimana dijelaskan oleh Talcott Parsons, sistem sosial Muhammadiyah memiliki kemampuan adaptasi dan integrasi yang kuat untuk mengembalikan fungsionalitas institusi dalam jangka panjang.³⁵¹

Pasca PRRI, Muhammadiyah perlahan-lahan mulai menggalang kembali kekuatan sosial dan memperkuat jaringan di tingkat lokal dan nasional. Dalam proses ini, dialog internal dan musyawarah menjadi kunci dalam menyusun strategi kebangkitan kembali. Teori tindakan komunikatif Jürgen Habermas memberikan landasan bagaimana Muhammadiyah membangun kembali konsensus melalui diskursus rasional dan komunikasi yang terbuka antara pengurus pusat, wilayah, dan daerah.³⁵²

Salah satu langkah signifikan dalam proses rekonstruksi ini adalah pengaktifan kembali lembaga pendidikan Muhammadiyah di Sumatera Barat.

³⁵⁰ Hasan Ahmad. *Sejarah Ringkas Universitas Muhammadiyah Padang Panjang*. (Arsip Pribadi)

³⁵¹ Talcott Parsons. 1951. *The Social System*. New York: The Free Press, hlm. 29. Sejak terjadi kevakuman yang cukup panjang dengan segala bentuk tekanan politis yang berdampak secara psikis dan psikologis terhadap warga persyarikatan, sehingga menjadi trauma untuk bangkit kembali. Apalagi akibat pergolakan daerah PRRI sarana dan sarana yang telah dibangun dengan susah payah hampir semua hancur dan tidak bisa lagi difungsikan secara baik. Namun, bukan berarti telah terjadi patah arang yang tidak bisa disambung lagi untuk membangkitkan batang terendam. Kondisi itu hanya sementara.

³⁵² Jurgen Habermas. 1984. *The Theory of Communicative Action*. Boston: Beacon Press, hlm. 72.

Meskipun Fakultas Falsafah dan Hukum tidak pernah kembali secara fisik ke Padang Panjang, namun semangat untuk membangun lembaga pendidikan tinggi baru terus diupayakan. Akademi Kulliyatul Muballighien yang didirikan pada 1964 menjadi simbol kebangkitan tersebut.³⁵³

Proses negosiasi sosial untuk membangun akademi baru tidak terlepas dari pembelajaran atas kegagalan masa lalu. Muhammadiyah menerapkan strategi yang lebih adaptif dengan mengintegrasikan pengalaman politik lokal dan nasional serta memperkuat relasi dengan pemerintah dan lembaga pendidikan lain. Muhammadiyah juga memperluas keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan sebagai bagian dari strategi membangun kepercayaan publik yang sempat tergerus akibat pergolakan PRRI.³⁵⁴

Dalam kerangka teori strukturasi Giddens, rekonstruksi ini mencerminkan proses reproduksi dan transformasi struktur sosial Muhammadiyah. Agensi Muhammadiyah tidak hanya menghidupkan kembali aktivitas pendidikan, tetapi juga membentuk norma-norma baru dalam tata kelola pendidikan tinggi yang lebih inklusif dan berbasis komunitas. Sementara itu, dalam kerangka teori sistem Parsons, Muhammadiyah berhasil mengintegrasikan kembali fungsi-fungsi sosial seperti pendidikan, agama, dan ekonomi dalam satu unit kelembagaan yang solid.³⁵⁵

Habermas menegaskan pentingnya komunikasi yang rasional dalam membangun konsensus sosial. Muhammadiyah Sumatera Barat berhasil membangun kembali legitimasi sosial melalui praktik komunikasi yang terbuka dan berorientasi pada pencapaian kesepakatan bersama. Proses ini menjadi bagian penting dalam menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap Muhammadiyah sebagai pelopor pendidikan Islam modern di daerah tersebut.³⁵⁶

Dengan demikian, dinamika Fakultas Falsafah dan Hukum pasca-PRRI menjadi refleksi penting dalam sejarah Muhammadiyah di Sumatera Barat.

³⁵³ Lihat Hasan Ahmad. *Sejarah Komplek Perguruan Muhammadiyah Kauman Padang Panjang*. (Arsip Pribadi).

³⁵⁴ Lihat Hasan Ahmad. *Sejarah Komplek Perguruan Muhammadiyah Kauman Padang Panjang*. (Arsip Pribadi).

³⁵⁵ Anthony Giddens. 1984. *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. Cambridge: Polity Press, hlm. 64.

³⁵⁶ Jurgen Habermas. 1984. *The Theory of Communicative Action*. Boston: Beacon Press, hlm. 83.

Perjalanan institusi ini menunjukkan bagaimana organisasi Islam modern mampu beradaptasi, melakukan restrukturisasi, dan membangun kembali konsensus sosial dalam menghadapi tantangan politik dan sosial yang kompleks. Proses ini juga menegaskan bahwa kekuatan organisasi tidak hanya terletak pada kapasitas material, tetapi pada kemampuan membangun jaringan sosial, konsensus internal, dan daya adaptasi terhadap perubahan zaman.³⁵⁷

5.4 Dinamika Fakultas Falsafah dan Hukum setelah Peristiwa PRRI

Setelah pergolakan PRRI berakhir pada 1961, kondisi kehidupan masyarakat Sumatera Barat atau Minangkabau pada umumnya diselimuti rasa takut, akibat traumatik perang saudara yang bagi generasi muda. Kehidupan masyarakat rata-rata di bawah garis kemiskinan dan lapangan kerja seperti hilang dan tertutup. Meskipun pintu untuk merantau tetap terbuka, tetapi selalu dibayangi rasa gamang dan khawatir terhadap keselamatan jiwa. Sementara bagi generasi tua hampir di setiap nagari terbagi dua. Ada yang memang waktu pergolakan bergejolak pergi ijok (lari) ke hutan dan bergabung dengan kelompok PRRI dan sebagainya lagi yang bertahan di nagari. Yang tinggal bertahan di nagari ini pun terbagi dua.

Ada yang karena tak ingin berpisah meninggalkan keluarga dan mempertahankan eksistensi nagari yang berfalsafah “*Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah*” terutama dalam bidang kr.agamaan seperti meramaikan masjid dan surau serta mendidik anak kemenakan mengaji di samping bersekolah. Tetapi sebagiannya lagi ada yang telah terbius aliran politik atheis Partai Komunis Indonesia (PKI) yang pada waktu itu telah mulai menyusun langkah dan kekuatan untuk mengambil alih kekuasaan Pemerintahan RI dengan cara illegal. Hal ini terbukti ketika pergolakan PRRI usai banyak Wali Nagari dan perangkat Nagari diduduki oleh orang-orang PKI. Di samping membangun kekuatan baru dengan menggeliatkan (seperti ular keluar dari sarang), organisasi sayapnya yang menonjol dikampung-kampung waktu itu adalah BTI, Gerwani, OPR/OKR.

Akibatnya banyak warga persyarikatan di masa itu yang menghilang pindah ke kota pergi merantau dan menyimpan identitasnya sebagai anggota Muhammadiyah, karena orang-orang PKI mulai ekspansi ke dalam kekuasaan

³⁵⁷ Talcott Parsons. 1951. *The Social System*. New York: The Free Press, hlm. 48.

rezim Orde Lama di tingkat nasional bahkan dengan memanfaatkan doktrin Manipol-Usdek, PKI mulai siap menyebarke daerah mengaktifkan barisan pendukung dari berbagai onderbow partainya seperti CGMI, Gerwani, BTI, Lekra, dan sebagainya. Kekuasaannya mulai melakukan intimidasi mencari mangsa dengan menteror masyarakat agar menjadi pendukung doktrin penghapusan ideologi agama (Ketuhanan) di Negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Taktik agar gerakan Atheis itu tidak kentara dipasang kuda-kuda dan strategi licik memengaruhi Bung Karno, dengan menciptakan sebuah wadah dengan slogan yang dapat diterima umat beragama, yaitu Nasakom. Perpaduan antara keyakinan dan aliran yang dianut masyarakat Indonesia, yaitu kelompok Nasionalis, Agama dan Komunis. Waktu itu memang ada golongan Islam yang ambisi politiknya sangat kental dapat menerima dan duduk dalam wadah tersebut mengatas namakan golongan agama. Bung Karno memang pernah mengatakan bahwa Pancasila jika diperas bisa menjadi Gotong Royong dan bisa juga Nasakom.

Ketika PRRI dideklarasikan tanggal 20 Februari 1958 di Padang oleh Kolonel Ahmad Husein, selaku Ketua Dewan Banteng sebagian dari Pimpinan Muhammadiyah Sumatera Tengah memang ada yang turut bergabung dengan PRRI, termasuk ketuanya H. A. Malik Ahmad dan beberapa orang anggota pimpinan lainnya seperti Buya Oedin, RI. Dt. Sinaro Panjang, Iskandar Zulkarnaini dan Duski Samad. Kompleks Kauman dikuasai tentara pusat, sehingga untuk memelihara kelangsungan cita-cita lembaga pendidikan yang ada di Kauman ini, sempat kegiatannya dipindahkan ke Sumanik dan Lintau di Tanah Datar.

Namun, karena situasi perang terus memanas, keamanan pun tidak terjamin, akhirnya sekolah-sekolah yang diboyong pindah ke dua tempat itu pun terpaksa ditutup. Dengan demikian, praktis kompleks Kauman Padang Panjang kosong dari aktivitas pendidikan sejak 1958 hingga 1963, sebab semua fasilitas sarana dan prasarana belajar seperti ruang belajar, kantor, dan asrama dikuasai oleh tentara pusat. Resikonya tidak sedikit kerugian yang dialami, termasuk inventaris alat kantor dan buku-buku di perpustakaan yang jumlahnya cukup banyak. Aset itu ada yang rusak dan banyak juga yang dibakar.

Dalam bidang organisasi, agar tidak terjadi kevakuman pimpinan dalam persyarikatan, jabatan Ketua Pimpinan Muhammadiyah Daerah waktu itu

diserahkan kepada Muhammad Yatim yang bertempat tinggal di Kota Padang. Kebetulan beliau juga sedang menjabat Kepala Kantor Pos Besar Padang, namun karena seorang kader yang telah terdidik dan terlatih sejak muda, beliau tidak menolak bahkan menerima dengan penuh rasa tanggung jawab meskipun penuh resiko, karena dalam situasi sangat mencekam dibawah ancaman PKI. Jabatan Ketua dalam suasana genting dan krusial itu beliau jalani hingga 1962.

Suasana yang dihadapi dalam kepemimpinan Muhammad Yatim ini dilematis. Tidak saja tekanan dari pejabat, terutama militer dan orang PKI, intimidasi dan teror terhadap Muhammadiyah kadang-kadang juga datang dari kalangan golongan Islam sendiri yang ingin menangguk di air keruh karena tidak senang dengan gerakan dakwah Muhammadiyah yang mulai berkembang maju dengan berbagai amal usahanya. Salah satu tuntutan mereka kepada aparat keamanan agar Muhammadiyah dibubarkan, karena termasuk Ormas pendukung Masyumi yang dituduh terlibat PRRI.

Di kota Padang sampai ada upaya untuk meruntuhkan Surau Papanyang yang baru dibangun di kampung Jawa oleh Muhammadiyah, berdampingan tidak terlalu jauh dengan Balai Kota dan kantor Kodim. Dalam situasi seperti itulah Ketua Pimpinan Muhammadiyah Daerah Sumatera Barat, Muhammad Yatim tampil dengan segala keberanian dan akibatnya. Setelah PRRI usai kepemimpinan Muhammadiyah Daerah Sumatera Barat di bawah Muhammad Yatim, melalui sebuah Konferensi Daerah di Padang, diserahkan kepada H. Haroun 'L Ma'any untuk periode 1962-1964.

Sebenarnya dalam kurun waktu 1962-1964 itu pun situasi belum sepenuhnya aman. Walaupun PRRI telah usai dan tentara ex-PRRI telah kembali kepangkuan ibu pertiwi dan diberi amnesti, namun situasi dikacaukan lagi dengan ancaman intimidasi PKI, bahkan banyak aktivis masjid, terutama di level nagari yang aktif sebagai penggerak dakwah tercatat hilang diculik, ditembak, dibunuh, dan tidak jelas di mana dikuburnya. Waktu itu kehidupan terasa sulit dan terjepit karena infiltrasi kekuatan PKI, nyawa dan harta ketika itu terasa tak berharga. Nagari-nagari sejak pergolakan PRRI telah dipagar dengan bambu setinggi satu setengah meter, di halaman belakang Sekolah-sekolah Rakyat pun digali lubang-lubang yang tidak jelas maksud dan tujuannya.

Keadaan itu berubah 180 derajat ketika kekuatan PKI hancur dan ditumbangkannya sendiri melalui Kudeta berdarah yang dikenal dengan peristiwa Gestapu 1965. Mereka ingin mengambil alih kekuasaan dengan cara sangat keji membunuh tujuh orang Jenderal TNI dan putri kesayangan Jenderal A.H. Nasution, Ade Irma Suryani, karena mereka gagal menangkap Jenderal Nasution yang selamat dari kepungan maut dipagi hari naas itu.

Selanjutnya, tahun 1966 merupakan tonggak sejarah baru di Republik ini, di mana Angkatan 66 yang disponsori Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) dan Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI) bangkit sebagai kekuatan raksasa mendobrak dan mengoreksi kekeliruan rezim Orde Lama di bawah kepemimpinan Bung Karno. Angkatan 66 tampil membawa misi yang dikenal dengan Tri Tura yaitu Bubarkan PKI, Turunkan Harga dan Rombak Kabinet 100 Menteri. Angkatan Muda Muhammadiyah dalam memperkuat barisan Angkatan 66 ini, di samping tampil aktif secara perorangan diberbagai angkatan seperti KAPPI, KAMI, KASI, dan lain-lain. Secara kelembagaan juga ambil peran khusus melalui Ortom KOKAM (Komando Operasi Keamanan Angkatan Muda Muhammadiyah) yang cukup aktif dan terkenal dengan baju lorengnya. Alhamdulillah meskipun ada yang kurban meninggal dunia sebagai Pahlawan Ampera seperti Ahmad Karim di Bukittinggi dan di tempat lain, namun dengan gerakan moral yang didukung penuh para tokoh Islam dan masyarakat yang anti komunis dan Nasakom, kekuatan PKI, dan antek-anteknya dapat dilumpuhkan dan dibubarkan. Situasi keamanan pun berangsur-angsur pulih dan kondusif, sehingga Muhammadiyah dapat bangkit dan bergerak kembali secara bertahap.

Berikut kronologis perkembangan Universitas Muhammadiyah di Padang Panjang setelah mengalami kevakuman gerak selama lebih kurang delapan tahun. Terutama menghadapi pergolakan daerah PRRI (1958-1961) hingga meletusnya Gestapu PKI tahun 1965. Setelah itu, Muhammadiyah mulai bangkit mengatur strategi utamanya menyelamatkan aset yang masih tersisa dan menghimpun kekuatan tenaga kader yang masih tetap setia, ibaratnya "*mangumpua nan taserak-manjapuik nan taicia*". Upaya ini dimulai dengan menyusun terjaga dan kekuatan untuk merehabilitasi dan rekonstruksi bengkalai-bengkalai Falsafah dan Hukum yang pernah didirikan tahun 1955. Usaha itu diawali dengan mengaktifkan kembali

lembaga Perguruan Tinggi di Kauman Padang Panjang dan secara bertahap di kota-kota lainnya di Sumatera Barat. Program mambangkik batang tarandam ini, sehingga dapat dimulai dengan tahapan dan perkembangan pada bagian berikutnya.

5.5 Pendirian Akademi dan Fakultas: Akademi Kuliyatul, Agama Islam, Adab, Syari'ah, dann Niaga

Sebagaimana telah dipaparkan di atas, bahwa akibat pergolakan daerah PRRI yang berdampak terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga hampir semua komponen civitas akademika Fakultas Falsafah dan Hukum terganggu konsentrasinya. Mereka ada yang ikut ke hutan dan bergabung dengan PRRI, ada yang pulang kampung ke daerah masing-masing dan situasi Kota Padang Panjang pun tiba-tiba sepi ditinggalkan penghuni. Akibatnya kegiatan operasional proses belajar mengajar terhenti (mati suri), maka terjadilah kevakuman seketika. Situasi yang tidak menguntungkan itu cepat mendapat tanggapan Pusat Pimpinan Muhammadiyah di Jakarta dan dalam waktu singkat mengambil kebijakan, bahwa untuk menyelamatkan Fakultas Falsafah dan Hukum yang baru saja didirikan, kegiatannya dipindahkan ke Jakarta. Maka, untuk sementara Kompleks Kauman Padang Panjang kosong dari aktivitas organisasi dan pendidikan. Situasi ini berlaku hingga pergolakan PRRI usai dan masa mengambang hingga tahun 1963.

Setelah vakumnya Fakultas Falsafah dan Hukum pasca-PRRI, Muhammadiyah di Sumatera Barat tidak berhenti dalam mengupayakan kebangkitan pendidikan tinggi. Dalam rentang waktu berikutnya, Muhammadiyah memulai inisiatif baru dengan mendirikan sejumlah akademi dan fakultas sebagai bentuk konsistensi perjuangan pendidikan Islam modern di daerah tersebut.

Kemudian, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sumatera Barat mendirikan Akademi Kuliyatul Muballighien yang menjadi tonggak pertama pada 1964 di Padang Panjang.³⁵⁸ Akademi ini lahir dari kesadaran pentingnya melanjutkan cita-

³⁵⁸ Lihat Mardjohan. 2006. *Embrio Muhammadiyah Ada di Kauman Padangpanjang*. Padangpanjang: Peringatan 80 Tahun Perguruan Muhammadiyah Kauman Padangpanjang. Untuk memperlancar usaha ini Majelis Pendidikan dan Pengajaran Muhammadiyah Daerah Sumatera Barat dengan surat keputusannya No.050/MPD/III/64, tanggal 2 Juni 1964 menunjuk Hasan Ahmad sebagai perwakilannya di Padang Panjang. Hasan Ahmad adalah tenaga yang berpengalaman dan punya kemampuan unggul dalam bidang organisasi dan administrasi. Sebagai realisasi dari arnana tersebut, tanggal 25 Agustus 1964 mulai diadakan kegiatan tes penerimaan calon mahasiswa.

cita pendidikan yang sempat terhenti. Akademi ini dirancang untuk mencetak muballigh dan kader da'i Muhammadiyah yang siap mengemban dakwah dan pembinaan masyarakat. Muhammadiyah memanfaatkan seluruh potensi internal dan eksternal untuk membangkitkan kembali lembaga pendidikan tinggi yang sebelumnya terguncang akibat konflik politik.

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sumatera Barat pun mulai bergerak lagi. Salah satu kegiatannya adalah Konferensi Muhammadiyah Daerah Sumatera Barat, pada 25-28 Agustus 1963 di Padang dan dilanjutkan dengan Konferensi Majelis Pengajaran tanggal 30 Mei-Juni 1964 di Padang Panjang. Kedua forum itu dengan serius membahas kembali tentang bagaimana gerak pendidikan Muhammadiyah ke depan, terutama bidang pendidikan setelah terjadi kevakuman yang cukup lama. Forum itu akhirnya mengamanahkan kepada Pimpinan Muhammadiyah Daerah Sumatera Barat agar sesegeranya merehabilitir Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Padang Panjang. Adapun nama yang disepakati waktu itu adalah Akademi Kuliyatul Muballighien di samping SLTA-nya dengan nama Kuliyatul Muballighien dan SLTP-nya dengan nama Tsanawiyah Muhammadiyah sebagai pengganti nama Mu'allimin.³⁵⁹

Akademi ini kemudian berkembang menjadi Fakultas Agama Islam dengan konsentrasi jurusan Dakwah, dan memperoleh pengakuan dari Kementerian Agama Republik Indonesia.³⁶⁰ Hal ini menjadi momentum penting bagi Muhammadiyah dalam merekonstruksi institusi pendidikan yang berbasis komunitas dan terintegrasi dengan jaringan Muhammadiyah secara nasional. Dalam kerangka teori strukturasi Anthony Giddens, pendirian akademi ini merupakan hasil dari agensi

Hasilnya dari sekian banyak yang ikut tes, dinyatakan lulus sebanyak 28 orang. Pada 1 September 1964 dapat dimulai kuliah perdana di Akademi Kuliyatul Muballighien ini, di bawah kepemimpinan kolektif sebagai berikut Dekan Drs. Djam'an Shaleh, Wakil Dekan H. Haroun 'L Ma'any, Sekretaris Hasan Ahmad.

³⁵⁹ Hasan Ahmad. *Sejarah Ringkas Universitas Muhammadiyah Padang Panjang*. (Arsip Pribadi)

³⁶⁰ Sebagai gambaran umum saja, pasca tahun akademik 1986/1987 terjadi lagi perubahan nama kelembagaan, setelah dari Akademi Kuliyatul Muballighien menjadi Fakultas Ilmu Agama, menjadi Fakultas Ushuluddin dengan Jurusan Aqidah dan Filsafat dengan sistem SKS, sesuai dengan arahan Departemen Agama RI selaku pembina. Walaupun berubah nama dua kali, namun visi misinya tetap sama, karena Fakultas Ilmu Agama Jurusan Dakwan telah tercatat dalam sejarah pendidikan Muhammadiyah di Sumatera Barat, melanjutkan kevakuman Fakultas Falsafah dan Hukum yang diresmikan 18 November 1955. Artinya, Akademi Kuliyatul Muballighien dan Fakultas Ilmu Agama tetap konsisten berupaya mengembangkan kehidupan kampus yang Islami dalam rangka menciptakan kader da'i dan ulama di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah seperti yang telah berhasil dicapai waktu Kuliyatul Muballighien pada tahun 1940-an dan 1950-an.

Muhammadiyah yang secara aktif mereproduksi dan merevitalisasi struktur sosial yang sempat terhenti.³⁶¹

Muhammadiyah kemudian memperluas cakupan pendidikannya dengan mendirikan Fakultas Adab di Kota Padang pada 1965, yang membuka dua jurusan yaitu Bahasa Arab dan Bahasa Inggris. Pendirian fakultas ini dilandasi oleh kebutuhan penguasaan bahasa dalam pengembangan dakwah dan studi Islam modern. Meskipun fakultas ini kemudian mengalami stagnasi dan kesulitan dalam aspek manajemen, pendirian awalnya merupakan bagian dari upaya Muhammadiyah dalam membangun pendidikan yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan global.

Setelah dibuka Fakultas Ilmu Agama di Padang Panjang dan Akademi Niaga di Bukittinggi, Muhammadiyah mulai berpikir untuk pemerataan lokasi amal usaha dalam bidang pendidikan tinggi di kota-kota Sumatera Barat, maka mulai dipersiapkan membuka sebuah Fakultas di bawah lingkungan Universitas Muhammadiyah di Kota Padang. Setelah melalui usaha dan kerja kolektif di bawah koordinasi Ketua Pimpinan Muhammadiyah Daerah Sumatera Barat Drs. Djam'an Shaleh yang juga merangkap sebagai Rektor. Pada 1 Agustus 1965 untuk pertama kali berhasil dibuka Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Kota Padang dengan nama Fakultas Adab yang membuka dua jurusan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris.³⁶²

Mahasiswa Fakultas Adab ini jumlah besar berasal dari guru-guru umum atau agama di SLTP dan SLTA di Kota Padang. Setelah melalui testing penerimaan,

³⁶¹ Sebagai tanda kesyukuran atas eksisnya kembali Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Sumatera Barat, dengan berdirinya Akademi Kuliyatul Muballighien, bertepatan peringatan Milad Muhammadiyah ke-52 tanggal 18 November 1964 diadakan upacara peresmian dengan kuliah umum oleh Prof. Dr. Zakiah Darajat, dari Direktorat Perguruan Tinggi Agama Departemen Agama R.I.

³⁶² Fakultas ini disahkan berdirinya berdasarkan Surat Keputusan Majelis Ilmiah dan Pendidikan Tinggi PP. Muhammadiyah No. D.02/SP-TDF/MIPTI/66 tanggal 10 Desember 1966. Fakultas ini dipimpin Dekan Drs. Nur Anas Jamil, Pembantu Dekan Moh. Noerman, Ketua Jurusan Bahasa Arab Moh. Noerman, Ketua Jurusan Bahasa Inggris Drs. Naziruddin, MA. Sedangkan untuk pengelolaan administrasi ditunjuk dua orang tenaga muda atau kader persyarikatan yang energik, yaitu Azmi, BA dan Mardjusman, BA. Kedua tenaga Administratif ini sekaligus membantu kegiatan administrasi Kantor Universitas Muhammadiyah yang baru dipindahkan dari Padang Panjang ke Padang. Lihat Hasan Ahmad. *Sejarah Ringkas Universitas Muhammadiyah Padang Panjang*. (Arsip Pribadi)

berhasil lulus sebanyak 88 orang sebagai mahasiswa pertama untuk kedua jurusan tersebut (Bahasa Arab dan Bahasa Inggris).

Pada awalnya semua komponen bersemangat baik Jurusan Bahasa Inggris maupun Bahasa Arab, termasuk yang berusia di atas 50 tahun seperti Ketua Senat Ali Rahman. Meskipun perkuliahan yang dipusatkan di lantai dua Masjid Raya Muhammadiyah itu sampai pukul 21.00 malam, tetap saja ramai diikuti dengan semangat. Bahkan kadang-kadang karena listrik sering mati, atas kesepakatan dengari dosen kuliahpun dilanjutkan dengan pasang lilin. Namun tanpa disadari, situasi itu berubah tiba-tiba. Semangat yang tadinya menggebu-gebu menghilang drastis. Aktivitas perkuliahan menurun secara perlahan, kampus lesu seperti bayi kekurangan gizi, pucat tak bertumbuh secara normal. Akhirnya perkembangan fakultas ini seperti kerakap di atas batu, hidup segan mati tak mau.³⁶³

Perkembangan yang kurang mengembirakan ini ternyata sangat dipengaruhi faktor manajemen yang kurang stabil, karena Dekan Drs. Nur Anas Jamil yang baru saja mulai berkonsentrasi melaksanakan tugas sebagai pimpinan tertinggi, dipromosikan sebagai Pimpinan Fakultas Keguruan Sastra dan Seni IKIP di Bukittinggi. Sementara Buya Moh Noerman sebagai Pembantu Dekan dan Ketua Jurusan juga punya kesibukan rutin mengelola toko buku milik sendiri di samping sebagai dosen tetap Bahasa Arab di IAIN Imam Bonjol Padang. Kondisi manajemen yang tidak normal ini berdampak terhadap semangat mahasiswa, sehingga jumlah yang aktif kuliah makin lama makin menyusut bahkan tinggal beberapa orang saja terutama Jurusan Bahasa Inggris. Akhirnya, fakultas ini mengalami koma dan mati suri ditinggalkan dokter yang merawatnya.³⁶⁴

Melihat kondisi yang dialami Fakultas Adab di Padang sangat memprihatinkan, karena mulai vakum tidak ada kegiatan sementara isu kelangkaan ulama di Minangkabau semakin marak dan merisaukan terutama di nagari-nagari, karena sempat diberitakan bahwa telah terjadi di sebuah masjid nagari jamaah Jumatnya terpaksa bubar karena tidak ada Imam dan yang berkhotbah. Apalagi dikaitkan dengan filosofi adat Minang yang terkenal dengan “*Syarak Mangato-Adat Mamakai*”.

³⁶³ Hasan Ahmad. *Sejarah Ringkas Universitas Muhammadiyah Padang Panjang*. (Arsip Pribadi)

³⁶⁴ Hasan Ahmad. *Sejarah Ringkas Universitas Muhammadiyah Padang Panjang*. (Arsip Pribadi)

Situasi itu menjadi renungan Buya H. Darwas Idris selaku Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Muhammadiyah Sumatera Barat, sehingga beliau menangkap peluang itu dengan pertimbangan utama untuk mengatasi kelangkaan ulama di Minangkabau itu. Pada akhir 1966 melalui Pimpinan Muhammadiyah Daerah Sumatera Barat diusulkan kepada Pimpinan Pusat agar di Padang dapat didirikan Fakultas Syari'ah dalam rangka memenuhi hajat masyarakat agar ada pendidikan kader ulama yang mahir dalam Bahasa Arab dan Hukum Islam.³⁶⁵

Kepada peserta Musyawarah Wilayah diminta untuk menyebarluaskan informasi tersebut dan mengarahkan putra-putrinya untuk masuk fakultas yang baru tersebut. Adapun mahasiswa pertama yang dijadikan basis untuk fakultas Syari'ah ini berasal dari seluruh eks mahasiswa Jurusan Bahasa Arab Fakultas Adab yang telah ditutup. Banyak peserta Musyawarah Wilayah yang menyatakan rasa syukurnya atas inisiatif Buya H. Darwas Idris, karena dianggap sebuah terobosan dan momentum yang monumental tepat waktu untuk menjawab permasalahan penting dan mendasar yang menyangkut jati diri Minangkabau yang terkenal sebagai ranah yang kuat agama dan adatnya. Tetapi kenyataannya ulama yang selama ini disebut-sebut sebagai "*Suluah bendang dalam Nagari*" itu benar yang dirasakan mulai berkurang dan hilang kesakralannya secara beransur-ansur. Sehingga, kehadiran Fakultas Syari'ah ini dapat menjadi "*sitawa sidingin*" dalam mengatasi kelangkaan ulama yang dirasakan hampir setiap nagari di Minangkabau saat itu.

Perkembangan lebih signifikan terjadi dengan berdirinya Fakultas Syari'ah di Padang pada akhir 1966. Fakultas ini didirikan untuk merespons kelangkaan ulama dan kebutuhan tenaga ahli di bidang hukum Islam yang semakin mendesak. Fakultas Syari'ah menjadi salah satu lembaga favorit yang menarik minat mahasiswa dari berbagai wilayah di Sumatera dan luar daerah. Muhammadiyah

³⁶⁵ Sehingga dengan cepat Pimpinan Pusat merespons usulan tersebut dengan mengeluarkan Surat Keputusan No. D.02/Sp-Tdf/Mipti/66 tanggal 10 Desember 1966. Tentang Pengesahan berdirinya Fakultas Syari'ah di Padang (disamakan dengan nomor SK penetapan Fakultas Adab), Kemudian pada waktu berlangsungnya Musyawarah Wilayah Majelis Tarjih Muhammadiyah Sumatera Barat tanggal 27 April 1967 di Padang diadakan sosialisasi nama Fakultas Syari'ah sebagai pelanjut dan pengganti Fakultas Adab yang tidak dapat lagi diteruskan. Lihat Hasan Ahmad. *Sejarah Ringkas Universitas Muhammadiyah Padang Panjang*. (Arsip Pribadi).

dalam hal ini memanfaatkan masjid dan jaringan sosial sebagai basis pengembangan pendidikan.

Fakultas yang berkampus di lantai dua Masjid Raya Muhammadiyah Jalan Bundo Kandung No. 1 Padang ini ternyata memang termasuk fakultas favorit di samping Fakultas Ilmu Agama jurusan Dakwah di Padang Panjang, sehingga lima tahun pertama dibanjiri mahasiswa yang berdatangan tidak saja dari Kabupaten atau Kota di Sumatera Barat, tetapi juga dari Provinsi Sumatera Utara, Jambi, Riau, dan Bengkulu. Seiring dengan penambahan jumlah mahasiswa hingga lima ratus orang lebih, fakultas ini juga berhasil mencatat beberapa reputasi yang cukup mengembirakan antara lain, pertama bersamaan dengan Fakultas Ilmu Agama jurusan Dakwah di Padang Panjang mendapat pengakuan berdasar SK Menteri Agama RI No. 18 tanggal 1 Februari 1968 yang menyatakan bahwa ijazah Sarjana Muda (*Bakaloreat*) diakui sama dengan Ijazah Sarjana Muda IAIN dalam hal ini Fakultas Syari'ah. Kedua pada 1971 melalui kerja sama dengan Departemen Agama Republik Indonesia diperbantukan seorang dosen bahasa arab bernama Abdel Mun'em Rasywan dari Mesir. Ketiga, mulai 1971 itu juga atas perjuangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jakarta, tiga orang alumni Sarjana Muda Fakultas ini diterima untuk melanjutkan studinya di Universitas Timur Tengah, yaitu Anhar Burhanuddin dan Djasman Abd. Rahman di University Al-Azhar Mesir. Sementara Fachri Bais di Universitas Madinah. Kemudian disusul pada tahun kedua Mursal ke negeri Belanda dan Nasrun Haroen serta Muslim Hamid ke Syria.

Reputasi lainnya, yaitu setelah pelantikan Sarjana Muda oleh Rektor Drs. Djam'an Shaleh, tanggal 16 Juli 1970, ketika itu belum dikenal istilah Wisuda, apalagi pakai toga warna hitam seperti sekarang. Pelantikan oleh Rektor hanya dilakukan di sebuah aula kecil dengan fasilitas terbatas dan dihadiri oleh para dosen dan undangan terbatas pula. Setelah beberapa hari sesudah pelantikan, para alumni yang baru dilantik sebanyak Sembilan orang itu sepakat menyampaikan permohonan kepada Pimpinan Universitas untuk membuka program tingkat lanjutan, sehingga para alumninya bisa memperoleh gelar Doktorandus. Permohonan itu mendapat respons yang positif baik oleh Rektor maupun oleh Dekan dan dosen-dosen senior. Dalam arti permohonan itu dikabulkan dan

Pimpinan Universitas segera melakukan konsultasi dengan Direktorat Perguruan Tinggi Islam di Jakarta.³⁶⁶

Dalam perspektif teori tindakan komunikatif Jurgen Habermas, pendirian Fakultas Syari'ah menjadi cerminan dialog sosial yang produktif dalam Muhammadiyah. Muhammadiyah membangun ruang deliberatif yang memungkinkan terbentuknya konsensus sosial melalui diskusi yang rasional dan terbuka. Konsensus yang tercipta tidak hanya berasal dari keputusan elite, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat luas.

Selain itu, Muhammadiyah juga mendirikan Fakultas Niaga di Bukittinggi, yang pada awalnya dibuka sebagai Akademi Niaga Muhammadiyah. Fakultas ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan ekonomi dan manajemen, guna memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja yang berkembang pesat pada masa itu. Muhammadiyah membangun kemitraan dengan Universitas Andalas untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memperkuat jaringan dosen yang berkualitas.

Perkembangan berikutnya, di kalangan Pimpinan Muhammadiyah Daerah Bukittinggi juga muncul keinginan untuk membuka Akademi Niaga Muhammadiyah. Rencana ini mendapat dukungan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat. Untuk menyiapkan perlengkapan yang diperlukan seperti kursi, meja, dan lain-lain dibantu biayanya oleh seorang simpatisan yang kebetulan sedang menjabat Pimpinan Bank Nasional Bukittinggi yaitu M. Navis, disokong para dermawan Bukittinggi lainnya. Melihat kesiapan dan keseriusan itu minat calon mahasiswa pertama pun cukup tinggi sampai berjumlah sebanyak 64 orang. Untuk merespons semua dukungan itu pada 20 Desember

³⁶⁶ Lihat Hasan Ahmad. *Sejarah Ringkas Universitas Muhammadiyah Padang Panjang*. (Arsip Pribadi). Setelah mendapat lampu hijau, meskipun surat izin resmi belum keluar, namun karena begitu antusiasnya mahasiswa, aktivitas perkuliahan telah dimulai. Beberapa bulan setelah perkuliahan dimulai diadakan evaluasi, ternyata pada awalnya jumlah mahasiswa yang aktif masih memadai. Namun, setelah beberapa saat kemudian yang berhasil menyelesaikan sampai ke tingkat Ujian Negara Sarjana lokal, hanya tiga orang saja. Ketiga Sarjana ini, yaitu Syahril Nurullah, Ruzham Lubis, dan M. Husin Samah. Semuanya berhasil diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, masing-masing Drs. Syahril Nurullah di IAIN Raden Intan Bandar Lampung, Drs. Ruzham Lubis Zamachsyari di BKKBN Medan Sumatera Utara dan Drs. M. Husini Samnah di Pengadilan Agama Padang. Mereka dibenarkan memakai gelar kesarjanaan (Drs) di depan namanya, namun tidak ada efeknya terhadap kenaikan pangkat dan gaji sebagai PNS. Yang jelas ini sebuah penghargaan dari bukti kegigihan kader Muhammadiyah dalam menuntut ilmu untuk meraih prestasi

1964 bertempat di gedung Nasional Bukittinggi diadakanlah upacara peresmian Akademi Niaga Muhammadiyah tersebut.³⁶⁷

Namun, tidak semua fakultas yang didirikan berhasil bertahan dalam jangka panjang. Fakultas Adab dan Fakultas Niaga pada akhirnya mengalami penurunan signifikan dalam hal jumlah mahasiswa dan kualitas pengelolaan. Dalam teori sistem Talcott Parsons, kegagalan fakultas-fakultas ini dapat dilihat sebagai kegagalan fungsi adaptasi dan integrasi. Fakultas-fakultas tersebut tidak mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan eksternal dan internal secara optimal.

Dalam rangka menyambut peningkatan status itu, agar mutu dan kualitas proses pembelajaran, terutama dalam bidang pendidikan, pengajaran, dan penelitian serta pengabdian masyarakat, diadakan kerja sama dengan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Kerja sama ini pun mendapat sambutan dan dukungan positif dari pimpinan Fakultas Ekonomi Unand. Sebagai realisasinya, Fakultas Ekonomi Unand menunjuk Drs. Sjamsuddin Munir selaku Ketua Tim Affiliasi. Ketua Tim juga sangat proaktif dalam memberikan bimbingan dan fasilitas yang diperlukan, sehingga setelah melalui proses sesuai prosedur yang berlaku, tanggal 29 Agustus 1967³⁶⁸

Sebaliknya, Fakultas Syari'ah dan Fakultas Agama Islam mampu bertahan dan terus berkembang. Faktor kunci keberhasilan ini terletak pada dukungan sosial yang kuat, kemampuan integrasi jaringan, dan manajemen organisasi yang relatif

³⁶⁷ Lihat Hasan Ahmad. *Sejarah Ringkas Universitas Muhammadiyah Padang Panjang*. (Arsip Pribadi). Setelah kegiatan operasional berjalan lebih kurang satu tahun, sesuai dengan kebijaksanaan PP Muhammadiyah Majelis Pendidikan dan Pengajaran, Majelis Ilmiah dan Perguruan Tinggi (MIPTI) dan Rektor Induk di Jakarta, dengan Surat Keputusan MIPTI No. D.02/SP-Taf/MIPTI/65, tertanggal 10 Desember 1965, Akademi Niaga Muhammadiyah Bukittinggi ini ditingkatkan statusnya menjadi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Cabang Sumatera Barat. Dengan pimpinan Dekan Drs. Burhan Rasyid dan Pembantu Dekan Drs. Muhammad Nazir.

³⁶⁸ Berdasarkan Surat Keputusan Ditjen PTIP No. 68h/B.Swt/P/67 Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah ini dinyatakan bahwa terhitung tanggal 1 Agustus 1967 diakui sebagai Perguruan Tinggi Swasta terdaftar. Adapun pimpinannya terdiri dari Dekan Drs. Burhan Rasyid dan Pembantu Dekan/Sekretaris Drs. Fahmi Rasyad. Pimpinan Fakultas secara kolektif terus bekerja keras dan berusaha mengembangkan Fakultas yang berstatus terdaftar ini dengan harapan lebih maju dan berkembang sebagaimana yang dicita-citakan. Sayang di saat kerja keras yang didukung kebersamaan itu berlangsung sangat harmonis, Allah SWT memanggil hamba-Nya Drs. Burhan Rasyid (Dekan) kembali kehadirat-Nya. Walaupun dalam suasana duka yang dalam, karena musibah itu terasa datang begitu cepat, namun kerja keras untuk mengayomi fakultas yang baru ini tetap diupayakan dan untuk melanjutkan kepemimpinan ditunjuk Drs. Fahmi Rasyad selaku pejabat Dekan, dibantu oleh Drs. Sjamsuddin Munir. Lihat Hasan Ahmad. *Sejarah Ringkas Universitas Muhammadiyah Padang Panjang*. (Arsip Pribadi).

stabil. Agensi Muhammadiyah di Sumatera Barat berhasil mempertahankan fungsi pendidikan sebagai bagian dari sistem sosial yang terus mereproduksi nilai-nilai Islam modern.

Dari sisi teoritis, keberhasilan dan kegagalan berbagai fakultas ini menunjukkan bagaimana Muhammadiyah melakukan refleksi kritis atas pengalaman masa lalu. Agensi Muhammadiyah membentuk kembali norma dan struktur pendidikan melalui praktik sosial yang fleksibel dan adaptif. Dalam analisis Habermas, keberhasilan Muhammadiyah dalam mempertahankan fakultas tertentu menunjukkan keberhasilan dalam membangun komunikasi rasional yang menghasilkan konsensus jangka panjang.

Dengan demikian, pendirian berbagai akademi dan fakultas dalam fase ini memperlihatkan kompleksitas dinamika sosial dalam Muhammadiyah. Faktor struktur, agensi, komunikasi sosial, dan dukungan komunitas menjadi elemen kunci dalam menentukan keberlanjutan institusi pendidikan. Muhammadiyah berhasil menunjukkan bahwa meskipun tidak semua fakultas bertahan, proses konsensus dan pembelajaran sosial terus berlangsung dalam jaringan Muhammadiyah Sumatera Barat.

5.6 Konsensus sebagai Produk Strukturasi: Narasi, Kompromi dan Kontrak Sosial

Konsensus yang terbentuk dalam proses pendirian dan pengembangan Universitas Muhammadiyah di Padang Panjang adalah hasil dari proses strukturasi yang kompleks dan dinamis. Muhammadiyah tidak hanya berperan sebagai pelaku institusional, tetapi juga sebagai komunitas sosial yang mampu memproduksi dan mereproduksi struktur pendidikan Islam modern yang adaptif dan kontekstual. Konsensus ini tidak lahir secara instan, melainkan merupakan akumulasi dari serangkaian musyawarah, negosiasi, dan kompromi yang berlangsung selama beberapa dekade.

Dalam perspektif teori strukturasi Anthony Giddens, konsensus yang tercipta adalah produk dari relasi dialektis antara agensi dan struktur. Muhammadiyah sebagai agensi sosial secara aktif membentuk struktur baru yang memungkinkan

terjadinya perubahan signifikan dalam dunia pendidikan. Struktur Muhammadiyah yang semula terpusat pada pendidikan menengah berhasil dikembangkan ke tingkat perguruan tinggi melalui praktik sosial yang konsisten dan terorganisasi. Konsensus ini tidak hanya sekadar keputusan administratif, tetapi juga merupakan hasil dari pembentukan narasi kolektif yang mengikat semua pihak dalam kontrak sosial yang tidak tertulis. Narasi perjuangan pendidikan Muhammadiyah menjadi dasar legitimasi sosial yang menggerakkan kader dan masyarakat untuk terlibat aktif dalam setiap fase pendirian akademi dan fakultas.

Kompromi menjadi bagian integral dalam proses pembentukan konsensus ini. Muhammadiyah mampu mengelola perbedaan pendapat dan kepentingan yang muncul di antara struktur internal dan eksternal. Perbedaan antara kebutuhan pendidikan lokal dan tuntutan nasional diselesaikan melalui pendekatan musyawarah yang produktif. Muhammadiyah menunjukkan kematangan sosial dalam membangun kompromi yang sehat demi keberlangsungan institusi. Dalam perspektif teori sistem Talcott Parsons, keberhasilan Muhammadiyah dalam mencapai konsensus adalah contoh sukses dari integrasi sosial. Muhammadiyah mampu menjaga keseimbangan antara adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola dalam sistem sosialnya. Fakultas dan akademi yang berhasil bertahan seperti Fakultas Syari'ah dan Fakultas Agama Islam adalah bukti dari stabilitas sosial yang dicapai melalui konsensus yang matang.

Jurgen Habermas menekankan pentingnya komunikasi rasional dalam pembentukan konsensus yang otentik. Muhammadiyah Sumatera Barat berhasil memfasilitasi ruang publik yang memungkinkan diskusi dan negosiasi berlangsung secara terbuka dan inklusif. Keberhasilan konsensus ini tidak lepas dari praktik komunikasi yang menempatkan kejujuran, keterbukaan, dan keadilan sebagai prinsip utama dalam pengambilan keputusan.

Kontrak sosial yang terbentuk dalam Muhammadiyah Padang Panjang bersifat fleksibel dan berkembang seiring waktu. Konsensus yang dibangun tidak bersifat statis, melainkan terus diperbaharui melalui proses refleksi sosial yang berkelanjutan. Setiap perubahan struktur sosial dan tantangan eksternal selalu direspon dengan penyesuaian strategi yang memungkinkan kelangsungan institusi

pendidikan Muhammadiyah. Dalam praktiknya, narasi perjuangan pendidikan Muhammadiyah menjadi alat kohesi sosial yang efektif. Narasi ini tidak hanya diinternalisasi oleh kader dan pengurus Muhammadiyah, tetapi juga diterima oleh masyarakat luas sebagai bagian dari identitas kolektif mereka. Keberhasilan Muhammadiyah dalam membangun konsensus sosial menunjukkan bahwa pendidikan dapat menjadi alat pemersatu yang melampaui sekat-sekat ideologi dan kepentingan kelompok.

Dengan demikian, konsensus dalam Muhammadiyah Padang Panjang adalah hasil dari proses panjang yang melibatkan interaksi antara narasi, kompromi, dan kontrak sosial. Muhammadiyah membuktikan bahwa melalui komunikasi rasional, kesediaan berkompromi, dan penguatan nilai-nilai kolektif, konsensus dapat menjadi fondasi yang kuat bagi keberlanjutan lembaga pendidikan Islam modern di Indonesia.

BAB VI

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa pendirian Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Padang Panjang merupakan sebuah proses yang panjang, berliku, dan penuh dengan tantangan baik dari sisi internal maupun eksternal organisasi. Secara garis besar, ada lima temuan utama yang dapat disarikan dari penelitian ini.

Pertama, proses transisi dari sekolah ke Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Padang Panjang tidak berjalan secara linear dan cepat, melainkan mengalami stagnasi dan keterputusan dalam beberapa periode. Hal ini dipengaruhi oleh ketidakstabilan struktur kepemimpinan internal, perbedaan visi di kalangan elite Muhammadiyah, dan kurangnya sumber daya yang memadai.

Kedua, peran agensi individu seperti Buya Hamka, A. Malik Ahmad, dan tokoh-tokoh lokal Muhammadiyah terbukti menjadi faktor penting dalam mendorong perubahan. Namun demikian, agensi seringkali terhalang oleh struktur sosial-politik yang lebih besar, seperti intervensi pemerintah, keterbatasan finansial, serta resistensi budaya lokal terhadap pembaruan pendidikan.

Ketiga, faktor eksternal seperti kebijakan pendidikan pemerintah Orde Lama dan Orde Baru, dinamika politik nasional, serta perubahan regulasi pendidikan turut memengaruhi kecepatan dan pola transisi Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Padang Panjang. Dalam banyak temuan, perubahan kebijakan pemerintah menjadi tantangan berat yang harus dinegosiasikan oleh pengelola Muhammadiyah secara hati-hati.

Keempat, nilai-nilai organisasi Muhammadiyah yang bercorak modernis dan reformis terbukti menjadi kekuatan utama dalam menjaga kesinambungan dan semangat perjuangan, meskipun nilai-nilai tersebut harus senantiasa dinegosiasikan dengan realitas sosial setempat yang lebih tradisional. Sehingga, dalam banyak kesempatan, Muhammadiyah di Padang Panjang mampu menampilkan wajah yang adaptif tanpa kehilangan identitas ideologisnya.

Kelima, keterlibatan perempuan dan generasi muda dalam proses transisi pendidikan Muhammadiyah di Padang Panjang belum optimal. Keterbatasan

partisipasi ini menunjukkan masih adanya bias gender dan kesenjangan generasi dalam pengambilan keputusan, yang pada akhirnya berdampak pada lambatnya proses konsolidasi kelembagaan.

Dalam refleksi teoretis, penelitian ini menegaskan relevansi dan kebermanfaatan teori strukturasi Anthony Giddens dalam memahami dinamika sosial Muhammadiyah di Padang Panjang. Melalui konsep strukturasi, terlihat bagaimana struktur sosial dan agensi individu tidak berada dalam hubungan yang kaku, melainkan saling membentuk dan mereproduksi satu sama lain secara berkelanjutan. Proses pendirian Perguruan Tinggi Muhammadiyah merupakan hasil dari dialektika antara struktur yang mengatur (aturan organisasi, kebijakan pemerintah, norma sosial) dan agensi yang bertindak (tokoh Muhammadiyah, aktivis pendidikan, komunitas lokal). Struktur bukanlah sesuatu yang mengekang secara *absolut*, melainkan ruang yang dapat direproduksi dan diubah oleh agensi melalui praktik sosial yang reflektif dan strategis.

Selain itu, teori konsensus dari Talcott Parsons dan Jurgen Habermas juga menemukan momentumnya dalam studi ini. Muhammadiyah Padang Panjang mampu menjaga kelangsungan organisasinya melalui upaya konsensus yang dinamis, meskipun seringkali diwarnai dengan perbedaan pendapat dan konflik internal. Dialog, musyawarah, serta negosiasi berperan sentral dalam menyelesaikan perbedaan dan membangun kesepakatan bersama. Dalam konteks ini, Muhammadiyah berhasil menciptakan arena publik yang memungkinkan diskursus rasional dan inklusif, meski pada praktiknya masih terdapat batasan partisipasi dari kelompok marginal, seperti perempuan dan generasi muda. Konsensus yang tercapai bukanlah hasil dari paksaan atau dominasi sepihak, melainkan melalui proses deliberasi yang panjang dan reflektif.

Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi historiografi pendidikan Islam di Indonesia. Selama ini, historiografi pendidikan Islam cenderung menempatkan pendirian lembaga pendidikan sebagai hasil dari inisiatif tokoh-tokoh besar semata, dengan menekankan aspek heroisme, perjuangan, dan narasi tunggal yang cenderung mengabaikan dinamika sosial yang lebih kompleks. Disertasi ini justru menampilkan realitas yang lebih plural dan kontekstual. Proses pendirian Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Padang Panjang 1955-1985 tidak

semata-mata ditentukan oleh visi besar para tokoh, melainkan juga hasil dari kompromi, negosiasi, dan kadangkala ketegangan antara berbagai kepentingan yang ada. Historiografi pendidikan Islam perlu mengakomodasi perspektif yang lebih kritis dan reflektif, termasuk memerhatikan peran agensi-agensi kecil, jaringan lokal, serta konteks struktural yang sering terpinggirkan. Melalui pendekatan ini, penulisan sejarah pendidikan Islam dapat memberikan gambaran yang lebih utuh dan berimbang tentang bagaimana institusi-institusi pendidikan Islam berkembang di tengah tekanan sosial, politik, dan budaya.

Setiap penelitian tentu memiliki keterbatasan, demikian pula dengan studi ini. Pertama, penelitian ini lebih banyak mengandalkan sumber tertulis dan arsip institusi yang tersedia, sementara penggunaan metode sejarah lisan (*oral history*) masih terbatas. Hal ini menyebabkan kemungkinan terdapat narasi-narasi alternatif atau pengalaman individu yang belum terjangkau dalam penelitian ini. Kedua, cakupan temporal yang panjang (1955-1985) memberikan tantangan tersendiri dalam pengumpulan data secara mendetail untuk setiap periode. Beberapa periode tertentu tidak dapat dikaji secara lebih dalam karena keterbatasan sumber. Ketiga, penelitian ini cenderung berfokus pada konteks lokal Muhammadiyah Padang Panjang dan belum mengeksplorasi secara memadai jejaring nasional dan internasional Muhammadiyah yang mungkin berpengaruh dalam proses pendirian perguruan tinggi tersebut. Keempat, aspek partisipasi kelompok perempuan dan generasi muda diakui belum tergali secara optimal, baik dari sisi narasi maupun dari data empirik. Studi lebih lanjut dengan pendekatan yang lebih sensitif gender dan inklusif generasi sangat diperlukan.

Berdasarkan hasil penelitian dan refleksi yang telah diuraikan, ada beberapa rekomendasi yang dapat diajukan baik untuk pengembangan penelitian berikutnya maupun untuk penguatan kelembagaan Muhammadiyah.

Pertama, untuk pengembangan penelitian lebih lanjut, penting untuk memperluas pendekatan metodologis dengan mengintegrasikan sejarah lisan (*oral history*) secara lebih intensif. Melibatkan saksi-saksi sejarah yang masih hidup dapat memperkaya perspektif dan memberikan data yang lebih personal dan kontekstual. Kedua, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji jaringan Muhammadiyah dalam skala nasional dan internasional secara lebih komprehensif.

Hubungan Muhammadiyah Padang Panjang dengan pusat-pusat Muhammadiyah di Yogyakarta, Jakarta, dan kota-kota besar lainnya, serta keterkaitannya dengan gerakan Islam global dapat memberikan wawasan baru tentang dinamika kelembagaan. Ketiga, dalam praktik kelembagaan, Muhammadiyah disarankan untuk terus memperkuat budaya konsensus dan musyawarah dengan memperluas ruang partisipasi bagi kelompok perempuan dan generasi muda. Keterlibatan kedua kelompok tersebut secara lebih aktif akan memberikan warna baru dalam pengembangan kebijakan dan strategi organisasi. Keempat, penting bagi Muhammadiyah untuk membangun sistem dokumentasi sejarah yang lebih baik. Arsip yang tertata rapi dan terkelola dengan baik akan memudahkan generasi mendatang dalam memahami perjalanan institusi dan mengambil pelajaran dari masa lalu. Kelima, Muhammadiyah perlu memperkuat pendidikan kader yang mampu memadukan pemahaman keagamaan yang kuat dengan kemampuan manajerial dan sensitivitas sosial yang tinggi. Dengan demikian, transisi dan pengembangan kelembagaan Muhammadiyah di masa depan dapat berjalan lebih efektif, adaptif, dan inklusif.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan sumbangan bagi pengembangan historiografi pendidikan Islam, tetapi juga menjadi refleksi penting bagi Muhammadiyah dalam membangun kelembagaan yang responsif, berkelanjutan, dan selaras dengan dinamika sosial yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik dan Siddique, Sharon. *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES
- Abdullah, Taufik. 1967. *Minangkabau 1900-1927: Preliminary Studies in Social Development*. Ithaca: Cornell University \Taufik Abdullah. 1971. *Adat dan Islam: dalam Sejarah Minangkabau*. Jakarta: Pustaka Grafitipers
- Abdullah, Taufik. 1971. *Schools and Politics: The Kaum Muda Movement in West Sumatra 1927-1933*. Ithaca: Cornell SEAP
- Abdullah, Taufik. 1972. *Modernization in the Minangkabau World: West Sumatera in the Early Decades of the 20th Century*", dalam Claire Holt (ed), *Culture and Politics in Indonesia*. Ithaca New York: Cornell University Press
- Abdullah, Taufik. 1987. *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*. Jakarta: LP3ES
- Abidin, Mas'ood (et.al). 2005. *Ensiklopedi Minangkabau (Edisi Awal)*. Padang: Pusat Kajian Islam dan Minangkabau (PPIM)
- Ahmad, Abdoellah. 1914. *Titian Kesoerga: Kitab Oetsoeloe'ddin*. Padang: Snelpersdrukkerij "Almoenir"
- Ahmad, Hasan, *Sejarah Perguruan Muhammadiyah Kauman Padang Panjang*. Arsip Muhammadiyah Padang Panjang.
- Ahmad, Hasan. 1955. *Pembukaan Fakultas Falsafah dan Hukum*. Arsip Pribadi.
- Alfian. 1989. *Muhammadiyah: The Political Behavior of a Muslim Modernist Organization under Dutch Colonialism*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Alfian. 2010. *Politik Kaum Modernis: Perlawanan Muhammadiyah terhadap Kolonial Belanda*. Jakarta: Al-Wasath Publishing House
- Algemeen Rijksarchief (ARA). "*Rapport van den Gouverneur Van Swieten*". Verbaal 15 Juni 1852, No. 3.
- Algemeen Rijksarchief (ARA). "*Rapport van den Generaal de Stuers*", Verbaal, 23 Oktober 1826, No. 48.
- Algemeen Rijksarchief (ARA). *Verbaal* 15 Juni 1852
- Algemeen Rijksarchief (ARA). *Verbaal*, 16 November 1865, No. 45.
- Algemeen Rijksarchief (ARA). *Verbaal*, 24 Maret 1902, No. 19.
- Algemeen Rijksarchief (ARA). *Verbaal*. 7 September 1910. No. 32.
- Algemeen Verslag 1906. *van Het Inlandsch Onderwijs*, Loopende over bet Jaar
- Ali, Mukti. 1957. *Liberalism and Islam in Indonesia*. Montreal: Institute of Islamic Studies McGill University

- Altbach, Philip G. and Kelly, Gail P. 1978. *Education and Colonialisme*. New York: Longman
- Amrullah, Haji Abdul Karim, *Sendi Aman Tiang Selamat*, Sungai Batang, 1340 H, Jilid 1
- Anckeveen, G. de Wal van. 1911. "Maleische Democratie en Padangsche Toestanden" *Adatrechtbundels* edisi 1
- Archer, R.L. 1937. "Muhammadan Mysticism in Sumatra", *JMBRAS*, 15 September, Bagian 2
- Arsip Muhammadiyah Sumatera Barat, *Dokumen Pengelolaan Pendidikan Muhammadiyah 1925-1935*.
- Arsip Muhammadiyah Sumatera Barat, Notulen Rapat Muhammadiyah 1925-1935.
- Arsip Muhammadiyah Sumatera Barat. *Amal Bakti Muhammadiyah Sumatera Barat 1925-1965*.
- Arsip Nasional Republik Indonesia, *Besluit* H.B. No. 36 tanggal 20 Juli 1927, Nomor Arsip 3168
- Arsip Nasional Republik Indonesia, *Inventaris Arsip Muhammadiyah 1922-2001*, Jakarta, 2016, Nomor Arsip 3348.
- Arx, Alexandre von. 1949. *L'évolution politique en Indonésie de 1900 à 1942*, Fribourg, n.p.,
- Asmara, Dedi. 2016. "Muhammadiyah Wilayah Sumatra Barat (1925-1950)". *Jurnal Analisis Sejarah*, Vol. 5, No. 1
- Asnan, Gusti. 2007. *Memikir Ulang Regionalisme: Sumatera Barat tahun 1950-an*. Padang: UNP Press
- Azra, Azyumardi. 2007. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*. Jakarta: Kencana
- Berg, Van den, *Het godsdienstonderwijs, serta Voo hoeve*, Handlist of arabic manuscripts
- Berita Tahunan Muhammadiyah Hindia Timoer 1927*
- Besluiten van den Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indie 20 den July 1927 No. 36.
- Besluiten van den Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indie 22 den Augustus 1914 No. 81.
- Bickmore, *Travels in the East Indian Archipelago*, 402.
- Boekoe Peringatan Diniyah School Poetri, Padang Panjang* tahun 1938 dan Jeanne Cuisinier. 1955. *Les Madrasahs Feminines de Minangkabau* dalam *Revue des Etudes Islamiques* XXIII
- Brugmans, I.J. 1938. *Geschiedenis van het Onderwijs in Nederland Sch-Indië*. Batavia: J. B. Wolters' Uitgevers Maatschappij N.V. Groningen

- Buys, M. 1886. *Twee Jaren op Sumatra's Westkust*. Amsterdam: Akkeringan
- Colombijn, Freek. 1995. "The Colonial Municipal Council in Padang (Sumatra) as Political Arena", *Journal of Southeast Asian Studies*, Vol. 26, No. 2
- Djamal, Murni. 2002. *Dr. H. Abdul Karim Amrullah: Pengaruhnya dalam Gerakan Pembaruan di Minangkabau pada Awal Abad ke-20*. Leiden-Jakarta: INIS,
- Dobbin, Christine. 1983. *Islamic Revivalism in a Changing Peasant Economy: Central Sumatra, 1784-1847*. London: Curzon Press
- Frederick, William H. dan Soeroto, Soeri. 1991. *Pemahaman Sejarah Indonesia: Sebelum dan Sesudah Revolusi*. Jakarta: LP3ES
- Giddens, Anthony. 1984. *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. Cambridge: Polity Press
- Gottschalk, Louis. 1985. *Mengerti Sejarah*. (diterjemahkan oleh Nugroho Notosusanto), Jakarta: UI-Press
- Graves, E. 1981. *The Minangkabau Response to Dutch Colonial Rule in the Nineteenth Century*. Ithaca, New York: Monograph Series Cornell Modern Indonesia Project
- Habermas, Jurgen. 1984. *The Theory of Communicative Action*. Boston: Beacon Press
- Hadler, Jeffrey. 2010. *Sengketa Tiada Putus: Matriarkat, Reformisme Islam, dan Kolonialisme di Minangkabau*. Jakarta: Freedom Institute
- Hamka, 1982. *Ayahku*. Jakarta: Umminda
- Hamka. 1951. *Kenang-kenangan Hidup 1: Dimasa Ketjil*. Djakarta: Gapura.
- Hamka. 1967. *Ayahku: Riwayat Hidup Dr. H. Abdul Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama*. Jakarta: Penerbit Wijaya, hlm. 8-83.
- Hamka. 2018. *Islam Revolusi dan Ideologi*. Jakarta: Gema Insani
- Harahap, Basyral Hamidi. 1979. *103 Tahun Wafatnya Willem Iskandar. Tokoh Pendidikan dan Sastrawan Indonesia*. Jakarta: Panitia Peringatan 103 Tahun Wafatnya Willem Iskandar.
- Hasselmann, C.J. 1901. "Het Palladium. Een Koloniaal Historische Dwaling", *De Gids*. IV
- Hazeu, *Sarikat Islam Congres*. 17-24 Juni 1916
- Herman. 1868. *Het Onderwys in Nederlandsch-Indie (Historisch Overzicht Sedert 1816)*
- Hurgronje, C. Snouck, "Een en Ander over het Inlandsch Onderwijs in de Padangsche Bovenlanden", *Bijdragen tot de Taal-, Land-, en Volkenkunde*, volume khusus Kongres Orientalis (1883): 57-84.
- Hurgronje, C. Snouck, *Adviézen 11,1541-1555 dan 11, 1615-1761*.
- Jaya, Tamar. 1965. *Pusaka Indonesia*. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang

- Joustra, M. 1926. *Batakspiegel*. Leiden: S.C. van Dusburg
- Kahin, Audrey. 2008. *Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatra Barat dan Politik Indonesia 1926-1998*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Kahin, George McTurnan. 2013. *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*. Depok: Komunitas Bambu
- Kartodirdjo, Sartono. 1987. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900*. Jakarta: Gramedia
- Kartodirdjo, Sartono. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT. Gramedia
- Kayo, H.M.D. Datuk Palimo. Tanpa Tahun. *Sejarah Perguruan Thawalib Padangpanjang*. Padang: Yayasan Thawalib Padangpanjang
- Kusnadi. 1972. *Muhammadiyah in Brief*. Yogyakarta: Jamiat Muhammadiyah
- Lulofs, C. 1914. "Passar Inrichting en Pasarbeheer", *Tijdschrift van het Binnenlandsch Bestuur* 46, lampiran 4.
- Ma'aroef, M. N. Soetan. 1931. *Riwajat X Koto Manindjau*. Manindjau: Comité Pembangoenan Sekolah P. M. I.
- Maharadha, Datuk Sutan. 1917. "Kaoem Moeda Tahoen 1906", *Oetoesan Melajoe*, 22 Desember
- Mansur, A.R. Sutan, *Pergerakan Islam dan Muhammadiyah di Sumatra 1927-1928*
- Mansur, Dahlan et.al. 1970. *Sejarah Minangkabau*, Jakarta: Bharata
- Mardjohan. 2006. *Embrio Muhammadiyah Ada di Kauman Padangpanjang*. Padangpanjang: Peringatan 80 Tahun Perguruan Muhammadiyah Kauman Padangpanjang.
- Marihandono, Djoko (ed). 2015. *K.H. Ahamd Dahlan (1868-1923)*. Jakarta: Museum Kebangkitan Nasional
- Nahujis H.G. 1926. *Brieven over Bengcoolen, Padang, het Rijk van Minangkabau, Rhiouw, Sincapoera, en Poelo-Pinang*. Breda.
- Naim, Mochtar. 1979. *Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Nashir, Haedar. 2003. *Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah, Resistensi Modernisme*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah
- Nashir, Haedar. 2016. *Muhammadiyah Gerakan Pembaruan*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah
- Navis, A.A. 1996. *Filsafat dan Strategi Pendidikan M. Sjafei: Ruang Pendidik INS Kayutanam*. Jakarta: Grasindo
- Nawawi, Duski. 1960. "Perjuangan Dr. H. Abdul Karim Amrullah", *Hikmah* XIII No. 12
- Niel, Robert van. 1984. *Munculnya Elite Modern Indonesia*. Jakarta: Pustaka Jaya

- Noer, Deliar. 1963. *The Rise and Development of the Muslim Modernist Movement in Indonesia during the Dutch Colonial Period 1900-1942*. Cornell University
- Noer, Deliar. 1973. *The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-1942*. Singapura: Oxford University Press
- Noer, Deliar. 1987. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES
- Notosusanto, Nugroho. 1984. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer (Suatu Pengalaman)*. Jakarta: Inti Idayu Press
- Onghokham. 2014. *Runtuhnya Hindia Belanda*. Jakarta: PT Gramedia
- Parsons, Talcott. 1951. *The Social System*. New York: The Free Press
- Pistorius, A. W. P. Verkerk. 1871. *Studien Over de Inlandsche Huishouding in de Padangsche Bovenlanden*. Zalt- Bommel, Joh. Noman En Zoon
- Radjab, Mohammad. 1964. *Perang Paderi di Sumatera Barat (1803-1838)*. Jakarta: Balai Pustaka
- Rahardjo, M. Dawam (ed). 1955. *Pesantren dan Pembaharuan*. Jakarta: LP3ES
- Resink, G. J. 1968. *Indonesia s History Between the Myths*. The Hague: Martinus Nijhoff
- Rohanah, Siti (et.al). 2001. *Peranan Muhammadiyah dalam Sistem Pendidikan Islam di Padang Panjang Tahun 1950-1965*. Padang: Depdibud
- Rohman, Fandy Aprianto dan Mulyati. 2019. "Rintisan Awal Pendidikan Muhammadiyah di Sumatra Barat tahun 1925-1939", *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya* Vol. 5 No. 1
- Schricke, B. J. 1955. *Indonesian Sociological Studies*. Vol. I, Den Haag, Bandung: W. van Hoeve
- Scoot, W. Richard. 2008. *Institutions and Organizations Ideas, Interests, and Identities*. United States of America: SAGE Publications, Inc
- Sewell, William H. 1992. "A Theory of Structure: Duality, Agency, and Transformation". *American Journal of Sociology*, Vol. 98, No. 1
- Steenbrink, Karel A. 1994. *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen*. Jakarta: LP3ES
- Steinmetz, RE. 1924. "Indlansch Onderwijs van Overheidswege in de Padangsche Bovelanden voor 1850", TBG
- Stibbe, G. dan Spat, C. (ed). 1927. *Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie*. Leiden: Martinus Nijhoff - E.J. Brill
- Stroomberg, J. 2018. *Hindia Belanda 1930*. (Judul asli *Handbook of the Netherlands East-Indies 1930* diterjemahkan oleh Heri Apriyono). Yogyakarta: IRCiSoD, hlm. 78.

- Stueuers, Cora Vrede de. 1959. *L'emancipation de la Femme Indonesienne*, Paris
- Suara Muhammadiyah*, Arsip Edisi Tahun 1930-an.
- Sutherland, H.A. 1976. "De Javanese Priyayi en het Nederlandse Bestuur" dalam Symposium 3
- Tibi, Bassam. 1999. *Islam, Kebudayaan dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Tjaja Soematra*, 16 April 1927
- Tosh, J. 2015. *The Pursuit of History: Aims, Methods and New Directions in the Study of Modern History*. London: Routledge.
- Usman, Umar. "Mengenang Almarhum Syekh Muhammad Jamil Jambek", Hikmah IX No. 48
- Veer, Paul van 't. 1979. *Het Leven van Multatuli*. Amsterdam: Uitgeverij De Arbeiderspers
- Verslag "Moehammadijah" di Hindia Timoer, Tahoen X (Januari-Desember 1923), hlm. 90-91.
- Verslag van het Indlandsch Onderwijs in Sederlandsch Indie, 1866. Batavia: Landsdrukkerij
- Yunus, Mahmud. 1960. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Mahmudiyah
- Yunus, Mahmud. 1982. *Riwayat Hidup Prof. Dr. H. Mahmud Yunus: 10 Pebruari 1899 - 16 Januari 1982*. Jakarta: Hidakarya Agung.
- Zed, Mestika. 1983. *Melayu Kopidaun: Eksploitasi Kolonial dalam Sistem Tanam Paksa Kopi di Minangkabau Sumatera Barat (1847-1908)*, Universitas Indonesia.
- Zed, Mestika. 1989. *Kolonialisme, Pendidikan dan Munculnya Elit Minangkabau Modern: Sumatera Barat Abad 19*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional
- Zed, Mestika. 2009. *Kota Padang Tempo Doeloe Zaman Kolonial*. (Seri Manuskrip No. 4). Universitas Negeri Padang: Pusat Kajian Sosial Budaya dan Ekonomi Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Dr. H. Muhammadjah
FEMBUKAAN

Fakultas
FALSAFAH dan HUKUM
MUHAMMADIYAH

~~Denybit~~

PENGURUS
„FAKULTAS FALSAFAH dan HUKUM“ MUHAMMADIYAH
SUMATERA TENGAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH

PEMBUKAAN FAKULTAS
FALSAFAH dan HUKUM
MUHAMMADIYAH

Pengurus

„FAKULTAS FALSAFAH dan HUKUM” MUHAMMADIYAH
SUMATERA TENGAH

PIAGAM

Pada hari ini hari Jumat tanggal 18 November 1955
bertepatan dengan 3 Rabiul Akhir 1375

Mengingat piduan Kongres Muhammadiyah Seprenapat
Abad di Jakarta tahun 1936 dan setelah memperhatikan ke-
sanggupan Muhammadiyah Daerah Sumatera Tengah untuk
melaksanakan pendirian Fakultas yang Pertama dari Universi-
tas Muhammadiyah menjadipuna tinggi piduan Sidang Majelis
Jawari Muhammadiyah yang dikumpulkan di Padangjangan. Per-
longan pada tanggal 18 November dengan 22 Juli 1955 dan dengan
niat hendak membentuk manusia Muslim yang berpendidikan Uni-
versitas dan untuk mempertinggi tingkatan masyarakat maka:

DENGAN NAMA ALLAH

Kami Ketua Umum Pusat Pimpinan Muhammadiyah Indonesia me-
rasakan pendirian Universitas Muhammadiyah dengan Fakultas yang
pertama: **FAKULTAS FALSAFAH dan HUKUM**

bertempat di Padang Pandang.

Semoga Tuhan melindungi dan membantunya kepada segunng penduduknya.

(Siti Hita Lurah ini)

Pada tanggal 18/11/55

Gubernur Aceh dan Sumatera
Baru Tengah

Muhammad R. S.

Muhammad R. S. K.

Muhammad R. S.

Padang Pandang 18 Rabiul Akhir 1375

18 November 1955

Pusat Pimpinan Muhammadiyah Indonesia

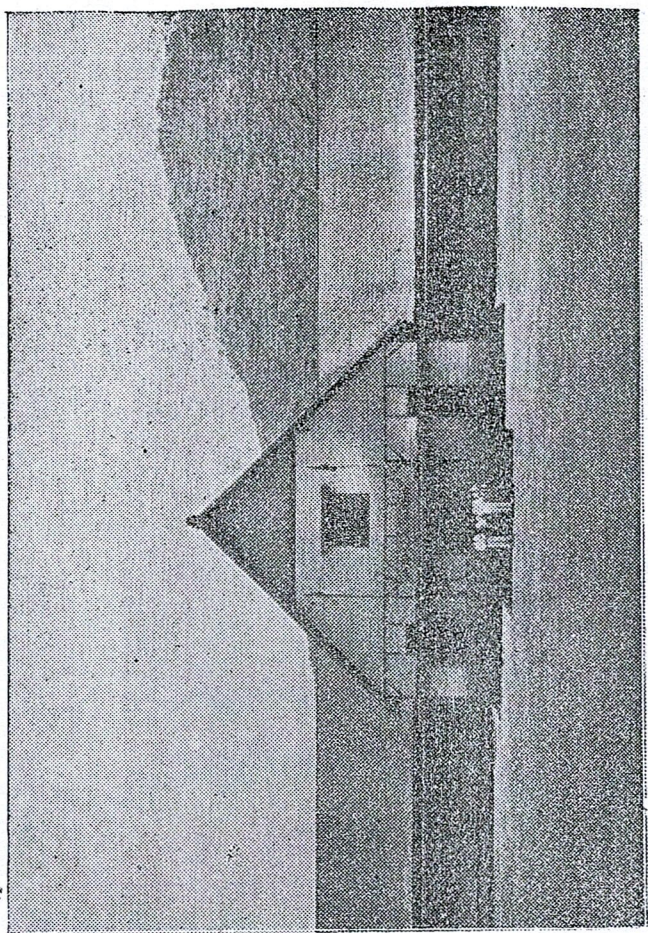
Ketua Umum

(A. P. H. Mansur)

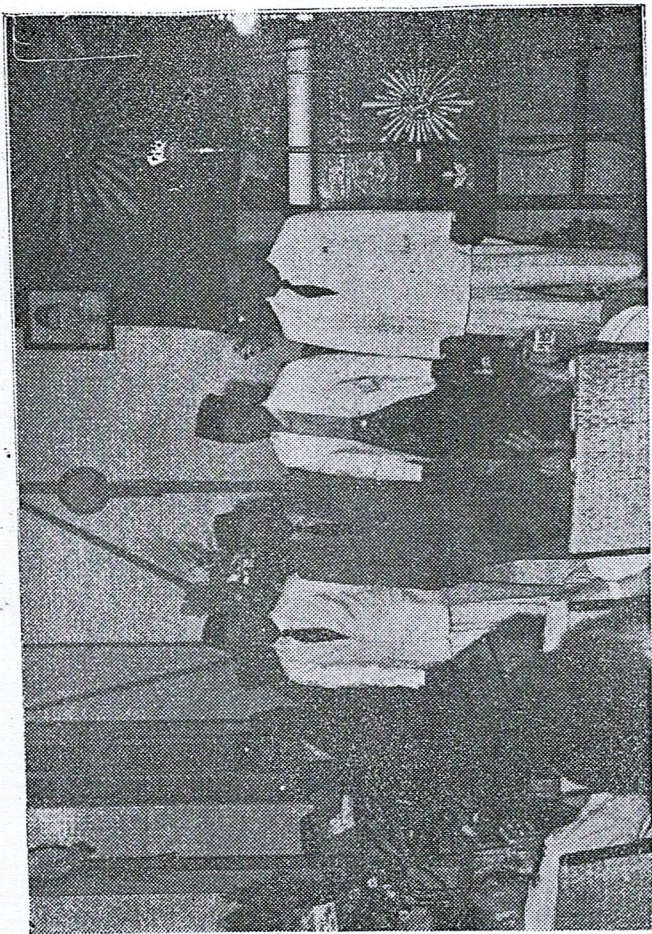
Ketua Persatuan P. M. Muhammadiyah
Daerah Sumatera Tengah

(A. J. H. Mansur)

PIAGAM Fakultas Falsafah dan Hukum dari
Universitas Muhammadiyah



Gedung Fakultas Falsafah dan Hukum Muhammadiyah dilihat dari depan.



Para Dosen sewaktu diperkenalkan kepada hadirin. Dari kiri kekanan : A. Hamid
Hakin, A.R. St. Mansur, Mr. Haroen Al Rasjid, H. Haroun El Ma'any
dan Hamka

PENGANTAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Assalamu'alaikum w.w.

Dengan penuh sjukur kehadhrat jang Maha Kuasa, dan dengan perasaan penuh gembira bahagia pada tanggal 18 Nopember 1955 tepat pada hari ulang tahun ke 43 dari Muhammadiyah, berlangsunglah upatjara peresmian Fakultas FALSAFAH dan HUKUM dalam rangkaian Universitas Muhammadiyah, bertempat di Aula Fakultas tsb. di Padangpandjang.

Upatjara mana merupakan satu peristiwa sedjarah jang mempunyai arti besar dalam langkah perdjalanannya Muhammadiyah chususnja, Islam umumnja dalam menudju tjita-tjita luhur.

Lebih besar kesjukuran kita lagi setelah memperhatikan bagaimana besarnya perhatian dan sambutan masyarakat terhadap lahirnja Fakultas kita ini.

Hal mana ternjata bahwa upatjara tersebut dikundjungi oleh jml. Menteri Agama, wakil jml. Menteri P.P. & K., Ketua Umum Pusat Pimpinan Muhammadiyah seluruh Indonesia beserta anggota² dan Ketua Madjelis Pengadjarannya, Dosen dari Perguruan² Tinggi jang berada di Sumatera Tengah, Gubernur Sumatera Tengah, Komandan Res. Inf. IV, Residen Sumatera Barat, Para Bupati dan Wali Kota, Wakil² Organisasi dan partai serta perseorangan dan ribuan utusan Tjabang dan ranting beserta keluarga Muhammadiyah.

Begitu pula tidak kurang dari 400 buah kawat² dan surat² utjapan selamat beserta karangan bunga, jang diterima diantaranya dari jml. Perdana Menteri, Menteri², Gubernur², Perwakilan² Muhammadiyah seluruh Indonesia, Ketua Umum Putjuk Pimpinan Masjumi dan lain²nja.

Demikianlah tepat pada djam 20.00 w.s.u. upatjara jang meriah ini dibuka dengan „nama Allah“ dibawah pimpinan sdr. Adam Saleh. selandjutnja oleh sdr. Abdullah M.S. Sekretaris Fakultas dibatjakan kawat², surat² serta karangan² bunga jang diterima.

Ber-turut² telah memberikan pidatonja H.A. Malik Ahmad Ketua Pembina Fakultas Falsafah dan Hukum, Sardjono Ketua P.P. Muhammadiyah Madjelis Pengadjaran, pidato Inuguratie Dewan Presidium jang dutjapkan oleh Hamka, terachir kata amanat dari Buja A.R. St. Mansur Ketua Umum Pusat Pimpinan Muhammadiyah Indonesia.

Selaku puntjak dari upatjara tsb., dilakukanlah penanda tanganan Piagam dengan suasana penuh chidmat ber-turut² oleh :

1. A.R. St. Mansur, Ketua Umum Pusat Pimpinan Muhammadiyah.
2. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Tengah.
3. Jml. Menteri Agama, K.H. Iljas.
4. Jml. Menteri P.P. & K., diwakili oleh Prof. M. Sjaaf.
5. S.J. St. Mangkuto, Ketua Perwakilan P.P. Muhammadiyah Sumatera Tengah.
6. Orang tua Muhammadiyah.

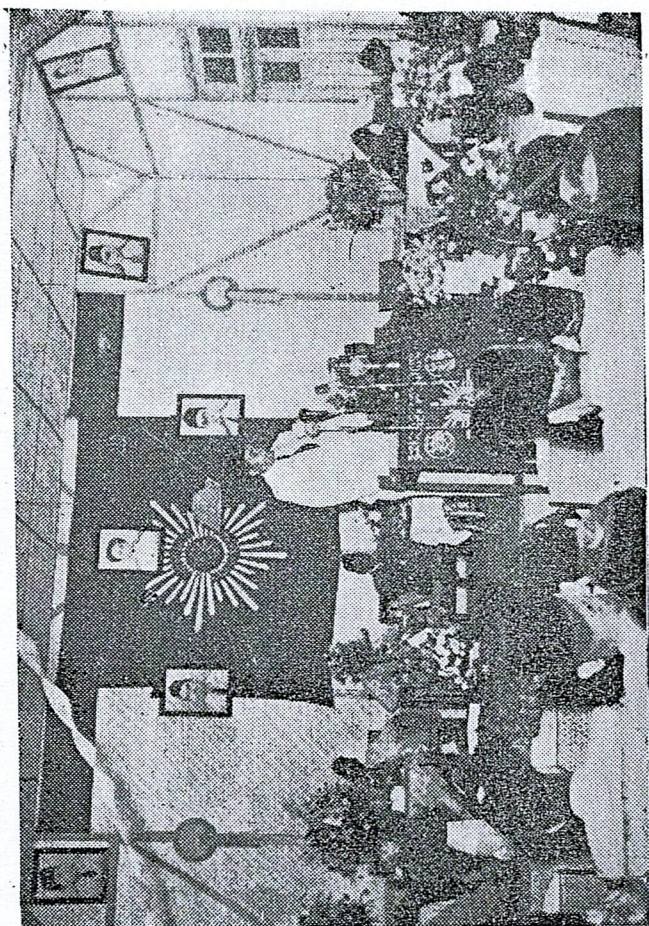
Waktu djedah, para Mahasiswa diperkenalkan kepada para Dosen jang hadir.

Selandjutnja kata sambutan diberikan oleh jml. Menteri Agama K.H. Iljas, jml. Menteri P.P. & K. jang diwakili oleh Prof. M. Sjaaf, Gubernur Sumatera Tengah jang diwakili oleh Residen Mr. A. Bakar Djaar, Bupati Tanah Datar dan terachir oleh S.J. St. Mangkuto Ketua P.P. Muhammadiyah Sumatera Tengah.

Maka supaja upatjara jang bersedjarah ini berikut dengan isi pidato dan kata sambutan jang penuh dengan nilai² jang bermutu tinggi, dapat diikuti oleh seluruh keluarga, walaupun mereka tidak sempat menghadirinja, maka dengan gembira kami persembahkanlah buku ketjil ini sehingga dalam waktu jang singkat, seluruh keluarga dapat merasakan sambil menambah pengertian terhadap usaha kita jang besar ini. Semoga jang Maha Berkuasa akan tetap melimpahi kita tenaga iradah dan hidajahnja dalam menudju mardhatNja dunia achirat. Amin !

Penjusun,

HASAN AHMAD



H.A. Malik Ahmad Ketua Panitia Pembina Fakultas Falsafah dan Hukum
Muhammadiyah, tengah menguraikan Pidato Pengrasmian berdirinya Fakultas

PIDATO KETUA PANITIA PEMBINA FAKULTAS FALSAFAH dan HUKUM MUHAMMADIYAH

H.A. MALIK AHMAD

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Assalamu'alaikum w.w.

Hadirin jth. !

Pertama kali kami Panitia Pembangun Fakultas Falsafah dan Hukum dari Universitas Muhammadiyah yang diperserahi oleh Konperensi Daerah Sumatera Tengah tanggal 8 Djuni 1955, dan dikuatkan oleh putusan rapat dari Consul² Muhammadiyah seluruh Indonesia tanggal 21-25 Djuli 1955, ditanfidzkan oleh P.P. Muhammadiyah Madjelis Pengadjaran dan Madjelis Perwakilan P.P. Muhammadiyah Daerah Sumatera Tengah, dengan ini mengutjapkan terima kasih atas kemurahan hati saudara² yang telah memerlukan hadir ketempat ini buat merasmikan Fakultas Falsafah dan Hukum dari Universitas Muhammadiyah ini.

Dari segenap pendjuru saudara² telah datang, dari Djakarta dan Palembang meliwati udara, dari djurusan P.S.K. dan Padang, dari djurusan Air Bangis, Lubuk Sikaping, dari djurusan Pakanbaru, dari djurusan Rengat, dari djurusan Djambi. Kemudian bertemu dalam negeri persimpangan yakni Padangpandjang ini, satu negeri yang berudara dingin, sedjuk diluar, panas didalam, dikaki gunung Merapi dan Singgalang, tak seberapa djauh dari danau Singkarak dalam luhak Kabupaten Tanah Datar.

Kami tahu bahwa untuk ini banjak kesulitan yang saudara² lalui, tetapi hasrat telah menggabung kita untuk berhimpun disini, yakni hasrat hendak bersama melihat dan menggembirakan lahirnja satu Perguruan Tinggi yang kita rasmikan pada malam ini.

Atas segala itu kami mengutjapkan terima kasih, serta selamat datang, marhaban ahlam wasahlam, dan kehadhrat Allah kita bersama mengutjapkan sjukur atas pertolongan, taufik dan hidajahnya sehingga karenaNja kesulitan dapat diatasi, tjita² dapat dike-

djar dengan berangsur, hatipun terbuka dengan gembiranja :

ربنا افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك

„O, Tuhan ! Bukakanlah kedalam sanubari kami pintu hikmat kebidjaksanaan-Mu dan taburkan serta pentjarkanlah kepada kami benih/sinar dari gutji wasiat rahmat-Mu”.

Waba'du, Universitas Muhammadijah jang dirasmikan malam ini adalah pendjelmaan dari niat dan hasrat jang telah lama, niat jang dari mulanja terus mendesak dengan kerasnja tetapi tenaga djua jang tak berketjukupan.

Seruan Firman Tuhan jang berbunyi :

كنتم خير أمة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله

„Kamu adalah ummat jang terbaik sendirinja, tegak dalam dunia **menegakkan kebaktian** jang berpokok dari iman dan kesutjian jang menimbulkan rahmat untuk kehidupan dan perikemanusiaan dan **tegak berdjua** dengan usaha dan kekuatan mentjegah timbulnja perbuatan mungkar jang berpokok dari keruntuhan moril dan kedurhakaan kepada Tuhan”.

Ajat itu mendjadi satu daja jang menggerakkan Muhammadijah menepatkan iman, memperbaiki mutu dan menjusun umat.

Diantaranja senantiasia sangat dirasakan pentingnja usaha membentuk MANUSIA MUSLIM JANG BERPENGETAHUAN UNIVERSITAS, apalagi melihat akibat² dari pendjadjahan Barat, alam fikiran Barat jang telah memasuki otak dan pipa darah putra Indonesia jang diatur oleh christening-politik, etisse-politik, aliran kolonialisme dan pengerahan pengetahuan jang tak memperdulikan pertumbuhan dan kemurnian djiwa, materialisme, passivisme dan atheis.

Dalam usaha kaum Muslimin hendak mentjapai ketinggian jang didjandjikan Tuhan, dan telah pernah tertjapai kepuntjajanja dari abad ke 7 s/d abad ke 14 (7 abad) itu dan dalam usaha mentjapai perseimbangan sehingga tak dibawa lalu begitu sadja, kita mengambil kebulatan tekad dan rentjana jang diantarjanja ialah „Perguruan Tinggi”.

Dengan tenang tapi terus bekerdja dan bergaja, maka hasrat ini didjalankan; diantaranya :

Tahun 1930 mulailah diusahakan mendapatkan tanah tempat Fakultas ini.

Tahun 1936 pada Kongres Seperempat Abad di Djakarta jang ketika itu bernama Betawi diputuskan berdirinja Universiteit Muhammadiyah. Dan terus diadakan penjelidikan tentang persiapan² jang perlu diadakan, dan diusahakan djuga memberi pengertian betapa pentingnja sesuatu Universiteit bagi satu ummat jang mau madju. Sajang usaha itu terhenti karena meletusnja peperangan di Eropah tahun 1939 dan disambung oleh ekspansi Djepang ke Indonesia ini.

Kemudian **tahun 1943** batu pertama dari gedung Sekolah Tinggi ini diupatjarakan oleh Pemimpin² Muhammadiyah Sumatera Barat, jang ketika itu baru bertiang bambu, beratap rumbia, berdinding tadir, berlantaikan semen murni jaitu tanah. Penanaman batu pertama diiringi oleh pengumpulan sen 'ilmu dari murid² Sekolah Muhammadiyah seluruh Sumatera Barat pada tiap tanggal 7 dan 17, tanggal jang sangat populair (terkenal) dengan nama hari Asia Raja itu jang oleh Muhammadiyah dinamai hari Sekolah Tinggi — hari gotong-rojong. Satu demi satu kaju dipahat, rumah didirikan, separoh beratap zink tua, separoh beratap rumbia, dinding tadir, lantai semen-sirah atau tanah pelempap panggangan batu kapur Bantjah Laweh (atah kapur).

Disa'at perjuangan kemerdekaan sampai clash kedua semua usaha² itu terhenti lagi karena seluruh tenaga dipusatkan kepada perjuangan dan memelihara 'amal jang ada.

Diwaktu masuk kota lagi **tahun 1950** sesudah penjerahan keaulatan Muhammadiyah kita hanja menemui puing² sekolah sadja lagi, guru² berserak, murid² habis, medja² habis diperkaju-apikan Belanda. Maka segenap usaha dipersatukan kepada pembikinan kader guru, mendirikan Mu'allimin, mengatur S.M.P., menggerakkan Taman Kanak², S.R.M. dan Ibtidaijah serta mendirikan SMA, SGAA, SGB, SGA, SKP, SMEA, SPKA, PGA dll.nja.

Baru **tahun 1954** dalam Konperensi Akbar Muhammadiyah Sumatera Tengah tanggal 19-23 Maret di Lubuk Alung dibitjara-

kan kembali hal Sekolah Tinggi jang ditangguhkan berdirinja pada awal tahun 1956.

Alhamdulillah, pada Konperensi Pengadjaran Muhammadiyah Daerah Sumatera Tengah tanggal 19-21 April 1955 kemarin ini dapat dibentuk Panitia Fakultas Muhammadiyah.

Sebagai pokok berfikir pada Konperensi Pengadjaran itu te dapat hal² seperti dibawah ini :

Kalau kita kembali kepada anggaran dasar Muhammadiyah fasal II jang berbunyi „Menegakkan dan mendjundjung tinggi agama Islam, sehingga dapat mewujudkan masjarakat Islam jang sebenar-benarnya” maka kita dihadapkan kepada :

1. Segala daja upaja jang ditudjukan kepada memperdalam rasa iman pada setiap sel masjarakat dalam segala tingkatan-nya, tingkatan mana berpusat dalam tingkatan :

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِلْمَاءِ

Hanja ulama (orang berpengertian tentang organik Alam, diri manusia dan hubungan semuanya itu dalam kekuasaan Tuhan) jang berchusjuk kepada Tuhan, chusjuk dengan arti hormat, segan, ingat kepada Tuhan dan mendjauuhkan diri, serta pikiran dan tindak-tanduk hidupnja dari kesalahan atau jang mengurangkan keridhaan Tuhan kepadanja.

2. Kepada segala daja upaja untuk membentuk organisasi dan tata hidup jang mengutamakan perbuatan ma'roef, hidup makmur, dan aman dari ketakutan, kemiskinan, aman dari kedjahatan djiwa dan adat istiadat jang merubuhkan.

Tata hidup mana harus pula dapat tenaga kekuatan jang sanggup mengalahkan kemungkaran menurut istilah ketuhanan. Djuga organisasi itu harus sanggup memimpin masjarakat sedemikian rupa dan dapat mematahkan aliran² pikiran dan daja teori jang menadjisi pikiran, rohani dan perikehidupan, dan sanggup menolak aliran fikiran jang memisahkan diri dari masjarakat dan dari tuntunan Tuhan serta Rasulnja.

3. Kepada segala usaha untuk mengembangkan daja dan gaja agama Islam biar dalam kehidupan masjarakat ataupun dalam alam fikiran, sehingga dapat merealisir kalimat Allah mengatasi kalimah apapun djuga.

4. Djuga kepada kesungguhan membentuk tenaga dalam segala lapangan kehidupan dan pertahanan yang didjivai dengan iman yang hidup dan pengetahuan yang dapat menjelidiki dan mempergunakan perkembangan²nja.

Tenaga inilah yang akan merumuskan usaha² yang dapat membuktikan pesan Tuhan yang berbunyi :

يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات

Artinja : „Allah akan meninggikan dardjat orang² yang beriman dari kamu serta mempunyai pengetahuan”. =

Sjahdan, maka segala yang kita sebutkan diatas memerlukan adanya suatu wasilah yang sampai sekarang masih lemah dalam golongan Muhammadiyah dan kaum Muslimin yakni **tenaga ahli** dan **tenaga ulama** (manusia muslim yang berpendidikan Universitas serta berpengetahuan tinggi yang didjivai oleh iman).

Tenaga ulama seperti tersebut diatas semendjak abad ke XIX tidak lagi memenuhi nilai ulama dizaman Islam berada dipuntjak kemadjuannja, dimana kita mengenal Ibnu Sina, Avirez (Razi), Avi Rusjd, Omar Qajam, El Farabi, Sjafei, Ahmad bin Hambal, Hanafie, Malik el Gazali dll.nja. Pada abad ke XIX hanya ada kedapatan ulama² yang dapat menguraikan Quran dan Hadist dari sudut iman, pergaulan se-hari² (achlaq) dan hukum Fiqhi yang diistimbatkan dari hukum² kedjadian dan perkembangan pada abad ke XII s/d XV. Sebaliknya ulama² kita dizaman tersebut tidaklah dapat menguraikan hukum² alam dan kodrat yang ada didalamnya, dan tidak mampu pula menguraikan tentang alam itu, yang amat berguna untuk memperdalam keimanan dan pelaksanaan masyarakat Islam.

Maka tidak heran kalau ulama² itu senantiasa didesak kesamping oleh kedjadian² baru sedang mereka tidak dapat menjelesakannya menurut arti yang setepat-tepatnja.

Disamping itu datanglah angin barat yang menguraikan hukum² alam tersebut (tabi'i dan rijadhi) yang menjimpang dari iman. Gerakan itu senantiasa semangkin mendesak kemuka mendahului pengaruh ulama abad ke XIX tsb. Dizaman achir ini kedua-duanya merupakan perlawanan yang menimbulkan ke-ragu²an dalam segala gema kehidupan masyarakat Indonesia. Sebenarnja

hal itu tidak perlu terdjadi kalau sekiranya ulama² kita itu dapat menyesuaikan diri dengan apa jang dimaksud oleh agama Islam dengan Quran dan Hadistnja, yakni ulama jang duduk pada proporsi jang sebenarnya atau ulama jang memenuhi sifat sebagai seorang jang berpendidikan Universitas serta mengerti maksud hukum² Islam jang didjiwai oleh Iman.

Segala jang tersebut diatas tjukup djelas untuk menarik kesimpulan betapa perlunja segera dibangun; „UNIVERSITAS MUHAMMADIJAH” sekali lagi kita tekankan nama UNIVERSITAS MUHAMMADIJAH karena nama tersebut lebih tinggi mutu dan nilainja biar tentang sifat ataupun tentang daja tuntunannja dibanding dengan nama² jang lain.

Disamping itu kita menindjau pula dari sudut kenjataan, betapa perlunja perjuangan fikiran lawan fikiran, filsafat lawan filsafat, sistim lawan sistim dalam alam dunia. Kenjataan itu menjadarkan kita kepada betapa perlunja dilaksanakan hal² jang kita sebutkan dibawah ini :

- a. Membentuk tenaga jang bermutu jang isi otaknja menjamai isi otak dunia tetapi didjiwai dengan Iman.
- b. Memperkembangkan alam fikiran Islam dalam seluruh segi² pengetahuan.
- c. Mengadakan pusat pengetahuan Islam jang dapat mengatasi pendapat² Sardjana atau dapat memakai pendapat² Sardjana itu sesuai dengan tuntutan Iman.
- d. Mengadjak ulama² Islam untuk mengambil inisiatif buat mengemukakan kepada masjarakat hubungan persoalan pengetahuan Agama dengan pengetahuan Umum dan didjadikan persoalan pengetahuan pada tingkatan tinggi dan bermutu.

Maka dengan mengingat keseluruhannja itu, diambillah suatu kesimpulan : „BAHWA PERGURUAN TINGGI WADJIB DIADAKAN, DIPELIHARA DENGAN BAIK, DAN DIDUKUNG BERSAMA-SAMA”.

Saudara² jang terhormat !

Sjukurlah bahwa tjita² ini kini telah dapat dibawa kedalam alam kenjataan jang berpokok kepada keinsjafan dan kesadaran

tentang tanggung djawab dan pandangan hidup kemuka. Tiap² keterlambatan artinja hantjur, dan setiap kealpaan artinja binasa.

أَنْ لَا تَتَفَرَّوْا يَعْذِبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا

artinja : „Kalau kamu tak bergerak madju, pasti adzab jang pedih menimpa kamu, dan kamu akan diganti dengan golongan lain lantas kamu tak akan dapat berbuat apa² terhadap mereka”.

Pendirian seperti itu mendapat sambutan dari Ketua P.P. Muhammadiyah Indonesia Buja A.R. St. Mansoer, P.P. Muhammadiyah Madjelis Pengadjaran dan Ketua Madjelis Perwakilan P.P. Muhammadiyah Daerah Sumatera Tengah saudara S.J. St. Mangkoeto, jang senantiasa memberi aspirasi kepada rapat itu. Beliau² itu memang telah merumuskan ber-tahun² sebelum ini, tjuma menunggu ruang dan waktu jang baik.

Perlu ditambahkan bahwa Pudjangga Indonesia dan Sardjana Hamka sebelum rapat ini senantiasa memberikan pendorong dengan surat dan dengan lisan agar Sekolah Tinggi segera didirikan. Tidaklah dapat dilupakan bahwa kedatangan sdr. Mr. Kasman Singodimedjo jang datang ke Padang sebulan sebelum konferensi tsb. Dan beliau telah memberikan petundjuk jang penting sehingga kesulitan² jang senantiasa menghalangi langkah madju buat terlaksanaja hasrat ini dapat diatasi.

Alangkah bersjukurnja kita kehadhrat Tuhan bahwa tjita² ini dengan spontan mendapat perhatian dari kaum terpeladjar dan djuga golongan saudagar serta pemimpin² jang dengan hati terbuka tidak bertangguh, bersedia memberikan tenaga bersama mendukung terlaksanaja tjita² ini.

Dengan begitu terbentuklah Panitia Pembina jang terdiri dari :

1. Ketua Umum : Sdr. H. A. Malik Ahmad
2. Wakil Ketua I : Sdr. Soein Dt. Malintang Alam
3. Wakil Ketua II : Sdr. R. I. Dt. Sinaro Pandjang
4. Sekretaris I : Sdr. 'Abdoellah M.S.
5. Sekretaris II : Sdr. A. Galib

Seksi Teknik :

1.	Sdr. Soein Dt. Malintang Alam	Ketua
2.	„ Palizir Hafliil	Anggota
3.	„ Moechtar Dt. Radjo Alam	„
4.	„ Noerdin Dt. Batoeah	„
5.	„ Adam Saleh	„
6.	„ Raden Soelaiman	„
7.	„ H. Haroun Alma'any	„
8.	„ Ambiar	„
9.	„ Mr. Haroen Al Rasjid	„
10.	„ Dr. Moezbar	„
11.	„ Djajoesman	„
12.	„ St. K.D.M. Pontas Nasoetion	„
13.	„ Dr. Kaharuddin Junus	„

Seksi Penjelenggara :

1.	Sdr. R.I. Dt. Sinaro Pandjang	Ketua
2.	„ H. Rifa'i Boerhan	Anggota
3.	„ Adam Ibrahim	„
4.	„ Zainoeddin Zain	„
5.	„ I. Zoelqarnaini	„
6.	„ Hasan Ahmad	„
7.	„ Doesqi Shamad	„
8.	„ Dinijah Shiddiq	„
9.	„ H. Sami' Ibrahim	„
10.	„ H.M. Jatim	„
11.	„ Hoesin Salim	„
12.	„ Bahar Dt. Mangkoeto Alam	„
13.	„ Wahab Shamad	„

Pada tanggal 28 Djuni 1955 putusan Konperensi Pengadjaran itu diterima oleh Konperensi Muhammadiyah, dimana Tjabang²/Ranting² Muhammadiyah bersedia mengerahkan tenaga pemu-
ngutan ajam dan zakat dari anggota²nja untuk memenuhi begro-
ting Fakultas jang berdjumlah Rp. 800.000,—

Dan mereka mengadakan djandji tertulis bersedia dischors kalau tak memenuhi putusan ini. Semendjak tanggal itulah Panitia mulai mengumpulkan uang dan bahan.

Pada tanggal 21-25 Djuli 1955 Sidang Tanwir Muhammadiyah jang terdiri dari Madjelis Perwakilan² P.P. Muhammadiyah seluruh Indonesia jang mempunyai hak tertinggi dimana Kongres tidak ada, telah membitjarkan Sekolah Tinggi ini dengan lebih luas ditindjau dari segenap sudut, jang achirnja mengambil putusan :

„Bersepakat mendirikan Universitas Muhammadiyah dengan Fakultas jang pertama di Padangpandjang (Sumatera Tengah) FAKULTAS FALSAFAH DAN HUKUM”.

Mulai Agustus 1955 kemarin ini seluruh tjabang/ranting bersama anggotanja sama bergiat memelihara dan mengumpulkan ayam, mereka memadu tjita, ber'amal dan bergembira, ajam djantan berkokok tanda subuh telah datang, beduk berbunji, adzan kedengaran, manusia sembahjang lantas bersiar dimuka bumi, sedang margasatwa beterbangan bergerak mentjapai rezekinja. Ayam betina berkotat, naik sangkak dan bertelur, seolah-olahnja berkata, kami tahu hidup dan tahu berbakti.

Alangkah leganja hati Panitia bahwa hasrat dan tudjuan ini dapat diterima dengan sadar, diterima oleh masjarakat dari segala lapisan, dimana orang² terpeladjar dengan rela memberikan petundjuknja, saudagar dengan mudah mengeluarkan uangnja berupa uang dan zakat, ada jang menanggung kursi, ada jang mendjamin lampu, ada jang mendjamin djubin. Pegawai² Kantor Negarapun giat membuat lijst mengumpulkan uang untuk dikirimkan guna pembangunan fakultas ini. Perlu kami djelaskan betapa Perkumpulan Dagang Djohan Djohor telah memberikan fasilliteit sebulan tempo dengan memberikan bahan seharga Rp. 41.000,—, djuga sdr² prominent dan penduduk Padangpandjang jang telah memberikan tenaga dan uangnja untuk terlaksananja perasmian ini, dan kepada murid² Sekolah Muhammadiyah Sumatera Tengah jang memberikan masing² satu butir telur atau uang Rp. 1,—.

Perspun tidak ketinggalan, dimana kita membuatja artikel², berita² interviu jang memuat hal Fakultas ini terutama surat kabar Harian Haluan, Abadi, Penerangan, Kantor Berita PIA, Antara dll. Tidak kurang pula dari itu studio R.R.I. jang terus-menerus memberikan beritanja tentang Fakultas ini.

Selanjutnya kami Panitia sangat terharu sehingga kami kekurangan kata² karena besarnya kesjukuran dengan perasmian ini yang mendapat perhatian istimewa dari jml. Menteri Agama Kijai Hadji Iljas dan rombongan dari Kementerian P.P. & K., Kepala Daerah Sumatera Tengah, Bupati², Pegawai² Tinggi, para ahli, Guru², para Saudagar², D.P.D.S. Sumatera Tengah, D.P.D.S. Kabupaten, Kepala² Djawatan, opsir² tentara dan kepolisian, kaum Pergerakan, Partai², Pemuda², Peladjar², kaum Bapak dan kaum Ibu.

Dibalik itu kami dapat melihat menembus dada bapak², ibu² dan sdr² yang terhormat, yang djelas bersedia memberikan sokongannya untuk landjut usianja Fakultas Falsafah dan Hukum ini. Jang belum mengirim tentu lekas² sesudah perasmian ini atau dengan wissel liwat Bank Nasional akan memberikan bantuannya, mana jang telah memberi tidak puas sekedar itu, malah hendak menambah lagi. Tjara terus terang kami katakan bahwa begroting jang Rp. 800.000,— sampai detik ini baru diterima sedjumlah Rp. 325.000,—

Inipun telah dipakai untuk persiapan gedung ini. Sebenarnya gedung ini telah dapat siap, karena bahannya telah tjukup, tukang² bekerdja siang dan malam, tjuma tanggal 18 ini lebih tjepat datangnya dari tenaga para tukang jang terus bekerdja dengan giatnja itu.

Buku² telah mulai disiapkan, dan dengan rasa sjukur serta berterima kasih kami sebutkan bahwa oleh keluarga almarhum Injik Dr. A. Karim Amroemah jang dipelopori oleh jml. Injik H. Joesoef dan sdr. Hamka telah diserahkan lebih dari 500 djilid buku berharga; bekal menjusul buku dari Sjech A. Wahab tinggal menunggu satu rapat negeri Sungai Batang jang akan menjerahkannya, dan demikian pula halnya dengan buku² dari alm. Hadji Ahmad Sumanik Batusangkar. Pun telah kami terima sebuah buku dari seorang saudara dari Rengat dan sdr. Soeltani St. Malako Bupati Solok. Kami yakin sdr² hadirin dan kaum Muslimin tak kurang hasrat hendak berlomba mewakafkan buku menambah deviezen achirat dan pembuka fikiran angkatan muda.

Tentang susunan Personalia Fakultas ini, jang semulanja kami melihat beban jang seberat-beratnja, tetapi rupanja dengan taufik Ilahi setiap jang diminta tenaganya tak ada jang menolak malah sebaliknya memberikan pendorong.

Maka alhamdulillah, buat tahun pertama ini telah disetudjui oleh P.P. Muhammadiyah Madjelis Pengadjaran susunan pimpinan seperti dibawah ini :

Presidium :

1. Sdr. Dr. H. 'Ali Akbar	Ketua
2. „ Prof. Dr. H. Boenjamin	Wk. Ketua
3. „ Dr. H. Sjamsoeddin	Anggota
4. „ H. Rasjidi B.A.	„
5. „ Hamka	„

Dibantu dengan Sekretariat :

1. Sdr. Z. Badjoeri
2. „ Ramli Thaha

Dewan Kurator :

1. Sdr. Roeslan Moeljohardjo Gubernur/Kep. Daerah Propinsi Sumatera Tengah
2. Buja A.R. St. Mansoer
3. Sdr. H. Farid Ma'roef
4. Sdr. H. Iljas Ja'qoeb
5. Sdr. Sa'doeddin Djambek

Decan : Drs. Danoehoesodo

Maha Guru/Dosen :

1. Sdr. Drs. Danoehoesodo	: utk. m.p. Ekonomi
2. „ Mr. Haroen Al Rasjid	: „ Pengantar I. Hukum
3. „ Marah Mohd. Thaher	: „ Sosiologie
4. „ A.R. St. Mansoer	: „ Tafsir/Quran
5. „ A. Hamid Hakim/ H. Haroun Alma'any	: „ Fikih/Ushul Fikih
6. „ Hamka	: „ Falsafah
7. „ O. K. Doerany	: „ Bhs. Inggeris
8. „ Adam Saleh	: „ Bhs. Indonesia
9. „ Fauzie 'Abbas	: „ Bhs. 'Arab
10. „ M. Said	: „ I. Djiwa Masjarakat
11. „ Dr. Kaharuddin Junus	: „ Ekonomi Islam
12. „ Prof. H. Mainar	: „ Kulijah umum
13. dan lain²nja.	

Hadirin jth.

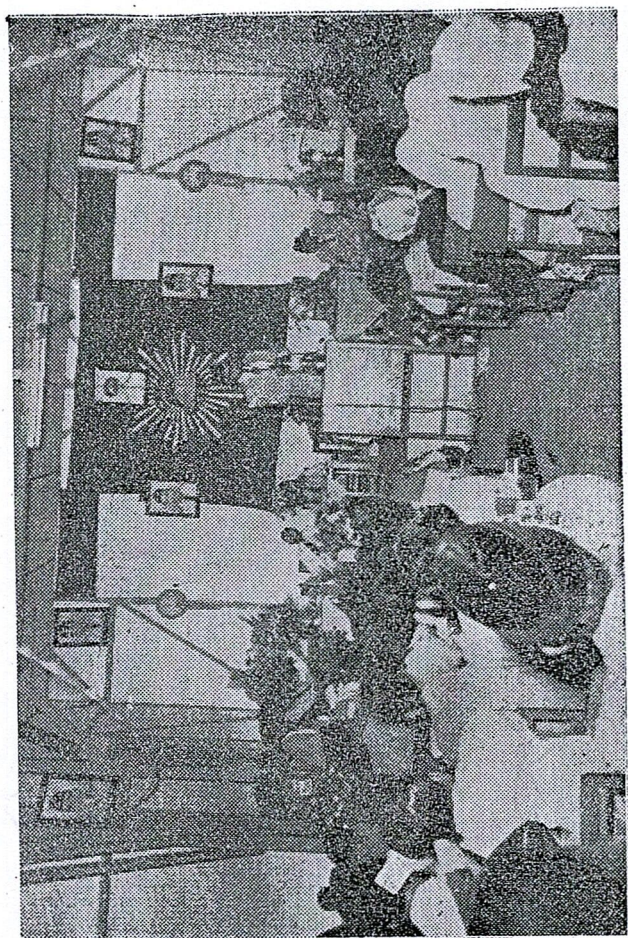
Tjukup demikian pendjelasan² dari Panitia, maka diperse-
rahanlah kepada Madjelis Perwakilan P.P. Muhammadiyah Da-
erah Sumatera Tengah, P.P. Muhammadiyah Madjelis Pengadjar-
an dan P.P. Muhammadiyah Indonesia untuk merasmikan berdi-
rinja Universitas Muhammadiyah — Fakultas Falsafah dan Hu-
kum ini.

Dan Fakultas ini disumbang-baktikan selandjutnja kepada
masjarakat guna kepentingan masjarakat. Pun dimaksudkan un-
tuk membantu Pemerintah Republik Indonesia dalam usahanja
mempertinggi mutu rakjat dan mempertinggi tingkatan masja-
rakat.

Djuga diharapkan guna kemadjuan alam fikiran dan penge-
tahuan disamping moril jang tinggi dan iman jang teguh, hidup
dan menghidup.

Mana jang senteng dibilai, mana jang pendek diulas, mana
jang kurang ditukuk, mana jang salah diperbaiki.

WABILLAHITTAUFIK.



**Ketua P.P. Muhammadiyah Majelis Pengajaran Sardjono tengah
menguraikan pidato rasminja**

PIDATO KETUA MADJLIS PENGADJARAN

PUSAT PIMPINAN MUHAMMADIYAH INDONESIA SARDJONO

Segala pujian kami pandjatkan kepada Zat Jang Maha Agung jang telah menganugerahi kita bersama satu daya kekuatan sehingga kita bersama dalam melaksanakan suatu amal perbuatan jang njata, jang dimaksudkan semata-mata untuk mendjundjung tinggi adjaran-ajaran Tuhan jang telah diwahjukan kepada Rasulnja Muhammad s.a.w.

Amma ba'du. Saudara-saudara hadirin sekalian, saudara Menteri Agama jang kami muliakan serta para pembesar Pemerintah Pusat maupun setempat jang kami hormati.

Saat bersedjarah jang telah lama kita nanti-nantikan pada tempat dan detik ini sedang berlangsung. Kami selaku warga Muhammadiyah jang dewasa ini mendapat tugas dan amanat untuk memegang pimpinan dan kemudi perguruan Muhammadiyah seluruh Indonesia merasa bangga dan berbesar hati serta sjukur atas adanya usaha untuk mendjelmakan suatu tingkatan perguruan dalam dunia Muhammadiyah jang selama ini belum pernah ada ialah suatu tingkatan tertinggi dalam alam perguruan.

Pertama sekali saja merasa wadajib menjampaikan terima kasih kepada segenap keluarga Muhammadiyah di Padangpanjang dan Sumatera Tengah unamnja, mulai dari anggota-anggota pengurusnja, peladjar² serta warga lainnja jang telah menundjukkan darma baktinja dan bertindak selaku bidan atas kelahiran Universitas Muhammadiyah.

Setelah itu terima kasih kami jang tak terhingga wadajib pula kami sampaikan kepada seluruh masjarakat ditempat ini jang telah memberikan bantuannja sehingga dapat terlaksananja tjita² Muhammadiyah ini.

Para hadirin jang mulia. Kami tahu apa jang sebentar lagi akan dibuka, adalah suatu barang jang akan banjak meminta pikiran dan tenaga dalam memeliharaja, begitupun dalam mendjaga kelanjutan hidupnja. Karena itu maka kami minta dengan bersungguh-sungguh agar perguruan ini dipelihara dengan baik.

Sebagaimana kita ketahui tjita-tjita perguruan tingkat tinggi dalam kalangan Muhammadiyah adalah bukan soal jang baharu, atau lebih djelasnja bukanlah idee jang timbul hanja karena dewasa ini seakan-akan telah musim atau telah mendjadi mode untuk mendirikan suatu universitas maupun perguruan tinggi. Tjita² tersebut telah ditjetuskan dalam kongres Muhamadijah ke 25 di Djakarta pada tahun 1936.

Berhubung karena saat itu keadaan belum lagi mengizinkan maka idee tersebut terpaksa ditunda. Ketika Djepang berkuas dinegara kita orang² Muhammadiyah tetap berkeras kemauan hendak mendirikan universitas. Karena saat itu dipandang tidak baik djika pelaksanaan perguruan tinggi itu diteruskan oleh Muhammadiyah sadja, maka mereka bekerdja sama dengan pemuka² Islam jang lain, dibawah pimpinan Drs. Mohammad Hatta sehingga terlahirlah Sekolah Tinggi Islam atau S.T.I. di Djakarta jang kemudian mengingat kepentingan-kepentingan lain terpaksa dipindahkan ke Jogjakarta.

Kemudian pada tahun 1948 Sekolah Tinggi Islam tersebut diubah mendjadi Universiteit Islam Indonesia atau U.I.I. Rupa² njah himmah untuk mendirikan perguruan tinggi dalam kalangan Muhammadiyah tidak padam. Dengan diam² disiapkanlah di Padangpandjang sebuah bangunan gedung jang dengan sengadja didirikan untuk perguruan tinggi.

Setelah melalui proses jang berbelit-belit serta perundingan jang mendalam di Padangpandjang ini, kemudian di Djakarta lalu dibawa ke Jogjakarta dan jang terachir di Pekadjangan Peka longan sesuai dengan tradisi dan hierarchie Muhammadiyah maka terdapatlah kebulatan tekad untuk selekas mungkin memproklamirkan Universitas Muhammadiyah dengan modal pertama sebuah fakultas Falsafah dan Hukum di Padangpandjang ini.

Hadirin jang mulia. Proses kebangunan Universitas Muhammadiyah jang kami utarakan diatas apabila kita perhatikan betul tampaklah djiwa dan semangat jang hidup dikalangan Muhammadiyah jang telah berurat dan berakar dan mendjadi tradisi Muhammadiyah. Jang kami maksudkan ialah djiwa dan semangat otonomi. Disaat Pemerintah kita sekarang ini sedang merentjanakan otonomi, agar tiap daerah dapat hidup dan berdiri sendiri dengan tidak hanja menggantungkan dan mengharapkan pimpinan dan perintah Pemerintah Pusat maka Muhammadiyah telah memprak-

er.
ang
ka-
adi
uan
am.
kan
asa
en-
aik
am.
Is-
ng-
ng
di-
out
a².
an
Pa-
ja
an²
la
ka-
na-
ro-
na
m-
ul²
na-
lu-
to-
an
an
an-
k-

tekan otonomi ini semendjak waktu jang lama. Semua perguruan Muhammadiyah jang tersebar keseluruh pelosok tanah air hidup dan langsung berdiri atas pembiajaan keluarga Muhammadiyah ditempat itu. Sepersenpun sekolah² Muhammadiyah belum pernah menerima bantuan dari Pusat Pimpinannya. Karena inilah maka walaupun perhubungan diseluruh Indonesia terputus akibat revolusi dan pertempuran, namun sekolah² Muhammadiyah tetap berdjalan walaupun satu dua sekolah terpaksa harus ditutup. Inilah diantara djasa sistim otonomi jang telah mendjadi tradisi dalam dunia Muhammadiyah.

Sekedar untuk memberikan gambaran djumlah sekolah Muhammadiyah baiklah lebih dahulu kami kemukakan dewasa ini telah ada ranting Muhammadiyah sebanyak 1799 buah dan tjabang sebanyak 300 buah. Sjarat untuk berdirinja ranting Muhammadiyah ialah djika ditempat itu telah mempunjai sebuah sekolah. Kalau kiranja kita ambil rata-rata bahwa tiap tjabang dan ranting itu mempunjai sekolah, maka sekolah² Muhammadiyah tidak kurang dari pada 2000 buah.

Tetapi djangan dilupakan bahwa tjabang Jogjakarta mempunjai 29 buah sekolah, serta tjabang Djakarta mempunjai 10 buah sekolah, dan tjabang Padangpandang ini saja kira saudara² lebih tahu. Karena itu maka menurut taksiran kasar, sekolah² Muhammadiyah berdjumlah 2.500 buah.

Hanja karena perhubungan dengan tjabang dan ranting belum lantjar maka pendaftaran jang dilaksanakan oleh Pusat Pimpinan baru dapat mentjatat sebagai berikut :

367 SR, 200 SMP, 20 SMA, 8 SGA, 1 SMEA, 1 SGKP, 1 SGTK, 2 SKP, 340 Ibtidaijah, 40 PGA, 45 Mu'allimin, 4 SGB. Djumlah seluruhnja meliputi lebih kurang 1.100 sekolah. Disamping itu maka di Jogjakarta telah didirikan 2 buah kursus B I masing² untuk djurusan ekonomi dan hukum.

Hadirin sekalian. Kalau kita hanja melihat statistik sekolah² jang kami sebutkan diatas bolehlah kita bangga. Tetapi sesungguhnya masih banjak lapangan pendidikan jang belum disinggung oleh Muhammadiyah. Jang kami maksudkan antaranja ialah pendidikan untuk anak² istimewa, seperti sekolah untuk anak² buta, anak² bisu dan tuli, untuk anak² kurang ingatan. Semua ini de-

wasu ini masih tengah diselidiki, apakah Muhammadiyah telah sanggup membuka sekolah untuk anak² istimewa itu atau belum.

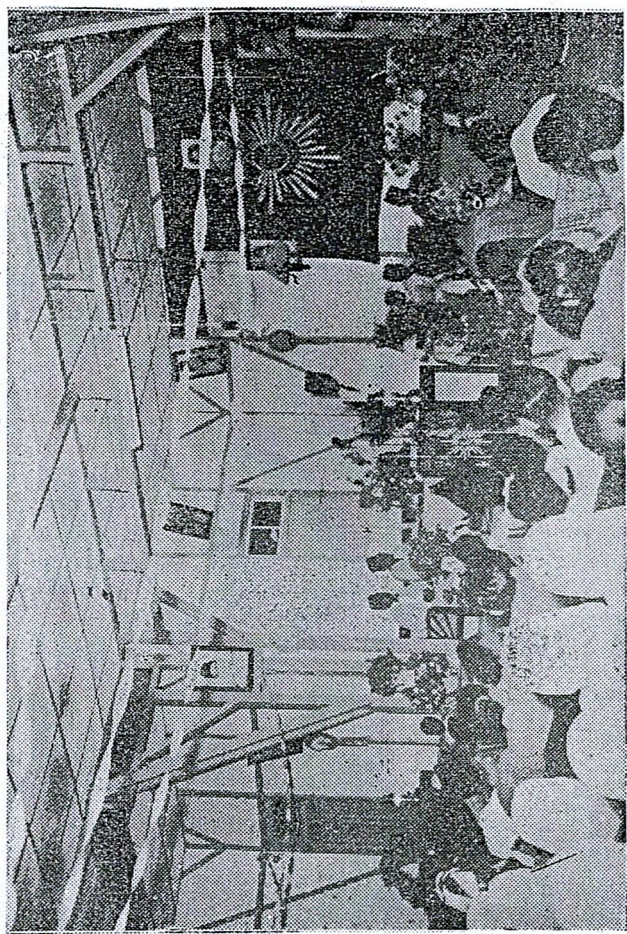
Hadirin sekalian. Inilah sekedar gambaran mengenai betapa luasnya perguruan Muhammadiyah. Kembali kita kepada soal otonomi dalam Muhammadiyah. Karena otonomi inilah maka kesempatan yang sangat bersedjarah ini kami atas nama Pusat Pimpinan Muhammadiyah Madjlis Pengadjaran mengambil kesempatan menitipkan sekali lagi fakultas ini kepada seluruh warga negara di Padangpandjang ini dan Sumatera Tengah ini umumnya.

Hanya namanya saja fakultas ini fakultas Muhammadiyah. Sesungguhnya fakultas ini adalah milik saudara² sekalian. Pintunya terbuka bagi siapa saja yang mempunyai syarat untuk menjadi mahasiswa, walau ia seorang Kristen, orang kafir atau apa saja.

Karena itu baik buruknya, hidup matinya adalah ditangan saudara² sekalian. Andai kata fakultas ini mati, maka yang rugi bukanlah Muhammadiyah saja, tetapi saudara² sekalian juga, seluruh lapisan masyarakat. Demikianlah kami tekankan sekali lagi.

Hadirin sekalian. Sampai disini saja akhiri pidato saja. Kepada Tuhan marilah kita menengadah dan mendoa semoga usaha kita ini memberi manfaat dan faedah bagi kita bersama serta amal ibadat kita kepadanya. Semoga Tuhan melimpahkan berkah dan rahmatnya. Wassalamu'alaikum warahmatu'llah.

* * *



Dewan Presidium yang diwakili oleh Hamka, tengah mengutipkan
Pidato Inauguratie

**PIDATO INUGURATIE (PENGUKUHAN) PRESIDIUM UNIVER-
SITAS MUHAMMADIYAH FAKULTAS FALSAFAH DAN HUKUM
DI PADANGPANDJANG 18 NOPEMBER 1955**

Diutjapkan oleh : **Hadji Abdul Malik Karim Amru'llah**

Sebagai pemegang tjita² jang mempunyai keinginan sedjak semula akan kemadjuan gerakan agama dinegeri ini, pada saat ini kita berkumpul untuk merasmikan Fakultas Hukum dan Falsafah Muhammadiyah. Kita pegang tjita² itu sebagai suatu tradisi dari pada dua gelombang besar gerakan agama, yakni di Djawa jg digelombangkan oleh Kijai Ahmad Dahlan jang mendirikan pergerakan Muhammadiyah, disusul oleh pergerakan agama di Sumatera Barat ini jang digelombangkan oleh beberapa ulama. Setengah daripada ulama-ulama itu telah meninggalkan kita dan setengahnja lagi menunggu zamannja pula. Jang njata ialah bahwa mereka telah berdjasa buat zamannja itu. Diantara jang telah terdahulu itu seperti Sjech Mohammad Djamil Djambek, Sjech Daud Rasjidi, Sjech Mohammad Djamil Djaho, Sjech Abdu'llah Ahmad, Sjech Ahmad Chatib dan lain-lain.

Sebenarnja gerakan pembaharuan agama di Minangkabau ini telah berdjalan semendjak tahun 1803. Ada tiga orang ulama jang memelopori gerakan itu, jaitu Hadji Miskin Pandai Sikat di Luhak Agam, Hadji Tuanku Lintau di Tanah Datar, dan Hadji Piabang diluhak Lima Puluh Kota. Karena terdjadinja pertentangan² maka pada tahun 1837 mereka ditangkap.

Oleh karena perlawanan dengan sendjata tidak dapat diteruskan lagi sebagai jang sudah-sudah, jang telah menjusahkan kehidupan orang di Minangkabau, maka kebangunan faham agama itu berwujudjudlah lagi dalam pergerakan² baru di Minangkabau.

Dimulai sedjak tahun 1903 oleh ulama-ulama baru yakni tuan-tuan Dr. Hadji Abdullah Ahmad, Sjech Mohammad Djamil Djambek, dan Dr. Hadji Abdul Karim Amru'llah. Tahun 1911 dikeluarkanlah madjallah agama jang bernama Almunir, tahun 1916 berdirilah Dinijah School dibawah pimpinan Zainu'ddin Labay, tahun 1918 berdirilah Sumatera Thawalib. Tahun 1924 masuklah Muhammadiyah jang digerakkan dari Djawa itu ke Minangkabau. Tahun 1925 Dr. Hadji Abdul Karim Amru'llah pergi

ke Djawa, dan sekembalinja dari sana didirikanja Muhammadijah di Padangpandjang dan di Manindjau. Tahun 1926 A.R. St. Mansur diutus oleh Pengurus Besar Muhammadiyah di Djawa untuk memimpin dan menjiarkan Muhammadiyah itu di Sumatera, ini umumnja dan di Minangkabau chususnja. Meskipun berbedabeda nama pergerakan itu tetapi asasnya tetap satu.

Kebaikan perguruan tjara lama dalam menegakkan agama, dapat diakui, tetapi hadirin jang terhormat, zaman tjepat sekaliberubahnja. Jang tua telah pergi dengan zaman ketuaannja sedang jang tinggal masih dapat dihitung dengan djari.

Dan ombak jang datang dari luar tak obahnja dengan zaman kemadjuan kebudayaan Islam dizaman pemerintahan Bani Abbas. Tindakan pemerintahan Harun Al Rasjid dan anaknja Al Makmun diwaktu itu sangat menguntungkan umat. Seiring dengarnya itu timbullah bahaja baru kedalam Islam yakni masuknja faham falsafah Junani, selain dari pada faham falsafah Hindu. Achirnja timbullah golongan Mu'tazilah dan golongan² lain dengan tjara berpikir jang baru dengan mengambil sistim: these, antithese dan synthese.

Pergerakan itu akan bertanggung djawab dihadapan Allah subhanahu wa Ta'ala dan akan bertanggung djawab atas sedjarah Islam sendiri. Mereka lekas menela'ah falsafah Junani untuk mempertahankan Islam kembali. Mengambil logika atau mantik Aristoteles untuk mempertahankan Islam sehingga menimbulkan Ilmu Kalam. Diwaktu itu timbullah mazhab Asj'ari.

Saudara² sekalian. Pada permulaan abad keenam timbul hudjdjatul Islam Al Ghazali jang menjesuaikan dan kembali adjaran tashawuf dengan adjaran sunnah. Mulanja beliau meminati soal² hukum, sehingga dikarangnja buku Al Wadjib dan Al Mustashfa. Lalu meminati filsafat, dan tidak puas dengan filsafat sadja lalu meneruskan minatnya kepada tashawuf atau mistik. Dalam masalah mistik ini dikarangnja bukunja jang masjhur: Ihjau'ulumi'ddin.

Wakil Kepala Negara kita Drs. Mohammad Hatta pernah mengatakan bahwa ulama dizaman baru harus banjak mengetahui filsafah, sosiologi dan pengetahuan ilmu djiwa. Disini terbahang apa jang kita tjita²kan, jaitu filsafah dan hukum. Disini akan kita peladjadi filsafah Junani, filsafah Islam dan kemudian filsafah

moderen. Adapun filsafah itu adalah menurut ukuran orang jang mengadjarkannja. Kalau jang mengadjarkannja orang kufur ber-
gunalah ilmu itu untuk mengingkari adanja Tuhan. Djika jang mengadjarkannja seorang Muslim dapatlah ia digunakan untuk menegakkan kebenaran adanja Zat Jang Maha Esa. Djika orang jang mengadjarkannja ragu, maka filsafatnja akan skeptis.

Ar-Razi pernah berkata :

Nihajatu idraki 'uquli'nnasi 'iqalu
wa ghajatu sa'jil 'alamina dhalalu;
walam nastafid min bahtsina thula 'umrina
siwa an djama'na fihi qila wa qalu;
wa arwahuna fi wahsjatin bi djusumina
wa achiru dun-jana adzar wa wabalu;
wa kam min djibalin qad 'alat sjurufatiha
ridjalun fa zalu wal djibalu djibalu.

Kesudahan pendapat akal manusia hanja mengikat dirinja sadja;
dan achir daja orang dunia hanjalah sesat semata;
tak ada jang dapat kita ambil dari pembahasan berlarat-larat
selain mengumpulkan kata si Polan dan si Anu;
djiwa kita dalam kesepian dibawa djasad
achir dan dunia kita ini hanja derita dan sengsara;
banjak gunung jang puntjaknja telah didaki orang
tetapi orang itu telah lenjap sedang gunung tetap disana djuga.

Sepandjang-pandjang djalan jang dilalui, sedjauh-djauh dja-
lan jang ditempuh udjungnja hanja kegelapan. Tidak dapat kita
bahas sepandjang umur. Umur manusia terlalu pendek diban-
ding dengan banjaknja rahasia alam dan kedjadiannja jang harus
diselidiki. Seperti dikatakanNja dalam surat Al Mukmin 57 : La-
chalqu ssamawati wal ardhi akbaru min chalqin nasi walakinna
aktsarannasi la ja'lamuun. Kedjadian langit dan bumi maha besar
dibanding dengan kedjadian manusia itu sendiri, tetapi kebanja-
kan manusia tidak tahu. Disangkanja otaknja djua jang berkuasa
dia tahu semua. Tak ada jang tak dapat diketahui. Kalau seperti
itu kita mentjari kebenaran maka itu hanja merupakan usaha
jang sia-sia. Berbahagialah orang Islam, jang selain mentjari ke-
benaran itu dengan akalnja, ada agama jang menuntunnja me-
nundjukkan djawab kepadanya akan adanja kebenaran itu. Seba-
gai jang lazim saja katakan : filsafah bertanja : Siapa engkau;

agama mendjawab : Inilah aku. Antara siapa dan inilah aku, disini, inilah letaknya ketinggian filsafah Islam yang kita tjinjai itu. Kalau tidak demikian maka filsafah akan membawa kita lanjut, akan membawa berchajal dalam alam abstrak.

Dalam djiwa manusia sedjak dia lahir telah ada rasa filsafah itu, sekalipun pada orang primitif. Dia sudah merasakan adanya Jang Ada. Tetapi dia tidak tahu mengatakan apakah Jang Ada itu. Sehingga disembahnja batu, disembahnja pohon. Disembahnja matahari dan arwah nenek moyangnja.

Einstein raksasa ilmu pengetahuan pada abad ini yang masih hur dengan teori relativiteitnja, achirnja hanya menjatakan tak ada yang pasti sesuatu djuga, semua relatif belaka. Maka kalau begini kemana kita harus berpegang. Maka pergantungan kita lagi, djika semata ilmu yang kita yakini. Sokrates pun mengatakan bahwa achir dari pada pengetahuan seseorang ialah bahwa dia akan mengatakan : yang sebenarnya saja tak tahu.

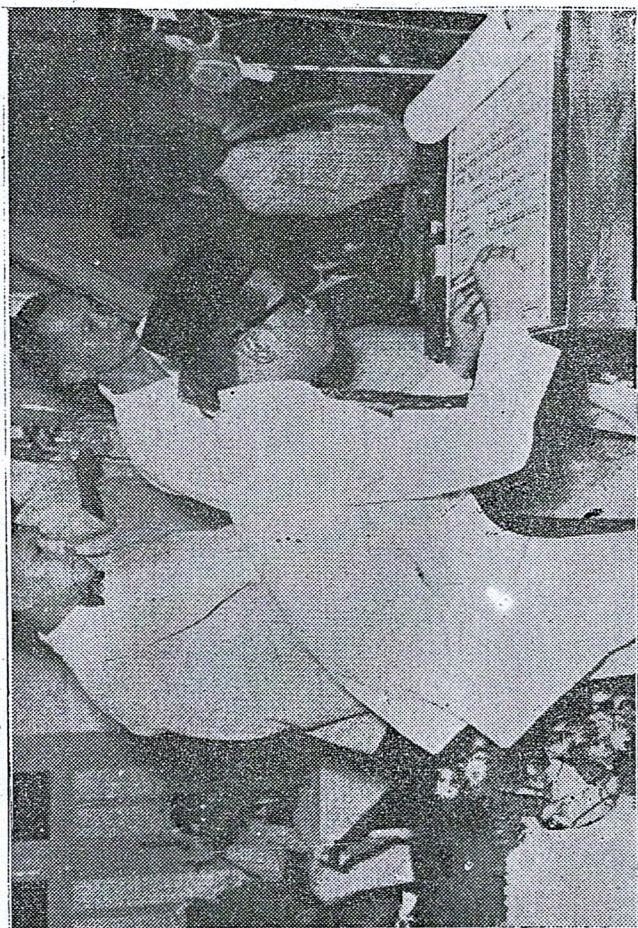
Plato pernah mengatakan, kalau ada orang yang mengatakan bahwa dia serba tahu, pakaikan kepadanya pakaian yang indah², tebarkan dikepalanja minjak harum, antarkan ia ketopal batas, suruh ia berangkat, karena orang yang seperti itu tidak ada dinegeri kami.

Sedjauh-djauh kita mengembara dengan ilmu pengetahuan, maka kita hanya akan menghadapi dua soal sadja : pertjaja atau tidak pertjaja. Siapa yang menjeberang ketempat otak dia tidak akan dapat lagi menjeberang selandjutnja karena otaknja lebih ketjil dari pada alam seluruhnja.

Hadirin yang terhormat. Djadi dapatlah kita beri bermisal, bahwa ilmu pengetahuan ataupun filsafat adalah laksana ular besar yang bisa. Dapat berbahaja kepada kita kalau kita tidak hati-hati. Dari pegang lehernja, kendalikan dia guna membawa kita ketempat yang kita tudju, jaitu mengakui Adanja Jang Ada. Inilah maksud filsafah.

Pada waktu ini sajalah yang diperserahi meberikan mata pelajaran filsafah ini, menunggu tiba yang lebih ahli. Djika telah ada orang ahli akan diserahkanlah kepada ahlinja itu. Dan djika tidak ada, biar djugalah kami mengadjarkannja.

Terima kasih.



Sewaktu penanda tanggan PIAGAM oleh A.R. St. Mansur
Ketua Umum Pusat Pimpinan Muhammadiyah

RINGKASAN PIDATO
KETUA PUSAT PIMPINAN MUHAMMADIYAH INDONESIA
A. R. SUTAN MANSUR

Fa aqim wadjhaka liddini hanifan fithrata'llahi'llahi fathara 'nnasa 'alaiha — latabdila lichalqi'llahi — dzalika'ddinulqaijim wa lakinna aktsarannasi la ja'lamuun. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimu'shshalata walatakunu minalmusjrikin; minalladzina farraqu dinahum wa kanu sjja'an; kullu hizbin bima ladaihim farihun.

Sesudah membatjakan ajat tersebut beliau melandjutkan pidatonja sebagai berikut :

Pendirian Universitas Muhammadiyah ini bertepatan dengan hari lahirnja Muhammadiyah seluruh Indonesia pada tanggal 18 Nopember. Perserikatan Muhammadiyah senantiasa berusaha kearah mempertinggi mutu umat dengan memegang teguh petunjuk Ilahy dengan pengharapan bahwa dengan pertundjuk itu kita akan diberi Tuhan hidup taqwa jang merupakan satu kehidupan jang bertenaga dan bermutu, sutji pada dirinja dan mensutjikan kepada orang lain.

Sebaliknya Muhammadiyah tidak akan ada arti dan nilainja sebab jang bernilai ialah tenaga umat jang ada didalamnja, tenaga umat itulah jang memberi nilai kepada Muhammadiyah. Selandjutnja tenaga itu tidak akan bernilai hanjalah manakala tenaga itu bersifat positif jang mengandung gaja dan gerak jang tepat serta berimbangan. Maka tenaga jang begitu terus bergerak tak obahnja sebagai tenaga pohon jang tidak berhenti-hentinja mengisap makanan dari bumi dengan urat dan akarnja, disamping itu batang dan daunnjapun bekerdja pula menghirup apa jang penting dari udara.

Alam tara kaifa dharaba'llahu matsalan kalimatn thaijibatan ka sjadjaratan thaijibatin, ashluha tsabitun wa far'uha fi'ssamaa-i, tukti akulaha kulla hiinin.

Tenaga² itu berpokok daripada kemauan hendak melahirkan mutu, kemauan berpokok dari tjita², tjita² itu sendiri timbul menurut iman, begitulah tjita² umat Muhammadiyah ini terletak dalam rahasia unsur dari ketentuan Anggaran Dasar Mu-

hammadijah semendjak semula. Dalam pokok itulah tersedia tenaga gerak hidup jaitu hidup yang digerakkan oleh hasrat dan niat hendak mendjundjung tinggi Agama Allah yang disampaikan dengan perantaraan Rasulnja, dan digerakkan oleh hasrat hendak meninggikan agama Allah dan hasrat hendak meneladan gerak-gerik hidup Nabi Besar Muhammad salla'llahu 'alaihi wa sallam.

Tjita² hendak mendirikan Al Djami'ah atau Universitas telah tumbuh sedjak kongres ke 25 di Djakarta tahun 1936. Dalam mendju hendak menegakkan tjita² itu, maka datanglah perubahan suasana dengan masuknja Djepang dan djatuhnja pemerintahan Belanda. Suasana itu memaksa tjita-tjita itu dimasukkan kedalam peti simpanan, kemudian sesudah suasana merdeka, perserikatan Muhammadiyah melangkah kembali dengan kelebihan tenaga yang telah diberikan untuk perdjjuangan menegakkan Republik Indonesia dengan perlahan-lahan bagai kaju dimusim hudjan sesudah mulai musim panas yang terik, tumbuhlah kembali daun, putjuk dan rantingnja. Dengan diam² dan tenang pohonnja kembali sebagai semula. Maka datanglah masa tenaga urat dan pohonnja bergerak mengeluarkan bunga, kemudian berubah mendjadi putik, achirnja hendak mengeluarkan buah. Itulah tjita-tjita mewudjudkan Universitas Muhammadiyah yang sekarang.

Ditjelah-tjelah daunnja telah tampak tunas bunga, dan telah berkembang, pada tgl. 18 Nopember 1955 ini telah berwujud putik, dan insja Allah tanggal 1 Djanuari 1956 mendjelma mendjadi buah muda yang diharapkan pada sa'atnja yang tentu akan melahirkan masak matangnja.

Dalam surat Al Fath dibajangkan Tuhan sifat orang Mukmin itu sebagai padi yang subur dan besar rumpunnja sehingga menjengangkan ahli² pertanian, sebaliknya memilukan perasaan orang² kafir.

Perumpamaan ini membajangkan pertumbuhan umat yang beriman didalam asuhan Nabinja dizaman kenabian. Dan pertumbuhan yang begitu djuga akan lahir disa'at umat terasuh menurut asuhan Nabi itu sepanjang masa. Tjita² inilah yang diusahakan oleh perserikatan Muhammadiyah sedjak semula sampai sekarang ini, dengan kemurahan Allah akan tetap terus selamanya dan Allah djugalah yang lebih mengetahui.

Bibit baik, tanahpun subur, putaran masa jang teratur dan petaninjapun radjin serta mempunjai keahlian, tentu akan melahirkan rumpun padi jang besar dan mentakdjubkan, berbuah dengan lebatnja.

Maka iman jang sutji bagai bibit padi jang baik dibumi, djiwa jang menerimanja akan tumbuh subur dan berbuah. Iman jg bersifat air muthlak jaitu sutji lagi mensutjikan, akan tumbuh dalam masjarakat bagai tumbuhnja anak² padi hingga mendjadi rumpun padi itu besar dan kuat.

Tiap-tiap diri adalah anak jang dilahirkan oleh masjarakat, masjarakat umum. Maka tiap-tiap diri itu adalah petjahan daripada masjarakat itu. Dan hidup bermasjarakat itu tetap pula djadi pembawaan tiap-tiap diri, dengan arti bahwa tidaklah dapat seseorang hidup memisahkan diri dari masjarakatnja. Maka iman jang bersifat air mutlak itu atau bersifat sutji lagi mensutjikan menumbuhkan hakikat hidup masjarakat jang telah disiapkan dalam tiap-tiap diri, dengan perlahan-lahan akan banjak pengikutnja bagai tumbuhnja anak pada kiri kanan induknja.

Demikianlah pertumbuhan umat, apabila iman itu benar-benar sutji bersih menurut asalnja. Dan buahnja akan lahir merata memenuhi hadjat masjarakat bagi padi memenuhi hadjat penduduk. Dikiri kanannja akan tumbuhlah aman sentosa, akibat daripada achlak mulia jang mendjadi buah masak daripada iman itu.

Usaha amal jang bersifat membangun telah dikerdjakan ber-puluh tahun lamanja oleh perserikatan Muhammadijah, suka-duka telah silih berganti dalam masa jang pandjang, namun usaha membangun jang dikerdjakan dengan suara hati tetap djuga berdjalan menurut ukuran tenaga jang dihimpun dibulatkannja. Mungkin ada orang jang mengira bahwa pergerakan Muhammadijah tidak pernah ketjewa atau ditimpa keketjewaan. Anggapan itu tidaklah benar. Ketjewa atau keketjewaan adalah alat menumbuhkan daja gerak. Apabila ketjewa atau jang mengetjewakan sudah lenjap dan tidak akan timbul lagi, maka daja penggerak madju atau perbaikan akan turut lenjap pula. Sebaiknja manusia jang hanja ber-putar² disekeliling kesenangan adalah manusia menudju kerubuhan. Maka ketjewa atau jang mengetjewakan wadjablah diambil sebagai alat perbaikan mentjapai kesempurnaan. Menindjau dan memahami sesuatu jang mengetjewakan adalah

pekerdjaan orang² jang berakal untuk membawakan diri dan masyarakat sesuai dengan tujuan hidup jang terlepas dari keinginan diri sendiri.

Mungkin disatu ketika orang tenggelam dalam amalnja at golongannja. Orang atau golongan itu djalan terus dengan tidak memahami sangkut-paut dikiri-kanannja, dimuka dibelakangn akibatnja mereka terkepung, terlibat didjalan buntu, atau djalan jang berputar, menudju kebekuan dengan perkataan lain dari jang da berilmu pindah kepada taklid buta.

Demikianlah sesudah pelaksanaan jang berbelit-belit dalam perdjalanannya alam kelihatan patah tumbuh hilang berganti, tetapi didalam masyarakat lain keadaannja jaitu jang patah tidak tumbuh kalau tidak diusahakan, jang hilang tidak berganti kalau tidak ditjari penggantinya.

Telah berpuluh ulama jang wafat, artinja hilang, tetapi dalam keadaan tidak dapat kita katakan patah tumbuh hilang berganti. Hanja dapat digambarkan diatas kemusnahan kebun jang lain telah tumbuh semak belukar jg akan mendjelmakan rimba raja dikuasai oleh binatang buas. Masyarakat adil, aman dan makmur akan tetap mendjadi impian semata. Adapun jang mendjelmalah masyarakat gelap dan gelisah menumbuhkan kasta kezaliman. Disamping itu Muhammadijah ditegakkan oleh pertumbuhan kiran dan keinginan anak² dan pemuda² jang mendesak kelanjutan hidup menudju kesempurnaan jang setiap waktu mengganggu perasaan mereka. Keadaan itu sangat dirasakan pula oleh orang² tua dalam Muhammadijah. Achirnja dari atas dan dibawah mengadakan titik pertemuan ditengah-tengah, mendjelaskan daja memaksa mewujudkan usaha mentjapai kesempurnaan.

Maka diantara usaha itu ialah mengadakan Universitas Muhammadijah, Sekolah atau Perguruan Tinggi jang dapat mentak pemuda-pemuda jang dapat melandjutkan usaha membangun amal jang besar sebagai apa jang dipusakakan oleh Nabi Muhammad s.a.w. jaitu meratakan Risalatul Kubra.

Tjita² menegakkan Fakultas ini bukanlah hanja tjita² dan keluarga Muhammadijah Sumatera Tengah, tetapi sedjak dari pusat pimpinan Muhammadijah sampai keranting Muhammadijah jang djauh memiliki tjita² ini. Hanja Muhammadijah Sumatera

Tengah boleh dikatakan bersifat mempelopori berdirinja UNIVERSITAS itu, tidak sadja keluarga Muhammadijah malah pen-tjinta²njapun mempunjai tjita² ini. Oleh karena itu memang sudah semestinja UNIVERSITAS ini kita wudjudkan.

UNIVERSITAS ini kita mulai dengan FAKULTAS FILSAFAT DAN HUKUM, dengan perkataan lain mengambil bahagian dalam vak Filsafat dan Hukum. Dalam hal ini mungkin ada pertanjaan bahwa perbedaan perdjalanann pengadjarann Filsafat dan Hukum itu membuahkan perbedaan pula dalam tjara berfikir bagi mahasiswa keluaran Universitas ini, apalagi dalam suatu Universitas memungkinkan terbitnja kesulitan² jang ditumbuhkan oleh fikiran merdeka dari pemuda², jang tengah meningkat tinggi dalam tjita²nja diliputi oleh suasana tenaga muda jang merasa tidak ada gunung jang tinggi, tidak ada lurah jang dalam, muka bumi bagaikan rata semuanya. Soal ini memang ada kebenaran jang memang terdapat hal² jang serupa itu. Maka untuk melihat soal jang ditudju oleh Universitas ini baiklah dibawah ini kita njatakan.

Filsafat jang artinja boleh diartikan alam fikiran, berpusat didalam daerah (ide) tjita², maka mutu ide atau tjita² itu menentukan bentuk alam fikiran jang bekerdja membuahkan ilham tjita² itu kealam kenjataan. Maka bentuk alam fikiran itu dibuat oleh sifat tjita² jang menumbuhkan ilham. Sebagai perumpamaan: tjita² kebangsaan membentuk alam fikiran jang dibuahkan oleh ilham tjita² kebangsaan itu. Dari itu tidak asing tjita² kebangsaan membuahkan alam fikiran jang bersifat hanja mementingkan bangsanja sadja dalam makna jang sempit, dan makna jang sempit itu terbit dari tenaga ilham tjita² kebangsaan jang hanja bersifat mementingkan bangsanja dengan memperoleh tenaga² diluar bangsanja untuk memenuhi kehendak ilham tadi.

Akibat dari tjita² itu menumbuhkan undang² dasar, undang² pidana, dan seterusnya didjiwai oleh tjita² kebangsaan tadi. Maka disini dapat kita simpulkan bahwa filsafat jang berpusat dalam tjita² itu telah membuahkan akibat terwudjudnja hukum² membentuk diri sebagai bangsa dan negara sesuai dengan djiwa tjita² pokok. Maka dalam perdjalanann gerak tjita², langsung mewudjudkan dirinja dalam hukum² jang menentukan peraturan dan batas² sesuai dengan djiwa tjita² itu.

Muhammadijah dalam usaha membangun Fakultas ini berpegang kepada paham tersebut. Islam jang memberikan tjita² kepada orang² Muslim, jaitu tjita² jang berpusat dalam iman me-

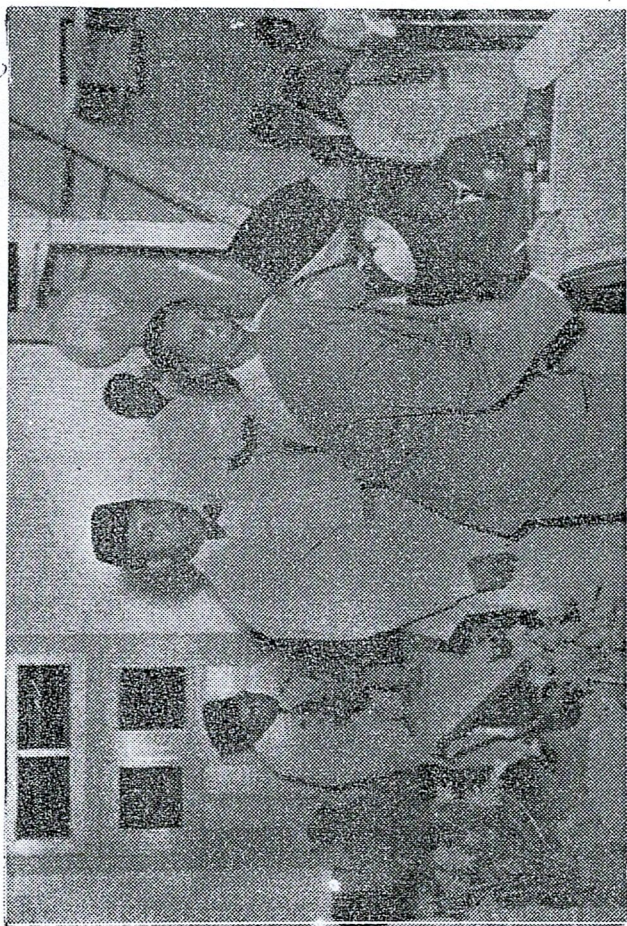
nurut mutu jang diimani dengan langsung membuahkkan kehe-
dak mewudjudkan hukum jang digerakkan oleh ilham tjita² da-
iman menurut jang diimani itu. Disini dapat kita katakan bahwa
perdjalanann Filsafat dan Hukum dalam masjarakat jang digera-
kan oleh hadjat masjarakat itu, bersamaan djalannja dengan fi-
sifat Islam (Alam fikiran Islam) membuahkkan penelitian dan pe-
hatian kepada hukum² Islam itu, hanja terdapat perbedaan d-
lam filsafat dan hukum jang ditimbulkan oleh masjarakat. S-
lain didjiwai oleh sifat masjarakat itu maka hukumnja ditja-
dalam tubuh masjarakat itu sendiri dan kehidupan masjarak-
itu disamping masjarakat lainnja. Dan dia akan mundur mad-
menurut hadjat dan kepentingan masjarakat itu dari otocrat-
kepada democratie, dari democratie kepada otocratie atau da-
nasional kepada internasional, dari internasional kepada nasi-
nal. Perobahan itu ditekankan oleh faktor² (sebab²) jang mene-
tukan dari perpusingan roda masjarakat jang berkait-kait. Ad-
pun dalam Islam hukum pokok tidaklah ditjari dalam tubuh m-
sjarakat Islam, malah hukum itu diturunkan dan ditentukan ole-
jang mempunjai Islam itu jaitu Allah Subhanahu Wata'ala. H-
kum² pokok itu bersifat pendjelmaan dari mutu jang diimani da-
mutunjapun bersifat mutu jang diimani dalam arti : Sangat b-
rat akibat penderitaan dari memungkirinja atau menolaknya. M-
ka hukum² selain hukum pokok diserahkan pemetjahannja men-
ikuti waktu dan tempat dengan mengingat dasar amar makru-
nahi mungkar atau islah dan ifsad mengawaskan dasar Rahma-
jang diberikan Allah kepada alam dan manusia.

Dapat kita sambilkan bahwa filsafat kebendaan mewudju-
kan pula kepada hukum jang ditjari sekeliling benda, denga-
arti tidak melihat benda dibawah kekuasaan muthlak jaitu k-
kuasaan Chaliq jang mendjadikannja. Perpusingan filsafat dis-
keliling benda itu membuat pandangan dan hukum meletakka-
benda dalam deradjat atau tingkatan jang tertinggi. Maka fils-
fat itu akan berakibat memberi nilai kepada manusia didala-
nilai benda. Hal itu lenjaplah kemanusiaan itu, dan manusia pi-
dah kepada nilai benda jang bisu. Dari sini mengalirlah pendap-
atau paham jang menetapkan politik bebas dari budi atau achla-
jang baik.

Dalam usaha mewudjudkan Universitas ini Muhammadija
Sum. Tengah mendidik diri tegak dengan kakinja, menumbuhkan
tenaga dalam dirinja. Kalau diperhatikan mungkin mentertaw-
kan. Apa sebabnja ? Fakultas ditegakkan dengan ajam, jang d-

panggilkan dengan ajam fakultas atau ajam sekolah tinggi. Muhammadijah menginsjafi kelemahannya dan dalam kelemahan itu ada kekuatan. Seekor ajam memang tidak ada artinja untuk menegakkan fakultas, tetapi kalau ajam itu banjak seperti hudjan lebat bukan tidak berhasil, malah bisa membuat bandjir. Muhammadijah bukan lupa kepada bantuan Pemerintah, Muhammadijah ingat betul kepada bantuan itu, dan menghargakan sepenuhnya, tetapi Muhammadijah tidak menjandarkan tenaganja kepada bantuan itu, bukan menolak malah menerimanja dengan sepenuh hati. Muhammadijah beramal dengan tenaganja, baik tenaga diri atau tenaga benda. Hal itu sudah pada tempatnja dan itulah hakikat hidup. Dan Muhammadijah bersedia pula menerima bantuan dari Pemerintah atau negara, hal itu sudah sepantasnja, karena buah usaha Muhammadijah beserta amalnja bukanlah hanja untuk Muhammadijah, Muhammadijah adalah sepantun panitia dapur, adapun jang akan menerima hidangannja ialah negara dan bangsa.

* * *



**Jml. Menteri Agama K.H. Ijas tengah menanda tangani PIAGAM
Fakultas Falsafah dan Hukum Muhammadiyah**

PIDATO J.M. MENTERI AGAMA R.I.

K. H. MOHD. ILJAS

Pada tanggal 29 September jang lalu saja turut serta dalam rombongan Presiden ke Surakarta untuk membuka dan mempersaksikan upatjara pembukaan Perguruan Tinggi Islam Tjokroaminoto. 19 Hari kemudian saja hadir di Padangpandjang ini untuk mempersaksikan pembukaan Perguruan Tinggi Islam jang diusahakan Muhammadiyah. Dalam waktu duapuluh hari itu telah dibuka di Indonesia dua buah Perguruan Tinggi Islam. Saja sangat merasa gembira sekali pada malam ini bahwa saja dapat turut serta menjaksikan pembukaan satu Perguruan Tinggi Islam jang diusahakan oleh Muhammadiyah jang mana semendjak sebelum perang telah diputuskan di Djakarta untuk membuka Perguruan Tinggi Muhammadiyah, tetapi pada malam ini putusan tersebut baru dapat dilaksanakan, jaitu dengan dibukanya Perguruan Tinggi Islam Muhammadiyah di Padangpandjang.

Saudara². Apabila pada waktu sekarang ini setelah Indonesia merdeka, maka disana-sini dapat dibangun dan dibuka Perguruan Tinggi Islam maka hari ini siasat dan politik pemerintah Republik Indonesia adalah menggerakkan pembangunan dari segala lapangan, terutama sekali ingin untuk perkembangan agama Islam dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat bertumbuh dan meluas untuk kepentingan masyarakat dan negara kita. Berbeda dengan apa jang kita rasakan pada zaman pendjadjahan jang telah kita rasakan selama lebih daripada tigaratus limapuluh tahun oleh pendjadjahan Belanda. Pada waktu selama itu kita bergerak hanja dapat mengusahakan dan memperkembangkan Islam adalah baru merupakan madrasah-madrasah Ibtidaijah semata-mata. Para ulama kita dengan kegiatan jang penuh menghadapi pembangunan untuk perkembangan Islam, tetapi para ulama kita itu banjak mendapat kesusahan dan rintangan dari pihak Belanda. Oleh sebab itu banjak daripada pemimpin² dan ulama-ulama kita melarikan diri ketempat-tempat jang djauh daripada kekuasaan Belanda dan mereka masih dapat mengumpulkan segala tenaga untuk menjiarkan agama Islam dan untuk menegakkan ajaran-ajaran Islam sehingga achirnja terdapat beberapa ulama dan tokoh-tokoh Islam jang dapat mengembangkan agama Islam itu. Hal itu adalah suatu usaha jang patut dipudji-

kan, meskipun apa jang dapat diusahakan oleh para ulama itu dengan tjara jang kurang teratur.

Saudara². Kalau orang mengatakan bahwa Pemerintah dia Belanda begitu merintangi akan kemenangan dan kemaan Islam maka seringkali orang akan membelokkan pikiran bahwa hal itu adalah satu tuduhan jang tidak benar kepada pemerintah Hindia Belanda, jaitu kata orang jang masih memBelanda. Akan tetapi pada tanggal 17 Oktober jang lalu, Prof. Dr. Pijper seorang jang pada zaman pendjadjahan Belanda mendjabat Ketua dari pada satu kantor jang dinamakan Inlands Zaken. Prof. Dr. Pijper telah diangkat mendjadi mahaguru ninklijke Academie di Utrecht dengan pangkat sebagai mahag dalam agama Islam dan Hukum Islam serta bahasa Arab. Hal adalah sesuatu jang menarik perhatian kita. Kadang-kadang pat djuga orang salah memandang, dikiranja bahwa Perguruan Tinggi Islam jang ada di Utrecht dapat disamakan dengan perguruan Tinggi Islam jang ada di Padangpandjang. Kalau Perguruan Tinggi Islam di Utrecht dengan Akademinja itu mengadakan agama Islam dan hukum Islam serta bahasa Arab, bukan untuk kekuatan Islam dan bukan pula untuk ketinggian umam. Akan tetapi semata-mata untuk mengetahui dengan dj bagaimana umat Islam dapat dilumpuhkan dan dari djalan umat Islam dapat dilemahkan dan dapat disesatkan untuk mendjadi umat jang dapat dikalahkan oleh umat Barat. Demikian Prof. Dr. Pijper jang sekarang tidak ada lagi di Djakarta, te dia sudah kenegeri Belanda dengan maksud dan pikiran untuk memperlemah kekuatan umat Islam, sampai sekarang keing seperti itu masih ada. Juriduna li juthfiu nura'llahi biafwahil wallahu mutimimu nurihi walau kaihal hulandijuna

Saudara². Begitulah Belanda jang selalu mentjari djalan mana terletaknja kelemahan umat Islam. Dalam kata pengantar annja Prof. Dr. Pijper itu ketika diangkat mendjadi mahaguru njatakan dengan tegas sebagaimana jang saudara batja dalam rat kabar, bahwa banjak pemimpin Islam jang mengeluh kar perkembangan agama Islam setjara bebas di-halang²i oleh pemerintah Hindia Belanda. Selandjutnja ia mengatakan: bahwa hal itu memang ada kebenarannja. Dengan ini ia telah menga segala perbuatannja jang dilakukannja di Indonesia. Selandnja ia mengatakan bahwa politik Belanda di Indonesia terhadap agama Islam sudah masuk kedalam sedjarah Indonesia. Maka

gi kita jang mengadjar sedjarah Indonesia akan dapat kita kira-
nja mempertimbangkan dengan baik lebih-lebih terhadap politik
Hindia Belanda terhadap kita umat Islam Indonesia ini, jang ingin
menghalang-halangi perkembangan agama Islam setjara bebas.
Hal ini sudah ternjata dengan utjapan dari pada orang jang per-
nah berkuasa sendiri ditanah air kita.

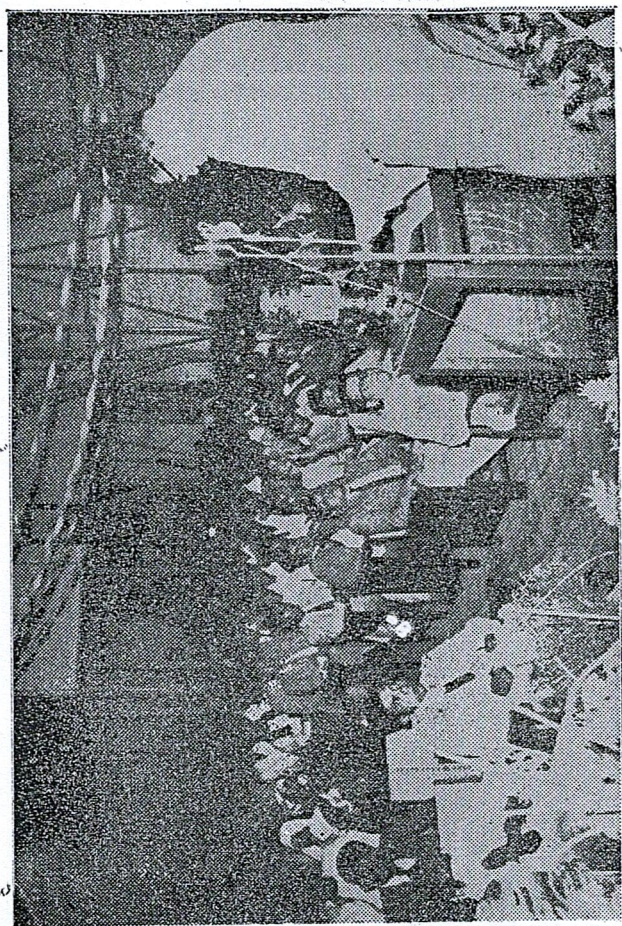
Saudara². Perguruan Tinggi Islam jang sekarang dibangun
di Padangpanjang tidak sama djuga dengan Perguruan Tinggi
Islam jang dibangun di Peking, diibu kota R.R.T. jang diperintah
oleh partai komunis. Disana djuga diadakan perguruan tinggi Is-
lam. Direktornja waktu sekarang ini saja masih ingat, seorang
pemuda Tionghoa jang lama menetap di Mesir bernama Muham-
mad Makin Ash-shinij. Tetapi dapat kita lihat bagaimana keada-
an Perguruan Tinggi Islam jang ada disana itu. Banjak perpusta-
kaan Islam jang mempunyai beribu djilid buku Islam, tetapi apa-
bila kita melihat kepada rakjat, melihat anak-anak Tiongkok dan
anak-anak orang jang beragama Islampun tidak mendapat adjar-
an Islam sama sekali. Bagaimana Islam dapat berkembang kalau
hanya dipeladjar di Perguruan Tinggi sadja. Inilah perbedaan
jang njata sekali antara kedua perguruan tinggi Islam tersebut.

Sebagaimana jang dikatakan oleh saudara Zubaidi, bahwa
nanti akan menjusul lagi pembukaan Sekolah Tinggi Islam di
Solo dan Bandung serta tempat-tempat jang lain, maka itu un-
tuk Indonesia masih amat kurang sekali. Kekurangan itu masih
terus kita rasai. Karena Perguruan Tinggi Islam jang ada di In-
donesia akan melajani anak-anak Indonesia jang 90% beragama
Islam semendjak ketjil. Bukan sadja mereka jang ada dimadras-
ah jang dibangun oleh rakjat jang sekarang mendapat bantuan
daripada Pemerintah semua itu mengadjarkan agama Islam, akan
tetapi S.R. jang didirikan oleh Pemerintahpun semua itu menga-
djarkan agama Islam. Telah ditetapkan oleh Menteri Agama dan
Menteri P.P.K., bahwa dimadrasah-madrasah diadjarkan peladja-
ran umum dan di S.R. diadjarkan agama Islam. Hal ini karena te-
lah kita rasakan daripada hasil usaha Belanda jang memisahkan
bangsa Indonesia daripada mendapat dua matjam peladjaran jang
dari sudut pendidikan Barat sama sekali bertentangan dengan
agama Islam. Malah kadang-kadang mengadakan permusuhan
kepada umat Islam. Malah pada masa dahulu ulama-ulama tidak
mau mengadjarkan segala peladjaran jang diadjarkan pada seko-
lah Pemerintah dengan alasan karena bentji kepada Pemerintah

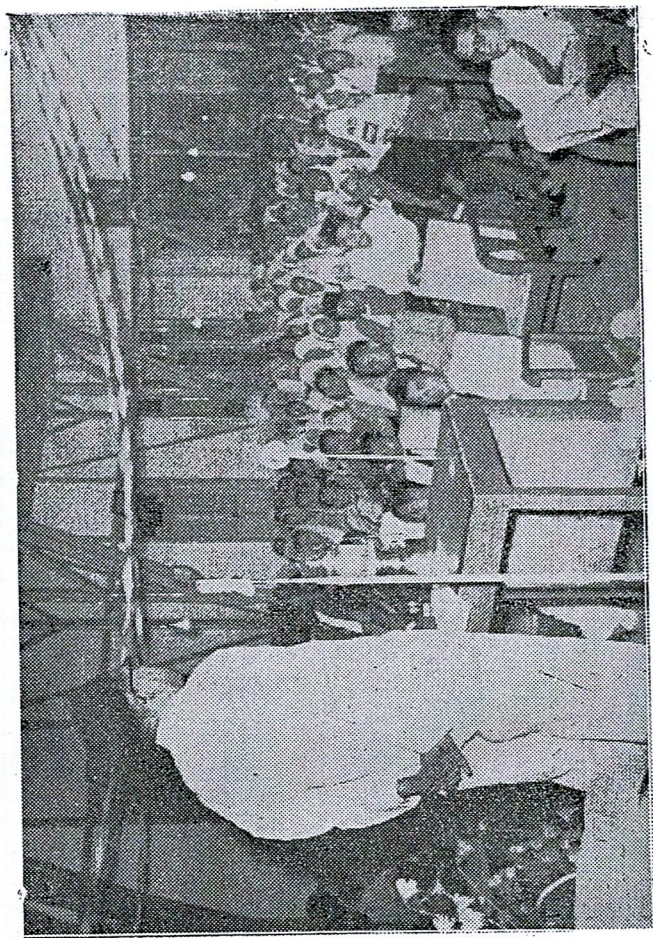
Belanda sadja. Maka untuk menutupi kekurangan jang lalu
lah padanja putusan bersama kedua Menteri tersebut tadi.

Dengan ini mungkin tertjapai maksud untuk menjemp
kan pendidikan dan pengadjaran jang menaruh perhatian t
dap agama Islam dan pengetahuan agama Islam.

Terima kasih.



Prof. Dr. M. Sjaaf mewakili Jml. Menteri P.P. & K.
tengah memberikan kata sambutan



Mr. A. Bakar Djaar mewakili Gubernur Sumatera Tengah (jang pada waktu ini berada diluar Negeri), memberikan kata sambutan atas nama Pemerintah Sumatera Tengah

**PIDATO SAMBUTAN J.M. MENTERI P.P. DAN K
JANG DIUTJAPKAN OLEH PROF. DR. M. SJAAF,
KETUA FAKULTAS KEDOKTERAN & FIPA
BUKITTINGGI**

Saudara² Panitia Penjelenggara, J.M. Menteri Agama, Wakil Gubernur Sum. Tengah, Ninik Mamak, tjerdik pandai, alim-ulama jang budiman serta para hadirin jang mulia.

Oleh karena J.M. Menteri P.P. & K. berhalangan datang untuk mengundjungi peresmian Universitas Muhammadiyah malam ini maka beliau mintak pada saja untuk menjampaikan salam dan utjapan terima kasih atas undangan dan mengaturkan selamat dan bahagia atas berdirinja Universitas ini dengan penjenggaraan fakultas Falsafah dan Hukum. Kedatangan Perguruan Tinggi ini tentu sadja kita sambut dengan segala kegembiraan, oleh karena ia akan menambah kesempatan pada pemuda dan pemudi untuk melegakan kehausan mereka akan pendidikan dan pengadjaran.

Ada sebahagian dari masjarakat mengatakan bahwa waktu sekarang ini ditanah air kita banjak sekali terdiri dari berbagai-bagai Universitas, Fakultas, Perguruan Tinggi, Akademi dll., seperti keluarnja tjendawan dimusim hudjan dengan tafsiran bahwa perguruan-perguruan tersebut akan lenjap pula kelak tersebab dari bermatjam-matjam kesukaran dan kesulitan jang tidak mudah diatasi.

Universitas Muhammadiyah ini tidak dapat kita samakan dengan jang saja sebutkan sebentar ini. Muhammadiyah mempunjai rentjana akan mendirikan perguruan tinggi ini telah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, dan berkat kegiatan, kejakinan dan kekuatan hasratnja baru sekarang dapat terlaksana. Dengan ini mungkin tertjapai maksud untuk menjempurnakan pendidikan dan pengadjaran jang menaruh keislaman dalam pengetahuan umum, jang akan memberikan manfaat besar pada masjarakat kita.

Kita telah sama-sama mengetahui usaha dan pekerdjaan Muhammadiyah semendjak berdirinja sampai dewasa ini, teristimewa dalam lapangan pengadjaran dan pendidikan.

Dalam masa pendjadjahan Belanda dimana usaha-usaha sional dalam segala lapangan, mendapat kekangan dan rintangan, Muhammadiyah dengan segala kebidjaksanaannja dapat madjukan usahanja setapak demi setapak, sehingga dalam waktu yang singkat dikenal oranglah nama Muhammadiyah seluruh pulau nusantara ini.

Saja yakin, bahwa sekiranya perguruan Muhammadiyah tadi ada, demikian pula perguruan partikulir yang lain seperti perguruan Taman Siswa, usaha saudara Mohammad Sjafei di Klaten dan lain-lain, maka persentase orang-orang buta huruf akan lebih besar daripada persentase yang ada sesudah Belanda meninggalkan Indonesia.

Rasanya adalah pada tempatnya rakyat Indonesia berterimakasih atas perguruan-perguruan partikelir umumnja, khusus perguruan Muhammadiyah, yang tak mengenal pajah dalam segala usahanja untuk memajukan pengadjaran dan pendidikan dalam kalangan rakyat.

Tudjuan, kemauan dan maksud yang sutji ini, tentu akan dapat sambutan yang meriah oleh kita semuanya dengan harapan agar pendirian yang luhur ini senantiasa selalu akan berkembang dibawah perlindungan Tuhan Yang Mahakuasa.

Lebih-lebih dewasa ini, diwaktu pemerintah kita belum mempunyai tenaga yang cukup untuk membangun sekolah-sekolah, mulai dari sekolah rendah sampai kesekolah tinggi, sebab mana yang dihadjati oleh rakyat dalam suatu negara yang merdeka, maka usaha-usaha partikulir dengan memajukan pengadjaran dan pendidikan sangat benar dihargai oleh Pemerintah.

Djika kita tinjau keadaan perguruan dinegara-negara modern yang telah maju, seperti di Amerika Serikat, njatalah bahwa adalah banyak sekolah-sekolah partikulir daripada sekolah-sekolah yang dibiajai oleh Pemerintah.

Sekalipun Amerika Serikat terkenal sebagai suatu negara yang kaya raja, tetapi rakyatnja insaf benar, bahwa kalau negara saja yang mesti dibebani dengan kemadjuan dalam perguruan mungkin hasilnja tidak akan memuaskan benar.

Sjukurlah keinsjafan yang sematjam itu ada pula dirasakan oleh rakyat dinegara kita ini. Kalau hanja akan mengharapkan Pen-

rintah sadja saja jakin, dalam keadaan negara seperti sekarang ini, diwaktu negara belum lagi mempunyai penghasilan jang tju-kup untuk memikul segala matjam beban jang berat-berat itu, ki-ta akan sangat lambat memperoleh kemadjuan dalam perguruan, dan dengan demikian selamanya akan tertinggal dan terkebelakang dari negara-negara lain.

Terhadap para mahasiswa saja utjapkan selamat, atas kebahagiaan saudara² jang telah mendapat suatu perguruan tinggi jg mempunyai keistimewaan, djika dibandingkan dengan perguruan tinggi lainnja. Pergunakanlah waktu dalam pendidikanmu ini sebak-baiknja akan melatih rohanimu jang sedjadjar dengan sembojan jang selama ini di-dengung²kan sebagai „para mahasiswa adalah harapan kita“, „bunga negara jang akan djadi pemimpin masjarakat kelak“ dan lain-lain. Insafilah bahwa harapan masjarakat itu djangan diketjewakan hendaknja.

Sekian sebagai sambutan dari saja pada upatjara jang ber-sedjarah ini, terima kasih.

...

RINGKASAN PIDATO
WAKIL GUBERNUR/KEPALA DAERAH SUM. TENGAH

MR. ABU BAKAR DJAAR

Oleh karena ikut dalam rombongan J.M. Wk. Presiden Republik Indonesia memenuhi undangan Pemerintah India untuk mengundjungi negara tersebut, maka sambutan Gubernur/Kepala Daerah Sumatera Tengah dilaksanakan oleh Residen Mr. Abu Bakar Djaar, Pendjabat Gubernur selama dalam perdjalan.

(Penjusun).

Dalam kata sambutannya pemitjara lebih dahulu menjatakan kegembiraan hati atas berdirinja Universitas Muhammadiyah dengan Fakultas Falsafah dan Hukumnja dalam daerah Sumatera Tengah. Hal itu tidak mengherankan, kata pemitjara selandjutnja, mengingat kebesaran dan besarnja tjita² Muhammadiyah jang telah hidup sedjak tahun 1912.

Antara lain diterangkan djuga fungsi sebuah Perguruan Tinggi didalam masjarakat, dan fungsi perguruan tinggi itu dari sudut kenegaraan.

Pada penutup pemitjaraan pemitjara sebagai fungsionaris didaerah ini menegaskan bahwa, tentulah Pemerintah akan senantiasa mengulurkan tangan kepada badan pelaksana perguruan tinggi ini djika bertemu dengan kesukaran, dan akan selalu siap sedia memberikan pertolongan bila dikehendaki.

Achirnja pemitjara mendoakan kelandjutan usia Fakultas ini dan mengaturkan terima kasih.

* * *

PIDATO SAMBUTAN BUPATI/KEPALA DAERAH TANAH DATAR I. DATUK PAMUNTJAK

Adalah satu kehormatan bagi saya, sebagai Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Tanah Datar mendapat kesempatan untuk mengutarakan sepatah dua kata dalam upatjara pembukaan dan perasmian ini.

Saja mengutarakan sjukur alhamdulillah bahwa Muhammadijah dalam waktu jang singkat berkat kerdja-sama jang baik dengan pelbagai pihak jang bersangkutan dan dengan bahan-bahan jang terbatas telah sampai mentjapai hasil jang memungkinkan berlangsungnya upatjara pembukaan sekarang ini.

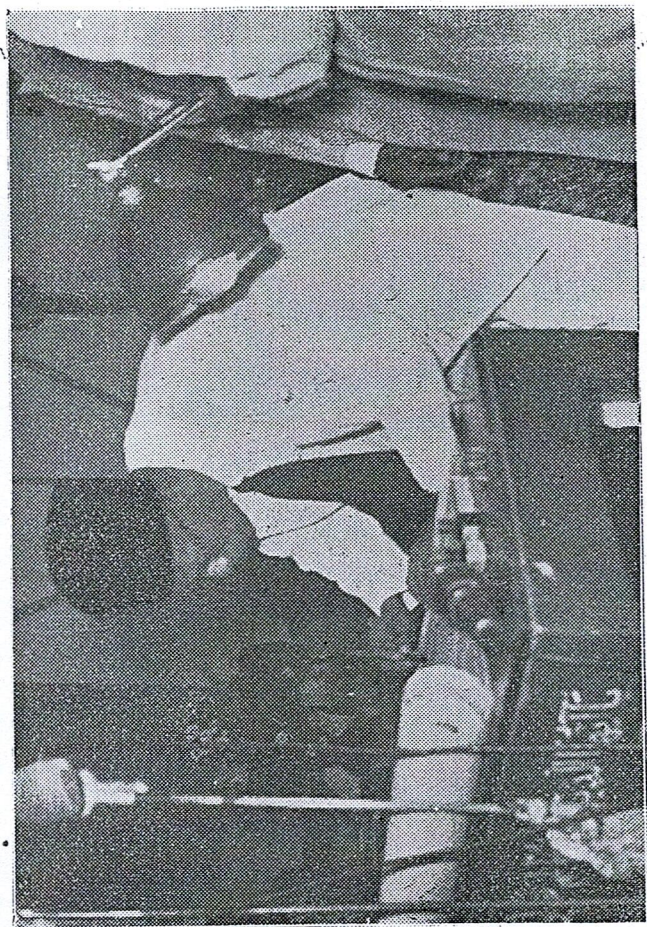
Atas nama seluruh rakjat dalam kabupaten Tanah Datar saja menjampaikan disini dengan penuh rasa terima kasih dan chidmat, rasa kegembiraan dan kepuasan hati rakjat atas adanja Fakultas Falsafah dan Hukum jang dirasmikan pada hari ini. Ditinjau dari segi sedjarah dan pembentukan generasi jang akan datang dalam usaha mengkonsolidir negara kita jang masih muda ini tidaklah dapat saja nilaikan betapa besar artinja Fakultas ini bagi bangsa dan tanah air kita. Saja mendoakan kehaderat Tuhan semoga tunas jang ditanam sekarang akan mendjadi pohon jang besar sebagai lambang persatuan jang kokoh untuk kedjajaan negara, bangsa dan agama kita.

Saja yakin dan pertjaja bahwa usaha Muhammadijah untuk mendirikan Fakultas ini tentu akan disambut dengan penuh gembira oleh masjarakat kita pada umumnja dan oleh tjalon mahasiswa pada chususnja.

Dalam rangkaian perbaikan dan penjempurnaan kemerdekaan bangsa kita saja merasa bangga akan anugerah jang dilimpahkan kepada masjarakat kita di Tanah Datar ini, karena dengan adanja Fakultas jang diresmikan sekarang ini Tanah Datar telah mempunjai dua Fakultas, sebuah di Padangpandjang ini dan sebuah lagi di Batusangkar dengan P.T.P.G.nja jang baru setahun usia nja.

Kepada chalajak ramai saja serukan, sambutlah dengan ichlas dan gembirakanlah perguruan tinggi ini dan bantulah dengan sekuat tenaga.

Sekian, terima kasih.



S.J. St. Mangkuto Ketua Perwakilan P.P. Muhammadiyah Sum. Tengah sedang membubuhi tanda tangan pada PIAGAM Fakultas

**RINGKASAN PIDATO KETUA PERWAKILAN
PUSAT PIMPINAN MUHAMMADIYAH DAERAH S. TENGAH
S. J. ST. MANGKUTO**

Sebagai pembicara terakhir dan penutup malam perasmian tersebut, pembicara memulai pidatonya dengan mengatakan bahwa, setiap masalah yang kita bicarakan, baik masalah internasional, masalah nasional, masalah daerah atau pribadi sekalipun pada waktu ini menghadjati adanya sebuah Fakultas untuk setiap masalah itu.

Oleh karena itulah Muhammadiyah dalam kongres ke 25 di Jakarta disambung lagi dengan Konferensi Muhammadiyah yang ke 26, di Lubuk Alung th. 1954 senantiasa berusaha mendirikan Fakultas ini. Sesudah konferensi Lubuk Alung selesai, maka dimulai pekerjaan dengan tekad yang bulat.

Tetapi, kata pembicara selanjutnya, modal itu telah ada, yakni didalam kantong setiap kaum Muslimin. Modal itu akan keluar kalau kita aktif. Keaktifan dan kepasipannya yang menentukan kita dapat membina sesuatu atau tidak, bukan Islam atau kafir.

Sekarang apa yang saja katakan itu telah terwujud. Gedung yang dahulunya tuma betung, sekarang telah menjadi beton karena kita aktif. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan tenaga kepada kita selanjutnya untuk melanjutkan tjita² mulia ini.

Pidato tersebut diatas diucapkan pembicara dengan tjara yang populer dan humoris.

* * *

**DAFTAR Mahasiswa „Fakultas Falsafah dan Hukum” dari Universitas
Muhammadiyah di Padangpandjang menurut keadaan tgl. 1 Djan. '56**

No.	Nama	Djenis II pr	Umur	Pekerjaan sekarang	Pendidikan Idjazah	Diperoleh tahun	Kawin S/B	Alamat sekarang
1.	Hasan Ahmad	II —	30	Kep. Djawt. Sosial B. Tinggi	Kulliah Muballi- ghin P. Pandjang	1942	1 —	Bukittinggi
2.	M. Idris Manaf	II —	31	Peg. Inspeksi Sosial	Training College Pajakumbuh	1947	1 —	Padang
3.	Mahmud Jatim	II —	34	Guru SGBM	Kull. Muballighin	1940	1 —	Padangpandjang
4.	Djohan Noerdin	II —	40	Direktur SGBM	Normal Islam Padang	1935	1 —	Padangpandjang
5.	Sjarbaini Karim	II —	34	Wk. Ketua DPD Kab. Tanah Datar	Kull. Muballighin	1942	1 —	Batusangkar
6.	Ridhwan 'Arif	II —	36	Ass. Wedalia Baso	Modern Islamic College	1942	1 —	Baso
7.	Emran Ibrahim	II —	21	—	SGAA Muhamma- dijah P. Pandjang	1955	— 1	Gg. Malintang Padangpandjang
8.	Iijas Kamin	II —	29	Guru Mu'allimin Solok	Kull. Muballighin P. Pandjang	1947	1 —	Solok
9.	Djalal Ibrahim	II —		Guru K.M.I. P. Pandjang	Normal Islam Padang	1936	1 —	P. Pandjang
10.	Zaini Asman	II —	22	—	Kullijatul Uhum Padangpandjang	1955	— 1	Mandiangan 719 Bukittinggi
11.	Iijas Abd. Gani	II —	29	Guru Mu'allimin	Kull. Muballighin	1948	1 —	Andalas Padang

12. R. Poehani Dt. Pengulu Besar	11	—	29	Djapenste B. Tinggi	sda	1945	1	Djapenste B. Tinggi
13. Darimi T.	11	—	31	Guru Mu'allimin	sda	1947	1	Sei. Lasi Solok
14. A. Kasim Ahmad	11	—	25	—	Kull. 'Ulum Padangpandjang	1955	1	Pariaman
15. Abd. Rahman	11	—	23	—	sda	1953	—	Gunung P. Pandjang
16. M. Rasjid Noer	11	—	29	Guru S.R.	Kull. Muballighin Padangpandjang	1945	1	Tembilahan
17. Zoebir Effendy	11	—	27	—	Kull. Mu'allimin Islamijah	1948	—	Indragiri P. Pandjang
18. Noerani Soeßen	—	pr	21	—	sda	1955	—	sda
19. Dewang Dewany Jahja	—	pr	19	—	Kull. Mu'allimin Islamijah	1955	—	P. Pandjang
20. Faridah Saleh	—	pr	20	—	sda	1955	—	sda
21. Hoesna Noerdin	—	pr	20	—	sda	1955	—	sda
22. Sjaff'i Chatib	11	—	30	Guru PGAP Padang	Kull. Muballighin /SGHA Jogja	1944/ 1954	1	Padang
23. Moestafa Labanoe	11	—	25	—	SGAA Muhamma- dijah	1955	1	P. Pandjang
24. Aminar Baha- roeddin	—	pr	20	—	Kull. Mu'allimin Islamijah	1955	—	sda
25. Sawijah Hasan	—	pr	28	—	sda	1955	—	sda
26. Djam'an Hakam	11	—	22	Guru SMP Islam	SGAA Muhamma- madijah	1955	—	Pauh Kambur Pariaman
27. Moelijani	—	pr	24	Guru Mu'allimin I.P.M.	sda	1954	—	Solok
28. Ramadhan Thaher	11	—	25	—	sda	—	—	Sidjundjung

29. Ramly Bakry Dt. P.R. Nan Koenig	II	—	36	Djupeu	Kull. Muballighin	1943	1	—	sda	P. Pandjang
30. Zamzami D.	II	—	34	Guru Mu'allimin		1954	—	1	sda	
31. Sjamsoel Bahar Djaä	II	—	23	s.d.a.	SGAA Muhamma- dijah	1948	1	—	sda	
32. Suhaimi Thaher	II	—	25	s.d.a.	Kull. Muballighin	1939	1	—	sda	
33. 'Adnoen Abdoellah	II	—	36	s.d.a.	sda	1947	1	—	sda	Bukittinggi
34. Rahima Thaher	—	pr	24	Guru S.R.	sda	1954	1	—	sda	P. Pandjang
35. Anas	II	—	22	Pegawai Pekana	Kull. Ulum Islamijah	1950	1	—	sda	Padang
36. Tanioes Iljas	II	—	29	Komis I.P.M. S. Tengah	Kull. Muballighin KPPM Jogja	1955	—	1	sda	P. Pandjang
37. Amroellah Thaijib	II	—	23	Guru SGBM	KPPU Bandung SGAA Muhamma- dijah	1955	—	1	sda	
38. Soewarni Moenaf	—	pr	21	s.d.a.	sda	1954	—	1	sda	
39. Zoeraida A.M.	—	pr	23	s.d.a.	sda	1954	—	1	sda	
40. Noerfah Hamid	—	pr	21	s.d.a.	sda	1954	—	1	sda	
41. Djamilis Djamal	—	pr	23	s.d.a.	sda	1955	—	1	sda	
42. Rosina B.	—	pr	20	—	sda	1955	—	1	sda	
43. Rosna Djama- loeddin	—	pr	21	—	sda	1946	1	—	sda	
44. Amiroedin A.M.	II	—	28	Peg. Djapen	Kull. Muballighin	1955	—	1	sda	
45. Kartini Hs.	—	pr	21	—	SGAA Muhamma- dijah	1954	1	—	sda	Solak P. Pandjang
46. Ibnoe Thaif	II	—	25	—	Kull. Sjar'ijah	1954	1	—	sda	Rukittinooi

47. Ermanoes M.J.	II	—	25	Guru SGBM	SGAA Muhamma- dijah	—	1	Pajakumbuh
48. Mansoor Arsjad	II	—	38	Kapendak	Kull. Muballighin	1	—	sda
49. Kamioes S.	II	—	28	Guru SGB	Kull. Muballighin	1	—	sda
50. Amir Bey	II	—	27	Guru Thawalib P. Pandjang	Kull. Ulum P.P.			P. Pandjang
51. Mohd. Djarat	II	—	26	sda	sda			sda
52. Bachtiar Hasan	II	—	25	Guru Mu'allimin	SGAA Muhamma- dijah	—	1	sda
53. Janoeur Thaib	II	—	30	Guru Mu'allimin	Kull. Muballighin /SGHA Jogja	1	—	sda
54. Pasni Djadid Taufah	II	—	25	Guru SMPM	SGAA Muhamma- dijah	—	1	sda
55. Addy Moechliah Ramly	II	—	26	Guru SGBM	sda	—	1	sda
56. Kasim Mizan	II	—	22	—	sda	1	—	sda
57. Rosna Dj.	—	pr	21	—	SGAA Muhamma- dijah	—	1	sda
58. Alamsjah	II	—	23	—	Kull. Ulum Isla- mijah			Bukittinggi
59. Oemar Z.	II	—	24	Dir. Mu'allimin	Kull. Muballighin	—	1	Pauh Kamar Lb. Alung
60. Asiah Oesman	—	pr	25	Guru SMPI	SGAA Muhamma- dijah	—	1	Batusangkar
61. Rahmah Iijas	—	pr	21	sda	sda			Balingka B.T.
62. L.R. Chatib Ibrahim	II	—	41	Dir. PGA MIN	Kull. Muballighin	1	—	P. Pandjang

63. Arsjad Gani	II	—	21	—	Kull. Ulum Islamijah	1955	—	1	Kerintji
64. Loethfiani	—	pr	20	—	sda				Bukittinggi
65. Anwar Thaib	II	—	23	—	Kull. Muballighin SGAA Muhammadiyah	1955	—	1	Solak
66. Amir Thaib	II	—			dijah				Pauh Kanbar
67. Zainal 'Abidin	II	—	22	—	Dir. Thawalib Gunung Parabek	1953	1	—	Gunung P. Pandj
68. Emialis Ilias	—	pr	22	—	Guru SGBM	1954	—	1	P. Pandjang
69. Kartini Ahmad	—	pr	20	—	sda	1955	—	1	sda
70. Rosmiar Zai-noeddin	—	pr	21	—	sda	1955	—	1	sda
71. Anisahmy Loethan	—	pr	21	—	sda	1955	—	1	sda
72. Junus Hasmis	II	—	19	—	Kull. Ulum El Isl.	1955	1	—	asrama Thawalib
73. Nur'aini S.	—	pr	20	—	Kull. Muallimaat	1955	—	1	asrama Dinijah
74. Rosadah Malin	—	pr	25	—	Kull. Muballighat SGAA Muhammadiyah	1955	—	1	Air Angat P. Pdj.
75. Ramli Kama-loeddin	II	—	22	—	dijah	1954	1	—	P. Pandjang
76. Hasan Manaf	II	—	34	—	Kull. Muballighin SGAA Muhammadiyah	1942	1	—	sda
77. Hulaimi	II	—	24	—	dijah				
78. Ramajoelis Dj.	—	pr	21	—	sda	1954	1	—	Pajakumbuh
79. Saleh Ibrahim	II	—	27	—	sda	1951	—	1	Koto Tinggi Pr.
80. Mustafa Ghani	II	—	32	—	Kull. Muballighin SGAA Muhammadiyah	1953	—	1	P. Pandjang
81. Suhar	II	—	25	—	dijah	1946	—	1	sda
					sda	1954	—	1	sda
82. A. Rasjid Wahab	II	—	21	—	Kull. Ulum El Isl.	1945			Kaju Tanam
83. Basjir Gani	II	—	32	—	Kull. Muballighin Normal Islam	1953	1	—	Sawahlunto
84. Th. Dt. Penghulu Besar	II	—		—			—	1	Batusangkar

85. A. Aziz	II	—	25	guru	SGBM	Kull. Muballighin SGAA Muhamma- dijah	1945	1 —	P. Pandjang sda
86. Damsiah	—	pr	20	—	—	—	1955	— 1	—
87. Busjira Basjir	—	pr	20	—	—	Kull. Muallimaat	1955	— 1	sda
88. Sjawir Abdullah	II	—	32	guru	SGBM	Kull. Muballighin	1946	1 —	Pajakumbuh
89. Rasimah Djamil	—	pr	20	guru Dir'jah P. Pandjang	—	Kull. Muallimaat	1955	— 1	P. Pandjang
90. Rosnah Baharudin	—	pr	20	guru	Dinjah	sda	1955	— 1	sda
91. Nurdjannah	—	pr	36	—	—	Kull. Muallimaat	1940	1 —	sda
92. T.M. Djunaidy	II	—	23	—	—	Kull. Ulum El Isl.	1954	— 1	sda
93. Ahmadiar	II	—	32	—	—	Kull. Dijannah	1944	— 1	Bukittinggi
94. M. Ali	II	—	21	—	—	Kull. Ulum El Isl.	1955	— 1	P. Pandjang
95. Lts. Sjuib Ibrahim	II	—	41	T.N.I.	—	Kull. Muballighin	1937	1 —	Padang
96. Haskim	II	—	34	Dj. Penerang- an Agama	—	sda	1942	1 —	P. Pandjang
97. Djanevar Ismail	—	pr	22	—	—	SGAA Muhamma- dijah	1954	— 1	sda
98. Sjahnar Saleh	—	pr	20	guru	SGBMIN	PGAA Negeri	1955	— 1	sda
99. Noerdjani Daja	—	pr	20	—	—	Kull. Muallimaat	1955	— 1	sda
100. Dahniar Muham- mad Ali	—	pr	20	—	—	sda	1955	— 1	sda
101. Boerhanoeddin Ra- sjad Dt. P. Radjo	II	—	38	Kep. IPM Tanah Datar	—	Islamic College sudah	1938	1 —	Batusangkar

Daftar tersebut diatas sampai tgl.8 Februari 1956

Padang, 8 Pebruari 1956

a.n. Panitia Pembina FFHM
Sekretaris,

(ABDOELLAH M.S.)

DAFTAR pendengar pada Fakultas Falsafah dan Hukum Universitas

Muhammadiyah di Padangpandjang sampai tgl. 8 Pebruari 1956.

No.	Nama	Djenis		Umur	Pekerjaan	Pendidikan	Alamat	Keterangan
		II	pr					
1.	Fachroeddin Hs.	II	—	28	Peg. Kir. Wil. X Koto	Thawalib Kader	P. Pandjang	
2.	Tk. Mohd. Ali Basjah	II	—	30	Kasir sda	Kul. Ulum	sda	
3.	Ahmaddin	II	—	27	guru Thawalib P. Pandjang	Thawalib/Kul. Ulum	sda	
4.	Sofjan Thaher	II	—	31	sda	Normaal Islam	sda	
5.	Nazwar Sjamsu St. Maradjo	II	—	34	Pem. I.P. II	MIK/Sek. Polisi	sda	
6.	Djalaloeddin Moesa	II	—	39	Komis Isori Padang	Normal Islam kl. IV	Padang	
7.	Dainan Muham-mad	—	pr	41	Peg. Isori Padang		sda	
8.	Masri Oesman	II	—	20	—	S.M.A. Muhamma-dijah	P. Pandjang	
9.	Ahmad Taudjidi	II	—	36	Krapste Bukittinggi	Thawalib	sda	
10.	Aboe Hanifah Siddik	II	—	33	guru Thawalib	Kul. Ulum	sda	
11.	Sjamsir	II	—	20	—	SMA Muhamma-dijah	Padang	
12.	Rosna Z.	—	pr	24	—	Pernasis	P. Pandjang	
13.	Rasjidin Abdoel-lah	II	—	—	guru S.R.	Kul. Muballighin	sda	
14.	Boestami Moech-tar	II	—	25	Djr. W.N.	sda	sda	
15.	A.M. Jahia	II	—	30	Ketua DPRS	Thawalib	Padang	

16. Zubir Wahid	II	—	41	Ketua Tjab.	sda	P. Pandjang
17. Ridjal Noerdin	II	—		guru Thawalib	S.M.A.	sda
18. Rasjidah Malik	—	pr		guru STKA	SGTK Aisjah	sda
19. Mahjarni	—	pr		guru SMPM	Normal Muhamma- dijah	sda
20. Tulus S.S.	II	—		sda	Islamic College	sda
21. Joesoef Thaib	II	—		guru SMPM	S.M.A. B. Negeri	sda
22. Sabarlillah	II	—		Kuaketj. P.P.	Thawalib	Batipuh
23. Mhd. Daud H. Hassan	II	—			sda	P. Pandjang
						Perak Malaja

Sekretaris,

(Abdoellah M.S.)

**DAFTAR Para Dosen Fakultas Falsafah dan Hukum dari Universitas
Muhammadiyah di Padangpandjang.**

No.	Nama	Dalam mata pe- lajaran	Djabatan	Berdomisili *)
1.	A.R. St. Mansoer	Tafsir/Quran	Ketua Umum P.P. Muham madiyah Indonesia	Jogjakarta
2.	Hamka	Falsafah	Pegawai Tinggi Kem. Aga- ma R.I.	Djakarta
3.	A. Hamid Hakim	Ushul	Direktur Thawalib/Kulli- jatul Ulum	Padangpandjang
4.	H. Haroun Alma'any	Fikih	Direktur SGAA Muham- madiyah	sda
5.	Mr. Haroen Al Rasjid	Pengantar Ilmu Hukum	Act. Decan Fak. Hukum dan Penget. Masjarakat	P a d a n g
6.	Marah Mohd. Taher	Sosiologi	Dosen Fak. Huk. & P.M./ Ketua Pengadiln Negeri	sda
7.	Dr. Kaharuddin Junus	Ekonomi	Dosen P.T.P.G. B. Sangkar	Djakarta
8.	Fauzie 'Abbas	Bhs. Arab **)	sda	Pajakumbuh
9.	B.K. Doerani	Bhs. Inggeris **)	sda	Djakarta
10.	Adam Saleh	Bhs. Indonesia **)	Direktur SMA/C Negeri	Bukittinggi

KETERANGAN:

*) Keringkasannya.

1. Di Jogjakarta 1 orang
2. Di Djakarta 3 "
3. Di Padangpandjang 2 "
4. Di Padang 2 "
5. Di Pajakumbuh 1 "
6. Di Bukittinggi 1 "

**PERWAKILAN PANITIA PEMBINA FAKULTAS FALSAFAH DAN
HUKUM MUHAMMADIYAH, JANG TELAH DAPAT DIBENTUK**

s/d FEBRUARI 1956

No.	Tgl. pembentukan	Tjabang	Ketua
1.	14-9-1955	Padangpandjang	Mahmud Jatim
2.	17-9-1955	IX Koto (Sei. Lasi)	Nurdin Saidy
3.	12-9-1955	Pulau Pundjung	Darwis
4.	13-9-1955	Solok	M.J. Dt. St. Nankodoh
5.	11-9-1955	Koto Baru	I l j a s
6.	21-9-1955	Bungus	Muhammad Djohar
7.	15-9-1955	Tilatang Kamang	A. T. Tk. Bandaro
8.	16-9-1955	X Koto Singkarak	Zainalabidin Chatib
9.	18-9-1955	Talaman	A. Karoen
10.	19-9-1955	Alahan Pandjang	M. Noer Dt. Mangkuto Alam
11.	22-9-1955	Sidjundjung	A. Moenaf
12.	23-9-1955	Tandjung Ampalu	Oy Pito Mulia
13.	23-9-1955	Talawi	G a d u n g
14.	24-9-1955	Sawahlunto	Djasiruddin Hals
15.	18-9-1955	Sumanik	Saleh St. Muntjak
16.	1-11-1955	Koto Pajang (P.S.K.)	Abdul Rahman
17.	11-9-1955	Daerah Riau	Hasanul'arifin
18.	23-9-1955	T i k u	M . Y a d i
19.	24-9-1955	Lubuk Basung	Dt. R. Tan Ameh
20.	14-10-1955	Palembajan VIII Koto	S. St. Besar
21.	15-10-1955	M a t u r	R. Dj. Tuangku Bagindo
22.	27-10-1955	Tandjung Raja	A. S. Cht. Suleiman
23.	13-11-1955	Bukittinggi	Hadji Sjamsuddin
24.	14-11-1955	Wilajah Guguk	Darwis A.M.
25.	15-11-1955	Bondjol	A . W a h a b
26.	14-11-1955	Lubuk Sikaping	Hadji Usman
27.	12-11-1955	Rao Mapat Tunggal	Hasan Hamzah
28.	10-11-1955	Rumbai	Muhammad Husin
29.	3-12-1955	Rokan Kanan	A. Wahab Ys
30.	8-12-1955	Batu Ridjal	H. Jazid Ali
31.	8-12-1955	Tjerenti	Sarmin Abroes E. Mudo
32.	8-12-1955	Baserah	Katjik/Soelaiman
33.	9-12-1955	T a l u k	H. Munaf Ja'cub
34.	11-12-1955	Lubuk Djambi	Saad Manan
35.	11-12-1955	Lemb. Djaja (Koto Anau)	I. Dt. Gagah Dilangit
36.	4-12-1955	X Koto Diatas (Sulit Air)	A. Loean
37.	24-11-1955	K u o k	Hamzah Joenoes
38.	26-11-1955	Air Tiris	Al Athar
39.	28-10-1955	Rtg. P. Koto Baru	Joenoes Iljas

40.	13-1-1956	Belawan (Sum. Timur)	Mhd. Sjukur - S. Utara
41.	12-1-1956	Kisaran idem	Nahar M.
42.	11-1-1956	Pamatang idem	Wedana I. Hasibuan
			Pelindung : Patih Kab. malungun.
43.	10-1-1956	Tebing Tinggi idem	Bagindo Ali Umar
44.	8-1-1956	Bindjai idem	H. A. Halim Hasan
			Bupati Kab. Langkat
45.	15-1-1956	M e d a n	Dr. Darwis Dt. Batu B
			Pelindung : Res. A.M. l
			laluddin.
46.	15-2-1956	Padang Sidempuan	Dja Mangarab (Radja Arab)
47.	16-2-1956	Sibolga	M. Thaib Simamora
48.	17-2-1956	B a r u s	Chaidir Kabajahan
49.	19-2-1956	Batang Toru	H. Burhanuddin
50.	20-2-1956	Sipirok	Poeli Siagian
51.	21-2-1956	Sigalangan	Barimun Dalimunthe
52.	22-2-1956	Simangambat	Djasomarang
53.	23-2-1956	Tamiang	M. Joesoef Nst.
54.		P a d a n g	Thaher Idris
55.		Tandjung Pinang	Hasan Beyk Dt. Mara

FAKULTAS FALSAFAH DAN HUKUM MUHAMMADIYAH

PADANG PANDJANG

I. PRESIDIUM :

1. Dr. H. Ali Akbar	Djakarta	Ketua
2. Prof.Dr. H. Boenjamin	Djakarta	wk. Ketua
3. Dr. H. Sjamsuddin	Djokja	Anggota
4. H. Rasjidi B.A.	Djakarta	"
5. H a m k a	Djakarta	"

II. DEWAN CURATOR :

1. Roeslan Muljohardjo	Gubernur/Kepala Daerah Sum. Tengah
2. A.R. St. Mansoer	Djakakarta
3. H. Farid Ma'roef	Djakakarta
4. H. Iljas Ja'cub	Padang
5. Sa'aduddin Djambek	Djakarta

III. DECAN :

1. Drs. Danoeoesodo	Decan
2. Hamka	wkl. Decan

IV. MAHAGURU/DOCEN :

1. Drs. Danoeoesodo,	untuk mata pelajaran	Ekonomi
2. Mr. Harun Al Rasjid	" "	Pengantar I. Hukum
3. Marah M. Thaher	" "	Sociologie
4. A.R. St. Mansoer	" "	Tafsir/Qur'an
5. A. Hamid Hakim/ H. Haroun El Ma'any	" "	Fiqih/Usul Fiqih
6. H a m k a	" "	Falsafah
7. O.K. Doerany	" "	Bahasa Inggeris
8. Adam Saleh	" "	Bahasa Indonesia
9. Fauzie Abbas	" "	Bahasa Arab
10. Dr. Kaharuddin Junus	" "	Ekonomi Islam
11. Prof. Husein Nainar	" "	Kulijah Umum

V. DEWAN PENGURUS :

1. H.A. Malik Ahmad	Ketua
2. A. Dt. Malintang Alam	wk. Ketua I
3. R. I. Dt. Sinaro Pandjang	wk. Ketua II
4. Abdullah M.S.	Sekretaris I
5. A. Galib	Sekretaris II
6. Mr. Harun Al Rasjid	Anggota
7. Dr. Muzbar	"
8. Dr. Kaharuddin Junus	"
9. Adam Saleh	"
10. Ambiar	"
11. Raden Suleman	"
12. Djajusman	"

13. St. K.D.M. Pontas Nst.	Anggota
14. Nurdin Dt. Batuah	"
15. H. Harun El Ma'any	"
16. Muchtar Dt. R. Alam	"
17. Palizir Hafli	"
18. H. Rivai Burhan	"
19. Adam Ibrahim	"
20. Hasan Ahmad	"
21. Zainuddin Zen	"
22. I. Zulqarnaini	"
23. Dusqi Samad	"
24. H. Sami' Ibrahim	"
25. H.M. Jatim	"
26. Husin Saleh	"
27. Bahar Dt. Mkt. Alam	"
28. Wahab Samad	"
29. Dinijah Sidik	"

VI. SENAT MAHASISWA :

1. Hasan Ahmad	Ketua (Preases)
2. Mahmud Jatim	wk. Ketua (Ab. Preases)
3. Djalal Ibrahim	Sekretaris (Abtis)
4. Mustafa Labanu	Sekretaris II (Ab. abtis)
5. Basjir Gani	Bendahara (Questor)
6. Sjarbaini Karim	Anggota
7. Amiruddin Aboe	"
8. Sjafei Chatib	"
9. Mansjur Arsjad	"
10. Nurfah Hamid	"
11. Faridah Saleh	"

* * *